

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 37/PR/2017

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyusun Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, melalui Keputusan Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Keputusan Presiden Nomor 21/M Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 307/KMK.01/2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : Surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan tanggal 18 April 2017 mengenai Persetujuan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PETA PROSES BISNIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO.



- PERTAMA Menetapkan Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang memuat proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Level 0 sampai dengan Level 3 yang selanjutnya disebut dengan Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini merupakan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan operasional kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yaitu dalam rangka terciptanya keselarasan antara arsitektur organisasi dan strategi serta tata kelola yang ada dalam organisasi.
- KETIGA Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

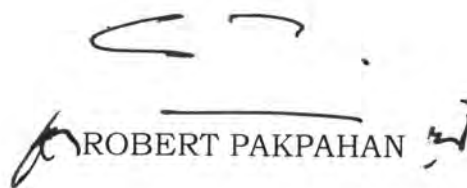


Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
u.p. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Para Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 37 /PR/2017 TENTANG PETA
PROSES BISNIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

**PETA PROSES BISNIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN	1
C. RUANG LINGKUP.....	1
D. LANDASAN TEORI	1
D.1 PROSES BISNIS.....	1
D.2 PEMODELAN PROSES BISNIS	2
1. TUJUAN PEMODELAN.....	2
2. TAHAPAN PEMODELAN.....	3
3. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG	3
E. TATA PEMODELAN PROSES BISNIS	4
E.1 VALUE ADDED CHAIN DIAGRAM	4
E.2 BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION	5
1. TUJUAN PENGGUNAAN BPMN	5
2. MANFAAT PENGGUNAAN BPMN.....	5
3. NOTASI BPMN	5
F. TATA KELOLA PEMBIAYAAN DAN RISIKO.....	8
F.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI DJPPR.....	8
F.2 VISI DAN MISI.....	9
F.3 PETA FUNGSI.....	10
F.4 SASARAN STRATEGIS	10
F.5 KEBIJAKAN.....	11

F.6 STRATEGI	11
F.7 PROGRAM DAN KEGIATAN	11
F.8 STAKEHOLDER UTAMA	12
G. HIRARKI PROSES BISNIS DJPPR	14
BAB II PROSES BISNIS LEVEL 0	16
A. PENDEKATAN SIKLUS	16
B. PENDEKATAN FUNGSI	17
BAB III PROSES BISNIS LEVEL 1	19
A. PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN	19
1. PENYUSUNAN STRATEGI PEMBIAYAAN UTANG JANGKA MENENGAH	19
2. PENYUSUNAN STRATEGI UTANG TAHUNAN	19
3. PENYUSUNAN RENCANA BIAYA UTANG	20
4. PENYUSUNAN BATAS MAKSIMUM PINJAMAN	20
5. PENYIAPAN USULAN KEGIATAN DAN PROYEKSI PENARIKAN PINJAMAN	20
6. PENYUSUNAN RENCANA TRANSAKSI SBN	20
7. PERENCANAAN TRANSAKSI PENGELOLAAN PORTOFOLIO	21
8. PENYIAPAN UNDERLYING ASSET SBSN	21
9. PENYUSUNAN FATWA DAN OPINI SYARIAH	21
B. PENGADAAN PEMBIAYAAN MELALUI SBN DAN PINJAMAN	21
1. PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEGERI	22
2. PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI	22
3. AMANDEMENT PINJAMAN	22
4. PENGEFEKTIFAN PINJAMAN	23
5. PENERBITAN NOMOR REGISTER PINJAMAN	23
6. TRANSAKSI LELANG DI PASAR PERDANA	23
7. TRANSAKSI BOOK BUILDING	23
8. TRANSAKSI PRIVATE PLACEMENT	23
C. PENGELOLAAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN	24
1. MONITORING DAN EVALUASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN	24

2. TRANSAKSI BUY BACK	24
3. TRANSAKSI SWITCHING	25
4. DEBT SWAP	25
5. PREPAYMENT	25
6. TRANSAKSI LINDUNG NILAI.....	25
D. PENGEMBANGAN PASAR SBN	25
1. PENGEMBANGAN INSTRUMEN	26
2. PENGEMBANGAN BASIS INVESTOR	26
3. PENGEMBANGAN DEALER UTAMA.....	26
E. SETELMEN TRANSAKSI.....	27
1. PEREKAMAN DATA REFERENSI	27
2. SETELMEN TRANSAKSI PENARIKAN PINJAMAN	27
3. SETELMEN TRANSAKSI PEMBAYARAN UTANG.....	27
4. SETELMEN TRANSAKSI PENERBITAN UTANG	28
F. AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN	28
1. REKONSILIASI DATA PEMBIAYAAN	28
2. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN	29
3. PENYUSUNAN LAPORAN MANAJERIAL	29
G. MONITORING DAN EVALUASI	29
1. MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN.....	30
2. MONITORING REALISASI EFFECTIVE COST	30
3. MONITORING REALISASI DAN PROYEKSI DEBT SERVICE	30
4. MONITORING KONDISI PASAR SBN	30
5. MONITORING KINERJA DEALER UTAMA	30
6. MONITORING LOAN EFFECTIVENESS	31
7. MONITORING UNDERLYING ASET SBSN	31
8. MONITORING KINERJA PINJAMAN	31
9. MONITORING DAN EVALUASI MITIGASI RISIKO	31
H. DUKUNGAN PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR.....	32
1. PENYIAPAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPBU).....	32

2. ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH KPS (KPBU).....	32
3. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS (NON KPBU)	33
4. ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS (NON KPBU)	33
5. PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN PBS	33
6. PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN.....	33
I. PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA.....	34
1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO	34
2. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO.....	34
3. PENYUSUNAN REKOMENDASI MITIGASI RISIKO.....	34
J. PENGELOLAAN PENJAMINAN PEMERINTAH	35
1. IDENTIFIKASI KEWAJIBAN KONTIJENSI.....	35
2. MENYUSUN REKOMENDASI PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH.....	35
3. MONITORING PENJAMINAN PEMERINTAH	36
4. PENYUSUNAN ALOKASI PENJAMINAN PEMERINTAH KE APBN .	36
5. PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN	36
6. PENGELOLAAN CADANGAN DANA KLAIM.....	36
K. PENGELOLAAN HIBAH	36
1. PENERBITAN NOMOR REGISTER HIBAH	37
2. PEREKAMAN DATA HIBAH.....	37
3. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENDAPATAN HIBAH	37
4. REKONSILIASI DATA HIBAH	37
5. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HIBAH	38
6. MONITORING HIBAH	38
L. PENGELOLAAN KINERJA.....	38
1. PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA	38
2. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA.....	39

M. PENGELOLAAN KEPATUHAN INTERNAL	39
1. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL	39
2. KLARIFIKASI DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN	40
3. TINDAK LANJUT PENGADUAN	40
N. MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL	41
1. PENYUSUNAN PROFIL RISIKO	41
2. MONITORING PELAKSANAAN MITIGASI RISIKO	41
O. KEORGANISASIAN DAN KETATALAKSANAAN	42
1. PENATAAN ORGANISASI	42
2. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ORGANISASI	42
3. PENYUSUNAN DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI	43
4. PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	43
P. PENGANGGARAN DIPA BUN	43
Q. PERATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO	44
1. PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN.....	44
2. REVIU LEGAL DRAFTING.....	44
R. TEKNOLOGI INFORMASI	45
1. PERANCANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI.....	45
2. PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	45
3. OPERASIONAL DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	45
S. KEPEGAWAIAN	46
1. PENGEMBANGAN PEGAWAI	46
2. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.....	46
T. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	47
1. PENYUSUNAN ANGGARAN.....	47
2. PERBENDAHARAAN.....	47
3. AKUNTANSI DAN PELAPORAN	48
U. ADMINISTRASI UMUM	48
1. PENGELOLAAN ARSIP.....	48
2. PENGELOLAAN BMN.....	49

3. PENGELOLAAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN	49
4. KEPUSTAKAAN	49
V. KESEKRETARIATAN	50
1. PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN.....	50
2. PROTOKOLER.....	50
BAB IV PROSES BISNIS LEVEL 2.....	51
A. PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN	51
A.1 PENYUSUNAN STRATEGI UTANG JANGKA MENENGAH	51
A.2 PENYUSUNAN STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN.....	52
A.3 PENYUSUNAN RENCANA BIAYA UTANG	53
A.4 PENYUSUNAN BATAS MAKSIMUM PINJAMAN	54
A.5 PENYIAPAN USULAN KEGIATAN DAN PROYEKSI PENARIKAN PINJAMAN.....	55
A.6 PENYUSUNAN RENCANA TRANSAKSI SBN	55
A.7 PERENCANAAN TRANSAKSI PENGELOLAAN PORTOFOLIO	56
A.8 PENYIAPAN <i>UNDERLYING ASSET</i> SBSN.....	56
A.9 PENYIAPAN FATWA DAN OPINI SYARIAH.....	57
B. PENGADAAN PEMBIAYAAN MELALUI SBN DAN PINJAMAN	58
B.1 PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEGERI.....	58
B.2 PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI.....	58
B.3 PENGEFEKTIFAN PINJAMAN	59
B.4 AMANDEMENT PINJAMAN.....	59
B.5 PEMBERIAN NOMOR REGISTER PINJAMAN	60
B.6 TRANSAKSI LELANG DI PASAR PERDANA	60
B.7 TRANSAKSI <i>BOOK BUILDING</i>	61
B.8 TRANSAKSI <i>PRIVATE PLACEMENT</i>	62
C. PENGELOLAAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN	63
C.1 MONITORING DAN EVALUASI PORTOFOLIO UTANG	63
C.2 TRANSAKSI <i>BUY BACK</i>	63
C.3 TRANSAKSI <i>SWITCHING</i>	64
D. PENGEMBANGAN PASAR SBN	64

D.1 PENGEMBANGAN INSTRUMEN	64
D.2 PENGEMBANGAN BASIS INVESTOR.....	65
E. SETELMEN UTANG	66
E.1 PEREKAMAN DATA REFERENSI	66
E.2 SETELMEN TRANSAKSI PENARIKAN PINJAMAN.....	66
E.3 SETELMEN TRANSAKSI PEMBAYARAN UTANG	67
E.4 SETELMEN TRANSAKSI PENERBITAN SBN.....	67
F. AKUNTABILITAS UTANG	68
F.1 REKONSILIASI DATA OUTSTANDING	68
F.2 REKONSILIASI DATA TRANSAKSI	69
F.3 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	69
F.4 PENYUSUNAN LAPORAN MANAJERIAL	70
G. MONITORING DAN EVALUASI	71
G.1 MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN	71
G.2 MONITORING REALISASI <i>EFFECTIVE COST</i>	71
G.3 MONITORING REALISASI DAN PROYEKSI <i>DEBT SERVICE</i>	72
G.4 MONITORING KONDISI PASAR SBN	73
G.5 MONITORING KEWAJIBAN <i>DEALER</i> UTAMA.....	73
G.6 MONITORING <i>LOAN EFFECTIVENESS</i>	74
G.7 MONITORING <i>UNDERLYING ASSET</i> SBSN	75
G.8 MONITORING KINERJA PINJAMAN.....	75
H. DUKUNGAN PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR.....	76
H.1 PENYIAPAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA / KPBU	76
H.2 ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH SWASTA / KPBU.....	77
H.3 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS / NON KPBU	77
H.4 ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS/ NON KPBU	78
H.5 PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN PBS... 78	
H.6 PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN.. 79	

I. PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA.....	80
I.1 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA.....	80
I.2 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO.....	80
I.3 PENYUSUNAN REKOMENDASI MITIGASI RISIKO KEUANGAN NEGARA.....	81
J. PENGELOLAAN PENJAMINAN PEMERINTAH	81
J.1 IDENTIFIKASI POTENSI KEWAJIBAN KONTIJENSI.....	81
J.2 REKOMENDASI JAMINAN PEMERINTAH.....	82
J.3 MONITORING JAMINAN PEMERINTAH.....	82
J.4 PENYUSUNAN ALOKASI JAMINAN PEMERINTAH KE APBN.....	83
J.5 PEMBAYARAN KLAIM.....	84
J.6 PENGELOLAAN CADANGAN DANA KLAIM.....	85
K. PENGELOLAAN HIBAH	85
K.1 PEMBERIAN NOMOR REGISTER HIBAH	85
K.2 PEREKAMAN DATA HIBAH	86
K.3 PENYELESAIAN TRANSAKSI PENDAPATAN HIBAH	86
K.4 REKONSILIASI DATA HIBAH.....	87
K.5 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN HIBAH.....	87
K.6 MONITORING HIBAH	88
L. PENGELOLAAN KINERJA.....	89
L.1 PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA	89
L.2 MONITORING DAN EVALUASI KINERJA.....	90
M. PENGELOLAAN KEPATUHAN INTERNAL.....	91
M.1 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL	91
M.2 KLARIFIKASI DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN	92
M.3 TINDAK LANJUT PENGADUAN	93
N. MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL	94
N.1 PENYUSUNAN PROFIL RISIKO.....	94
N.2 MONITORING PELAKSANAAN MITIGASI RISIKO	95
O. KEORGANISASIAN DAN KETATALAKSANAAN	96

O.1 PENATAAN ORGANISASI.....	96
O.2 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ORGANISASI	96
O.3 PENYUSUNAN DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI	97
O.4 PENYUSUNAN SOP	98
P. PERATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN	99
P.1 PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN.....	99
P.2 REVIU LEGAL DRAFTING.....	100
Q. TEKNOLOGI INFORMASI.....	101
Q.1 PERANCANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	101
Q.2 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM	102
Q.3 OPERASIONAL DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	103
R. KEPEGAWAIAN.....	104
R.1 PENGEMBANGAN PEGAWAI	104
R.2 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.....	105
S. PENGELOLAAN KEUANGAN	105
S.1 PENYUSUNAN ANGGARAN.....	105
S.2 PERBENDAHARAAN	106
S.3 AKUNTANSI DAN PELAPORAN	107
T. ADMINISTRASI UMUM.....	108
T.1 PENGELOLAAN ARSIP.....	108
T.2 PENGELOLAAN BMN.....	108
T.3 PENGELOLAAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN	109
T.4 KEPUSTAKAAN	110
U. KESEKRETARIATAN	111
U.1 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN	111
U.2 PROTOKOLER.....	112
BAB V PROSES BISNIS LEVEL 3.....	113
A. PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN	113
A.1 PENYUSUNAN STRATEGI UTANG JANGKA MENENGAH	113
A.1.01 MELAKUKAN PERSIAPAN	113

A.1.02 MENGUMPULKAN DATA	114
A.1.03 MENGANALISIS DATA	115
A.1.04 MENYUSUN STRATEGI	116
A.2 PENYUSUNAN STRATEGI UTANG TAHUNAN	117
A.2.01 MELAKUKAN PERSIAPAN	117
A.2.02 MENGUMPULKAN DATA	118
A.2.03 MENYUSUN KONSEP AWAL STRATEGI	119
A.2.04 MENYEMPURNAKAN STRATEGI	120
A.3 PENYUSUNAN RENCANA BIAYA UTANG	121
A.3.01 MELAKUKAN PERSIAPAN	121
A.3.02 MENYIAPKAN KONSEP AWAL	122
A.3.03 MENYEMPURNAKAN RENCANA	123
A.4 PENYUSUNAN DOKUMEN BATAS MAKSIMUM PINJAMAN	124
A.4.01 MELAKUKAN PERSIAPAN	124
A.4.02 MENGUMPULKAN DATA	125
A.4.03 MENGANALISIS DATA	126
A.4.04 MENETAPKAN BMP	127
A.5 PENYIAPAN USULAN KEGIATAN DAN PROYEKSI PENARIKAN PINJAMAN	128
A.5.01 ANALISIS DATA	128
A.5.02 MELAKUKAN PENETAPAN	129
A.6 PENYUSUNAN RENCANA TRANSAKSI SBN	130
A.6.01 MENGOLAH DATA	130
A.6.02 MENYEMPURNAKAN RENCANA TRANSAKSI	131
A.7 PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PORTOFOLIO	132
A.7.01 MENGOLAH DATA	132
A.7.02 MENYEMPURNAKAN RENCANA TRANSAKSI	133
A.8 PENYIAPAN UNDERLYING ASET	134
A.8.01 MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN ASET	134
A.8.02 MENGIDENTIFIKASI KETERSEDIAAN ASET	135
A.8.03 MENETAPKAN ASET	136

A.9 PENYIAPAN FATWA DAN OPINI SYARIAH	137
A.9.01 MENYUSUN PROPOSAL FATWA DAN OPINI SYARIAH.....	137
B. PENGADAAN PEMBIAYAAN MELALUI SBN DAN PINJAMAN	138
B.1 PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEGERI	138
B.1.01 SELEKSI KREDITOR.....	138
B.1.02 NEGOSIASI.....	139
B.2 PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI.....	140
B.2.01 NEGOSIASI.....	140
B.2.02 MENANDATANGANI PERJANJIAN.....	141
B.3 AMANDEMENT PINJAMAN.....	142
B.3.01 MENGAJUKAN AMANDEMENT PINJAMAN	142
B.3.02 MENANDATANGANI AMANDEMENT PINJAMAN	143
B.4 PENGEFEKTIFAN PINJAMAN	144
B.4.01 MENYUSUN LEGAL OPINION.....	144
B.4.02 MENGEFEKTIFKAN PINJAMAN.....	145
B.5 PENERBITAN NOMOR REGISTER PINJAMAN.....	146
B.6 TRANSAKSI LELANG DI PASAR PERDANA	147
B.6.01 MEMPERSIAPKAN LELANG	147
B.6.02 MELAKSANAKAN LELANG	148
B.6.03 MENETAPKAN PEMENANG LELANG.....	149
B.7 TRANSAKSI BOOK BUILDING	150
B.7.01 MELAKUKAN SELEKSI	150
B.7.02 MENENTUKAN TINGKAT KUPON	151
B.7.03 BOOK BUILDING	152
B.7.04 MENETAPKAN HASIL PENJATAHAN	153
B.8 TRANSAKSI <i>PRIVATE PLACEMENT</i>	154
B.8.01 MELAKUKAN CEK KELENGKAPAN	154
B.8.02 MENETAPKAN TERMS AND CONDITIONS	155
C. PENGELOLAAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN	156
C.1 MONITORING DAN EVALUASI PORTOFOLIO UTANG	156

C.1.01 MENGUMPULKAN DATA.....	156
C.1.02 MENGANALISIS DATA	157
C.2 TRANSAKSI <i>BUY BACK</i>	158
C.2.01 MEMPERSIAPKAN TRANSAKSI	158
C.2.02 MELAKUKAN TRANSAKSI <i>BUY BACK</i>	159
C.2.03 MENETAPKAN HASIL TRANSAKSI	160
C.3 TRANSAKSI <i>SWITCHING</i>	161
C.3.01 MEMPERSIAPKAN TRANSAKSI	161
C.3.02 MELAKUKAN TRANSAKSI <i>SWITCHING</i>	162
C.3.03 MENETAPKAN HASIL TRANSAKSI	163
C.4 DEBT SWAP.....	164
C.5 PREPAYMENT	164
D. PENGEMBANGAN PASAR SBN	165
D.1 PENGEMBANGAN INSTRUMEN	165
D.1.01 MENGUMPULKAN DATA	165
D.1.02 MENYUSUN LAPORAN.....	166
D.2 PENGEMBANGAN BASIS INVESTOR.....	167
D.2.01 MENGUMPULKAN DATA	167
D.2.02 MENYUSUN LAPORAN.....	168
E. SETELMEN UTANG	168
E.1 PEREKAMAN DATA REFERENSI	168
E.2 SETELMEN TRANSAKSI PENARIKAN PINJAMAN.....	169
E.2.01 VERIFIKASI DOKUMEN PENARIKAN.....	169
E.2.02 MENERBITKAN SP4HLN	170
E.3 SETELMEN TRANSAKSI PEMBAYARAN UTANG	171
E.3.01 VERIFIKASI DOKUMEN PEMBAYARAN.....	171
E.3.02 MENERBITKAN DOKUMEN PEMBAYARAN	172
E.4 SETELMEN TRANSAKSI PENERBITAN UTANG	173
E.4.01 MENERBITKAN DOKUMEN PEMBAYARAN	173
F. AKUNTABILITAS UTANG	174

F.1 REKONSILIASI DATA <i>OUTSTANDING</i>	174
F.1.01 MEMPERSIAPKAN DATA REKONSILIASI <i>OUTSTANDING</i> ..	174
F.1.02 MEMUTAKHIRKAN DATA <i>OUTSTANDING</i>	175
F.2 REKONSILIASI DATA TRANSAKSI	176
F.2.01 MEMPERSIAPKAN DATA REKONSILIASI TRANSAKSI.....	176
F.2.02 MEMUTAKHIRKAN DATA TRANSAKSI.....	177
F.3 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN UTANG ..	178
F.3.01 PENYIAPAN DATA LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN UTANG	178
F.3.02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN UTANG	179
F.4 PENYUSUNAN LAPORAN MANAJERIAL	180
F.4.01 MENYIAPKAN DATA LAPORAN MANAJERIAL.....	180
F.4.02 MENYUSUN LAPORAN MANAJERIAL	181
G. MONITORING DAN EVALUASI	182
G.1 MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN	182
G.1.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN.....	182
G.1.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN.....	183
G.2 MONITORING REALISASI <i>EFFECTIVE COST</i>	184
G.2.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING REALISASI <i>EFFECTIVE</i> <i>COST</i>	184
G.2.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING REALISASI <i>EFFECTIVE</i> <i>COST</i>	185
G.3 MONITORING REALISASI DAN PROYEKSI <i>DEBT SERVICE</i>	186
G.3.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING REALISASI <i>DEBT</i> <i>SERVICE</i>	186
G.3.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING REALISASI <i>DEBT</i> <i>SERVICE</i>	187
G.4 MONITORING KONDISI PASAR SBN	188
G.4.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING KONDISI PASAR SBN .	188

G.4.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING KONDISI PASAR SBN	189
G.5 MONITORING KINERJA DEALER UTAMA.....	190
G.5.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING KINERJA DEALER UTAMA	190
G.5.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING KINERJA DEALER UTAMA	191
G.6 MONITORING <i>LOAN EFFECTIVENESS</i>	192
G.6.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING LOAN EFFECTIVENESS	192
G.6.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING LOAN EFFECTIVENESS	193
G.7 MONITORING <i>UNDERLYING ASSET</i> SBSN	194
G.7.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING UNDERLYING ASSET SBSN	194
G.7.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING UNDERLYING ASSET SBSN	195
G.8 MONITORING KINERJA PINJAMAN.....	196
G.8.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING KINERJA PINJAMAN ..	196
G.8.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING KINERJA PINJAMAN	197
H. DUKUNGAN PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR.....	198
H.1 PENYIAPAN KPS/ KPBU.....	198
H.1.01 MENYUSUN KEBIJAKAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH KPS/ KPBU	198
H.1.02 MENYUSUN PERENCANAAN KERJASAMA KPS/ KPBU	198
H.1.03 PENGELOLAAN DANA PENYIAPAN PROYEK.....	198
H.2 ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH KPS/ KPBU.....	199
H.2.01 ANALISA DAN PERSETUJUAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK (PDF)	199
H.2.02 ANALISA DAN PERSETUJUAN FASILITAS VIABILITY GAP FUND (VGF)	199

Bye

H.2.03 ANALISA DAN PERSETUJUAN PENJAMINAN PEMERINTAH	199
H.3 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS/ NON KPBU	200
H.3.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN PROYEK NON KPS/NON KPBU	200
H.3.02 PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PROYEK NON KPS/NON KPBU	200
H.4 ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH KPS / KPBU.....	201
H.4.01 ANALISA DAN PENERBITAN SURAT JAMINAN PEMERINTAH PUSAT	201
H.4.02 ANALISA DAN PENERBITAN SURAT JAMINAN KELAYAKAN USAHA (SJKU)	202
H.5 PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN PBS.	202
H.6 PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN	202
I. PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA.....	203
J. PENGELOLAAN PENJAMINAN PEMERINTAH	204
J.1 IDENTIFIKASI KEWAJIBAN KONTIJENSI.....	204
J.1.01 MENGUMPULKAN DATA	204
J.1.02 MENGANALISIS DATA.....	205
J.2 MENYUSUN REKOMENDASI PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH.....	206
J.2.01 MENILAI KELAYAKAN PROYEK.....	206
J.2.02 MENYUSUN REKOMENDASI SURAT JAMINAN	207
J.3 MONITORING JAMINAN PEMERINTAH.....	208
J.3.01 MENCATAT TRANSAKSI.....	208
J.4 PENYUSUNAN ALOKASI JAMINAN PEMERINTAH KE APBN	209
J.4.01 MEMBAHAS ALOKASI.....	209
J.5 PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN	210
J.5.01 MENGANALISIS KLAIM PEMBAYARAN.....	210
J.5.02 SETELMEN TRANSAKSI	211

J.6 PENGELOLAAN CADANGAN DANA KLAIM.....	212
J.6.01 MENGUMPULKAN DATA	212
K. PENGELOLAAN HIBAH	213
K.1 PENERBITAN NOMOR REGISTER HIBAH.....	213
K.1.01 MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN HIBAH	213
K.1.02 MENERBITKAN NOMOR REGISTER HIBAH	214
K.2 PEREKAMAN DATA HIBAH	215
K.3 PENYELESAIAN TRANSAKSI PENDAPATAN HIBAH	215
K.3.01 MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN PENDAPATAN HIBAH	215
K.3.02 MENERBITKAN SP4HLN/SP3HL-BJS	216
K.4 REKONSILIASI DATA HIBAH	217
K.4.01 MEMPERSIAPKAN DATA REKONSILIASI HIBAH	217
K.4.02 MEMUTAKHIRKAN DATA HIBAH	218
K.5 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HIBAH... 219	
K.5.01 PENYIAPAN DATA LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HIBAH	219
K.5.02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HIBAH	220
K.6 MONITORING HIBAH	221
K.6.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING HIBAH.....	221
K.6.02 PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING HIBAH	222
L. PENGELOLAAN KINERJA.....	223
L.1 PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA	223
L.1.01 MENYUSUN PETA STRATEGIS.....	223
L.1.02 MENYUSUN KONTRAK KINERJA.....	224
L.2 MONITORING DAN EVALUASI KINERJA.....	225
L.2.01 MENYUSUN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI (CKP).....	225
L.2.02 MENYUSUN NILAI KERJA ORGANISASI (NKO)	226
L.2.03 MENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA	227
M. PENGELOLAAN KEPATUHAN INTERNAL.....	228

M.1 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL	228
M.1.01 PERENCANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL.....	228
M.1.02 PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL.....	229
M.2 KONFIRMASI DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN..	230
M.2.01 MELAKUKAN KONFIRMASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN	230
M.2.02 MENINDAKLANJUTI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN.....	231
M.3 TINDAK LANJUT PENGADUAN	232
M.3.01 KONFIRMASI PENGADUAN	232
N. MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL	233
N.1 PENYUSUNAN PROFIL RISIKO	233
N.1.01 PENYUSUNAN PROFIL DAN RENCANA MITIGASI RISIKO.....	233
N.1.02 PENYUSUNAN REVISI PROFIL DAN RENCANA MITIGASI RISIKO.....	234
N.2 MONITORING PELAKSANAAN MITIGASI RISIKO	235
O. PENATAAN ORGANISASI	236
O.1 PENATAAN ORGANISASI.....	236
O.1.01 MENYUSUN URJAB.....	236
O.2 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ORGANISASI	237
O.2.01 MENGUMPULKAN DATA	237
O.2.02 MENYUSUN KOMPILASI.....	238
O.2.03 MENETAPKAN DOKUMEN.....	239
O.3 MENYUSUN DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI.....	240
O.4 PENYUSUNAN SOP.....	240
P. PERATURAN PENGELOLAAN UTANG	241
P.1 PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN.....	241
P.2 REVIU LEGAL DRAFTING.....	241
Q. TEKNOLOGI INFORMASI.....	242
Q.1 PERANCANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	242

Q.1.01 MENYUSUN DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM.....	242
Q.2 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM	243
Q.2.01 MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN SISTEM.....	243
Q.3 OPERASIONAL DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	244
R. KEPEGAWAIAN.....	245
R.1 PENGEMBANGAN PEGAWAI	245
R.1.01 MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI LAPORAN	245
R.2 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.....	246
R.2.01 MENGUMPULKAN DATA PEGAWAI.....	246
R.2.02 MEMUTAKHIRKAN DATA PEGAWAI.....	247
R.2.03 MENYUSUN FORMASI PEGAWAI	248
S. PENGELOLAAN KEUANGAN	249
S.1 PENYUSUNAN ANGGARAN.....	249
S.1.01 MENYUSUN RKA-KL	249
S.1.02 MENYUSUN DIPA	250
S.1.03 MENYUSUN REVISI DIPA.....	251
S.1.04 MENYUSUN REVISI POK.....	252
S.1.05 MENYUSUN PNBP.....	253
S.2 PERBENDAHARAAN.....	254
S.2.01 MENERBITKAN SPTB.....	254
S.2.02 MENERBITKAN SPP	255
S.2.03 MENERBITKAN SPM	256
S.2.04 MENYUSUN LPJ BENDAHARA.....	257
S.3 AKUNTANSI DAN PELAPORAN	258
S.3.01 MENYUSUN LAPORAN BELANJA MODAL	258
S.3.02 MENYUSUN LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN	259
S.3.03 MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN.....	260
T. ADMINISTRASI UMUM.....	261
T.1 PENGELOLAAN ARSIP	261
T.1.01 MELAKUKAN PEMUSNAHAN ARSIP	261

T.2 PENGELOLAAN BMN.....	262
T.2.01 MELAKUKAN PENGADAAN	262
T.2.02 MELAKUKAN PENGHAPUSAN	263
T.2.03 MELAKUKAN PEMELIHARAAN.....	264
T.2.04 MENYUSUN AKUNTANSI BMN	265
T.3 PENGELOLAAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN	266
T.3.01 MENYUSUN DAFTAR GAJI.....	266
U. KESEKRETARIATAN	267
U.1 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN	267
U.2 PROTOKOLER.....	267

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: HUBUNGAN PROSES 2

Gambar 2: FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH DALAM PEMODELAN PROSES
BISNIS 3

Figure 3: PEMODELAN PROSES BISNIS 3

Figure 4: KONVENSI VACD 5

Figure 5: STRUKTUR ORGANISASI DJPPR..... 9

Ays

DAFTAR TABEL

Table 1 : NOTASI VACD..... 4

Table 2 : ELEMEN BPMN 6

Table 3 : TABEL NOTASI BPMN..... 7

Agus

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suatu organisasi secara umum tentu mempunyai tujuan, yaitu visi, misi dan fungsi, agar dapat berjalan dengan baik dan terstruktur serta selalu meningkat kinerja serta produktifitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi membutuhkan suatu proses bisnis yang baik untuk mendukung operasional pengelolaan organisasi tersebut.

Organisasi yang modern ditandai dengan adanya pengaturan proses dan menitikberatkan pada kelompok atau tim serta menyeluruh pada proses bisnis organisasi. Berbeda dengan organisasi tradisional yang berorientasi pada tugas dan menitikberatkan pada perorangan. Organisasi yang modern juga relatif lebih terukur dari sisi target kinerja dan produktivitasnya, dimana pencapaiannya diatur melalui serangkaian proses kerja yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi membutuhkan suatu proses bisnis yang baik untuk mendukung berjalannya organisasi tersebut. Proses bisnis merupakan identitas suatu organisasi sekaligus pembeda satu organisasi dengan organisasi yang lain.

DJPPR sebagai suatu organisasi tentu saja juga membutuhkan suatu proses bisnis yang baik agar dapat mendukung pencapaian tujuan dari DJPPR.

Suatu proses bisnis yang baik harus mempunyai tujuan mengefektifkan, mengefisienkan dan meningkatkan produktivitas dari suatu organisasi. Oleh karenanya, melalui dokumen ini seluruh proses bisnis yang ada di DJPPR dipetakan.

Dokumentasi proses bisnis sebagai bagian kecil dari pengelolaan proses bisnis merupakan pembukaan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dari pengelolaan proses bisnis DJPPR. Dokumentasi ini akan mencoba menguraikan kompleksitas suatu organisasi dalam konteks proses bisnis. Dan akhirnya diharapkan dokumentasi proses bisnis ini akan terus berlanjut dan akan dimutakhirkan berdasarkan data terkini organisasi

B. TUJUAN

Ada beberapa tujuan dalam penyusunan dokumentasi proses bisnis, yaitu:

1. Mengetahui fungsi-fungsi dan tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Sebagai bahan masukan untuk pengembangan proses bisnis, fungsi, dan tata kelola terkait aktivitas pengelolaan pembiayaan dan risiko pada masa yang akan datang.
3. Menjadi acuan atau referensi utama dalam Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
4. Sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal
5. Sebagai masukan dalam pengembangan teknologi informasi dan bisnis arsitektur.

C. RUANG LINGKUP

Dokumentasi Proses Bisnis DJPPR Versi 01 ini merupakan dokumentasi proses bisnis pertama DJPPR yang meliputi peta proses bisnis untuk proses bisnis inti level 1-3, proses bisnis manajemen level 1-3 dan proses bisnis pendukung bisnis inti level 1-3.

D. LANDASAN TEORI

D.1 PROSES BISNIS

Secara umum Proses Bisnis (*Business Process*) dapat dimaknai sebagai suatu kumpulan dari aktivitas (task) atau pekerjaan terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau

yang menghasilkan suatu keluaran (produk/output) atau layanan (demi meraih tujuan tertentu) dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis dari suatu organisasi.

Sebuah proses bisnis, harus mempunyai (1) tujuan yang jelas, (2) adanya masukan,

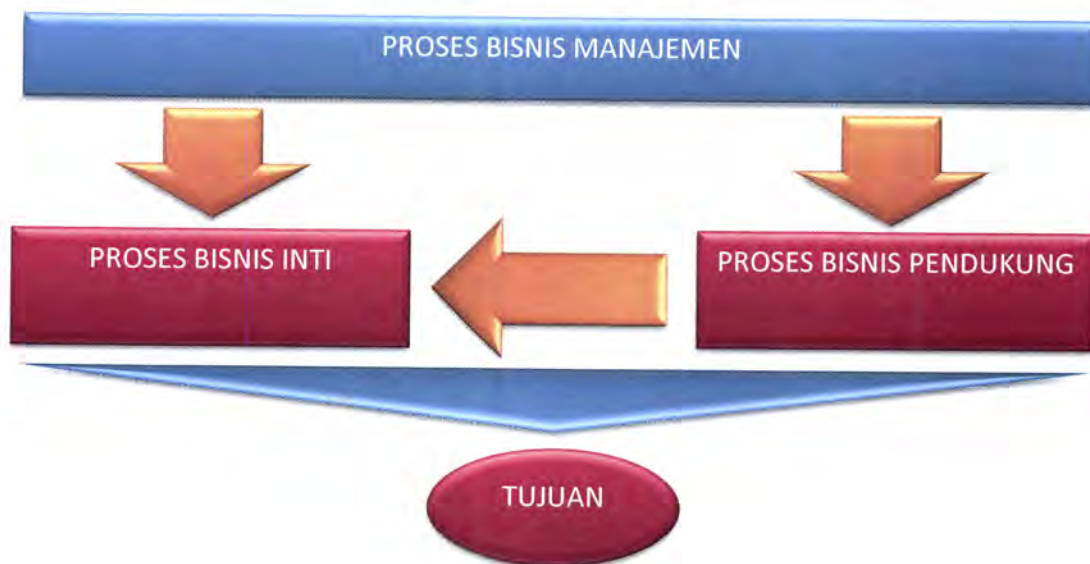
(3) adanya keluaran, (4) menggunakan *resource*, (5) mempunyai sejumlah kegiatan yang dalam beberapa tahapan, (6) dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi, dan (7) dapat menciptakan nilai atau *value* bagi konsumen (*Sparx System*, 2004). Sedangkan menurut Weske (2007) sebuah proses bisnis terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi di lingkungan bisnis dan teknis. Sangkaian kegiatan ini bersama-sama mewujudkan strategi bisnis. Suatu proses bisnis biasanya diberlakukan dalam suatu organisasi, tapi dapat juga saling berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lain.

Terdapat 3 tipe utama dari proses bisnis, yaitu:

1. Proses Manajemen, yaitu proses yang mengelola operasional dari suatu sistem (pengelolaan kinerja, manajemen strategis)
2. Proses operasional/inti merupakan proses yang membentuk bisnis inti dan menciptakan nilai tambah utama (divisi pembelian, penjualan, pemasaran, dll)
3. Proses pendukung, merupakan pendukung dari proses bisnis inti (keuangan, sumber daya manusia/kepegawaian, teknologi informasi).

Hubungan antara 3 tipe proses tersebut tergambar sebagai berikut:

Gambar 1: HUBUNGAN PROSES



D.2 PEMODELAN PROSES BISNIS

Pemodelan proses bisnis (*business process modelling*) merupakan salah satu rangkaian proses dalam pengelolaan proses bisnis (*business process management*). Pemodelan proses bisnis merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan representasi dari proses bisnis yang ada (*as is*) ataupun proses bisnis yang diusulkan (*to be*).

1. TUJUAN PEMODELAN

Terdapat beberapa tujuan dalam melakukan Pemodelan proses bisnis, yaitu:

- Untuk mendokumentasikan proses bisnis yang ada dengan jelas.
- Untuk digunakan sebagai bahan penilaian atas kebutuhan standar dan kepatuhan.
- Untuk mengerti bagaimana proses bekerja, siapa yang mengerjakan dan kapan proses dikerjakan.

- Sebagai basis untuk melakukan analisis dalam rangka identifikasi kesempatan untuk perbaikan.
- Untuk melakukan desain proses baru atau pendekatan baru untuk proses yang tersedia.
- Sebagai basis untuk komunikasi dan diskusi.
- Untuk mendeskripsikan kebutuhan untuk adanya proses bisnis yang baru.

Kesimpulannya, pemodelan proses bisnis *as is* akan membawa pengertian yang utuh mengenai proses bisnis dan arah perbaikannya.

2. TAHAPAN PEMODELAN

Pemodelan proses bisnis merupakan suatu proses yang meliputi langkah-langkah berikut:

- Penetapan ruang lingkup dari pemodelan proses bisnis, diantaranya penentuan level pemodelan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, etc
- Penetapan notasi dan standar yang akan digunakan dalam pemodelan proses bisnis.
- Penyusunan peta dan model proses bisnis DJPPR
- Kompilasi model proses bisnis menjadi dokumen Peta proses bisnis DJPPR

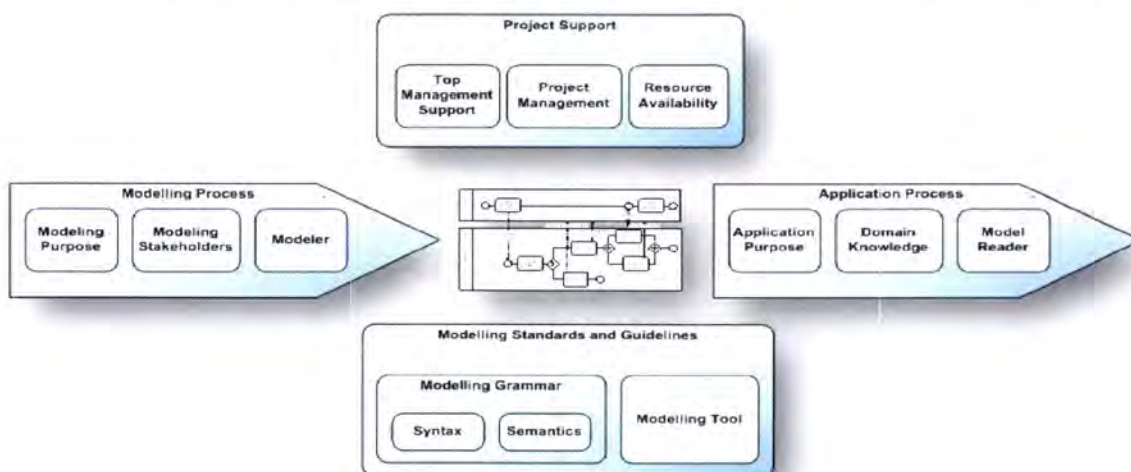
3. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG

Selain itu terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pemodelan proses bisnis¹, sehingga proses pemodelan proses bisnis dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

- Project support
- Modelling process
- Application process
- Modelling standard and guidelines.

Secara lebih rinci, faktor-faktor tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH DALAM PEMODELAN PROSES BISNIS



Pemodelan proses bisnis merupakan cara untuk mendapatkan Peta proses bisnis yang valid. Sehingga pemodelan proses bisnis harus dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hubungan antara pemodelan proses bisnis dan dokumentasi proses bisnis terlihat pada gambar dibawah ini:

Figure 3: PEMODELAN PROSES BISNIS

¹ Business Process Modelling Course



E. TATA PEMODELAN PROSES BISNIS

Tata pemodelan proses bisnis merupakan salah satu konvensi dalam pemodelan proses bisnis yang berisi tipe grafik yang digunakan dalam pemodelan proses bisnis. Tata Pemodelan dalam suatu organisasi dapat terdiri dari berbagai tipe tergantung dari peruntukannya. Untuk pemodelan proses bisnis terdapat beberapa tipe grafik yang dapat digunakan yaitu *Flow chart*, *Value Added Chain Diagram*, BPMN dan lainnya. Dalam rangka penyusunan peta maupun model proses bisnis DJPPR, akan digunakan tata pemodelan sesuai standar internasional sehingga selain dapat dibaca untuk kalangan sendiri, peta dan model proses bisnis akan dapat dibaca oleh kalangan praktisi dan akademisi terkait proses bisnis. Selain itu tata pemodelan yang akan digunakan juga akan memperhatikan peraturan yang berlaku, yaitu Buku 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 12 mengenai Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015. Dalam dokumen tersebut memuat mengenai kaidah penggambaran tata laksana yang menggunakan BPMN sebagai kaidah penggambaran.

Terdapat 4 level hirarki dalam pemodelan proses bisnis yaitu:

1. Level 0: Peta Proses Bisnis. Level 0 ini memuat seluruh proses bisnis utama di DJPPR yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis pendukung dan proses bisnis manajemen. Selain itu untuk kelompok proses bisnis utama
2. Level 1: Model Bisnis. Level 1 merupakan penjabaran dari proses bisnis utama di DJPPR.
3. Level 2: Kelompok Proses Bisnis
4. Level 3: Proses Bisnis

Level 0 dan Level 1 digambarkan menggunakan tata bahasa pemodelan *Value Added Chain Diagram*, sedangkan Level 2 dan Level 3 akan digambarkan menggunakan *Business Process Model and Notation*.

E.1 VALUE ADDED CHAIN DIAGRAM

Value Added Chain Diagram (VACD) digunakan untuk membuat struktur proses bisnis. Tipe tata pemodelan ini tidak menyediakan *logical connectors* (konektor logis) untuk menggambarkan adanya keputusan eksplisit dan hasilnya dapat memberikan gambaran abstrak untuk aliran dan struktur proses bisnis.

Berikut merupakan keterangan dari notasi yang digunakan:

Table 1: NOTASI VACD

	Notasi disamping berarti “proses” yang merupakan bagian dari proses hirarki. Proses yang mempunyai hirarki lebih tinggi berada di posisi atas, sedangkan yang berada di bawahnya merupakan proses dengan hirarki yang lebih rendah
---	---

	Notasi disamping merupakan kategori dari proses yang posisinya berada di bawahnya.
---	--

Selanjutnya, secara lebih jelas konvensi VACD yang digunakan dalam dokumen ini adalah digambarkan sebagai berikut:

Figure 4: KONVENSI VACD



E.2 BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION

Business Process Model and Notation (BPMN) merupakan notasi gambar yang menggambarkan langkah-langkah dalam proses bisnis. Notasi ini didesain khusus untuk mengkoordinasi urutan proses dan informasi yang mengalir diantara partisipan dalam aktivitas yang berbeda. Notasi ini dikembangkan oleh OMG (Object Management Group), salah satu organisasi yang bergerak dalam mengembangkan pengorganisasian proses bisnis.

1. TUJUAN PENGGUNAAN BPMN

Dunia bisnis telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, proses dapat melibatkan banyak partisipan dan bentuk koordinasinya kompleks. Sebelum BPMN diterbitkan, belum ada standarisasi dalam pemodelan proses bisnis.

Salah satu tujuan dalam pembangunan BPMN adalah menciptakan notasi yang sederhana dan mudah diadopsi oleh analis bisnis.

2. MANFAAT PENGGUNAAN BPMN

Terdapat beberapa manfaat dalam penggunaan BPMN, diantaranya:

- BPMN dapat menciptakan bahasa yang komprehensif dan dimengerti oleh analis bisnis maupun pakar dalam area teknologi.
- BPMN menyediakan notasi yang umum sehingga individu yang terkait dengan proses dapat menggambarkan secara jelas, terstandarisasi dan lengkap.
- BPMN tidak hanya menyediakan standarisasi proses bisnis, namun juga meningkatkan nilai dari standarisasi untuk dibagi dan dimengerti oleh berbagai pihak ketiga.

3. NOTASI BPMN

Notasi BPMN terdiri dari empat kategori dasar yaitu:

- *Flow Objects*
- *Connecting Objects*
- *Swimlanes*
- *Artifacts*

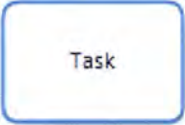
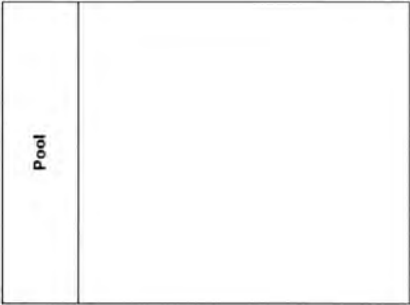
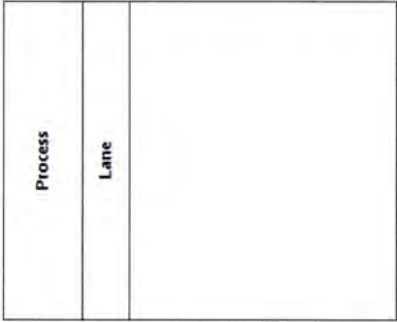
Secara lebih lengkap, kategori tersebut diatas, dapat dilihat pada table berikut:

Table 2: ELEMEN BPMN

Elemen	Definisi	Nama Notasi BPMN
Flow Objects	Merupakan notasi utama yang mendefinisikan perilaku proses.	Events
		Activities
		Gateways
Connecting Objects	Flow objects terhubung antara satu dengan lainnya untuk memberi makna dan menciptakan konsepsi dasar dari struktur proses bisnis	Sequence Flow
		Message Flow
Swimlane	Swim lanes adalah mekanisme untuk mengatur aktivitas dalam kategori yang berbeda sehingga dapat memberikan ilustrasi mengenai perbedaan fungsi atau pihak yang bertanggung jawab	Association
		Pools
Artifacts	Artifacts digunakan untuk menyediakan tambahan informasi.	Lanes
		Annotation
		Group
		Data Object
		Data Store

Pada Dokumentasi Proses Bisnis DJPPR, Kelompok Proses (Level 2) ini terdapat beberapa notasi yang digunakan yaitu:

Table 3: TABEL NOTASI BPMN

Notasi	Nama Notasi BPMN	Arti
 Start Event	Start Events	Merupakan tanda untuk proses dimulai.
 End Event	End Events	Merupakan tanda proses selesai atau diakhiri
	Activities	Merupakan aktivitas tunggal yang saling berhubungan membentuk proses
	Sequence Flow	Merupakan penghubung antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain
	Pools	Merupakan kumpulan aktivitas yang tergabung dalam sebuah Proses
	Lanes	Merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap proses.

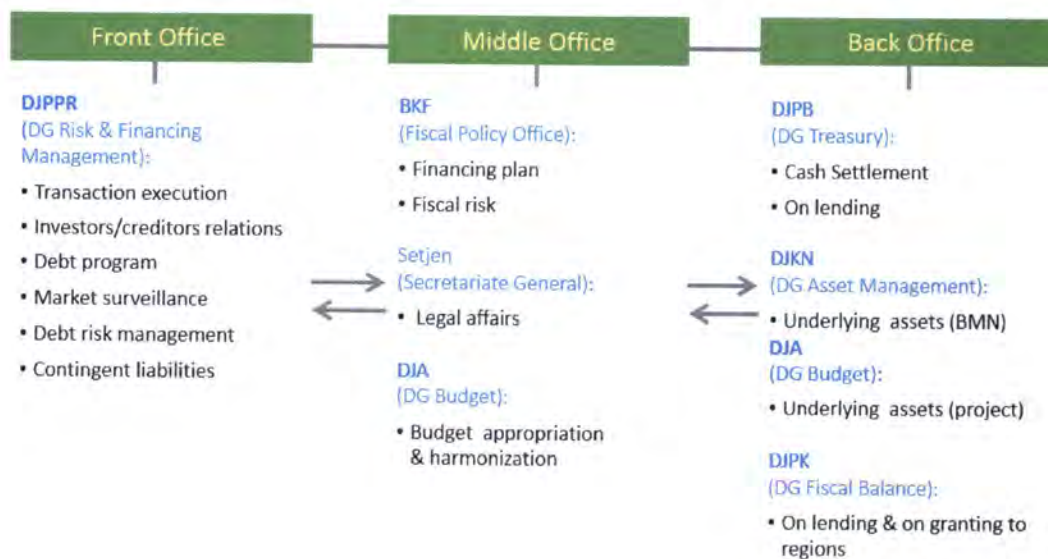
F. TATA KELOLA PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Sesuai ketentuan perundang-undangan, tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan pembiayaan APBN, termasuk pembiayaan proyek infrastruktur dan pengelolaan risiko keuangan Negara, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Namun demikian, dalam perspektif Kemenkeu *wide*, operasional pengelolaan pembiayaan tersebut, melibatkan juga beberapa unit eselon I lain di Kemenkeu, seperti Setjen, BKF, DJA, DJPB, dan DJPK. Masing-masing unit eselon I di Kemenkeu tersebut turut berperan dalam kapasitas dan kewenangan masing-masing, untuk mewujudkan operasional pengelolaan pembiayaan dan risiko oleh DJPPR.

Peran dan fungsi masing-masing unit eselon I Kemenkeu tersebut dalam pengelolaan pembiayaan dan risiko dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Fungsi Fungsi Terkait Pengelolaan Pembiayaan APBN



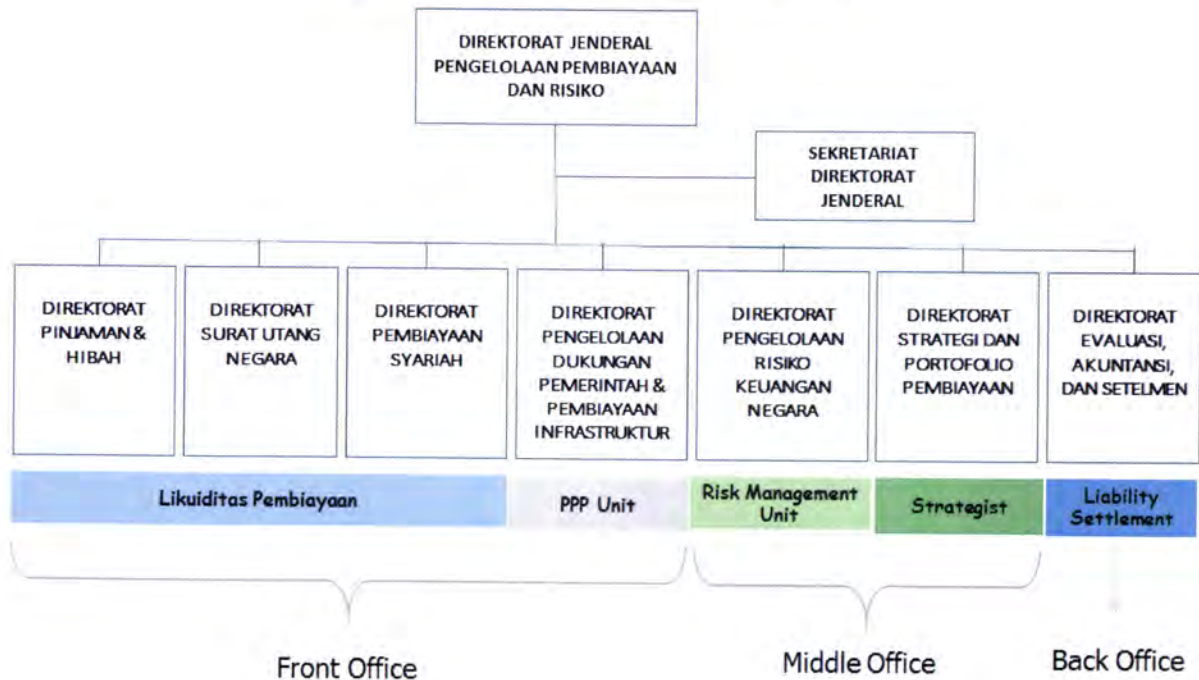
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara adalah suatu proses multi-stakeholder yang kompleks yang melibatkan peran serta dari berbagai pihak. Namun demikian, peran strategis DJPPR, sesuai mandat yang diberikan oleh perundang-undangan.

Pada bagian ini, akan diuraikan lebih mendalam peran strategis DJPPR dalam proses pembiayaan APBN dan pengelolaan risiko keuangan Negara, khususnya melalui peta fungsi DJPPR sesuai dengan mandat yang diberikan perundang-undangan. Selain itu, juga akan disampaikan pokok-pokok proses bisnis utama yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan DJPPR.

F.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI DJPPR

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJPPR terdiri dari 8 unit eselon II, dengan rincian sebagaimana gambar berikut:

Figure 5: STRUKTUR ORGANISASI DJPPR



Tugas utama DJPPR sesuai PMK 234/PMK.01/2015 tersebut adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; dan
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

F.2 VISI DAN MISI

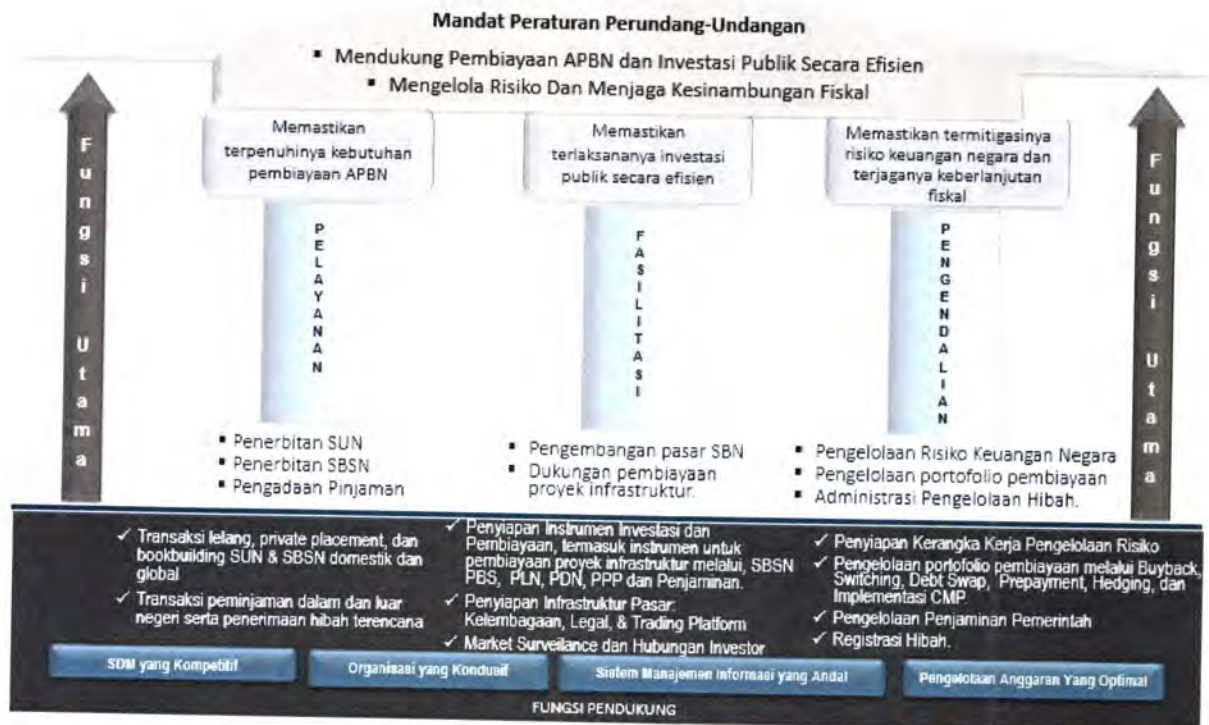
Sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, visi DJPPR adalah:

Menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN dan investasi publik secara efisien sekaligus mengelola risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.

Untuk mencapai visi tersebut, misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ditetapkan sebagai berikut: a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel; b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang yang mendukung stabilitas fiskal; c. Mengedepankan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan mengembangkan pasar finansial domestik yang efisien dan stabil; d. Memperoleh sumber pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional; e. Menjaga risiko finansial sovereign pemerintah dikelola secara pruden dan holistic.

Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan pembiayaan dan risiko tahun 2015-2019 adalah pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.

F.3 PETA FUNGSI



Sesuai dengan mandat yang diberikan peraturan perundangan, terdapat 3 fungsi utama yang dilaksanakan oleh DJPPR, meliputi:

- Fungsi layanan, yaitu dalam rangka memastikan terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN;
- Fungsi fasilitasi, yaitu dalam rangka memastikan terlaksananya investasi publik secara efisien;
- Fungsi pengendalian, yaitu dalam rangka memastikan termitigasinya risiko keuangan negara dan terjaganya keberlanjutan fiskal.

Fungsi-fungsi tersebut dalam operasionalnya diwujudkan oleh DJPPR dalam bentuk pelaksanaan beberapa kegiatan yang tersebar pada masing-masing unit eselon II di DJPPR. Selain itu, juga terdapat beberapa fungsi pendukung, yang relevan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing unit dalam mendukung pencapaian fungsi utama DJPPR.

F.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pengelolaan pembiayaan dan risiko untuk tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Peta Strategi Kemenkeu-One, adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal;
- Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal;
- Pengelolaan utang, risiko keuangan negara dan dukungan pemerintah yang kredibel;
- Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil;
- Pinjaman yang efektif dan efisien;
- Biaya dan risiko utang yang terkendali;
- Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent;
- Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur;
- SDM yang kompetitif;

- j. Organisasi yang kondusif;
- k. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi; dan
- l. Pengelolaan anggaran yang optimal.

F.5 KEBIJAKAN

Kebijakan umum pengelolaan utang dalam strategi pengelolaan utang jangka menengah tahun 2014-2017 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Tahun 2014 – 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap;
- b. Melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali;
- c. Memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal;
- d. Memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama pembangunan infrastruktur;
- e. Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara; dan
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

F.6 STRATEGI

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi-strategi yang efektif dan tepat sasaran, dimana di sisi lain dapat sekaligus mengatasi permasalahan yang ada. Strategi-strategi yang disusun harus dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki, baik internal maupun eksternal. Adapun strategi DJPPR untuk periode tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik untuk memenuhi pembiayaan APBN-P, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer;
- b. Penentuan instrumen yang akan diterbitkan memperhatikan kebutuhan pasar/investor SBN dalam rangka pengembangan pasar dan kebutuhan pengelolaan portofolio utang;
- c. Penerbitan SBN Ritel dalam rangka diversifikasi sumber pembiayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berinvestasi (financial inclusion);
- d. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN-P;
- e. Melakukan pengelolaan portofolio SBN secara aktif antara lain melalui buyback dan debt switch untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar;
- f. Memperkuat fungsi Investor Relation Unit, antara lain melalui diseminasi informasi secara proaktif, respon yang cepat dan efektif, dan komunikasi yang efektif dengan investor dan stakeholder lainnya.

F.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan penganggaran dengan dasar performanced based budgeting, dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada tahun 2016, DJPPR memiliki program pokok dan program penunjang. Program pokok adalah Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pinjaman;
- b. Pengelolaan Surat Utang Negara;
- c. Pengelolaan Pembiayaan Syariah;
- d. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;

- e. Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
- f. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Pembiayaan; dan
- g. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Sedangkan, program penunjang adalah program yang ditujukan untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

F.8 STAKEHOLDER UTAMA

Sebagaimana telah diuraikan di Bab sebelumnya bahwa proses pembiayaan dan pengelolaan risiko merupakan proses yang kompleks dan multi stakeholder. Dalam pelaksanaan tugas selaku pengelola pembiayaan dan risiko, peran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terkait secara langsung dengan berbagai institusi baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Berdasarkan proses identifikasi pemangku kepentingan (stakeholder identification), dapat dijelaskan peta stakeholder DJPPR sebagai berikut:

Peta Stakeholder DJPPR



Stakeholder internal maupun eksternal Kementerian Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DJPPR, antara lain sebagai berikut:

- a. Internal Kementerian Keuangan, antara lain dengan:
 - 1) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dalam hal penyusunan komponen pembiayaan APBN dan penyusunan dokumen anggaran, dan penyiapan Daftar Kegiatan yang telah mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk digunakan sebagai *underlying* penerbitan *Project Base Sukuk*;
 - 2) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dalam hal pelaksanaan kebijakan fiskal;
 - 3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dalam hal:
 - i. koordinasi pengelolaan kas khususnya untuk mengharmonisasikan pelaksanaan/eksekusi penerbitan/pengadaan utang tunai dengan ketersediaan kas untuk pembiayaan; dan
 - ii. koordinasi pengelolaan penerusan pinjaman.

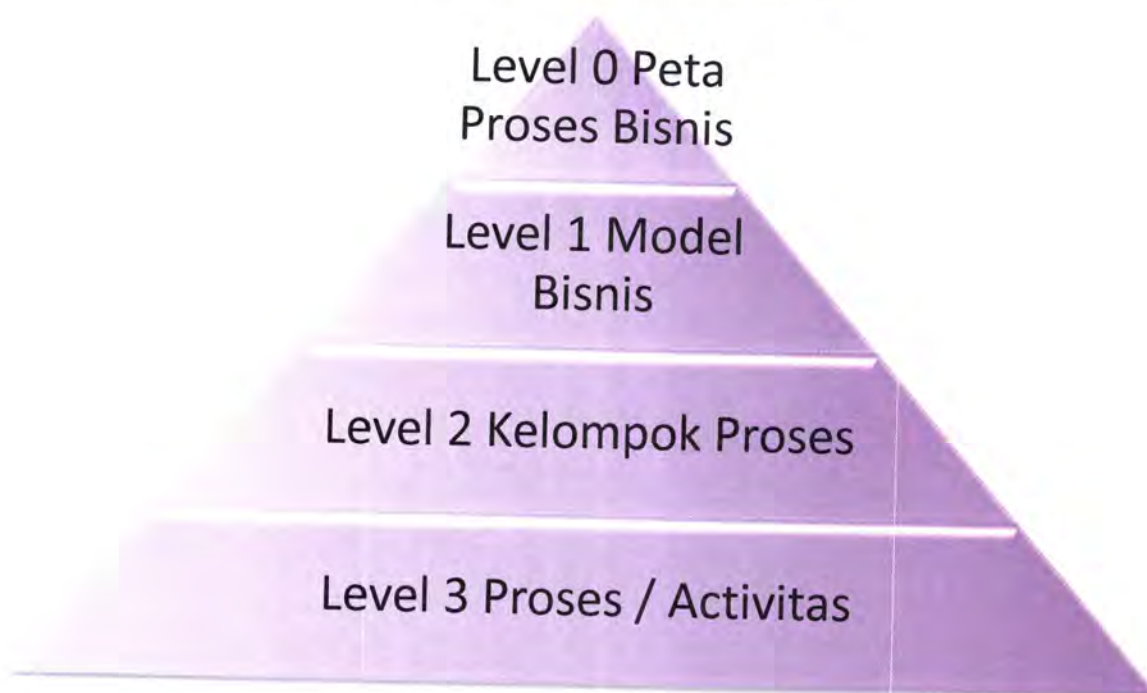
- 4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan DJA, dalam hal penyiapan *underlying asset* yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk;
- 5) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam hal aspek perpajakan pada pengelolaan utang;
- 6) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan:
 - i. Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, serta penyusunan anggaran dan Laporan Keuangan Kementerian;
 - ii. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terkait pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional;
 - iii. Biro Hukum terkait pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas;
 - iv. Biro Bantuan Hukum terkait koordinasi dan pelaksanaan penelaahan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan;
 - v. Biro Sumber Daya Manusia terkait pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - vi. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terkait pelaksanaan tugas aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan utang, penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, dan monitoring opini publik;
 - vii. Biro Perlengkapan terkait pengelolaan perlengkapan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - viii. Biro Umum terkait pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - ix. Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) terkait aspek pengembangan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - x. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan terkait pelaksanaan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - xi. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik terkait pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan.
- 7) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal pelaksanaan review APIP terkait penyusunan anggaran BUN dan pengawasan internal Kementerian Keuangan; dan
- 8) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) khususnya Pusdiklat Keuangan Umum dan Pusdiklat Pengembangan SDM, dalam hal pelaksanaan *Capacity Building* Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- b. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain dengan:
 - 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam hal alokasi pembiayaan melalui utang dalam APBN, persetujuan penggunaan BMN sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN, dan persetujuan penggunaan dana SAL untuk pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN;
 - 2) Bank Indonesia (BI) yang dalam kaitannya dengan pengelolaan utang memiliki dua peran, yaitu:
 - i. Sebagai pengelola kebijakan moneter dan neraca pembayaran dalam kerangka *Asset and Liability Management* (ALM); dan

- ii. Sebagai mitra dalam pengembangan pasar dan sebagai agen lelang, agen penatausahaan utang, dan setelmen utang.
- 3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra dalam pengembangan dan pengawasan pasar SBN;
- 4) Pelaku pasar/investor termasuk *dealer* utama/*primary dealers* dan peserta lelang, dalam hal mengembangkan kapasitas daya serap pasar dan memperoleh input atas kondisi pasar keuangan pada umumnya (*market update*), preferensi instrumen, dan rencana alokasi investasi;
- 5) *Investment Bank* dan *International/Local Legal Counsel*, dalam hal pelaksanaan transaksi penerbitan SBN valas;
- 6) Lembaga Pemeringkat/*Rating Agencies*, dalam hal *assessment* tahunan dan *assessment* transaksi penerbitan SBN valas;
- 7) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam hal:
 - i. koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - ii. perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman atau sebagai *underlying asset sukuk project*; dan
 - iii. pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman.
- 8) Kementerian/Lembaga, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman, serta penyiapan *policy matrix* atas pinjaman program;
- 9) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal pemenuhan dokumen pengefektifan pinjaman;
- 10) DSN – MUI, dalam hal penerbitan Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) penerbitan SBSN;
- 11) Pemberi Pinjaman/Lender, dalam hal memperoleh informasi mengenai fokus pembiayaan dan indikasi besaran/alokasi pinjaman; dan
- 12) Lembaga atau negara pemberi donor.

G. HIRARKI PROSES BISNIS DJPPR

Proses bisnis DJPPR sebagai dokumen keluaran dari pemodelan proses terdiri dari beberapa level yang digambarkan sebagai berikut:

Figure 5: HIRARKI PROSES BISNIS



1. Level 0 yang disebut *The Map* atau Peta Proses Bisnis, yang menggambarkan organisasi secara keseluruhan dan menjelaskan keseluruhan proses dalam level paling tinggi. Pada level ini terlihat proses bisnis inti, pendukung dan manajemen dan level ini menjadi dasar bagi proses yang lebih detail lagi.
2. Level 1 yang disebut Model Bisnis. Pada level ini digambarkan proses yang organisasi lakukan dan bagaimana satu proses dengan yang lainnya berbeda. Level 1 merupakan level dekomposisi pertama dan masih sama dengan level 0, berupa peta dengan bahasa VACD.
3. Level 2 merupakan *Main Process* atau Kelompok Proses. Level ini menunjukkan *end-to-end* proses bisnis yang aktual pada level yang cukup tinggi. Level 2 fokus pada interaksi dan perpindahan tanggung jawab diantara aktor utama dalam proses bisnis.
4. Level 3 merupakan Proses/aktivitas yang menunjukkan detail informasi secara keseluruhan sehingga didapatkan pengertian yang menyeluruh mengenai proses bisnis tersebut. Level 3 ini berisi *flow* proses, *flow* informasi (*input* dan *output*), sistem informasi yang digunakan, dan aktor yang melakukan aktivitas tersebut.

BAB II PROSES BISNIS LEVEL 0

Proses Level 0 atau disebut dengan arsitektur proses bisnis merupakan penggambaran seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi, baik itu proses bisnis inti dan proses bisnis pendukung. Dalam penyusunan proses bisnis level 0 terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan fungsi *debt management office* dan fungsi siklus pengelolaan pembiayaan dan risiko, sehingga jika digambarkan sebagai berikut:

A. PENDEKATAN SIKLUS

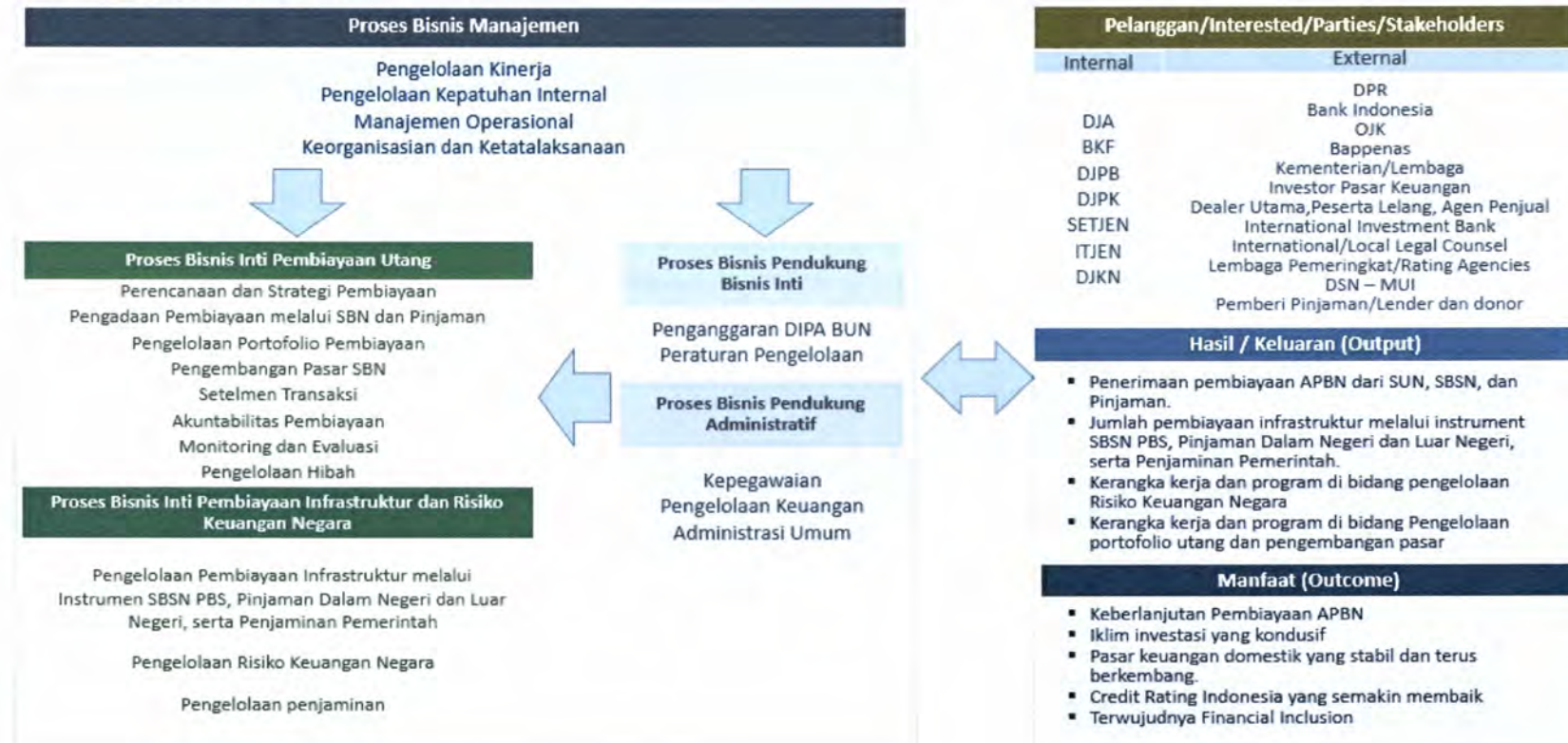


Figure 6 PENDEKATAN SIKLUS

B. PENDEKATAN FUNGSI

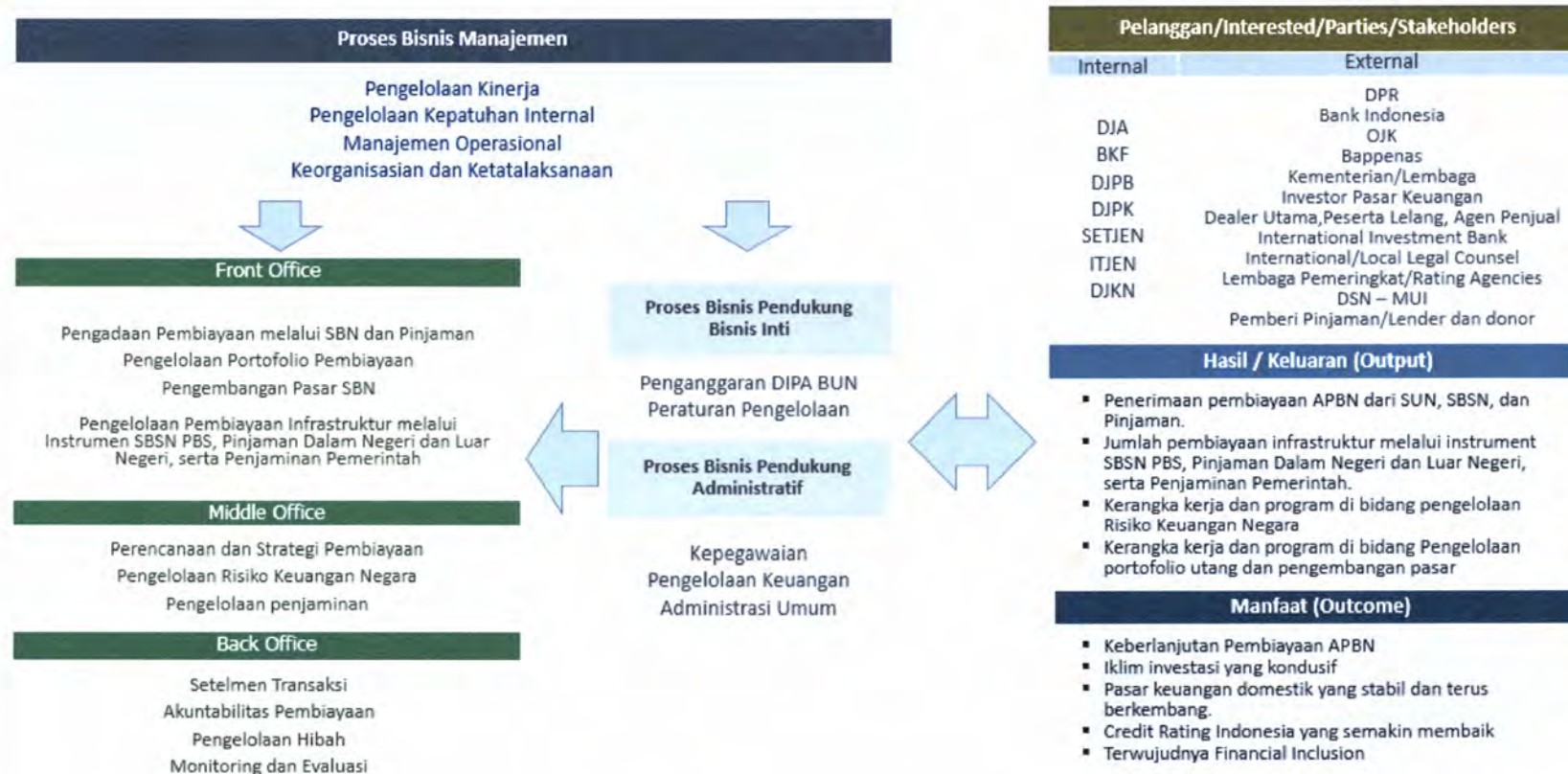


Figure 7 PENDEKATAN FUNGSI

Sehingga dari peta proses bisnis diatas dapat disimpulkan bahwa proses bisnis inti DJPPR terdiri dari 2 kategori yaitu Proses Bisnis Inti Pembiayaan Utang dan Proses Bisnis Inti Pembiayaan Infrastruktur dan Risiko Keuangan Negara. Proses bisnis pembiayaan utang terdiri dari proses berikut, yaitu Perencanaan dan Strategi Pembiayaan, Pengadaan Pembiayaan melalui SBN dan Pinjaman, Pengelolaan Portofolio Pembiayaan, Pengembangan Pasar SBN, Setelmen Transaksi, Akuntabilitas Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengelolaan Hibah. Sedangkan Proses Bisnis Inti Pembiayaan Infrastruktur dan Risiko Keuangan Negara terdiri dari Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur melalui

Instrumen SBSN PBS, Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri, serta Penjaminan Pemerintah, Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, dan Pengelolaan penjaminan. Pengelompokan proses bisnis inti dapat dilihat pada gambar berikut:

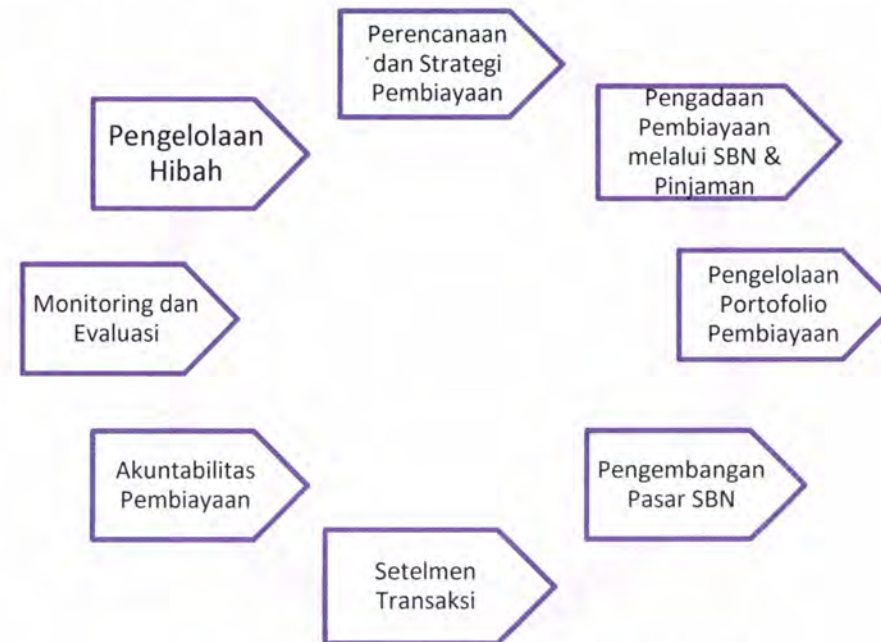


Figure 8: PROSES BISNIS INTI PEMBIAYAAN



Figure 9: PROSES BISNIS INTI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN RISIKO KEUANGAN NEGARA

BAB III PROSES BISNIS LEVEL 1

A. PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN



Pada Proses Perencanaan Pembiayaan terdapat 9 macam proses bisnis inti level 1, yaitu Penyusunan strategi pembiayaan utang jangka menengah, penyusunan strategi pembiayaan utang tahunan, penyusunan rencana biaya utang, penyusunan batas maksimum pinjaman, penyusunan rencana transaksi SBN, perencanaan transaksi pengelolaan portofolio, penyiapan underlying aset SBSN, dan penyiapan fatwa dan opini syariah. Berikut merupakan detail dari kelompok proses inti tersebut:

1. PENYUSUNAN STRATEGI PEMBIAYAAN UTANG JANGKA MENENGAH

Nama Proses	Penyusunan Strategi Pembiayaan Utang Jangka Menengah
Deskripsi	Proses ini merupakan proses penyusunan dokumen strategi utang untuk periode 5 tahunan, yang biasanya sejalan dengan pergantian pimpinan pemerintahan. Namun, strategi ini dapat juga direview dan disusun kembali untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian ataupun kondisi lain yang mempengaruhi pengelolaan pembiayaan.
Penanggung jawab	Direktorat SPP

2. PENYUSUNAN STRATEGI UTANG TAHUNAN

Nama Proses	Penyusunan Strategi Pembiayaan Utang Tahunan
-------------	--

Deskripsi	Proses ini merupakan proses penyusunan dokumen strategi utang untuk periode tahunan. Strategi ini berisi rencana pembiayaan tahunan beserta profil risikonya, selain itu dokumen tahunan ini juga memuat target kebijakan kualitatif.
Penanggung jawab	Direktorat SPP

3. PENYUSUNAN RENCANA BIAYA UTANG

Nama Proses	Penyusunan Rencana Biaya Utang
Deskripsi	Proses ini merupakan proses penyusunan rencana biaya utang tahunan terkait dengan pembayaran pokok dan biaya utang yang nantinya akan dimasukkan dalam dokumen anggaran.
Penanggung jawab	Direktorat SPP

4. PENYUSUNAN BATAS MAKSIMUM PINJAMAN

Nama Proses	Penyusunan Batas Maksimum Pinjaman
Deskripsi	Proses ini merupakan proses penyusunan batas maksimum pinjaman yang dapat dibuat dalam tahun yang bersangkutan, termasuk project financing SBSN yang nantinya akan
Penanggung jawab	Direktorat SPP

5. PENYIAPAN USULAN KEGIATAN DAN PROYEKSI PENARIKAN PINJAMAN

Nama Proses	Penyiapan Usulan Kegiatan dan Proyeksi Penarikan Pinjaman
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk merencanakan kegiatan pinjaman dan perencanaan anggaran pinjaman APBN dan Program
Penanggung jawab	Direktorat PH

6. PENYUSUNAN RENCANA TRANSAKSI SBN

Nama Proses	Penyusunan Rencana Transaksi SBN
Deskripsi	Proses ini merupakan proses penyusunan transaksi SBN yang akan dilakukan sepanjang tahun dalam rangka memenuhi target pembiayaan yang telah ditetapkan. Rencana transaksi SBN berisi rencana penerbitan
Penanggung jawab	Direktorat SUN dan PS

7. PERENCANAAN TRANSAKSI PENGELOLAAN PORTOFOLIO

Nama Proses	Perencanaan Transaksi Pengelolaan Portofolio
Deskripsi	Proses ini merupakan proses perencanaan yang berisi perencanaan pengelolaan portofolio baik yang akan dilakukan melalui mekanisme lelang maupun transaksi langsung.
Penanggung jawab	Direktorat SUN dan PS

8. PENYIAPAN UNDERLYING ASSET SBSN

Nama Proses	Penyiapan Underlying Asset SBSN
Deskripsi	Proses ini merupakan proses identifikasi hingga penyiapan aset BMN maupun proyek APBN untuk digunakan sebagai underlying asset SBSN.
Penanggung jawab	Direktorat PS

9. PENYUSUNAN FATWA DAN OPINI SYARIAH

Nama Proses	Penyusunan Program Transaksi SBSN
Deskripsi	Proses ini merupakan proses penyusunan transaksi SBSN yang akan dilakukan sepanjang tahun dalam rangka memenuhi target pembiayaan yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.
Penanggung jawab	Direktorat PS

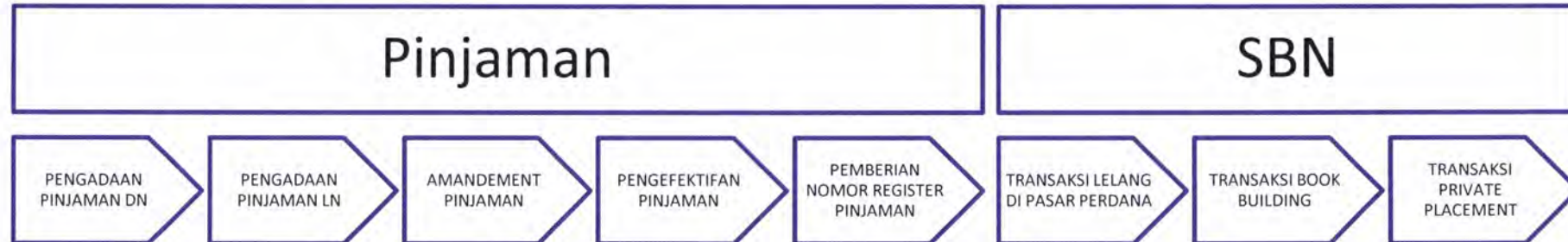
B. PENGADAAN PEMBIAYAAN MELALUI SBN DAN PINJAMAN

Pengadaan Pembiayaan merupakan proses yang terdiri dari berbagai macam transaksi untuk mengadakan pembiayaan utang, baik itu pinjaman maupun SBN. Pengadaan Pembiayaan dibagi menjadi 2 kategori besar yaitu pengadaan pembiayaan pinjaman dan pengadaan pembiayaan SBN, dimana total keseluruhan menjadi 10 model bisnis/ kelompok proses bisnis.

Model bisnis untuk kategori pengadaan pinjaman adalah: pengadaan pinjaman DN, pengadaan pinjaman LN, amandement pinjaman, pengefektifan pinjaman, dan pemberian nomor register.

Sedangkan model bisnis untuk kategori pengadaan SBN adalah: transaksi lelang di pasar perdana, transaksi book building, transaksi private placement, penyusunan dokumentasi hukum SBSN dan penetapan underlying asset SBSN.

Pengadaan Pembiayaan Melalui SBN dan Pinjaman



1. PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Nama Proses	Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk mendapatkan Pinjaman Dalam Negeri, dimana proses berakhir ketika Naskah Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh Lender dan Pemerintah Indonesia
Penanggung jawab	Direktorat PH

2. PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Nama Proses	Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk mendapatkan Pinjaman Luar Negeri, dimana proses berakhir ketika Naskah Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh Lender dan Pemerintah Indonesia
Penanggung jawab	Direktorat PH

3. AMANDEMENT PINJAMAN

Nama Proses	Amandement Pinjaman
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan amandement pada Naskah Perjanjian Pinjaman dimana proses ini berakhir pada saat naskah tersebut ditanda tangani kembali dalam rangka persetujuan amandement dibuat.
Penanggung jawab	Direktorat PH

4. PENGEFEKTIFAN PINJAMAN

Nama Proses	Pengefektifan Pinjaman
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan pemenuhan persyaratan (precedence condition) agar Perjanjian Pinjaman dapat dinyatakan efektif dan penarikan pinjaman dapat segera dilakukan.
Penanggung jawab	Direktorat PH

5. PENERBITAN NOMOR REGISTER PINJAMAN

Nama Proses	Penerbitan Nomor Register Pinjaman
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menerbitkan nomor register atas Naskah Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Lender.
Penanggung jawab	Direktorat EAS

6. TRANSAKSI LELANG DI PASAR PERDANA

Nama Proses	Transaksi Lelang di Pasar Perdana
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menerbitkan SBN melalui mekanisme lelang di pasar perdana, antara lain berupa penerbitan seri baru SBN. Dimana pada proses ini melibatkan dealer utama, LPS dan BI.
Penanggung jawab	Direktorat SUN dan PS

7. TRANSAKSI BOOK BUILDING

Nama Proses	Transaksi Book Building
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menerbitkan SBN melalui mekanisme <i>book building</i> . Proses ini antara lain dilakukan untuk menerbitkan SBN ritel maupun global bond.
Penanggung jawab	Direktorat SUN dan PS

8. TRANSAKSI PRIVATE PLACEMENT

Nama Proses	Transaksi Private Placement
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menerbitkan SBN melalui mekanisme <i>private placement</i> . Proses ini dilakukan untuk menerbitkan SBN untuk kalangan tertentu dan terbatas, misalnya penerbitan Sukuk Dana Haji untuk Kementerian Agama.

C. PENGELOLAAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

Pengelolaan Portofolio Pembiayaan merupakan proses kelanjutan dari proses untuk mengelola portofolio pembiayaan sehingga dapat memenuhi target pembiayaan APBN dengan biaya yang efisien. Pengelolaan portofolio dapat memberikan masukan bagi proses perencanaan dan pengadaan pembiayaan utang, namun juga dapat merupakan kelanjutan dari proses-proses tersebut. Proses Pengelolaan Portofolio terdiri dari proses Monitoring dan Evaluasi Portofolio Pembiayaan dan Transaksi Portofolio Pembiayaan yang terdiri dari *Buy Back*, *Switching*, *Debt Swap* dan *Prepayment*. Berikut gambaran detailnya:



1. MONITORING DAN EVALUASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

Nama Proses	Monitoring dan Evaluasi Portofolio Pembiayaan
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memonitor kemudian melakukan evaluasi terhadap portofolio utang terhadap target pembiayaan berdasarkan kondisi pasar terkini dan memberikan rekomendasi untuk melakukan transaksi atas hasil evaluasi tersebut.
Penanggung jawab	Direktorat SPP

2. TRANSAKSI BUY BACK

Nama Proses	Transaksi <i>Buy Back</i>
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan pembelian kembali SBN baik melalui transaksi langsung menggunakan fasilitas dealing room ataupun melalui lelang.

Penanggung jawab	Direktorat SUN
------------------	----------------

3. **TRANSAKSI SWITCHING**

Nama Proses	Transaksi Switching
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan penukaran SBN tertentu yang ada di pasar dengan penerbitan SBN yang baru
Penanggung jawab	Direktorat SUN

4. **DEBT SWAP**

Nama Proses	Debt Swap
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan penukaran utang yang ada dengan skema utang yang baru.
Penanggung jawab	Direktorat PH

5. **PREPAYMENT**

Nama Proses	Prepayment
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan percepatan pelunasan pokok utang kepada lender sebelum tanggal jatuh tempo.
Penanggung jawab	Direktorat PH

6. **TRANSAKSI LINDUNG NILAI**

Nama Proses	Transaksi Lindung Nilai
Deskripsi	Proses ini merupakan proses kegiatan untuk memitigasi risiko atau melindungi posisi nilai suatu aset / kewajiban terhadap risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai mata uang di masa datang
Penanggung jawab	Direktorat SPP

D. **PENGEMBANGAN PASAR SBN**

Pengembangan Pasar merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan utang dalam rangka mencapai salah satu tujuan pengelolaan utang, yaitu menciptakan pasar SBN yang aktif, dalam, dan likuid. Proses ini terdiri dari tiga model bisnis, yaitu pengembangan instrument, pengembangan basis investor, dan pengembangan infrastruktur pasar SBN.

Pengembangan Pasar SBN

Pengembangan
Instrumen

Pengembangan
Basis Investor

Pengembangan
Dealer Utama

1. PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Nama Proses	Pengembangan Instrumen
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan analisis terhadap instrumen dan memberikan rekomendasi terkait penerbitan jenis instrumen baru.
Penanggung jawab	Direktorat SUN dan PS

2. PENGEMBANGAN BASIS INVESTOR

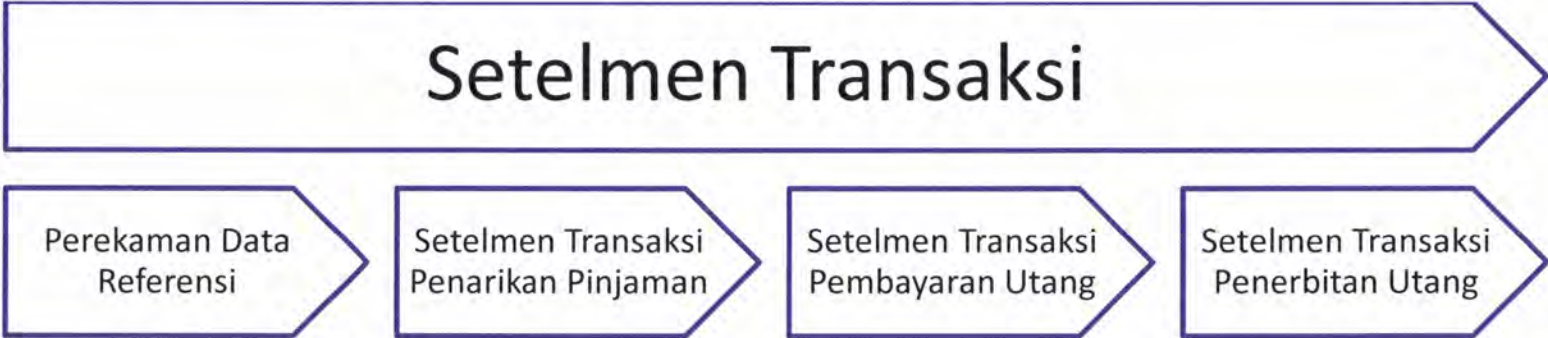
Nama Proses	Pengembangan Basis Investor
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menyusun kajian analisis dan rekomendasi terhadap target basis investor yang lebih luas dan lebih dalam.
Penanggung jawab	Direktorat SUN dan PS

3. PENGEMBANGAN DEALER UTAMA

Nama Proses	Pengembangan Dealer Utama
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menyusun kajian analisis dan rekomendasi fokus pada kinerja dealer utama agar lebih maksimal
Penanggung jawab	Direktorat SUN dan PS

E. SETELMEN TRANSAKSI

Setelmen Transaksi melakukan penyelesaian transaksi utang, meliputi transaksi penerimaan dan pembayaran. Proses setelmen penerimaan antara lain melakukan verifikasi dana atas penerbitan SBN yang diterima melalui rekening pemerintah pada Bank Indonesia. Sedangkan proses setelmen pembayaran adalah yang terkait dengan kewajiban pembayaran utang. Terdapat 4 Model Bisnis yang terlibat dalam proses ini, yaitu: perekaman data referensi, setelmen transaksi penarikan pinjaman, setelmen transaksi pembayaran utang, dan setelmen transaksi penerbitan utang.



1. PEREKAMAN DATA REFERENSI

Nama Proses	Perekaman Data Referensi
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan perekaman data referensi yang akan digunakan dalam proses setelmen. Data referensi merupakan acuan dalam kalkulasi setelmen utang, antara lain meliputi perekaman <i>tranche</i> , <i>term & condition</i> , tingkat bunga, dsb.
Penanggung jawab	Direktorat EAS

2. SETELMEN TRANSAKSI PENARIKAN PINJAMAN

Nama Proses	Setelmen Transaksi Penarikan Pinjaman
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan setelmen penarikan yang dilakukan oleh penerima utang kepada pemberi utang (<i>Lender</i>). Proses ini dilakukan setelah WA (<i>Withdrawal Application</i>) diterima.
Penanggung jawab	Direktorat EAS

3. SETELMEN TRANSAKSI PEMBAYARAN UTANG

Nama Proses	Setelmen Transaksi Pembayaran Utang
-------------	-------------------------------------

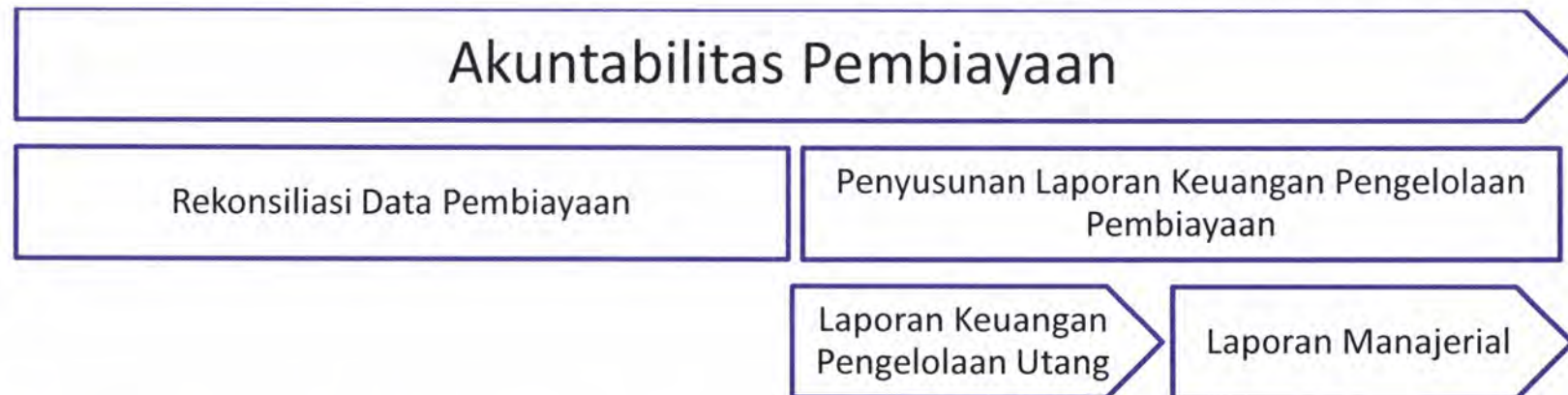
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan setelmen transaksi atas pembayaran utang baik berupa pokok utang, bunga maupun biaya lainnya.
Penanggung jawab	Direktorat EAS

4. SETELMEN TRANSAKSI PENERBITAN UTANG

Nama Proses	Setelmen Transaksi Penerbitan Utang
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan setelmen transaksi atas penerbitan utang baik merekam penerimaan dana maupun melakukan setelmen atas transaksi terkait, misalnya pengakuan premium maupun diskonto.
Penanggung jawab	Direktorat EAS

F. AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN

Proses Akuntabilitas Pembiayaan adalah proses akuntansi dan penyajian data statistik yang dilakukan oleh DJPPR dalam rangka membuat laporan keuangan, laporan manajerial maupun statistik utang. Terdapat 4 Model Bisnis yang berada dalam kategori akuntabilitas utang, yaitu terdiri dari penyusunan laporan dan rekonsiliasi data.



1. REKONSILIASI DATA PEMBIAYAAN

Nama Proses	Rekonsiliasi Data Pembiayaan
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan rekonsiliasi posisi pinjaman dengan lender dan rekonsiliasi data transaksi, baik itu data pembayaran maupun penarikan utang.

Penanggung jawab	Direktorat EAS
------------------	----------------

2. **PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN**

Nama Proses	Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Pembiayaan
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk Bagian Anggaran 999.01 Pengelolaan Pembiayaan.
Penanggung jawab	Direktorat EAS

3. **PENYUSUNAN LAPORAN MANAJERIAL**

Nama Proses	Penyusunan Laporan Manajerial
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan pembuatan laporan publikasi dan statistik utang.
Penanggung jawab	Direktorat EAS

G. **MONITORING DAN EVALUASI**

Proses Monitoring dan Evaluasi merupakan proses monitoring aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan utang, misalnya kondisi pasar SBN. Sedangkan proses evaluasi merupakan proses menganalisis hasil dari evaluasi. Pada umumnya proses monitoring biasanya diikuti oleh proses evaluasi sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi langkah-langkah yang hendaknya dilakukan.



1. MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN

Nama Proses	Monitoring Pemenuhan Pembiayaan
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memantau antara target dan realisasi pembiayaan tahunan yang ditetapkan APBN
Penanggung jawab	Direktorat SPP, SUN dan PS

2. MONITORING REALISASI EFFECTIVE COST

Nama Proses	Monitoring Realisasi Effective Cost
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memantau realisasi atas biaya yang timbul dari jumlah utang yang belum ditarik oleh pihak executing agency (Kementerian/ Lembaga)
Penanggung jawab	Direktorat SPP

3. MONITORING REALISASI DAN PROYEKSI DEBT SERVICE

Nama Proses	Monitoring Realisasi dan Proyeksi Debt Service
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memantau realisasi atas proyeksi debt service pada tahun bersangkutan dan melakukan penyesuaian terkait perbedaan antara realisasi dan proyeksi
Penanggung jawab	Direktorat SPP

4. MONITORING KONDISI PASAR SBN

Nama Proses	Monitoring Kondisi Pasar SBN
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memantau perkembangan kondisi pasar SBN dan menjadi bahan masukan dari proses transaksi utang terkait SBN yang akan dieksekusi.
Penanggung jawab	Direktorat SUN dan PS

5. MONITORING KINERJA DEALER UTAMA

Nama Proses	Monitoring Kinerja Dealer Utama
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memantau kinerja pihak ketiga dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra kerja utama DJPPR khususnya yang terkait dalam penerbitan SBN antara lain Dealer Utama.
Penanggung jawab	Direktorat SUN dan PS

6. MONITORING LOAN EFFECTIVENESS

Nama Proses	Monitoring Loan Effectiveness
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memantau perkembangan pinjaman, antara lain meliputi pemenuhan persyaratan pengefektifan pinjaman.
Penanggung jawab	Direktorat PH

7. MONITORING UNDERLYING ASET SBSN

Nama Proses	Monitoring Underlying Aset SBSN
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memantau aset SBSN yang meliputi pemantauan penyelesaian proyek, kondisi dan status penggunaan/pemanfaatan BMN
Penanggung jawab	Direktorat PS

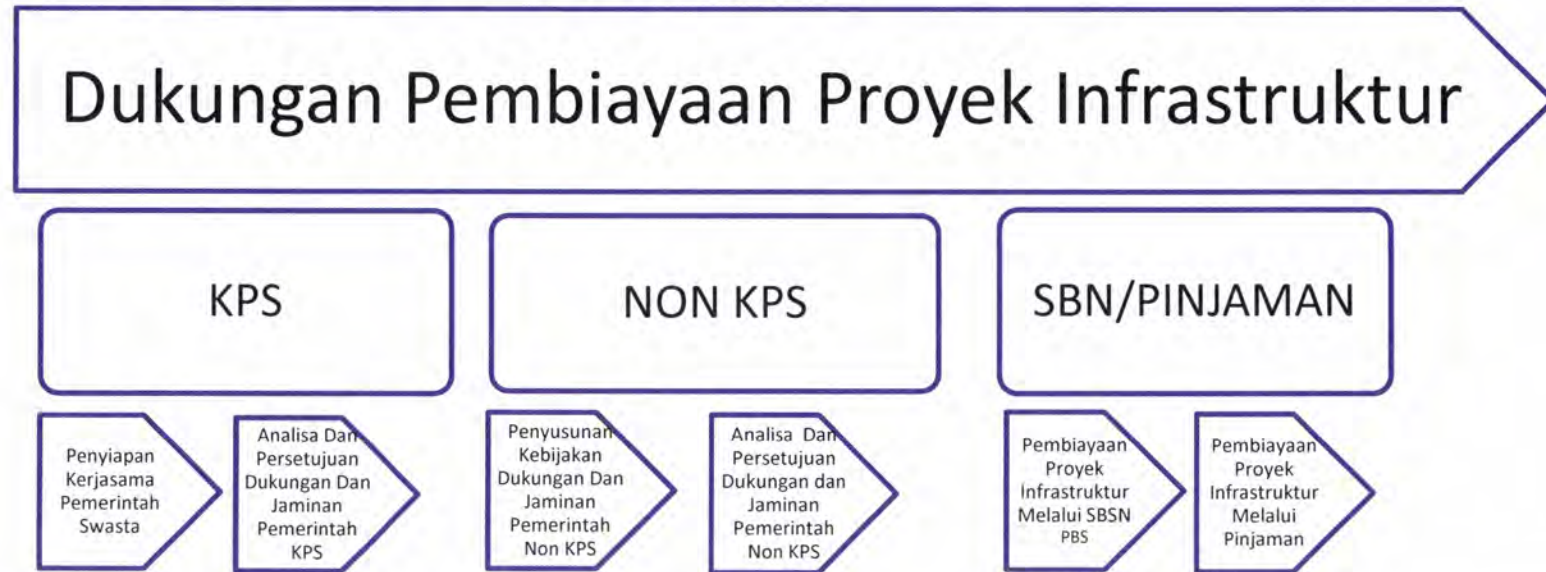
8. MONITORING KINERJA PINJAMAN

Nama Proses	Evaluasi Kinerja Pinjaman
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memantau kinerja pinjaman, membandingkan realisasi dengan target penarikan, apakah pinjaman tersebut behind schedule, normal atau at risk. Metode perhitungan yang digunakan adalah progress variant dimana perhitungan itu membandingkan antara disbursement ratio dan elapsed time ratio.
Penanggung jawab	Direktorat EAS

9. MONITORING DAN EVALUASI MITIGASI RISIKO

Nama Proses	Monitoring dan Evaluasi Mitigasi Risiko
Deskripsi	Merupakan proses pemantauan implementasi terhadap rekomendasi mitigasi risiko dukungan dan jaminan pemerintah
Penanggung jawab	Direktorat PRKN

H. DUKUNGAN PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR



1. PENYIAPAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS)

Nama Proses	Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
Deskripsi	Merupakan proses untuk menyusun kebijakan, peraturan, perencanaan yang digunakan sebagai dasar pemberian dukungan dan jaminan pemerintah atas proyek KPS / badan usaha (non pemerintah) untuk proyek infrastruktur yang diusulkan oleh PJP
Penanggung jawab	Direktorat PDPPI

2. ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH KPS (KPS)

Nama Proses	Analisa dan Persetujuan Dukungan dan Jaminan Pemerintah KPS
Deskripsi	Merupakan proses untuk melakukan analisa dan persetujuan terhadap proyek KPS / badan usaha (non pemerintah) untuk proyek infrastruktur yang diusulkan oleh PJP
Penanggung jawab	Direktorat PDPPI

3. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS (NON KPBU)

Nama Proses	Penyusunan Kebijakan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Non KPS
Deskripsi	Merupakan proses untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum pemberian dukungan dan jaminan pemerintah atas proyek infrastruktur yang dilakukan oleh badan usaha pemerintah untuk membantu kecukupan dana dan mengantisipasi risiko default
Penanggung jawab	Direktorat PRKN

4. ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS (NON KPBU)

Nama Proses	Analisa dan Persetujuan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Non KPS
Deskripsi	Merupakan untuk melakukan analisa dan penerbitan persetujuan jaminan pemerintah pusat atau jaminan kelayakan usaha
Penanggung jawab	Direktorat PRKN

5. PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN PBS

Nama Proses	Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN PBS
Deskripsi	Merupakan proses untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur melalui Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (Project Based Sukuk) atau SBSN PBS
Penanggung jawab	Direktorat PS

6. PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN

Nama Proses	Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Pinjaman
Deskripsi	Merupakan proses untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur melalui pinjaman
Penanggung jawab	Direktorat PH

I. PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA

Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Risiko

Identifikasi Dan
Analisis Risiko

Penyusunan
Rekomendasi Mitigasi
Risiko

1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Nama Proses	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Risiko
Deskripsi	Merupakan penyusunan kebijakan dan peraturan sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan risiko atas proyek yang didukung dan dijamin pemerintah
Penanggung jawab	Direktorat PRKN

2. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

Nama Proses	Identifikasi dan Analisis Risiko
Deskripsi	Merupakan proses identifikasi, penilaian signifikansi dan probabilitas serta simulasi mitigasi risiko terhadap proyek yang didukung dan dijamin oleh pemerintah. Terdiri dari identifikasi dan analisis risiko APBN, BUMN, Lembaga Keuangan, Instrumen Mitigasi, Aset, Kewajiban Negara
Penanggung jawab	Direktorat PRKN

3. PENYUSUNAN REKOMENDASI MITIGASI RISIKO

Nama Proses	Penyusunan Rekomendasi Mitigasi Risiko
Deskripsi	Merupakan proses penyusunan rekomendasi mitigasi risiko yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Rekomendasi mitigasi risiko bisa berupa dalam aspek ekonomi, keuangan, pengelolaan utang, politik, dan tuntutan hukum

Penanggung jawab	Direktorat PRKN
------------------	-----------------

J. PENGELOLAAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Proses Penjaminan Pemerintah merupakan proses bisnis inti non pembiayaan, dimana penjaminan pemerintah ini dapat menjadi kewajiban kontijensi pemerintah karena ada *default* dari pihak yang dijamin oleh pemerintah. Penjaminan pemerintah ini biasanya diberikan kepada proyek-proyek Infrastruktur yang membutuhkan dana swasta, baik asing maupun domestik.



1. IDENTIFIKASI KEWAJIBAN KONTIJENSI

Nama Proses	Identifikasi Kewajiban Kontijensi
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan identifikasi terhadap adanya potensi kewajiban kontijensi Pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN
Penanggung jawab	Direktorat SPP

2. MENYUSUN REKOMENDASI PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH

Nama Proses	Penyusunan Rekomendasi Pemberian Jaminan Pemerintah
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menyusun rekomendasi terhadap proyek-proyek yang akan dijamin oleh Pemerintah.
Penanggung jawab	Direktorat SPP

3. MONITORING PENJAMINAN PEMERINTAH

Nama Proses	Monitoring Penjaminan Pemerintah
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan pemantauan terhadap proyek yang dijaminan Pemerintah atas risiko <i>default</i>
Penanggung jawab	Direktorat SPP

4. PENYUSUNAN ALOKASI PENJAMINAN PEMERINTAH KE APBN

Nama Proses	Penyusunan Alokasi Penjaminan Pemerintah ke APBN
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk mengalokasikan Penjaminan Pemerintah ke dalam APBN
Penanggung jawab	Direktorat SPP

5. PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN

Nama Proses	Pembayaran Klaim Jaminan
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk membayar klaim atas default pembayaran yang terjadi
Penanggung jawab	Direktorat SPP

6. PENGELOLAAN CADANGAN DANA KLAIM

Nama Proses	Pengelolaan Cadangan Dana Klaim
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk mengelola dana klaim yang telah dicadangkan oleh Pemerintah, namun tidak digunakan pada tahun anggaran tersebut.
Penanggung jawab	Direktorat SPP

K. PENGELOLAAN HIBAH

Proses Pengelolaan Hibah merupakan proses pengelolaan hibah baik itu hibah terencana maupun hibah langsung. Hibah terencana adalah mekanisme pemberian hibah melalui APBN, sedangkan hibah langsung adalah mekanisme pemberian hibah langsung kepada penerima hibah dan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan terkait pendapatan dan belanjanya.

Pengelolaan Hibah

Penerbitan Nomor
Register Hibah

Perekaman Data
Hibah

Penyelesaian
Transaksi
Pendapatan Hibah

Rekonsiliasi Data
Hibah

Penyusunan
Laporan Keuangan
Pengelolaan Hibah

Monitoring Hibah

1. PENERBITAN NOMOR REGISTER HIBAH

Nama Proses	Penerbitan Nomor Register Hibah
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan registrasi terhadap hibah langsung yang dilaporkan kepada DJPPR
Penanggung jawab	Direktorat EAS

2. PEREKAMAN DATA HIBAH

Nama Proses	Perekaman Data Hibah
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk merekam data hibah umum beserta data terms and conditions, baik ketika hibah itu direkam pertama kali maupun ketika ada amandemen hibah
Penanggung jawab	Direktorat EAS

3. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENDAPATAN HIBAH

Nama Proses	Penyelesaian Transaksi Pendapatan Hibah
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menyelesaikan dan merekam transaksi pendapatan hibah.
Penanggung jawab	Direktorat EAS

4. REKONSILIASI DATA HIBAH

Nama Proses	Rekonsiliasi Data Hibah
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan pencocokan antara data yang dimiliki DJPPR dengan Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola kas negara
Penanggung jawab	Direktorat EAS

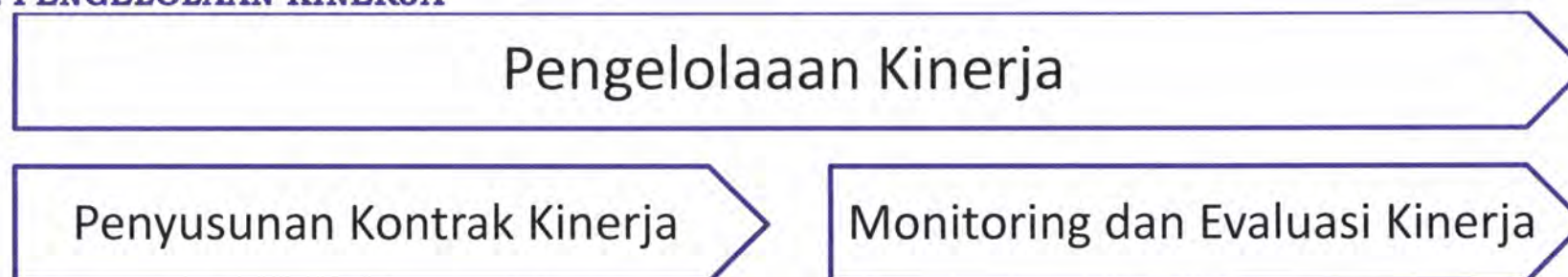
5. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HIBAH

Nama Proses	Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Hibah
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menyusun laporan keuangan dari mulai dokumen sumber diterima, posting jurnal, posting BB, hingga menyusun laporan keuangan
Penanggung jawab	Direktorat EAS

6. MONITORING HIBAH

Nama Proses	Monitoring Hibah
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk melakukan pemantauan atas hibah yang telah dilaporkan dan melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan terkait belanja dengan dana hibah
Penanggung jawab	Direktorat EAS

L. PENGELOLAAN KINERJA



Pada Proses Pengelolaan Kinerja terdapat 2 macam proses bisnis manajemen level 1, yaitu Penyusunan Kontrak Kinerja dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Berikut merupakan detail dari kelompok proses manajemen tersebut:

1. PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA

Nama Proses	Penyusunan Kontrak Kinerja
Deskripsi	Merupakan proses penyusunan kontrak kinerja untuk semua level pegawai di dalam organisasi, dimulai dari Eselon I hingga ke level pelaksana. Penyusunan kontrak Kinerja meliputi penyusunan peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), target capaian IKU (trajectory), manual IKU, matriks cascading IKU, inisiatif strategis, matriks tindak lanjut dan kontrak kinerja itu sendiri untuk periode satu tahun.

Penanggung jawab	Bagian Kepatuhan Internal
------------------	---------------------------

2. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Nama Proses	Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Deskripsi	Merupakan proses untuk melakukan monitoring dan evaluasi progress capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja yang telah dibuat. Output dari proses ini adalah Laporan Capaian Kinerja yang berisi Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Nilai Kinerja Unit (NKU)
Penanggung jawab	Bagian Kepatuhan Internal

M. PENGELOLAAN KEPATUHAN INTERNAL



Pada Proses Pengelolaan Kepatuhan Internal terdiri dari 3 macam model proses bisnis manajemen, yaitu Pemantauan Pengendalian Internal, Klarifikasi dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, dan Tindak Lanjut Pengaduan. Berikut merupakan detail dari kelompok proses bisnis manajemen tersebut:

1. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Nama Proses	Pemantauan Pengendalian Internal
Deskripsi	Merupakan proses pemantauan pengendalian internal di lingkungan DJPPR yang dilakukukan secara reguler maupun irreguler. Pemantauan reguler dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu, sedangkan pemantauan yang tidak terjadwal dilakukan dengan cara pemilihan tema spesifik dalam pengendalian internal. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan antara lain pemilihan kegiatan, penyusunan dan uji coba perangkat, implementasi dan penyusunan laporan
Penanggung jawab	Bagian Kepatuhan Internal

2. KLARIFIKASI DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN

Nama Proses	Klarifikasi dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
Deskripsi	Merupakan proses pemberian klarifikasi ataupun tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak aparat pengawasan fungsional. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan selanjutnya akan dianalisa dan diberikan jawaban berupa susunan rekomendasi dan klarifikasi. Bahan masukan untuk jawaban didapat dari unit teknis di lingkungan DJPPR.
Penanggung jawab	Bagian Kepatuhan Internal

3. TINDAK LANJUT PENGADUAN

Nama Proses	Tindak Lanjut Pengaduan
Deskripsi	Merupakan proses untuk memantau layanan pengaduan maupun tindak lanjut atas pengaduan yang diajukan pihak ketiga. Media yang digunakan saat ini untuk mengajukan pengaduan adalah email, melalui aplikasi WISE (Whistle Blowing System) dan surat resmi ke DJPPR
Penanggung jawab	Bagian Kepatuhan Internal

N. MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL



Pada Proses Manajemen Risiko Operasional terdiri dari 2 macam model proses bisnis manajemen, yaitu Penyusunan Profil Risiko dan Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Berikut merupakan detail dari kelompok proses bisnis manajemen tersebut:

1. PENYUSUNAN PROFIL RISIKO

Nama Proses	Penyusunan Profil Risiko
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menyusun profil risiko operasional beserta langkah-langkah mitigasi risiko yang biasanya dilakukan di awal tahun.
Penanggung jawab	Bagian Kepatuhan Internal

2. MONITORING PELAKSANAAN MITIGASI RISIKO

Nama Proses	Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko yang telah didefinisikan di awal tahun termasuk melakukan validasi atas mitigasi yang telah dilakukan. Hasil evaluasi merupakan bahan masukan atas profil risiko yang telah disusun.
Penanggung jawab	Bagian Kepatuhan Internal

O. KEORGANISASIAN DAN KETATALAKSANAAN



Pada Proses Keorganisasian dan Ketatalaksanaan terdiri dari 4 macam model proses bisnis manajemen, yaitu Penataan Organisasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Organisasi, Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Organisasi dan Penyusunan SOP. Berikut merupakan detail dari kelompok proses bisnis manajemen tersebut:

1. **PENATAAN ORGANISASI**

Nama Proses	Penataan Organisasi
Deskripsi	Merupakan proses untuk menyusun organisasi yang diawali dengan penyusunan naskah akademis, menyusun dokumen penataan dan dilanjutkan dengan penyusunan dan penelaahan tugas dan fungsi serta evaluasi uraian jabatan setiap formasi jabatan.
Penanggung jawab	Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi

2. **PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ORGANISASI**

Nama Proses	Penyusunan Dokumen Perencanaan Organisasi
Deskripsi	Proses ini merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi antara lain meliputi penyusunan, bahan masukan dokumen kebijakan strategis Kementerian Keuangan (KSKK) yang memiliki periode 10 tahun, rencana strategis (Renstra) yang memiliki periode 5 tahun dan rencana kerja tahunan (RKT) atau Renja yang memiliki periode 1 tahun.
Penanggung jawab	Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi

3. PENYUSUNAN DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI

Nama Proses	Penyusunan Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Organisasi
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk menyusun dokumen monitoring dan evaluasi dari organisasi, baik itu berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maupun Analisis Beban Kerja
Penanggung jawab	Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi

4. PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Nama Proses	Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)
Deskripsi	Proses ini merupakan proses penyusunan dan penetapan <i>standar operating procedure</i> di lingkungan DJPPR. Setiap SOP yang disusun membutuhkan review dari Biro Kementerian Keuangan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi. Tujuan penyusunan SOP adalah untuk mendukung sistem dan tata kelola organisasi untuk mencapai penataan organisasi yang efektif.
Penanggung jawab	Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi

P. PENGANGGARAN DIPA BUN



Q. PERATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Peraturan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Penyusunan Draft Peraturan

Reviu Legal Drafting

Pada Proses Peraturan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terdiri dari 2 macam model proses bisnis pendukung bisnis inti, yaitu Penyusunan Draft Peraturan dan Reviu Legal Drafting. Berikut merupakan detail dari kelompok proses bisnis pendukung bisnis inti tersebut:

1. **PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN**

Nama Proses	Penyusunan Draft Peraturan
Deskripsi	Proses ini merupakan proses penyusunan draft peraturan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis di DJPPR. Pada umumnya draft peraturan disusun oleh unit teknis dan mendapatkan masukan dari Biro Hukum dan Bagian Kepatuhan Internal untuk aspek legalitasnya. Selanjutnya draft peraturan ini akan dikirimkan kepada Biro Hukum untuk mendapatkan pengesahan.
Penanggung jawab	Direktorat Pemilik Peraturan

2. **REVIU LEGAL DRAFTING**

Nama Proses	Reviu Legal Drafting
Deskripsi	Proses penelaahan rancangan peraturan/keputusan tingkat dirjen maupun tingkat kementerian. Kegiatan penelaahan menyesuaikan dengan usulan reviu legal drafting/ rancangan keputusan unit konseptor
Penanggung jawab	Bagian Kepatuhan Internal

R. TEKNOLOGI INFORMASI



Pada Proses Teknologi Informasi terdiri dari 3 macam model proses bisnis pendukung bisnis inti, yaitu Perancangan Sistem Teknologi Informasi, Pengembangan dan Implementasi Sistem dan Operasional Layanan Teknologi Informasi. Berikut merupakan detail dari kelompok proses bisnis pendukung bisnis inti tersebut:

1. PERANCANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Nama Proses	Perancangan Sistem Teknologi Informasi
Deskripsi	Proses tersebut adalah proses yang dimulai dari analisis dan perancangan sistem serta monitoring dan evaluasi proyek TIK. Selain itu juga bertanggung jawab atas penyusunan dokumen standar tata kelola berupa dokumen strategi maupun petunjuk pelaksanaan proses teknologi informasi.
Penanggung jawab	Bagian Teknologi Informasi

2. PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Nama Proses	Pengembangan dan Implementasi Sistem
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk mengembangkan sistem informasi, sekaligus merencanakan dan mengawal implementasi dari sistem informasi.
Penanggung jawab	Bagian Teknologi Informasi

3. OPERASIONAL DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nama Proses	Operasional dan Layanan Teknologi Informasi
Deskripsi	Proses ini merupakan proses untuk mengelola layanan teknologi informasi dan dukungan kegiatan operasional teknologi informasi.
Penanggung jawab	Bagian Teknologi Informasi

S. KEPEGAWAIAN



Proses Kepegawaian terdiri dari 2 macam model proses bisnis pendukung administratif yaitu Pengembangan Pegawai dan Administrasi Kepegawaian. Berikut merupakan detail dari kelompok proses bisnis pendukung administratif tersebut:

1. PENGEMBANGAN PEGAWAI

Nama Proses	Pengembangan Pegawai
Deskripsi	Proses yang dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan potensi dan kompetensi pegawai dengan pelaksanaan diklat serta mengatur dan melaksanakan pola mutasi.
Penanggung jawab	Bagian Organisasi dan Kepegawaian

2. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Nama Proses	Administrasi Kepegawaian
Deskripsi	Proses ini bertujuan untuk mengelola data administratif pegawai termasuk didalamnya data penghargaan dan hukuman disiplin pegawai. Manajemen administratif elektronik menggunakan Aplikasi SIMPEG (SIstem InforMasi KePEGawaian). Data administratif pegawai yang dikelola dengan baik kemudian dapat digunakan sebagai salah satu bahan penyiapan kebutuhan formasi pegawai.
Penanggung jawab	Bagian Organisasi dan Kepegawaian

T. PENGELOLAAN KEUANGAN



Proses Pengelolaan Keuangan terdiri dari 3 macam model proses bisnis pendukung administratif yaitu Penyusunan Anggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi dan Pelaporan. Berikut merupakan detail dari kelompok proses bisnis pendukung administratif tersebut:

1. PENYUSUNAN ANGGARAN

Nama Proses	Penyusunan Anggaran
Deskripsi	Proses yang bertujuan untuk menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran DJPPR. Diantaranya terdapat proses penyusunan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), DIPA(Daftar Isian Pelaksanaan Anggggaran), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan Revisi Anggaran.
Penanggung jawab	Bagian Keuangan

2. PERBENDAHARAAN

Nama Proses	Perbendaharaan
Deskripsi	Proses yang bertujuan untuk menyelesaikan urusan perbendaharaan dan penerbitan dokumen pembayaran diantaranya SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja), SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan lainnya
Penanggung jawab	Bagian Keuangan

3. AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Nama Proses	Akuntansi dan Pelaporan
Deskripsi	Proses yang bertujuan untuk melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan seperti laporan belanja modal, laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan laporan lainnya serta melakukan rekonsiliasi data dengan pihak lain
Penanggung jawab	Bagian Keuangan

U. ADMINISTRASI UMUM



Proses Administrasi Umum terdiri dari 4 macam model proses bisnis pendukung administratif yaitu Pengelolaan Arsip, Pengelolaan BMN, Pengelolaan Gaji dan Kesejahteraan dan Kepustakaan. Berikut merupakan detail dari kelompok proses bisnis pendukung administratif tersebut:

1. PENGELOLAAN ARSIP

Nama Proses	Pengelolaan Arsip
Deskripsi	Proses yang bertujuan untuk mengelola dokumen arsip termasuk pemusnahan arsip yang tidak lagi digunakan. Aplikasi EFS (Electronic Filling System) digunakan untuk membantu pengelolaan digitalisasi pengarsipan dokumen.
Penanggung jawab	Bagian Umum

2. PENGELOLAAN BMN

Nama Proses	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Deskripsi	Proses pengelolaan barang milik negara dimulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, penghapusan serta pelaksanaan akuntansi BMN. Aplikasi SIMAK BMN digunakan untuk pelaksanaan akuntansi BMN
Penanggung jawab	Bagian Umum

3. PENGELOLAAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN

Nama Proses	Pengelolaan Gaji dan Kesejahteraan
Deskripsi	Proses ini merupakan proses yang meliputi fungsi berupa penyusunan Pagu anggaran belanja pegawai, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, serta pengelolaan dokumen pembayaran terkait belanja pegawai. Selain itu, juga mengelola hal lain berkaitan dengan kesejahteraan pegawai seperti uang makan dan lembur
Penanggung jawab	Bagian Umum

4. KEPUSTAKAAN

Nama Proses	Kepustakaan
Deskripsi	Proses yang bertujuan untuk mengelola perpustakaan yang terdiri dari pengadaan materi perpustakaan, penyusunan katalog dan operasional perpustakaan
Penanggung jawab	Bagian Umum

V. KESEKRETARIATAN



Proses Keseekretariatan terdiri dari 2 macam model proses bisnis pendukung administratif yaitu Pengelolaan Keseekretariatan dan Protokoler. Berikut merupakan detail dari kelompok proses bisnis pendukung administratif tersebut:

1. PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

Nama Proses	Pengelolaan Keseekretariatan
Deskripsi	Proses yang melakukan pengelolaan hal yang berkaitan dengan fungsi sekretaris seperti penatausahaan surat, penyusunan dan penyiapan dukungan rapat, administrasi absensi pegawai dan lainnya
Penanggung jawab	Bagian Umum

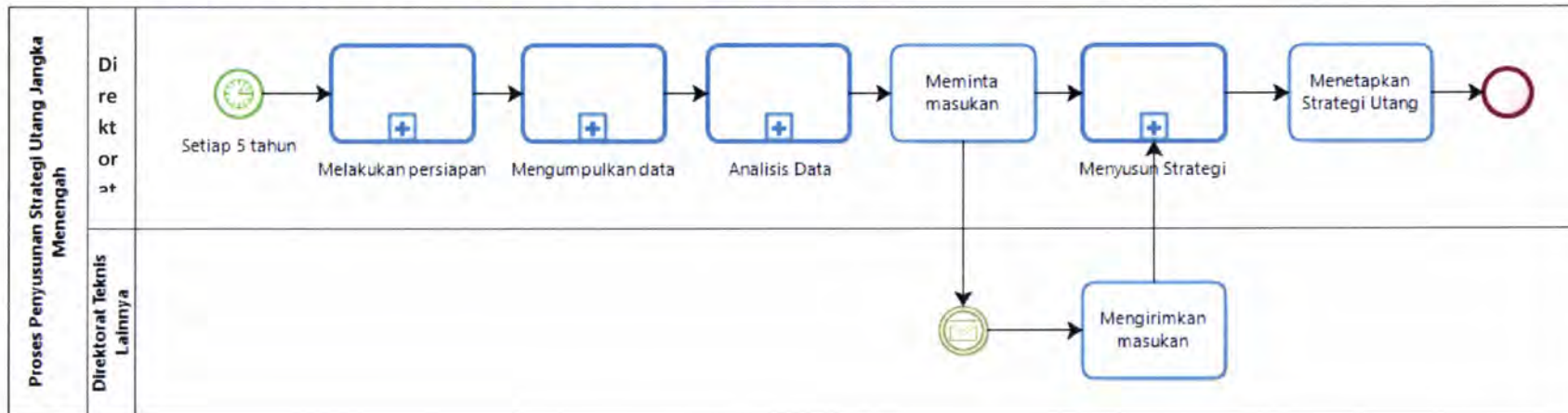
2. PROTOKOLER

Nama Proses	Protokoler
Deskripsi	Proses yang bertujuan menyediakan fasilitas layanan terhadap pimpinan dan tamu penting di lingkungan DJPPR
Penanggung jawab	Bagian Umum

BAB IV PROSES BISNIS LEVEL 2

A. PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN

A.1 PENYUSUNAN STRATEGI UTANG JANGKA MENENGAH

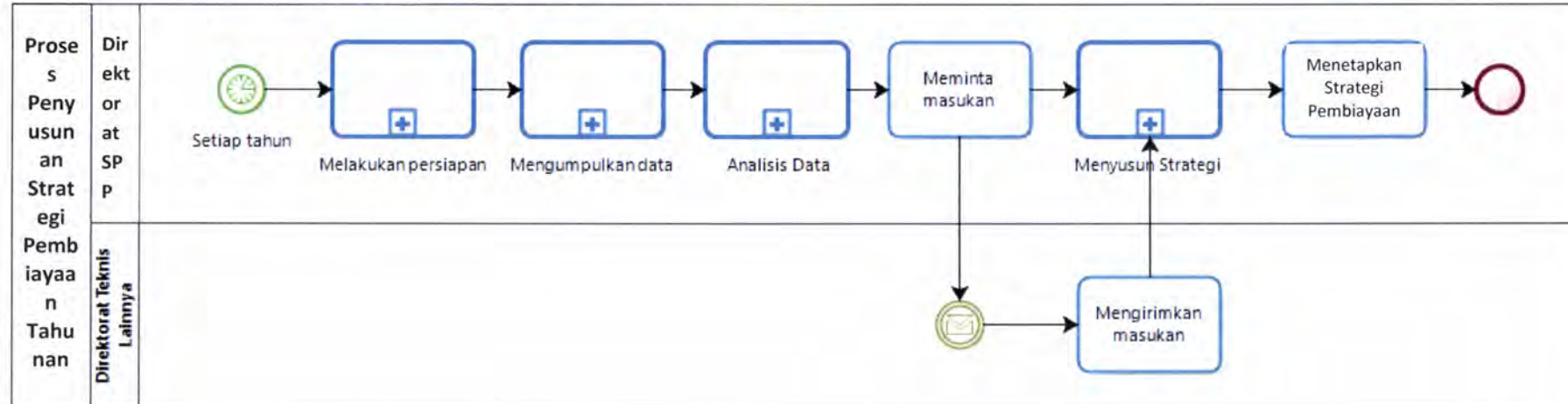


Proses penyusunan strategi utang jangka menengah merupakan proses yang melibatkan seluruh Direktorat Teknis di DJPPR dengan Direktorat SPP sebagai koordinator. Output dari proses ini merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan utang dalam durasi waktu yang ditentukan, dimana biasanya 5 tahun. Proses ini memiliki 6 kelompok proses yaitu:

1. Proses Melakukan Persiapan;
2. Proses Mengumpulkan Data;
3. Proses Analisis Data;
4. Proses Meminta Masukan;
5. Proses Mengirimkan Masukan;
6. Proses Menetapkan Strategi Utang.

Terdapat satu proses yang melibatkan Direktorat teknis pengelola utang di DJPPR, yaitu proses meminta bahan masukan. Proses ini merupakan jembatan bagi proses analisis dan proses menyusun strategi.

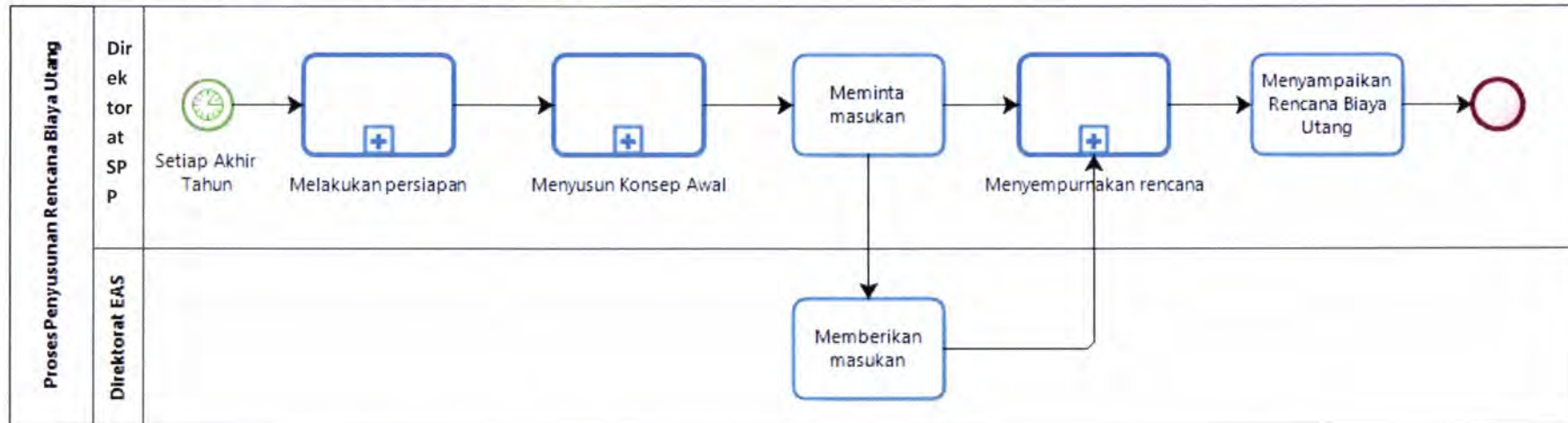
A.2 PENYUSUNAN STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN



Proses penyusunan strategi pembiayaan jangka tahunan memiliki karakteristik yang sama dengan proses penyusunan strategi utang jangka menengah. Proses ini melibatkan seluruh Direktorat Teknis di lingkungan DJPPR. Direktorat SPP sebagai koordinator. Output dari proses ini merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan pembiayaan dalam durasi satu tahun. Proses ini memiliki 7 kelompok proses yaitu:

1. Proses Melakukan Persiapan;
2. Proses Mengumpulkan Data;
3. Proses Analisis Data;
4. Proses Meminta Masukan;
5. Proses Mengirimkan Masukan;
6. Proses Menyusun Strategi;
7. Proses Menetapkan Strategi Utang.

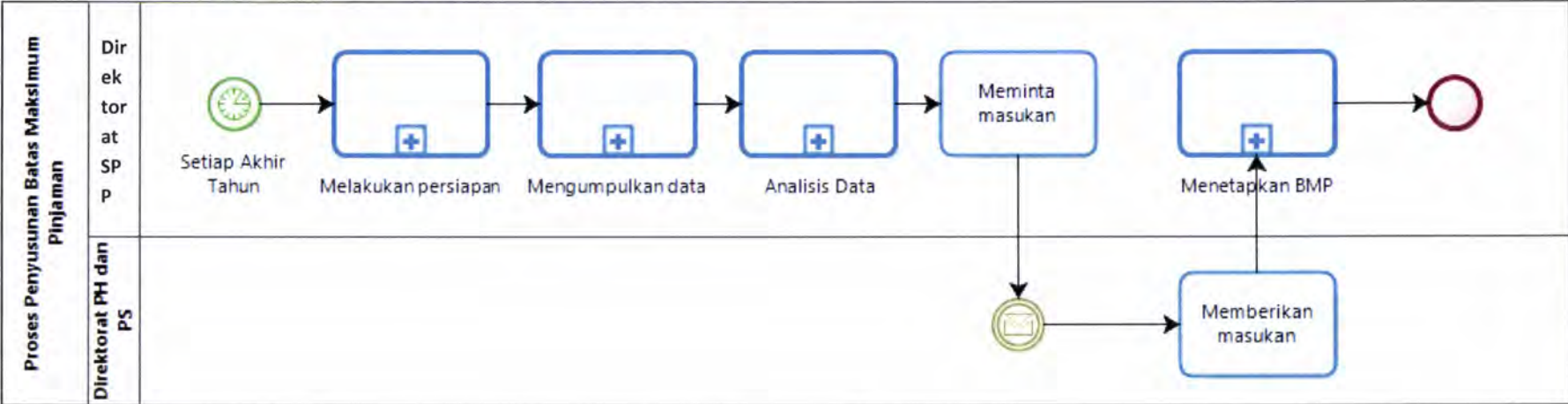
A.3 PENYUSUNAN RENCANA BIAYA UTANG



Proses penyusunan rencana biaya utang merupakan proses yang durasinya tahunan. Proses ini merupakan bahan masukan bagi penerbitan DIPA Pembiayaan. Proses ini melibatkan Direktorat SPP dan EAS, dimana EAS menyampaikan hasil proyeksi biaya utang yang akan timbul di tahun berikutnya. Output dari proses ini merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan utang dalam durasi tahunan. Proses ini memiliki 6 kelompok proses yaitu:

1. Proses Melakukan Persiapan;
2. Proses Menyusun Konsep Awal;
3. Proses Meminta Masukan;
4. Proses Memberikan Masukan;
5. Menyempurnakan Rencana;
6. Menyampaikan Rencana Biaya Utang.

A.4 PENYUSUNAN BATAS MAKSIMUM PINJAMAN



Proses Penyusunan Batas Maksimum Pinjaman merupakan proses untuk menentukan batas maksimum untuk pinjaman baik itu pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, dokumen ini juga memuat batasan untuk project financing SBSN. Terdapat 6 kelompok proses dalam model bisnis ini yaitu:

1. Proses Melakukan Persiapan;
2. Proses Mengumpulkan Data;
3. Proses Analisis Data;
4. Proses Meminta Masukan;
5. Proses Memberikan Masukan;
6. Proses Menetapkan BMP.

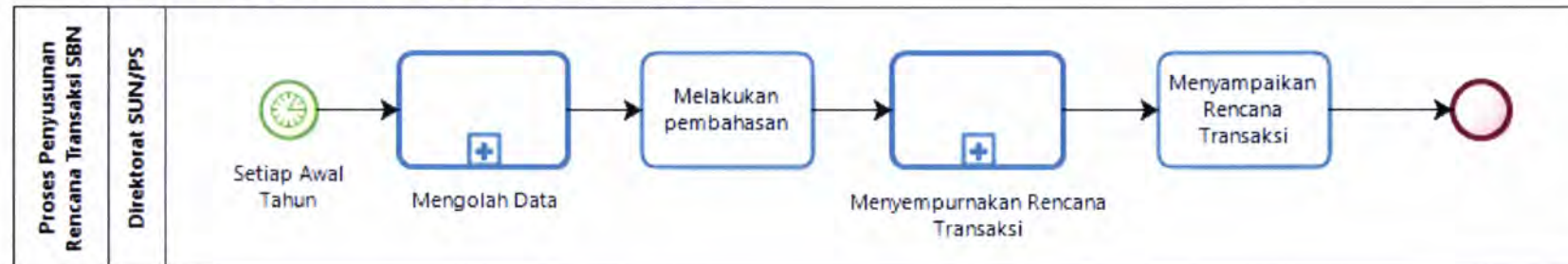
A.5 PENYIAPAN USULAN KEGIATAN DAN PROYEKSI PENARIKAN PINJAMAN



Proses Penyusunan Usulan Kegiatan dan Proyeksi Penarikan Pinjaman merupakan proses yang dilakukan Direktorat PH setiap awal tahun setelah daftar rencana pinjaman diterima dari Bappenas. Terdapat 3 kelompok proses yaitu:

1. Proses Analisis;
2. Proses Melakukan Pembahasan;
3. Proses Melakukan Penetapan.

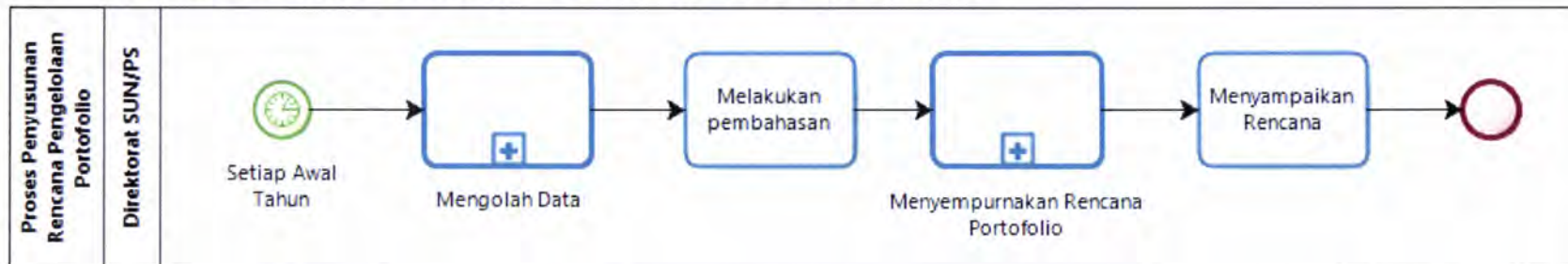
A.6 PENYUSUNAN RENCANA TRANSAKSI SBN



Proses Penyusunan Rencana Transaksi SBN merupakan lanjutan dari penyusunan strategi pembiayaan tahunan, di mana rencana ini memuat waktu dan instrumen yang akan diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan defisit dan mengelola portofolio utang. Proses ini dilakukan oleh Direktorat SUN dan PS yang outputnya berupa kalender penerbitan SBN tahunan. Terdapat 4 kelompok proses dalam penyusunan transaksi SBN, yaitu:

1. Proses Mengolah Data;
2. Proses Melakukan Pembahasan;
3. Proses Menyempurnakan Rencana Transaksi;
4. Proses Menyampaikan Rencana Transaksi.

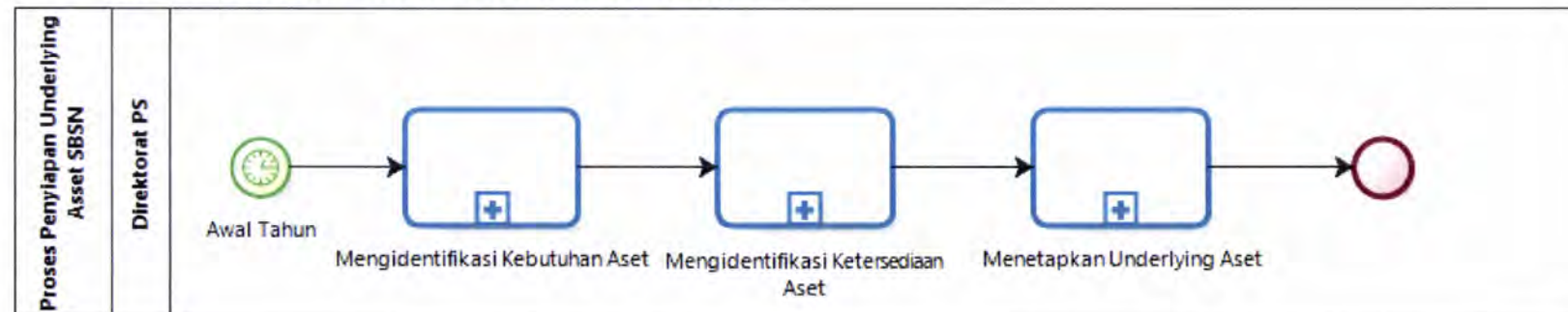
A.7 PERENCANAAN TRANSAKSI PENGELOLAAN PORTOFOLIO



Perencanaan transaksi pengelolaan portofolio juga merupakan salah satu proses lanjutan dari strategi utang tahunan. Proses ini memuat rencana transaksi terkait pengelolaan portofolio baik itu berupa penerbitan, *switching* maupun *buy back*. Proses ini terdiri dari 4 kelompok proses yaitu:

1. Proses Mengolah Data;
2. Proses Melakukan Pembahasan;
3. Proses Menyempurnakan Rencana Portofolio;
4. Proses Menyampaikan Rencana.

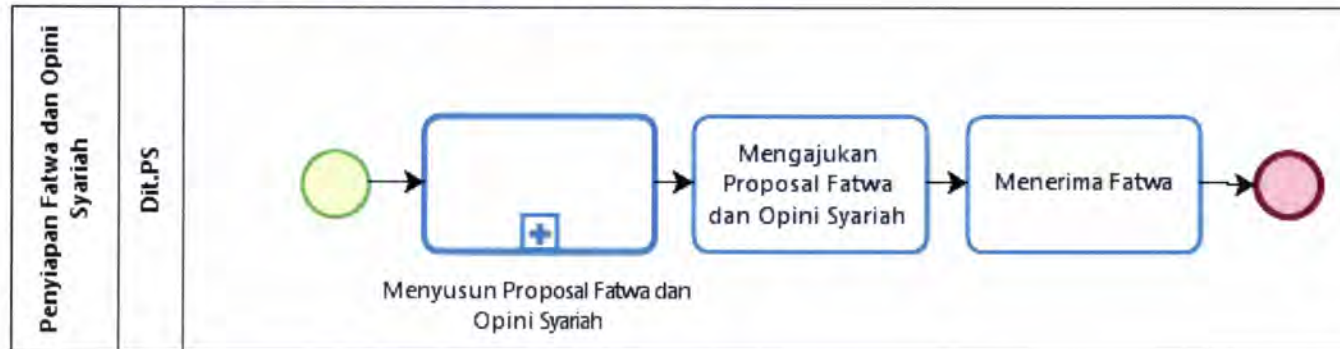
A.8 PENYIAPAN UNDERLYING ASSET SBSN



Proses Penyiapan *Underlying Asset* SBSN merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam rangka mendukung proses penerbitan SBSN, dimana setiap SBSN yang diterbitkan memiliki *underlying asset* sebagai jaminan SBSN. Terdapat 3 kelompok proses yaitu:

1. Proses Mengidentifikasi Kebutuhan Aset;
2. Proses Mengidentifikasi Ketersediaan Aset;
3. Proses Menetapkan *Underlying Asset*.

A.9 PENYIAPAN FATWA DAN OPINI SYARIAH

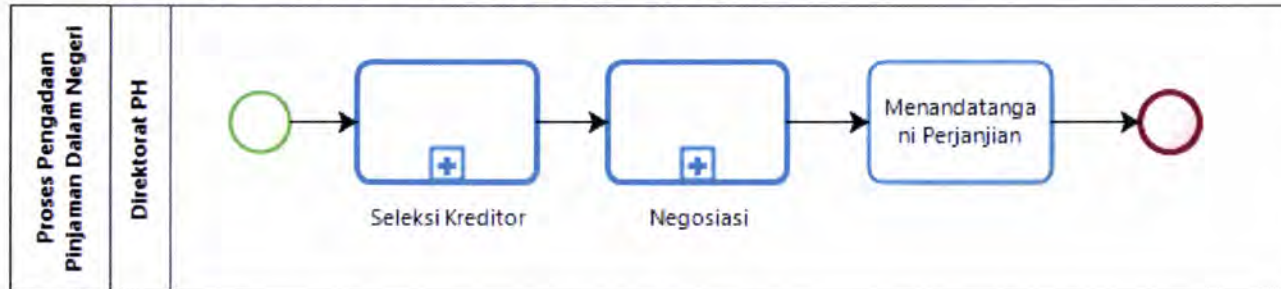


Proses penyiapan fatwa dan opini syariah adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan fatwa dan opini syariah terkait instrumen SBSN dan pengelolaan SBSN. Terdapat 3 kelompok proses terkait proses ini yaitu:

1. Proses Menyusun Proposal Fatwa dan Opini Syariah;
2. Proses Mengajukan Proposal Fatwa dan Opini Syariah;
3. Proses Menerima Fatwa.

B. PENGADAAN PEMBIAYAAN MELALUI SBN DAN PINJAMAN

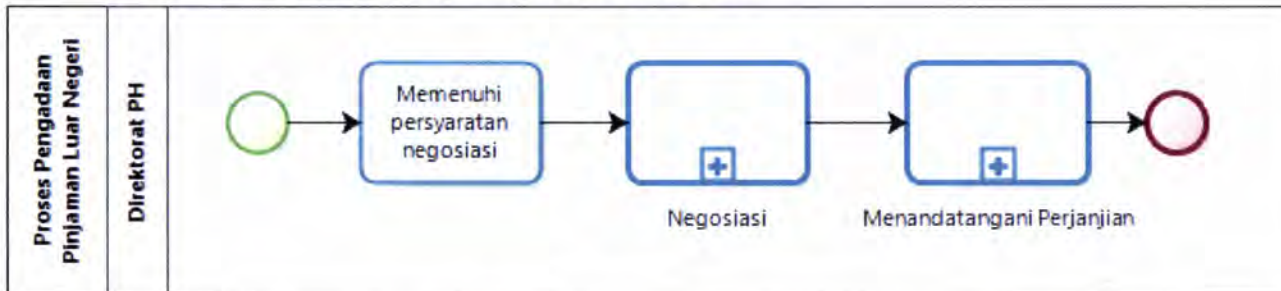
B.1 PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEGERI



Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri merupakan salah satu transaksi dalam mengadakan utang dengan mengambil sumber pembiayaan DN. Terdapat 3 kelompok proses dalam proses ini yaitu:

1. Proses Seleksi Kreditor;
2. Proses Negosiasi;
3. Proses Menandatangani Perjanjian.

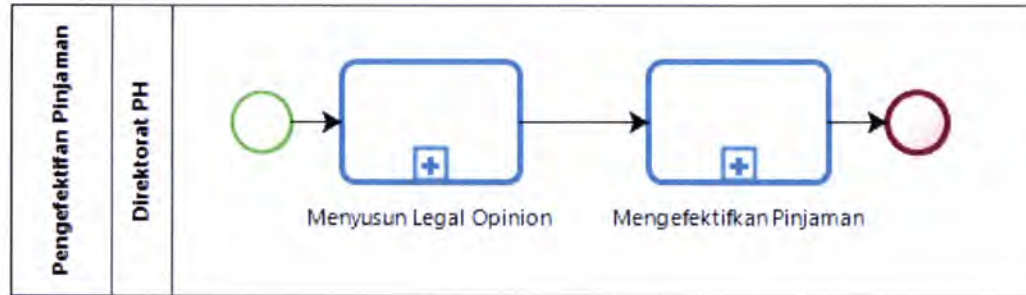
B.2 PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI



Pengadaan Pinjaman Luar Negeri merupakan salah satu transaksi dalam mengadakan utang dengan mengambil sumber pembiayaan LN, baik itu dari institusi, negara maupun kreditor swasta. Khusus untuk pengadaan pinjaman LN dari sumber dana kreditor swasta asing, maka ada proses seleksi kreditor, namun sisanya tidak melalui seleksi kreditor karena sudah ditetapkan sebelumnya di proses penyusunan Blue Book di Bappenas. Terdapat 3 kelompok proses yaitu:

1. Proses Memenuhi Persyaratan Negosiasi;
2. Proses Negosiasi;
3. Proses Menandatangani Perjanjian.

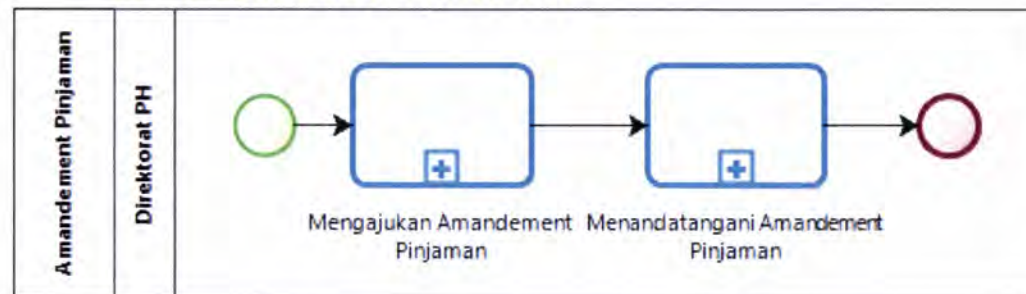
B.3 PENGFEKTIFAN PINJAMAN



Pengefektifan Pinjaman merupakan proses lanjutan dari proses pengadaan pinjaman, baik DN dan LN. Pengefektifan dapat dilakukan jika persyaratan untuk effectiveness pinjaman telah dipenuhi. Kelompok proses terkait proses ini adalah:

1. Proses Menyusun Legal Opinion;
2. Proses Mengefektifkan Pinjaman.

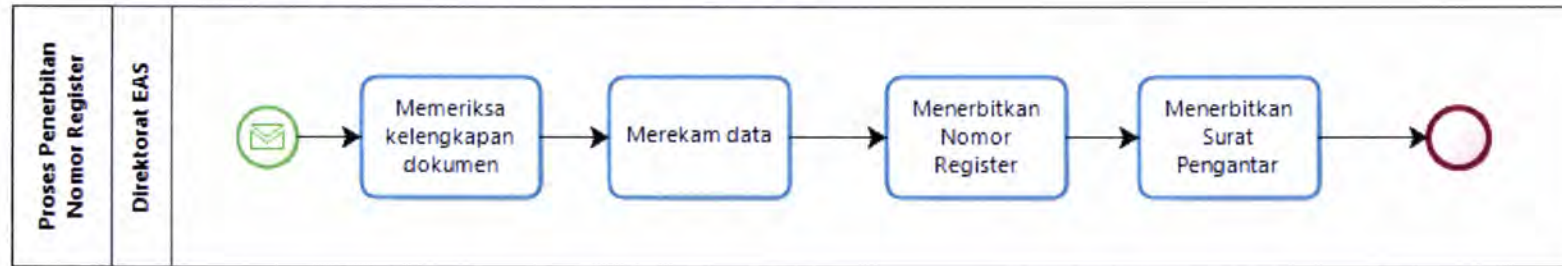
B.4 AMANDEMENT PINJAMAN



Proses Amandement pinjaman merupakan proses untuk merubah sebagian ataupun keseluruhan dari Perjanjian Pinjaman yang telah disepakati. Untuk itu kadang diperlukan negosiasi ulang terkait penyusunan terms and conditions pinjaman. Terdapat 2 kelompok proses terkait proses ini yaitu:

1. Proses Mengajukan Amandement Pinjaman;
2. Proses Menandatangani Amandement Pinjaman.

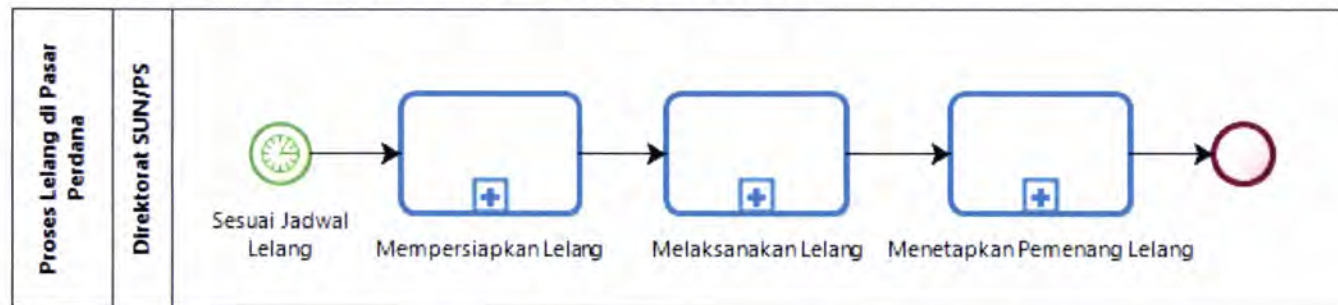
B.5 PEMBERIAN NOMOR REGISTER PINJAMAN



Proses Pemberian Nomor Register merupakan dapat menjadi salah satu bagian dari Proses Pengefektifan Pinjaman, maupun berdiri sendiri, tergantung dari kebutuhan penerima pinjaman. Terdapat 4 proses dalam proses pemberian nomor register yaitu:

1. Proses Memeriksa Kelengkapan Dokumen;
2. Proses Merekam Data;
3. Proses Menerbitkan Nomor Register;
4. Proses Menerbitkan Surat Pengantar.

B.6 TRANSAKSI LEANG DI PASAR PERDANA

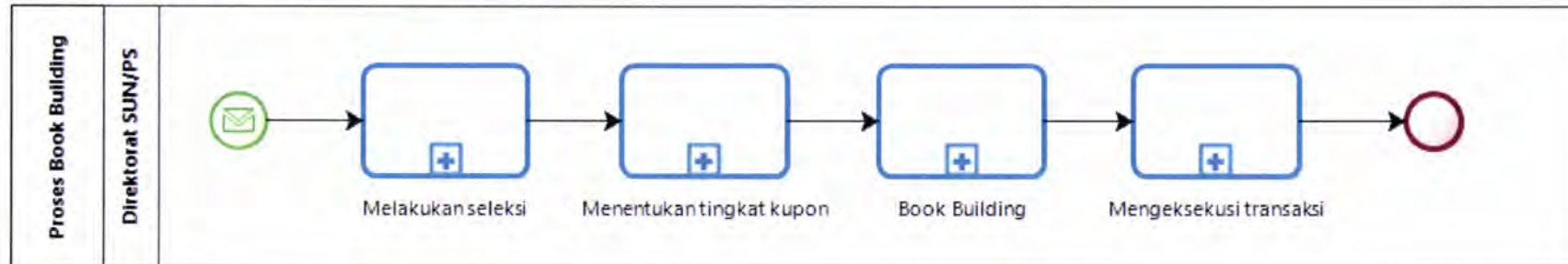


Proses Transaksi Lelang di Pasar Perdana merupakan salah satu jenis transaksi dalam penerbitan SBN. Transaksi ini dilakukan berdasarkan kalender penerbitan tahunan yang telah disusun ataupun di luar kalender penerbitan.

Terdapat 3 kelompok proses yang melibatkan 2 Direktorat, yaitu Direktorat SUN/PS sebaga eksekutor transaksi dan Direktorat EAS sebagai penyelesai transaksi. Kelompok proses tersebut adalah:

1. Proses Mempersiapkan Lelang;
2. Proses Melaksanakan Lelang;
3. Proses Menetapkan Pemenang Lelang.

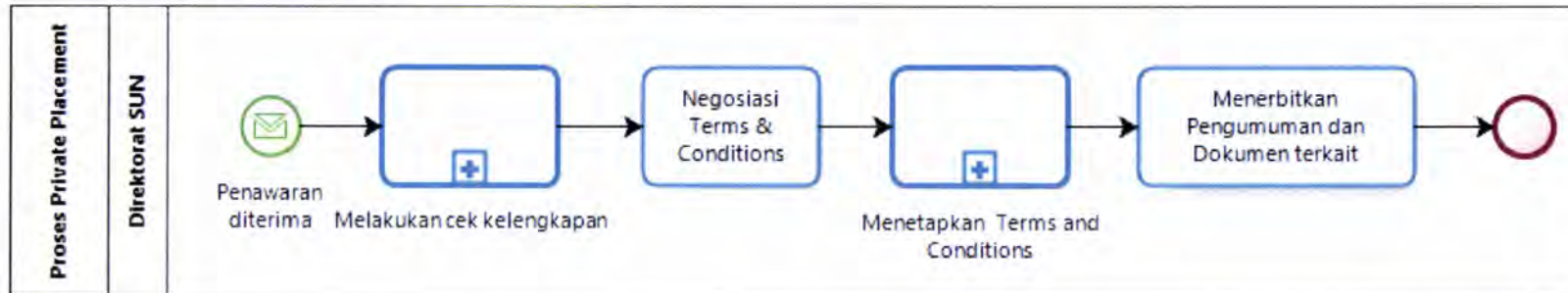
B.7 TRANSAKSI BOOK BUILDING



Proses transaksi *book building* merupakan salah satu jenis transaksi dalam rangka mengadakan atau menerbitkan SBN. Jenis transaksi ini biasanya digunakan pada Penerbitan SBN dalam denominasi valuta asing dan Penerbitan SBN untuk individu (ritel). Terdapat 4 kelompok proses pada proses ini, yaitu:

1. Proses Melakukan Seleksi
2. Proses Menentukan Tingkat Kupon
3. Proses *Book Building*
4. Proses Mengeksekusi Transaksi

B.8 TRANSAKSI *PRIVATE PLACEMENT*



Proses transaksi *private placement* merupakan salah satu jenis transaksi dalam rangka mengadakan atau menerbitkan SBN. Proses ini merupakan proses transaksi SBN yang dilakukan khusus untuk satu atau beberapa investor yang telah ditentukan. Saat ini yang telah diterbitkan dengan mekanisme ini adalah penerbitan Sukuk Dana Haji yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Terdapat 4 kelompok proses dalam model bisnis ini, yaitu:

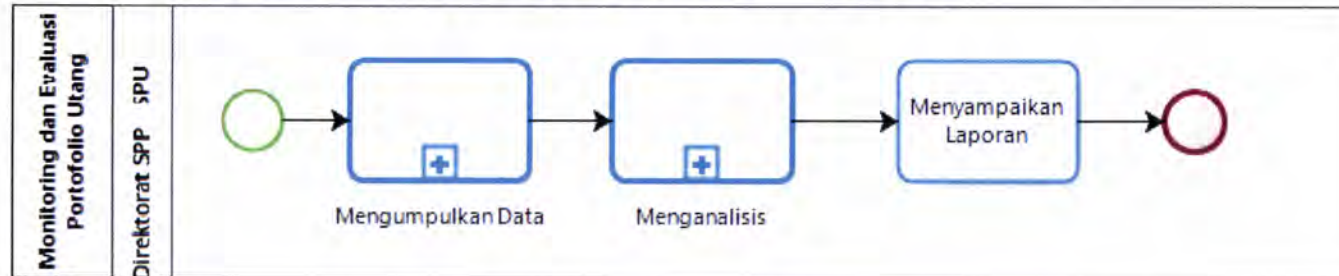
1. Proses Melakukan Cek Kelengkapan;
2. Proses Negosiasi *Terms&Conditions*;
3. Proses Menetapkan *Terms and Conditions*;
4. Proses Menerbitkan Pengumuman dan Dokumen terkait.

Proses Penyusunan Dokumentasi Hukum SBSN merupakan proses yang dilakukan setiap ada transaksi SBSN dimana dilakukan setelah transaksi selesai dilakukan sebagai syarat pemenuhan dalam rangka memperoleh opini syariah dari DSN MUI. Dua kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Proses Menyusun Dokumentasi Transaksi Aset SBSN;
2. Proses Menyusun Dokumentasi Transaksi *Terms and Conditions*;

C. PENGELOLAAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

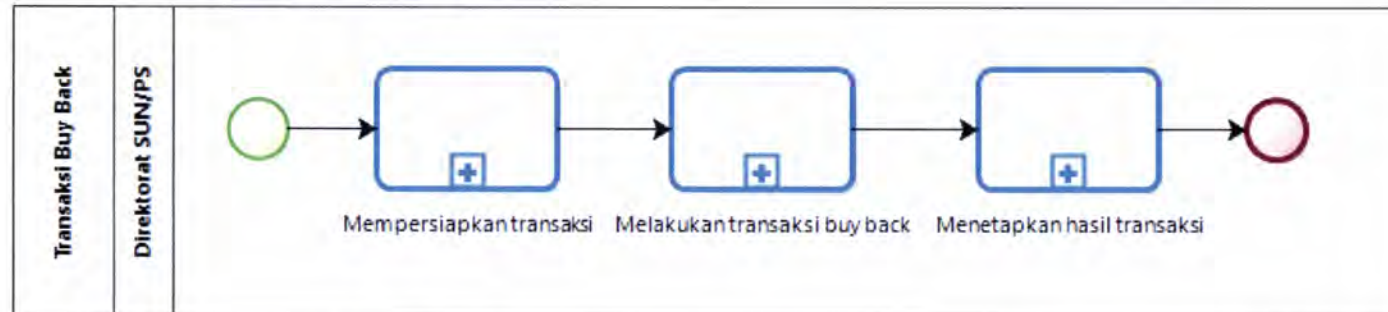
C.1 MONITORING DAN EVALUASI PORTOFOLIO UTANG



Proses Monitoring dan Evaluasi Portofolio merupakan pemantauan terhadap portofolio utang dan indikator kinerja dari portofolio untuk kemudian dievaluasi dan disusun rekomendasi terhadap struktur portofolio utang. Kelompok Proses yang terlibat adalah:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Menganalisis;
3. Proses Menyampaikan Laporan.

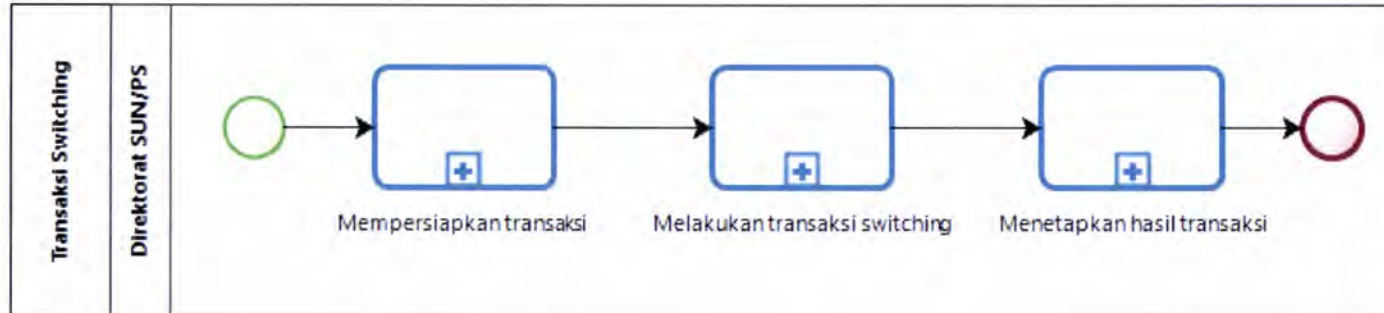
C.2 TRANSAKSI *BUY BACK*



Proses Transaksi *Buy Back* merupakan proses untuk melakukan penukaran kembali SBN yang telah diterbitkan baik dengan menggunakan mekanisme lelang maupun langsung ke dealer utama. Proses ini dilakukan dalam rangka pengelolaan portofolio yang memiliki 3 kelompok proses yaitu:

1. Proses Mempersiapkan Transaksi;
2. Proses Melakukan Transaksi *Buy Back*;
3. Proses Menetapkan Hasil Transaksi.

C.3 TRANSAKSI SWITCHING

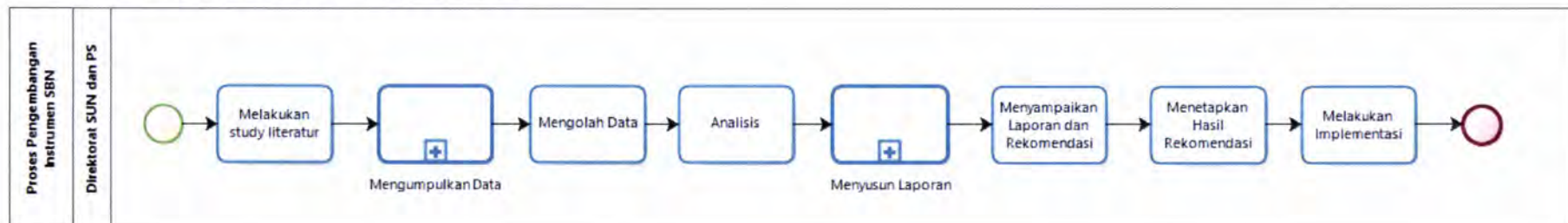


Proses Transaksi *Switching* adalah proses penukaran kembali SBN yang pernah diterbitkan dengan satu atau beberapa SBN yang telah ditentukan. Proses ini dapat dilakukan untuk SBN Domestik maupun SBN Valas. Kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Proses Mempersiapkan Transaksi;
2. Proses Melakukan Transaksi *Switching*;
3. Proses Menetapkan Hasil Transaksi.

D. PENGEMBANGAN PASAR SBN

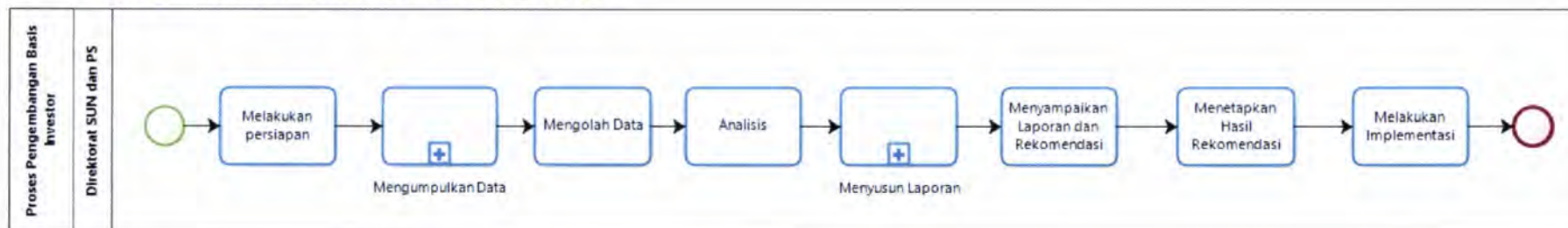
D.1 PENGEMBANGAN INSTRUMEN



Proses Pengembangan Instrumen merupakan proses untuk melakukan pengembangan instrumen SBN sehingga SBN dapat memiliki diversifikasi yang cukup. Proses ini lebih bersifat penyusunan dokumen rekomendasi implementasi instrumen, sedangkan penerbitan instrumen SBN terdapat di proses pengadaan utang maupun pengelolaan portofolio. Terdapat 8 kelompok proses yaitu:

1. Proses Melakukan Study Literatur;
2. Proses Mengumpulkan Data;
3. Proses Mengolah Data;
4. Proses Analisis;
5. Proses Menyusun Laporan;
6. Proses Menyampaikan Laporan dan Rekomendasi;
7. Proses Menetapkan Hasil Rekomendasi;
8. Proses Melakukan Implementasi.

D.2 PENGEMBANGAN BASIS INVESTOR



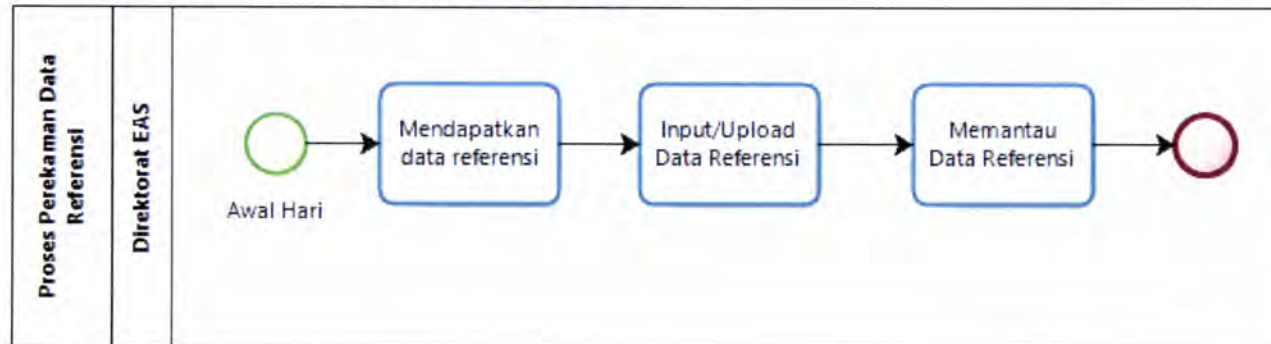
Proses Pengembangan Basis Investor merupakan proses untuk intensifikasi dan ekstensifikasi investor, sehingga terdapat diversifikasi investor. Proses ini lebih bersifat penyusunan dokumen rekomendasi instrumen yang mendukung pengembangan basis investor baik domestik maupun international, sedangkan penerbitan instrumen SBN terdapat di proses pengadaan utang maupun pengelolaan portofolio. Terdapat 8 kelompok proses yaitu:

1. Proses Melakukan Persiapan;
2. Proses Mengumpulka Data;
3. Proses Mengolah Data;
4. Proses Analisis;
5. Proses Menyusun Laporan;
6. Prosepe Menyampaikan Laporan dan Rekomendasi;
7. Proses Menetapkan Hasil Rekomendasi;

8. Proses Melakukan Implementasi.

E. SETELMEN UTANG

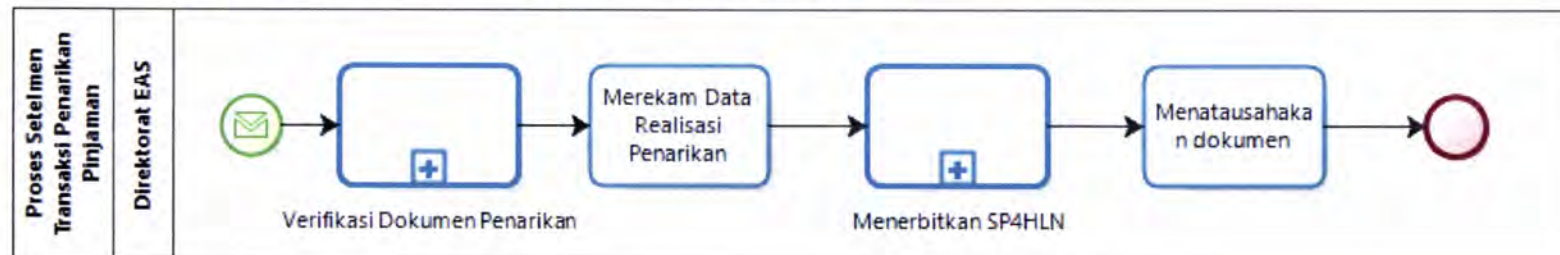
E.1 PEREKAMAN DATA REFERENSI



Proses Perekaman Data Referensi merupakan proses yang dilakukan di awal hari untuk merekam nilai tukar rupiah ke dalam mata uang yang digunakan dalam pembayaran utang maupun tingkat bunga referensi seperti LIBOR dan SIBOR. Terdiri dari 3 kelompok proses:

1. Proses Mendapatkan Data Referensi;
2. Proses Input/Upload Data Referensi;
3. Proses Memantau Data Referensi.

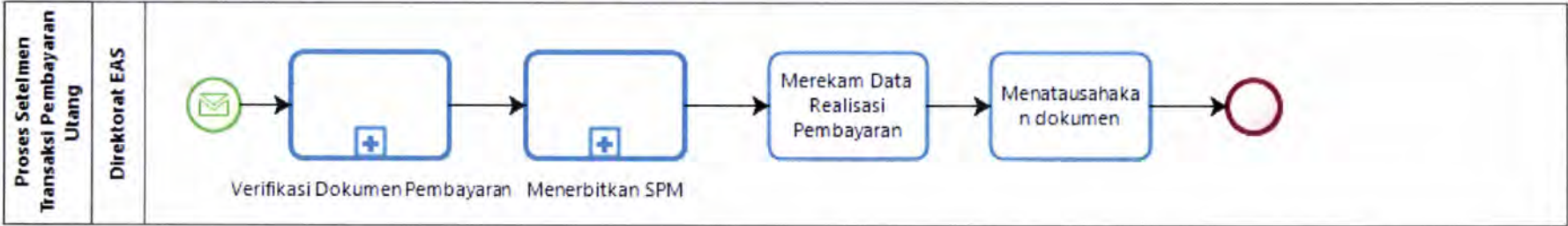
E.2 SETELMEN TRANSAKSI PENARIKAN PINJAMAN



Proses Setelmen Transaksi Penarikan Pinjaman merupakan proses untuk menyelesaikan transaksi penarikan yang telah dilakukan oleh Penerima Pinjaman. Proses ini terdiri dari 4 kelompok proses yaitu:

- 1. Proses Verifikasi Dokumen Penarikan;
- 2. Proses Merekam Data Realisasi Penarikan;
- 3. Proses Menerbitkan SP4HLN;
- 4. Proses Menatausahakan Dokumen.

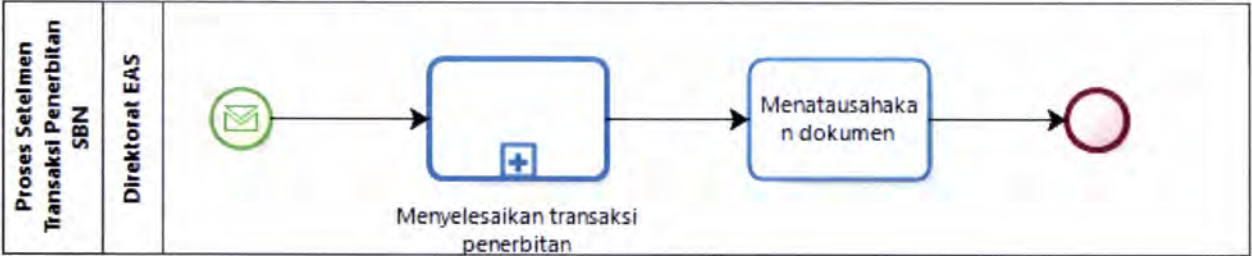
E.3 SETELMEN TRANSAKSI PEMBAYARAN UTANG



Proses Setelmen Transaksi Pembayaran Utang merupakan proses untuk menyelesaikan pembayaran utang baik biaya maupun pokok yang akan jatuh tempo dalam beberapa waktu mendatang, sehingga diperlukan dokumen pembayaran sebagai bukti permohonan pembayaran. Kelompok proses yang terlibat adalah:

- 1. Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran;
- 2. Proses Menerbitkan SPM;
- 3. Proses Merekam Data Realisasi Pembayaran;
- 4. Proses Menatausahakan Dokumen.

E.4 SETELMEN TRANSAKSI PENERBITAN SBN

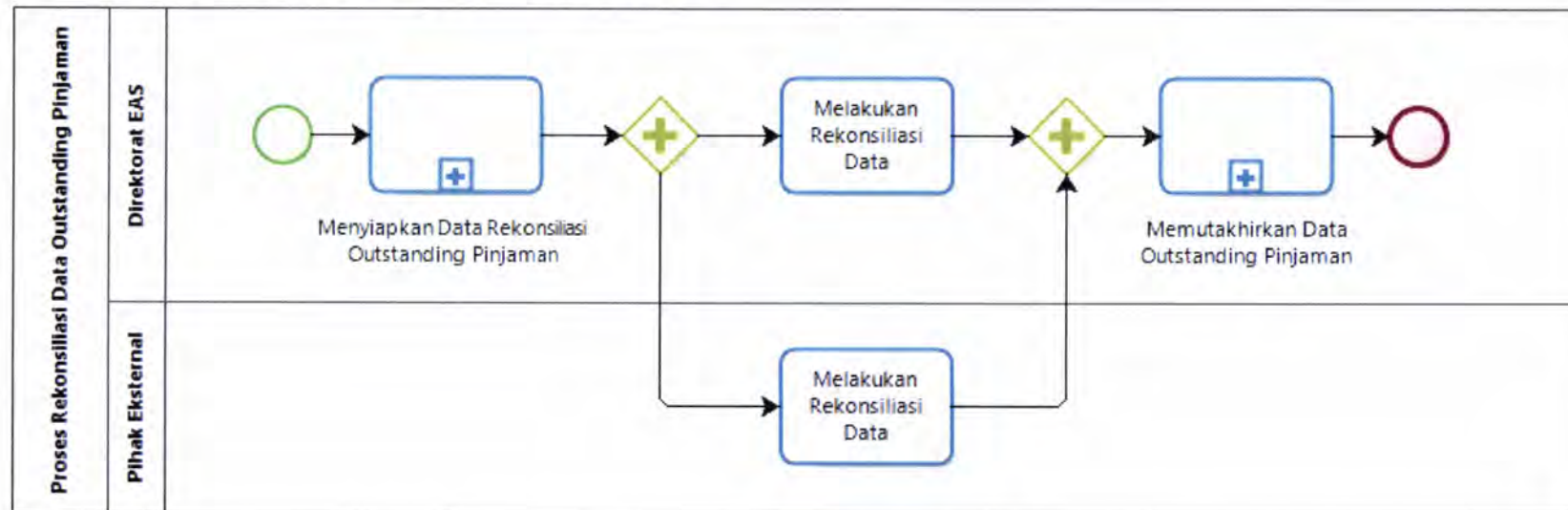


Proses Setelmen Transaksi Penerbitan SBN merupakan proses untuk menyelesaikan transaksi penerbitan SBN, baik yang dilakukan secara lelang, book building maupun private placement. Kelompok proses yang ada dalam Model Bisnis ini adalah:

1. Proses Menyelesaikan Transaksi Penerbitan;
2. Proses Menatausahakan Dokumen.

F. AKUNTABILITAS UTANG

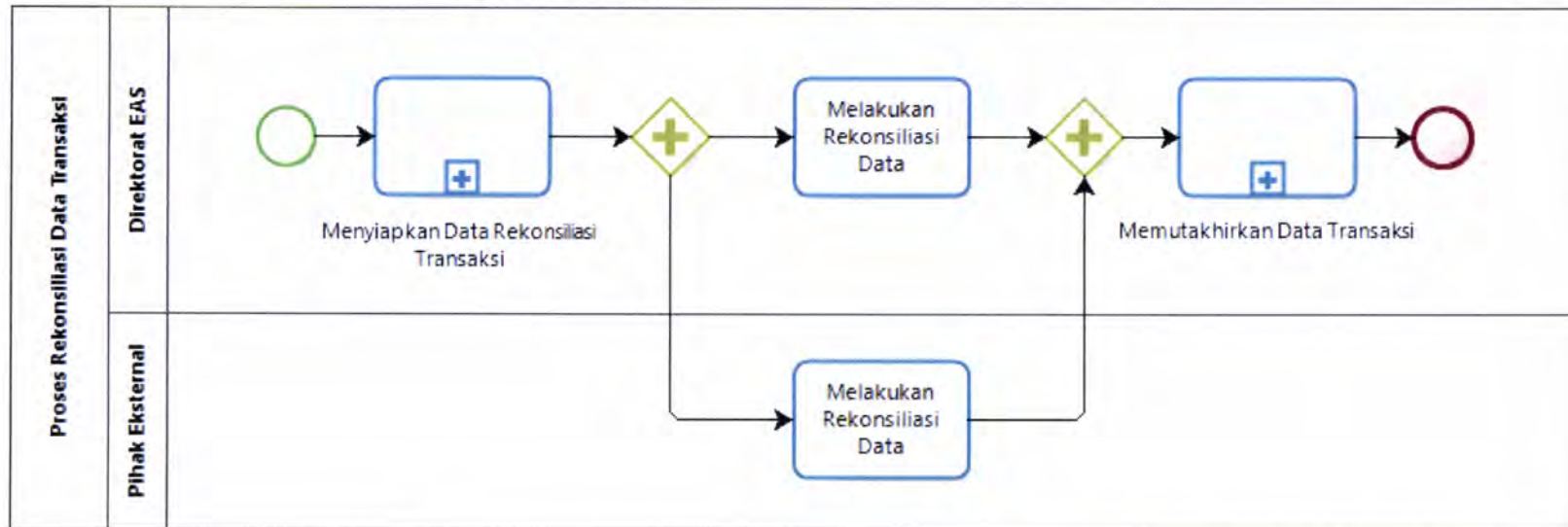
F.1 REKONSILIASI DATA OUTSTANDING



Proses Rekonsiliasi Data Outstanding merupakan proses untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemilik data lain sehingga didapatkan data yang benar pada suatu kurun waktu. Kelompok Proses yang terlibat adalah:

1. Proses Menyiapkan Data Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman;
2. Proses Melakukan Rekonsiliasi Data;
3. Proses Memutakhirkan Data Outstanding Pinjaman.

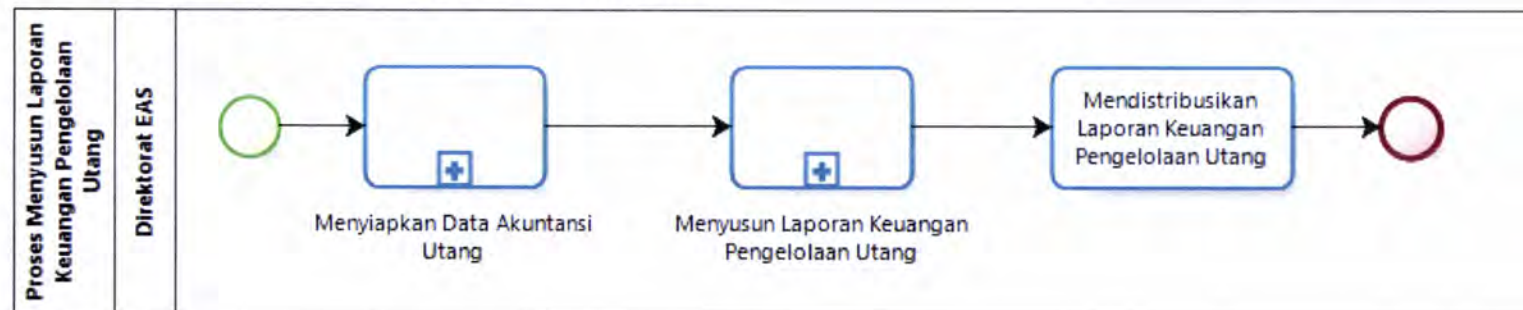
F.2 REKONSILIASI DATA TRANSAKSI



Proses Rekonsiliasi Data Transaksi pada dasarnya ada proses untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemilik data lain sehingga didapatkan data yang benar pada suatu kurun waktu. Kelompok Proses yang terlibat adalah:

1. Proses Menyiapkan Data Rekonsiliasi Transaksi;
2. Proses Melakukan Rekonsiliasi Data;
3. Proses Memutakhirkan Data Transaksi.

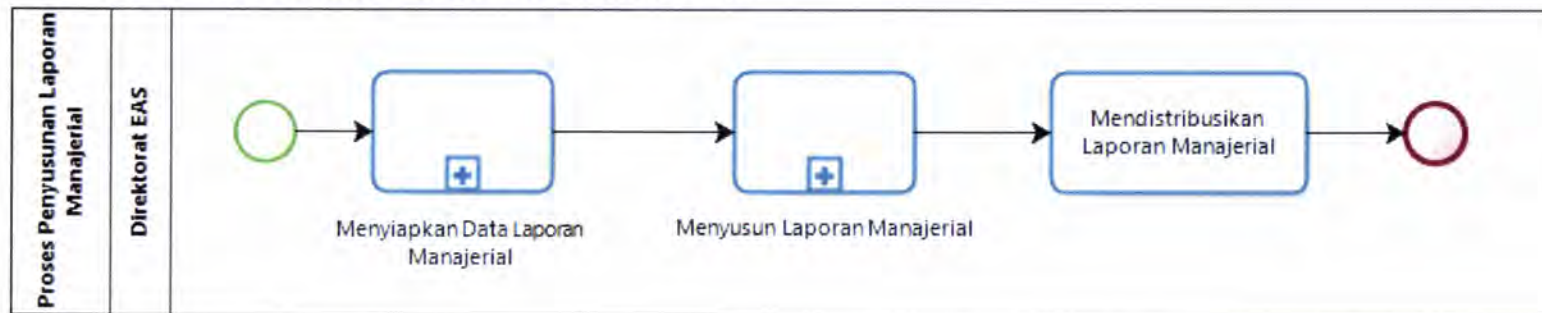
F.3 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN



Proses Penyusunan Laporan Keuangan Utang (BA 999.01) adalah proses menyusun laporan keuangan yang dimulai dari pengumpulan bukti sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Kelompok proses pada model bisnis ini adalah:

1. Proses Menyiapkan Data Akuntansi Utang;
2. Proses Menyusun Laporan Keuangan Pengelolaan Utang;
3. Proses Mendistribusikan Laporan Keuangan Pengelolaan Utang.

F.4 PENYUSUNAN LAPORAN MANAJERIAL

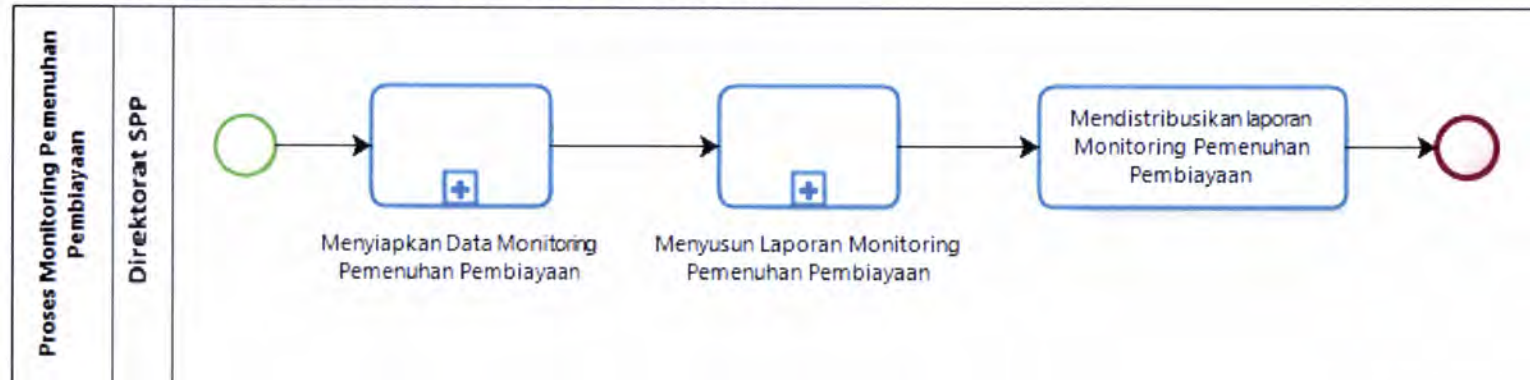


Proses Penyusunan Laporan Manajerial adalah proses untuk menyusun laporan-laporan manajerial dimana data yang didapat juga berasal dari pemilik data dan dikompilasi oleh Direktorat EAS. Terdapat 3 kelompok proses pada model bisnis ini yaitu:

1. Proses Menyiapkan Data Laporan Manajerial;
2. Proses Menyusun Laporan Manajerial;
3. Proses Mendistribusikan Laporan Manajerial;

G. MONITORING DAN EVALUASI

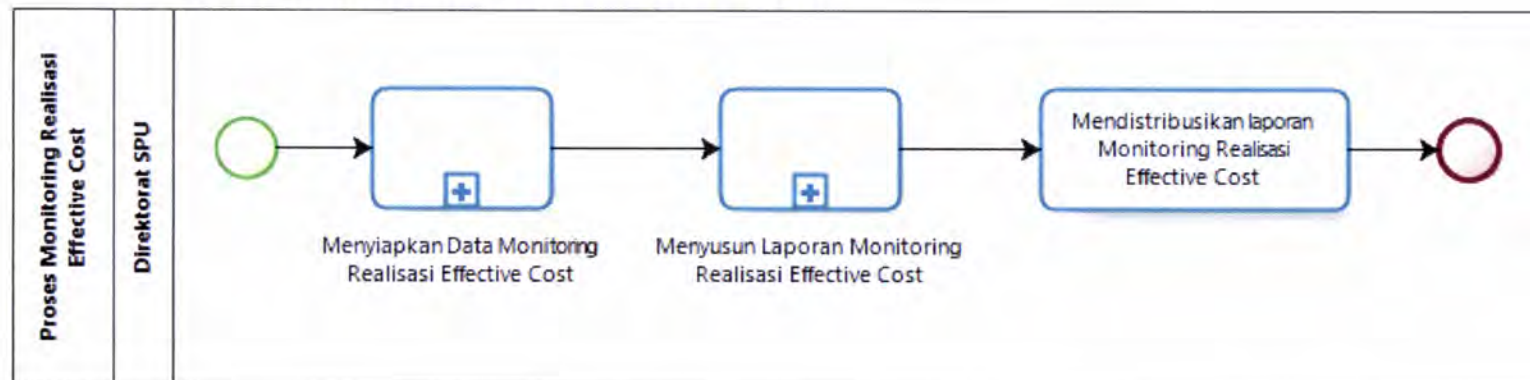
G.1 MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN



Proses Monitoring Pemenuhan Pembiayaan merupakan proses yang dilakukan untuk memantau pencapaian target pembiayaan tahunan baik berupa Pinjaman maupun SBN. Kelompok Proses yang terlibat adalah:

1. Proses Menyiapkan Data Monitoring Pemenuhan Pembiayaan;
2. Proses Menyusun Laporan Monitoring Pemenuhan Pembiayaan;
3. Proses Mendistribusikan Laporan Monitoring Pemenuhan Pembiayaan.

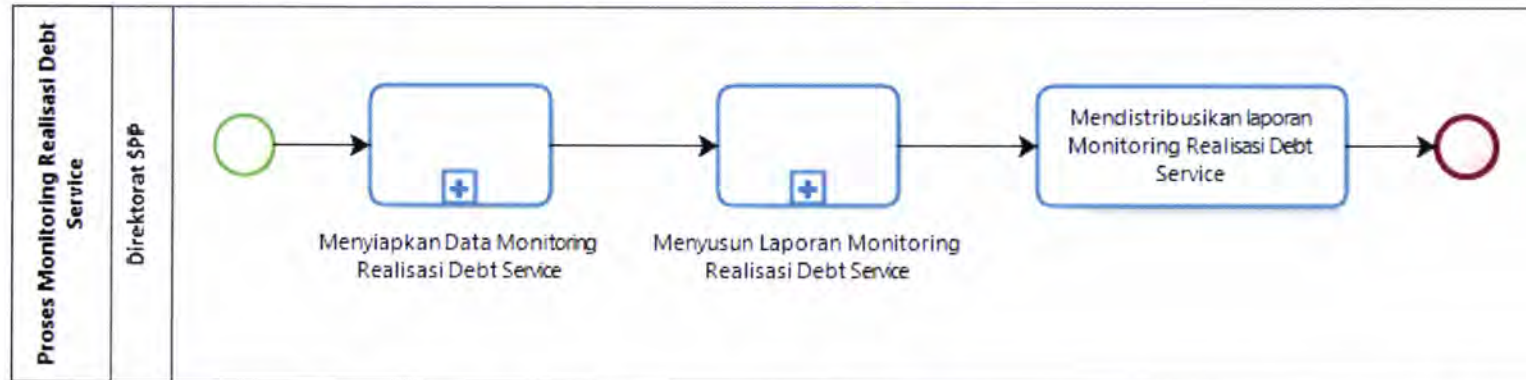
G.2 MONITORING REALISASI *EFFECTIVE COST*



Proses Monitoring realisasi *Effective Cost* adalah pemantauan realisasi biaya riil utang yang ditanggung oleh Pemerintah dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kelompok Proses yang ada dalam model bisnis ini adalah:

1. Proses Menyiapkan Data Monitoring Realisasi *Effective Cost*;
2. Proses Menyusun Laporan Monitoring Realisasi *Effective Cost*;
3. Proses Mendistribusikan Laporan Monitoring Realisasi *Effective Cost*.

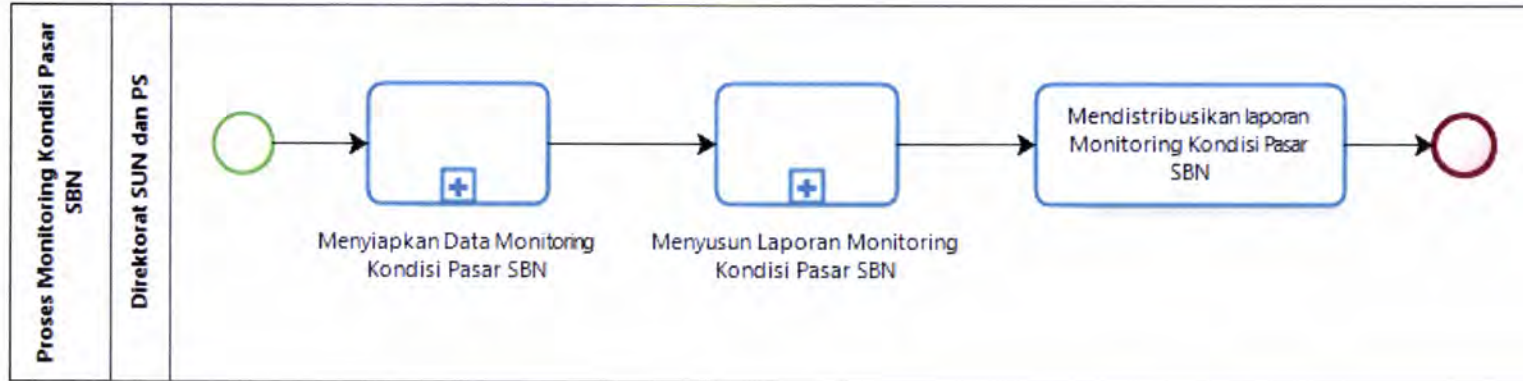
G.3 MONITORING REALISASI DAN PROYEKSI *DEBT SERVICE*



Proses Monitoring Realisasi dan Proyeksi *Debt Service* merupakan salah satu proses berkelanjutan dari proses perencanaan biaya utang. Proses ini memantau realisasi *debt service* dan sekaligus menyusun proyeksi untuk tahun selanjutnya. Adapun kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Proses Menyiapkan Data Monitoring Realisasi *Debt Service*;
2. Proses Menyusun Laporan Monitoring Realisasi *Debt Service*;
3. Proses Mendistribusikan Laporan Monitoring Realisasi *Debt Service*.

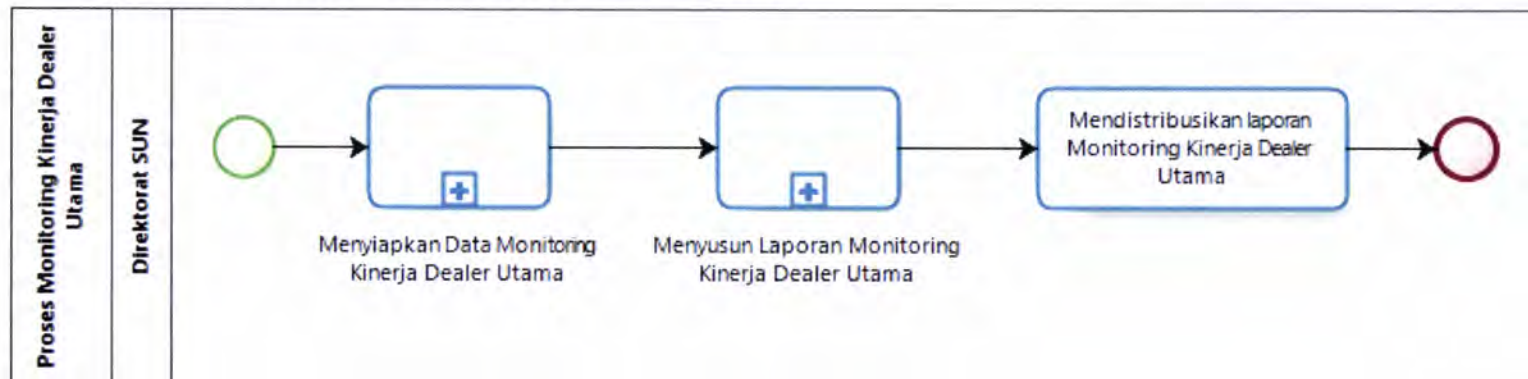
G.4 MONITORING KONDISI PASAR SBN



Proses Monitoring Kondisi Pasar SBN merupakan proses pemantauan terhadap kondisi pasar yang data pemantauan akan digunakan dalam proses penerbitan terutama dalam penentuan imbal hasil yang diharapkan oleh pasar. Kelompok proses yang ada dalam model bisnis ini adalah:

1. Proses Menyiapkan Data Monitoring Kondisi Pasar SBN;
2. Proses Menyusun Laporan Monitoring Kondisi Pasar SBN;
3. Proses Mendistribusikan Laporan Monitoring Kondisi Pasar SBN.

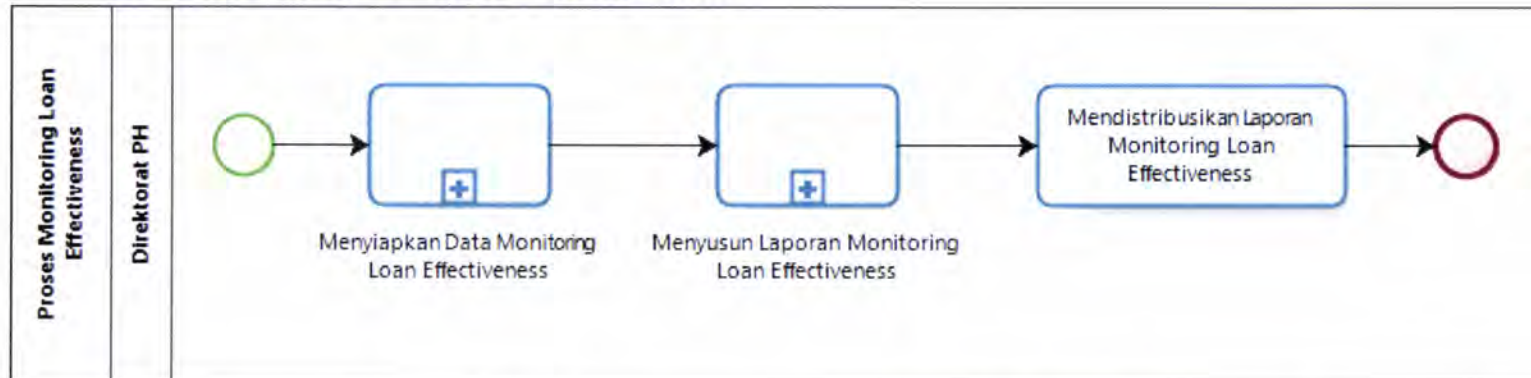
G.5 MONITORING KEWAJIBAN DEALER UTAMA



Proses Monitoring Kewajiban dan Kinerja Pihak Ketiga adalah proses pemantauan yang dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi utang, yaitu Dealer Utama dan Agen Penjual SBN Ritel. Kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Proses Menyiapkan Data Monitoring Kinerja Dealer Utama;
2. Proses Menyusun Laporan Monitoring Kinerja Dealer Utama;
3. Proses Mendistribusikan Laporan Monitoring Kinerja Dealer Utama.

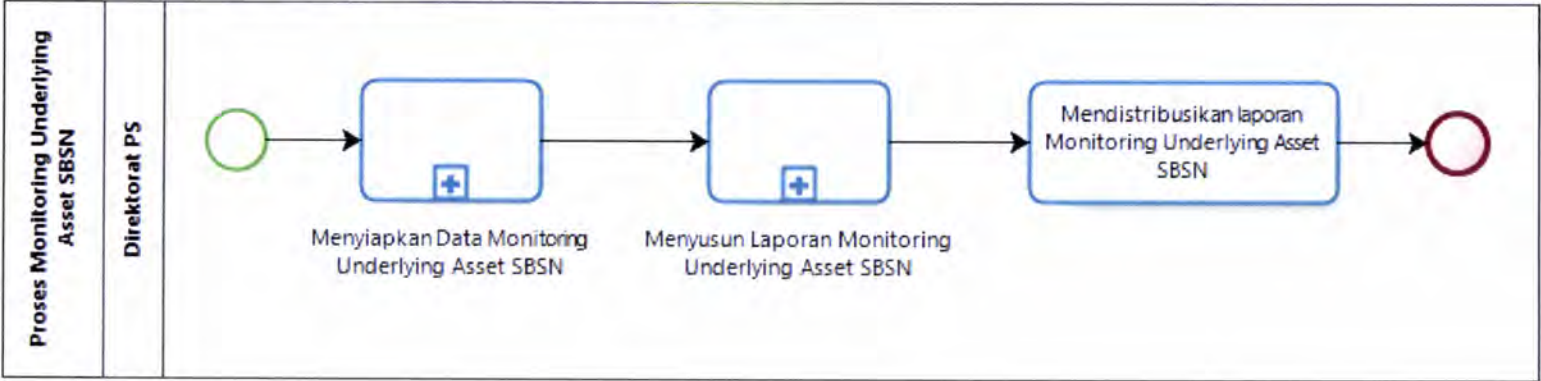
G.6 MONITORING LOAN EFFECTIVENESS



Proses Monitoring Pinjaman pada umumnya berfokus pada progress *dibursement*, capaian kegiatan dan progress pengefektifan pinjaman. Kelompok Proses yang terdapat dalam model bisnis ini adalah:

1. Proses Menyiapkan Data Monitoring *Loan Effectiveness*;
2. Proses Menyusun Laporan Monitoring *Loan Effectiveness*;
3. Proses Mendistribusikan Laporan Monitoring *Loan Effectiveness*.

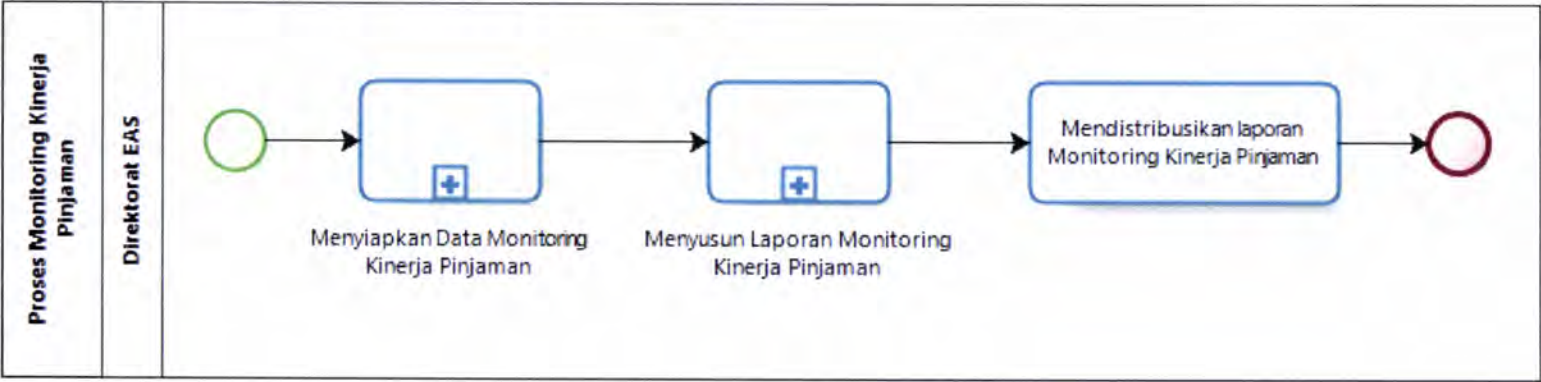
G.7 MONITORING UNDERLYING ASSET SBSN



Proses Monitoring Aset SBSN merupakan proses yang diperuntukkan untuk memantau realisasi penggunaan aset sebagai *underlying* dan dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat. Kelompok Proses yang terdapat dalam model bisnis ini adalah:

- 1. Proses Menyiapkan Data Monitoring *Underlying Asset* SBSN;
- 2. Proses Menyusun Laporan Monitoring *Underlying Asset* SBSN;
- 3. Proses Mendistribusikan Laporan Monitoring *Underlying Asset* SBSN.

G.8 MONITORING KINERJA PINJAMAN

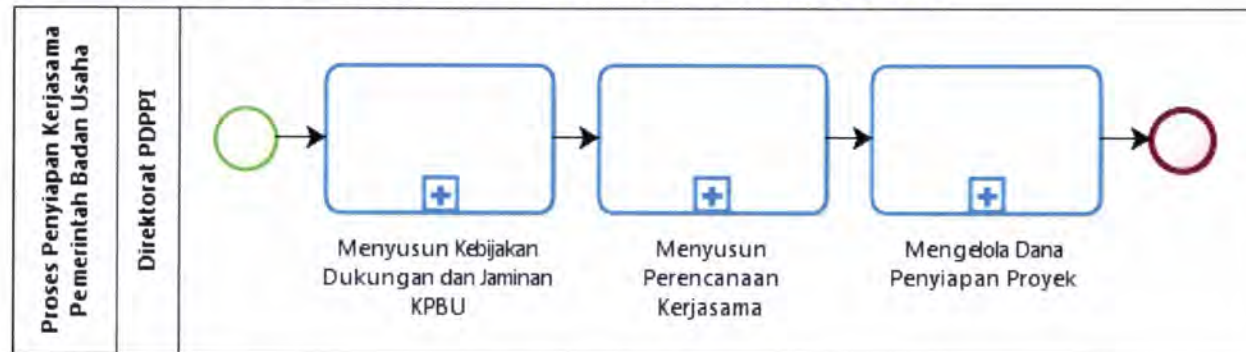


Proses Evaluasi Kinerja Pinjaman merupakan proses untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi pada pinjaman dan tingkat penyerapannya untuk kemudian disusun rekomendasi yang diperlukan. Model Bisnis ini melibatkan 2 kelompok proses yaitu:

1. Proses Menyiapkan Data Monitoring Kinerja Pinjaman;
2. Proses Menyusun Laporan Monitoring Kinerja Pinjaman;
3. Proses Mendistribusikan Laporan Monitoring Kinerja Pinjaman.

H. DUKUNGAN PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR

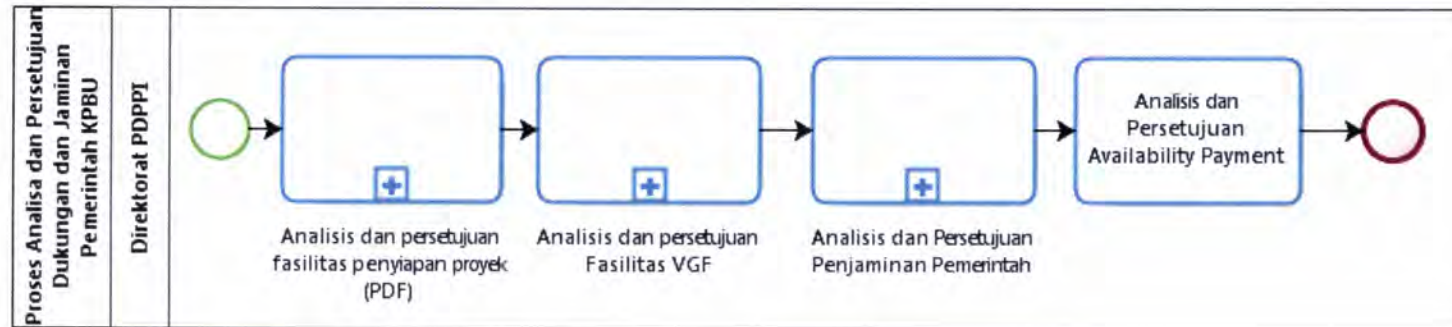
H.1 PENYIAPAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA / KPBU



Kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Proses Menyusun kebijakan dukungan dan jaminan;
2. Proses Menyusun Perencanaan Kerjasama;
3. Proses Mengelola Dana Penyiapan Proyek.

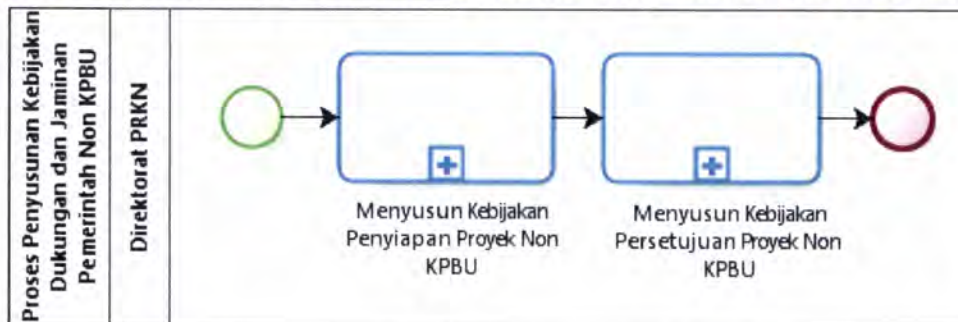
H.2 ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH SWASTA / KPBU



Kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Analisis dan persetujuan fasilitas penyiapan proyek (PDF);
2. Analisis dan persetujuan fasilitas VGF;
3. Analisis dan persetujuan penjaminan pemerintah;
4. Analisis dan persetujuan *Availability Payment*.

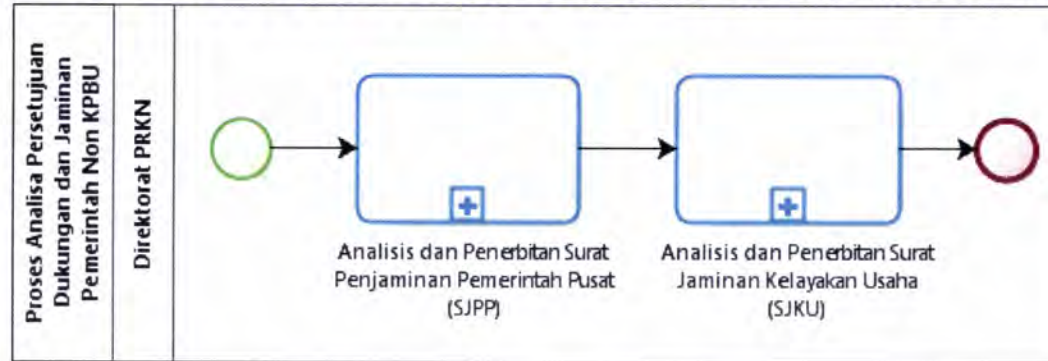
H.3 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS / NON KPBU



Kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Menyusun kebijakan penyiapan proyek non KPBU;
2. Menyusun kebijakan persetujuan proyek non KPBU.

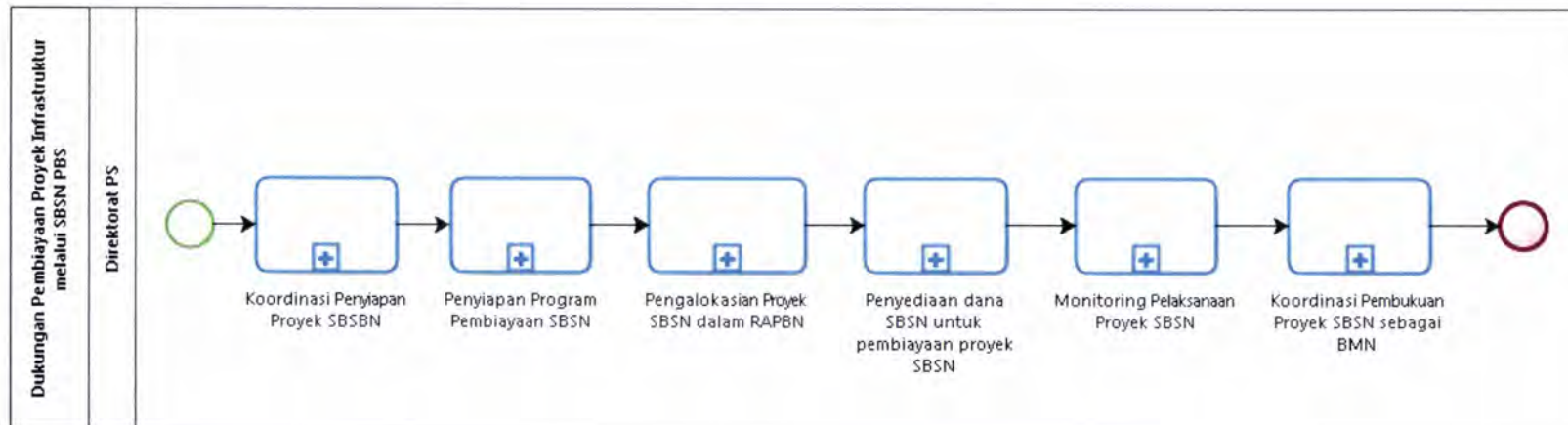
H.4 ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS/ NON KPBU



Kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Analisis dan penerbitan surat penjaminan pemerintah pusat (SJPP);
2. Analisis dan penerbitan surat jaminan kelayakan usaha (SJKU).

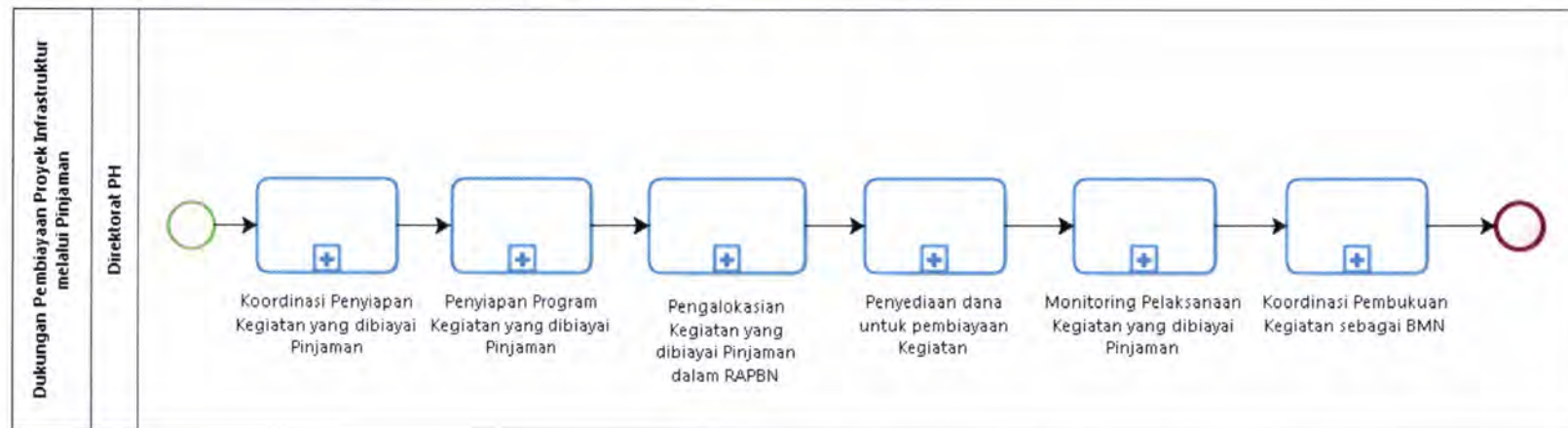
H.5 PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN PBS



Kelompok Proses yang terlibat adalah:

1. Koordinasi Penyiapan Proyek SBSN;
2. Penyiapan Program Pembiayaan SBSN;
3. Pengalokasian Proyek SBSN dalam RAPBN;
4. Penyediaan dan SBSN untuk pembiayaan proyek SBSN;
5. Monitoring Pelaksanaan Proyek SBSN;
6. Koordinasi Pembukuan Proyek SBSN sebagai BMN.

H.6 PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN



Kelompok Proses yang terlibat adalah:

1. Koordinasi penyiapan kegiatan yang dibiayai pinjaman;
2. Penyiapan program kegiatan yang dibiayai pinjaman;
3. Pengalokasian kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam RAPBN;
4. Penyediaan dana untuk pembiayaan kegiatan;
5. Monitoring pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman;
6. Koordinasi pembukuan kegiatan sebagai BMN.

I. PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA

I.1 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA



Kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Menyusun peraturan pengelolaan risiko;
2. Menyusun peraturan mitigasi risiko;
3. Menyusun peraturan perjanjian kerjasama kelembagaan.

I.2 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO



Kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Menyusun identifikasi risiko;
2. Menilai signifikansi risiko;
3. Melakukan simulasi risiko.

I.3 PENYUSUNAN REKOMENDASI MITIGASI RISIKO KEUANGAN NEGARA

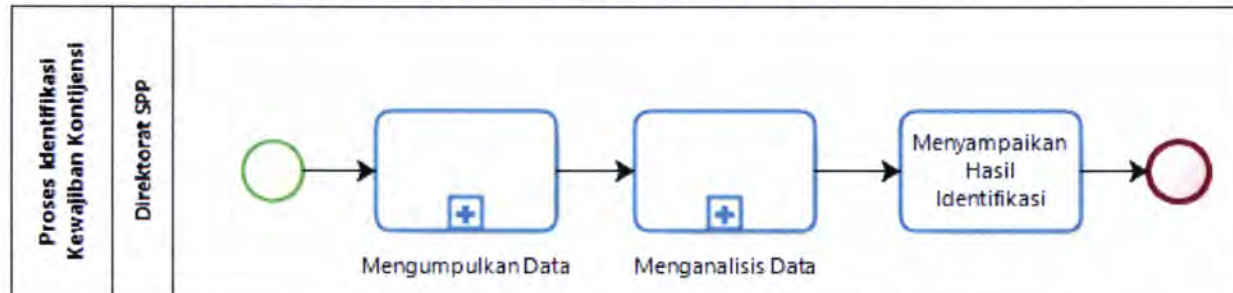


Kelompok proses yang terlibat terdiri dari:

1. Menyusun mitigasi risiko aspek ekonomi;
2. Menyusun mitigasi risiko aspek keuangan;
3. Menyusun mitigasi risiko aspek pengelolaan utang;
4. Menyusun mitigasi risiko aspek politik;
5. Menyusun mitigasi risiko aspek tuntutan hukum.

J. PENGELOLAAN PENJAMINAN PEMERINTAH

J.1 IDENTIFIKASI POTENSI KEWAJIBAN KONTIJENSI

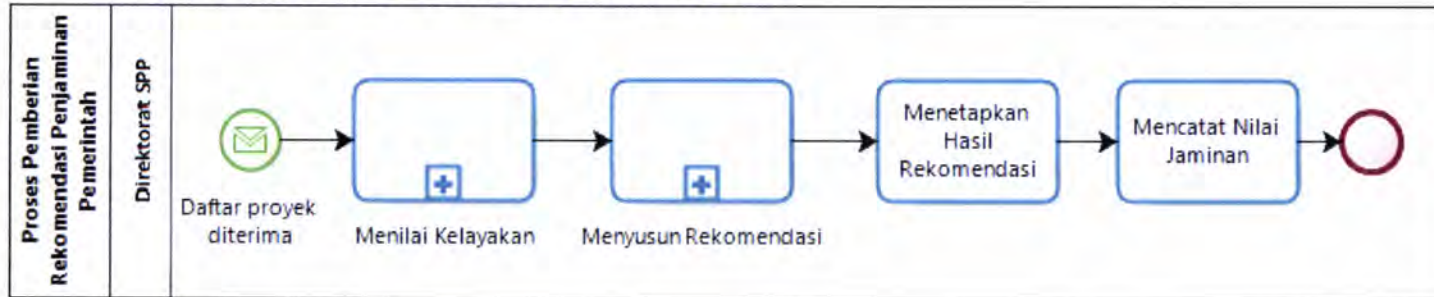


Proses Indetifikasi Kewajiban Kontijensi merupakan proses untuk mengidentifikasi kegiatan apa yang menimbulkan adanya kewajiban pemerintah di masa depan. Model Bisnis ini terdiri dari 3 kelompok proses yaitu:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Menganalisis Data;

3. Proses Menyampaikan Hasil Identifikasi.

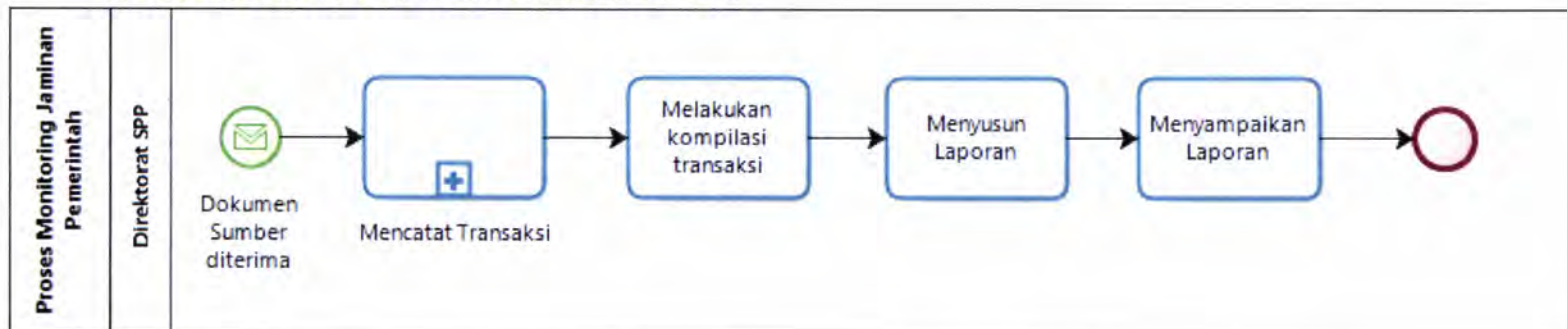
J.2 REKOMENDASI JAMINAN PEMERINTAH



Proses Penyusunan Rekomendasi Jaminan Pemerintah merupakan proses yang dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan dokumen dan rekomendasi finansial terkait jaminan yang diberikan Pemerintah. Kelompok prosesnya yaitu:

1. Proses Menilai Kelayakan;
2. Proses Menyusun Rekomendasi;
3. Proses Menetapkan Hasil Rekomendasi;
4. Proses Mencatat Nilai Jaminan.

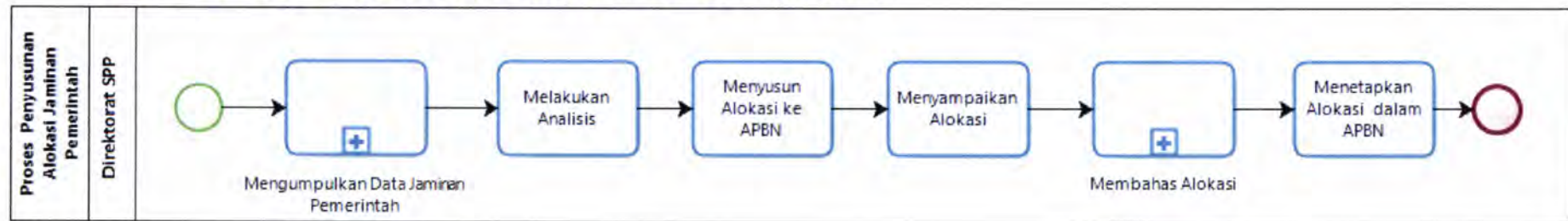
J.3 MONITORING JAMINAN PEMERINTAH



Model Bisnis Monitoring Jaminan Pemerintah adalah proses pemantauan terhadap jaminan yang telah diterbitkan dan menyusun rekomendasi yang diperlukan. Kelompok proses yang terlibat adalah Proses:

1. Proses Mencatat Transaksi;
2. Proses Melakukan Kompilasi Transaksi;
3. Proses Menyusun Laporan;
4. Proses Menyampaikan Laporan.

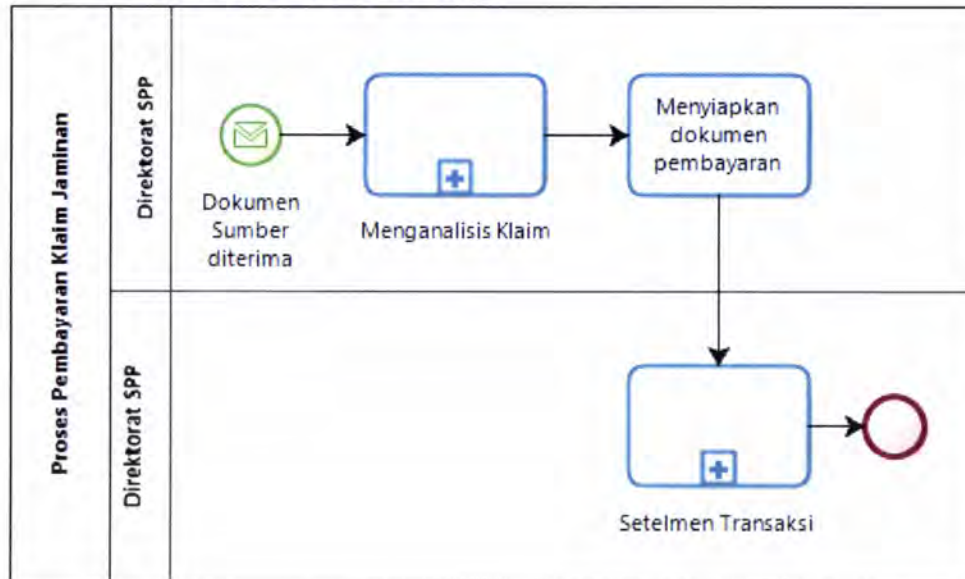
J.4 PENYUSUNAN ALOKASI JAMINAN PEMERINTAH KE APBN



Proses Penyusunan Alokasi Jaminan Pemerintah ke APBN merupakan proses untuk memasukkan potensi kewajiban kontijensi ke APBN berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada tahun tersebut. Kelompok Proses yang terlibat adalah:

1. Proses Mengumpulkan Data Jaminan Pemerintah;
2. Proses Melakukan Analisis;
3. Proses Menyusun Alokasi ke APBN;
4. Proses Membahas Alokasi;
5. Proses Menetapkan Alokasi dalam APBN.

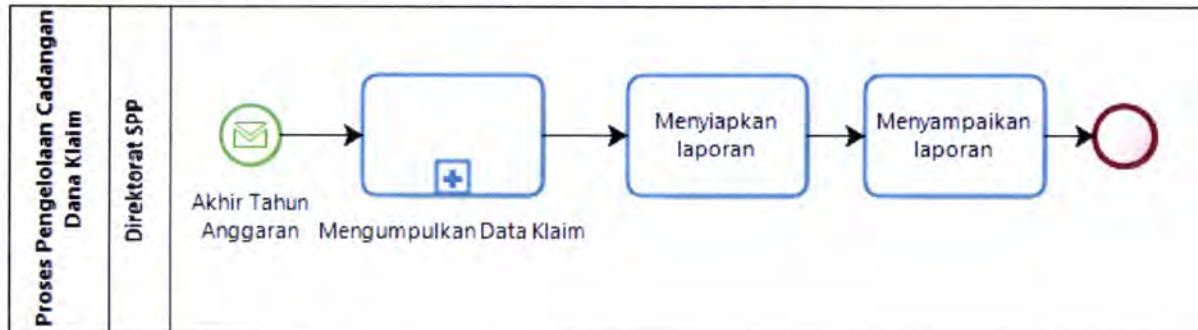
J.5 PEMBAYARAN KLAIM



Proses Pembayaran Klaim dapat dilakukan ketika dokumen permintaan pembayaran dari pemberi utang didapatkan dan dianalisis apakah telah sesuai dengan jaminan yang Pemerintah berikan. Selanjutnya kelompok proses yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Proses Menganalisis Klaim ;
2. Proses Menyiapkan Dokumen Pembayaran;
3. Proses Setelmen Transaksi.

J.6 PENGELOLAAN CADANGAN DANA KLAIM

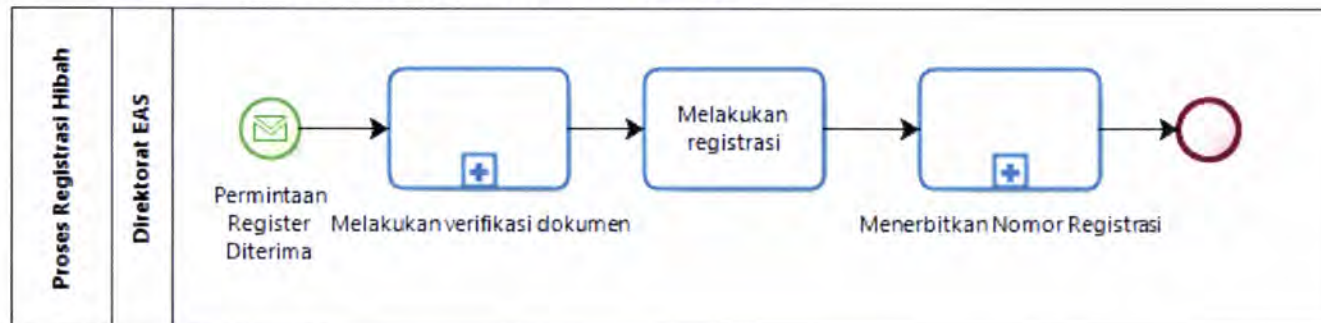


Setelah proses alokasi anggaran telah dijalankan dan ternyata masih ada sisa dalam alokasi tersebut, maka dana tersebut akan dikelola dan tidak diperkenankan untuk realokasi ke mata anggaran yang lain. Adapun kelompok proses yang terlibat adalah:

1. Proses Mengumpulkan Data Klaim;
2. Proses Menyiapkan Laporan;
3. Proses Menyampaikan Laporan.

K. PENGELOLAAN HIBAH

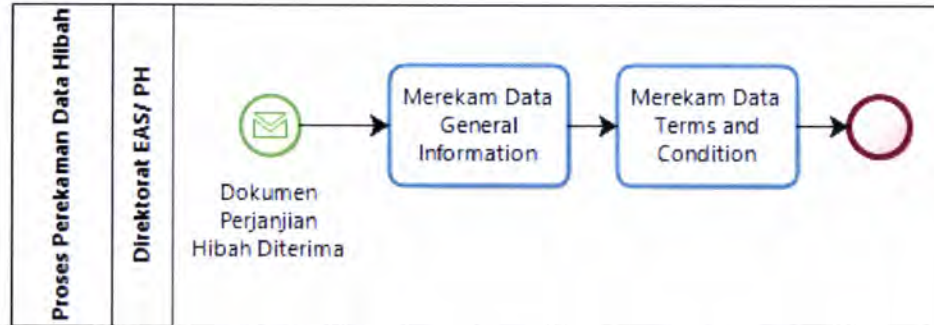
K.1 PEMBERIAN NOMOR REGISTER HIBAH



Proses Registrasi Hibah merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan nomor register perjanjian hibah sehingga dapat diadministrasikan lebih lanjut. Model Bisnis ini memiliki 3 kelompok proses yaitu:

1. Proses Melakukan Verifikasi Dokumen;
2. Proses Melakukan Registrasi;
3. Proses Menerbitkan Nomor Registrasi.

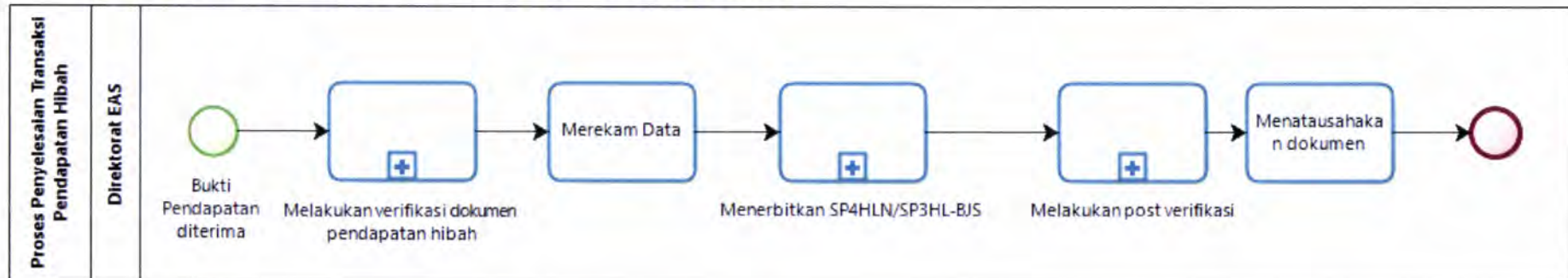
K.2 PEREKAMAN DATA HIBAH



Proses Perekaman Data Hibah merupakan proses pencatatan atau perekaman data baik data General Information (GI) maupun Data Terms and Conditions ke dalam sistem informasi. Kelompok prosesnya adalah

1. Proses Merekam Data GI ;
2. Proses Merekam Data Terms and Condition.

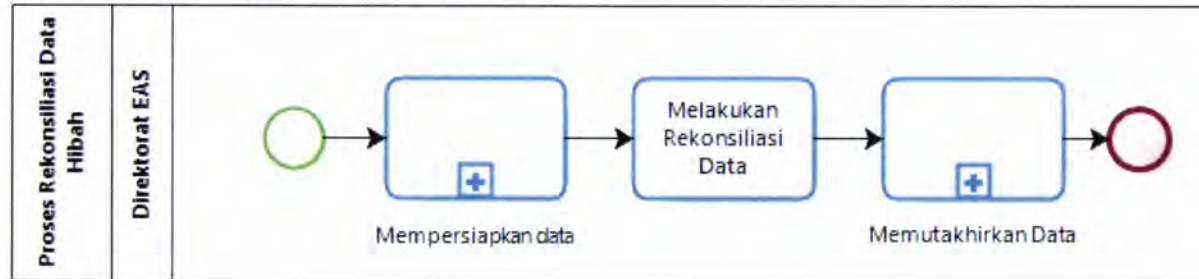
K.3 PENYELESAIAN TRANSAKSI PENDAPATAN HIBAH



Proses Penyelesaian Transaksi Pendapatan Hibah merupakan proses yang dilakukan untuk mendokumentasikan pendapatan hibah ke dalam data hibah umum. Terdapat 3 kelompok proses pada model bisnis ini yaitu:

1. Proses Melakukan Verifikasi Dokumen Pendapatan Hibah;
2. Proses Merekam Data;
3. Proses Menerbitkan SP4HLN/ SP3HL-BJS;
4. Proses Melakukan Post Verifikasi;
5. Proses Menatausahakan Dokumen.

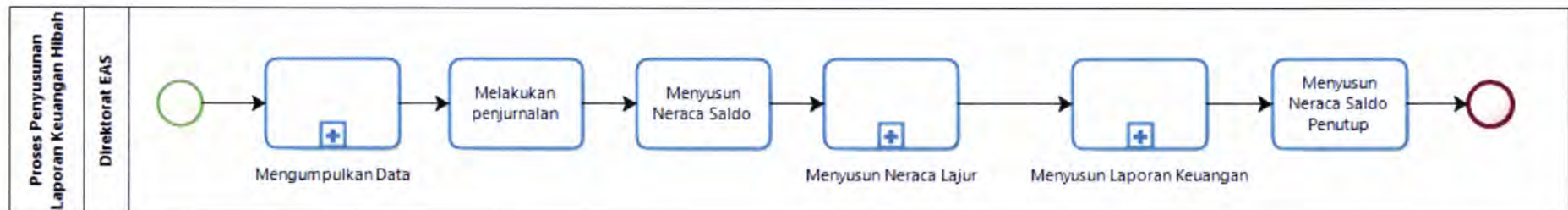
K.4 REKONSILIASI DATA HIBAH



Seperti proses rekonsiliasi yang ada dalam proses Akuntabilitas Hibah, maka proses rekonsiliasi hibah mempunyai karakteristik yang sama. Adapun kelompok prosesnya adalah:

1. Proses Mempersiapkan Data;
2. Proses Melakukan Rekonsiliasi Data;
3. Proses Memutakhirkan Data.

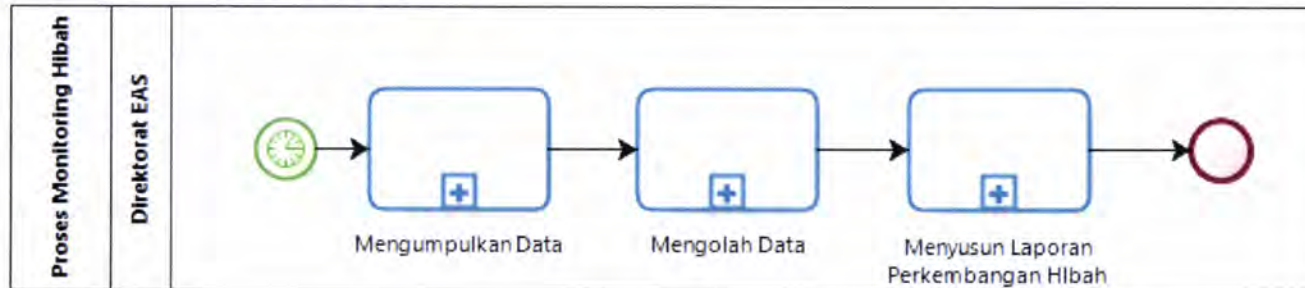
K.5 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN HIBAH



Proses Penyusunan Laporan Keuangan Utang (BA 999.02) adalah proses menyusun laporan keuangan hibah yang dimulai dari pengumpulan bukti sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Kelompok proses pada model bisnis ini adalah:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Melakukan Penjurnalan;
3. Proses Menyusun Neraca Saldo;
4. Proses Menyusun Neraca Lajur;
5. Proses Menyusun Laporan Keuangan;
6. Proses Menyusun Neraca Saldo Penutup.

K.6 MONITORING HIBAH

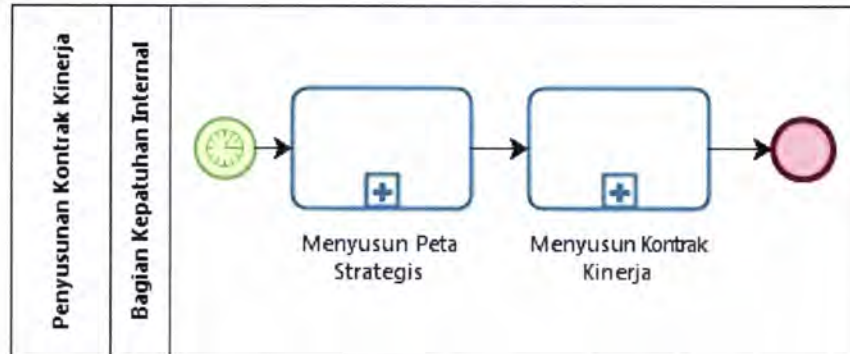


Proses Monitoring Hibah merupakan proses pemantauan terhadap hibah terencana maupun hibah langsung yang telah dilaporkan. Kelompok Proses pada model bisnis ini adalah:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Mengolah Data;
3. Proses Menyusun Laporan Perkembangan Hibah.

L. PENGELOLAAN KINERJA

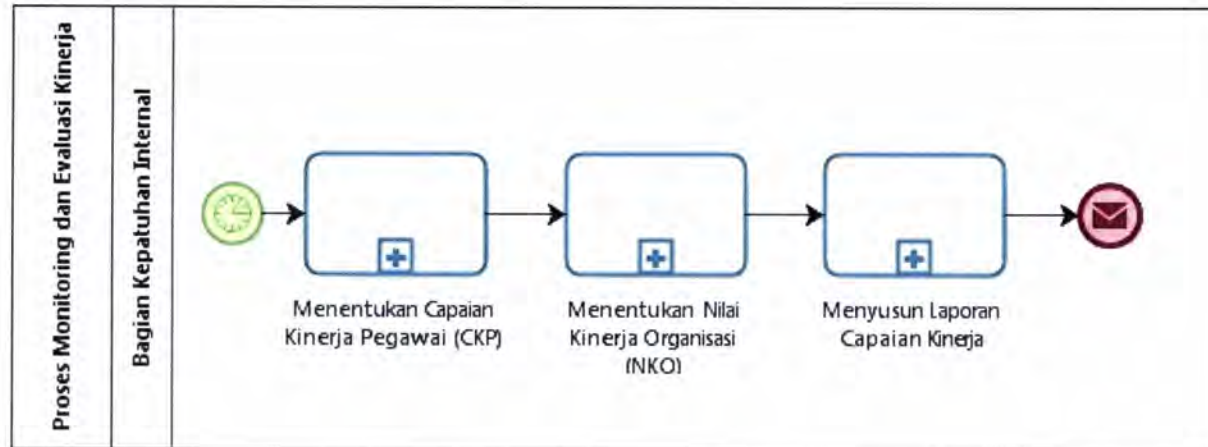
L.1 PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA



Merupakan proses penyusunan kontrak kinerja untuk semua level pegawai di dalam organisasi, dimulai dari Eselon I hingga ke level pelaksana. Terdiri dari kelompok proses:

1. Proses Menyusun Peta Strategis;
2. Proses Menyusun Kontrak Kinerja.

L.2 MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

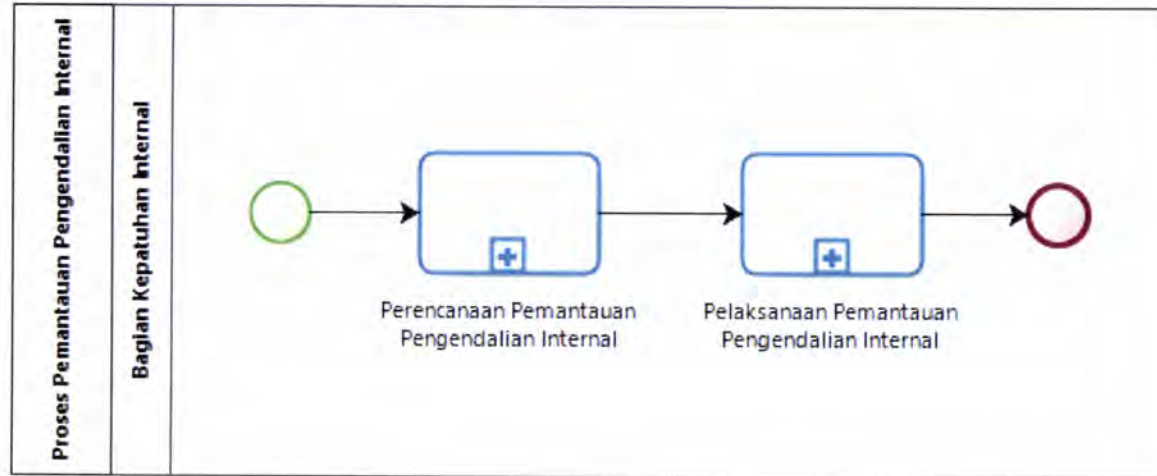


Merupakan proses monitoring dan evaluasi progress capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja yang telah dibuat. Terdiri dari Kelompok Proses:

1. Proses Menentukan Capaian Kinerja Pegawai (CKP);
2. Proses Menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ;
3. Proses Menyusun Laporan Capaian Kinerja.

M. PENGELOLAAN KEPATUHAN INTERNAL

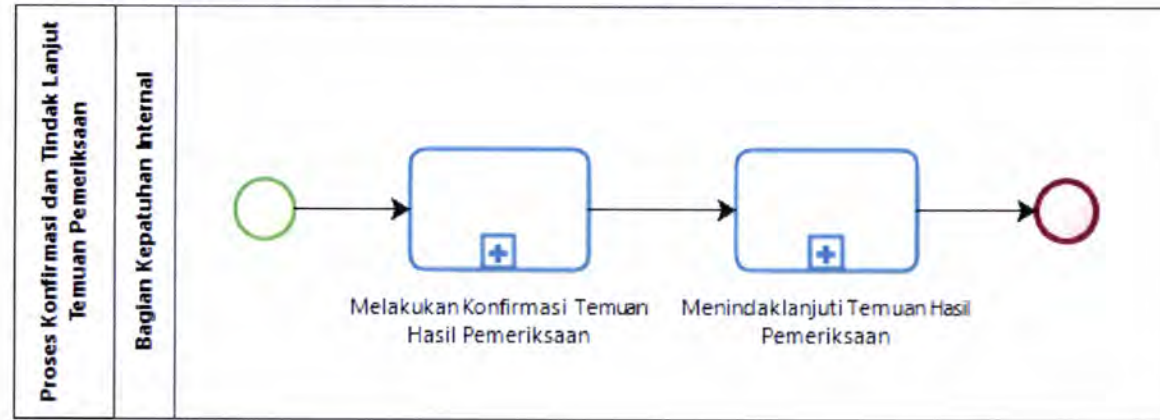
M.1 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL



Merupakan proses pemantauan pengendalian internal di lingkungan DJPPR yang dilakukukan secara reguler maupun irregular. Terdiri dari kelompok proses:

1. Proses Perencanaan Pemantauan Pengendalian Internal;
2. Proses Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal.

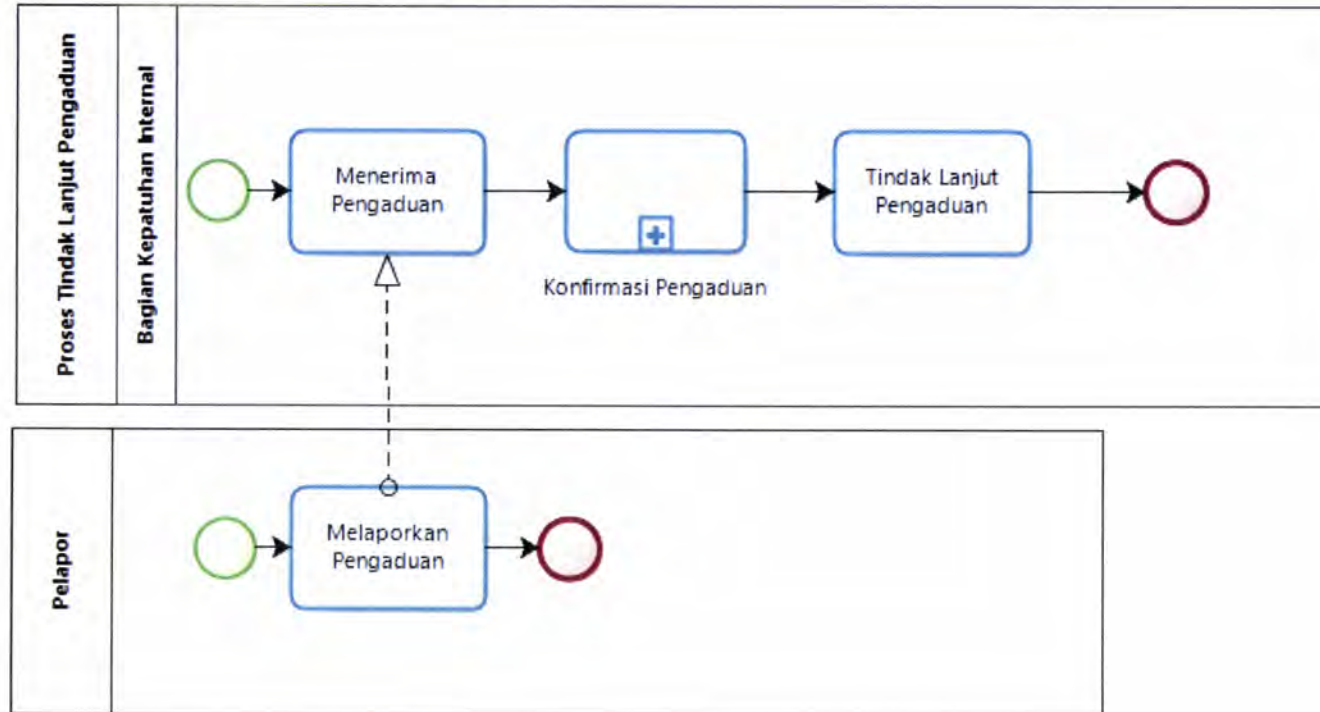
M.2 KLARIFIKASI DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN



Merupakan proses pemberian klarifikasi ataupun tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak aparat pengawasan fungsional. Terdiri dari 2 Kelompok Proses:

1. Proses Melakukan Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan;
2. Proses Menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan.

M.3 TINDAK LANJUT PENGADUAN

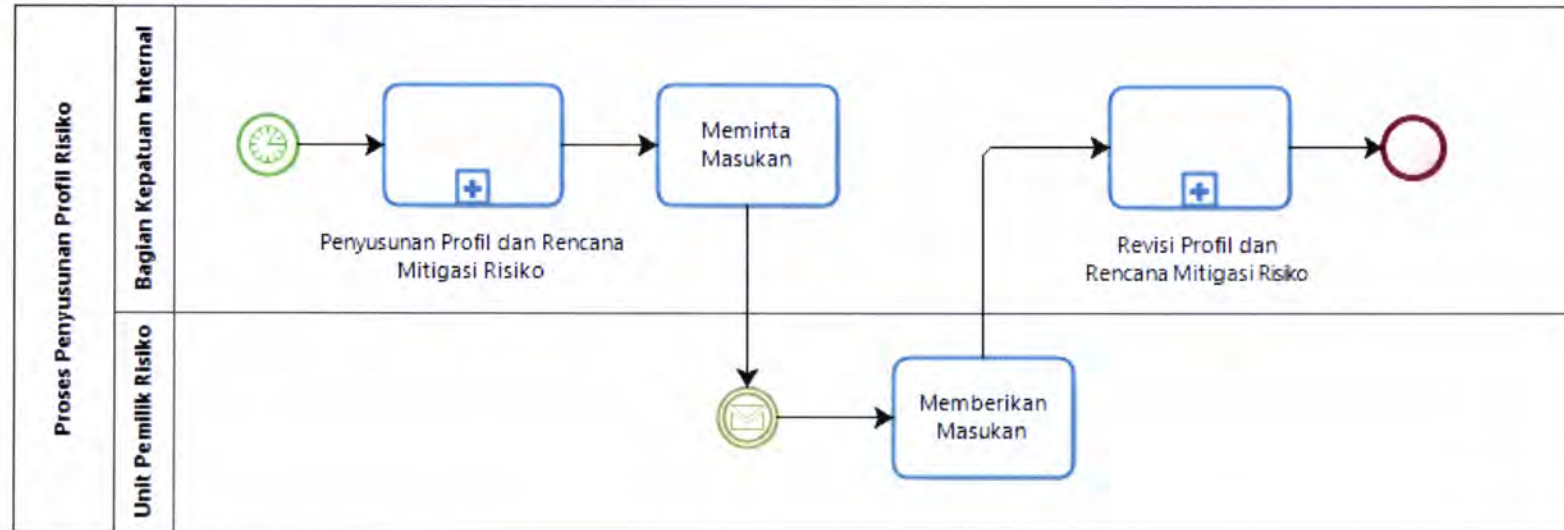


Merupakan proses untuk memantau layanan pengaduan maupun tindak lanjut atas pengaduan yang diajukan oleh pihak ketiga. Terdiri dari proses:

1. Proses Melaporkan Pengaduan;
2. Proses Menerima Pengaduan;
3. Proses Konfirmasi Pengaduan;
4. Proses Tindak Lanjut Pengaduan.

N. MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

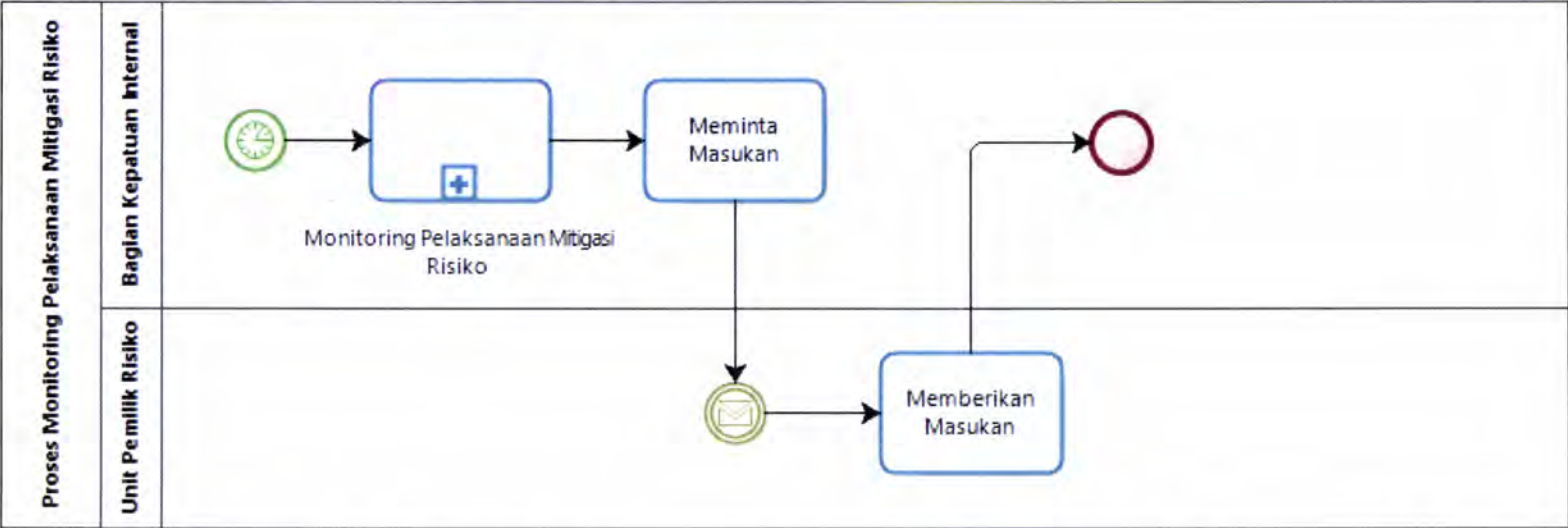
N.1 PENYUSUNAN PROFIL RISIKO



Proses ini merupakan proses untuk menyusun profil dan rencana mitigasi risiko disertai revisi di tahun berjalan. Terdiri dari 4 Kelompok Proses:

1. Proses Penyusunan Profil dan Rencana Mitigasi Risiko;
2. Proses Meminta Masukan;
3. Proses Memberikan Masukan;
4. Proses Revisi Profil dan Rencana Mitigasi Risiko.

N.2 MONITORING PELAKSANAAN MITIGASI RISIKO

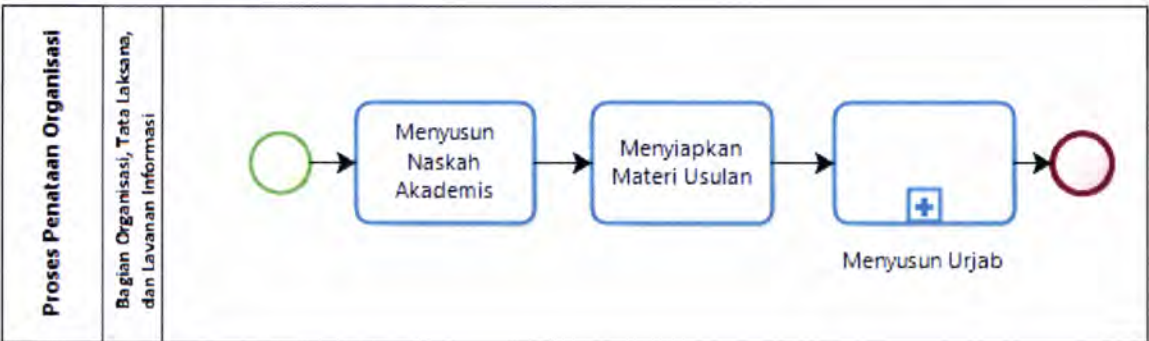


Merupakan proses untuk memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko yang telah didefinisikan di awal tahun termasuk melakukan validasi atas mitigasi yang telah dilakukan. Terdiri dari proses:

- 1. Proses Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko;
- 2. Proses Meminta Masukan;
- 3. Proses Memberikan Masukan.

O. KEORGANISASIAN DAN KETATALAKSANAAN

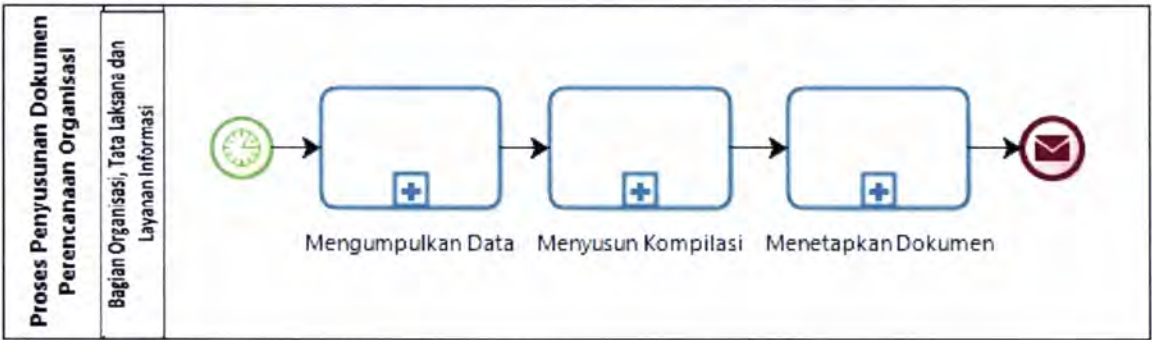
O.1 PENATAAN ORGANISASI



Merupakan proses untuk menyusun organisasi yang diawali dengan penyusunan naskah akademis, menyusun dokumen penataan dan dilanjutkan dengan penyusunan dan penelaahan tugas dan fungsi serta evaluasi uraian jabatan setiap formasi jabatan. Terdiri dari 3 proses yaitu:

1. Proses Menyusun Naskah Akademis;
2. Proses Menyiapkan Materi Usulan;
3. Proses Menyusun Urjab.

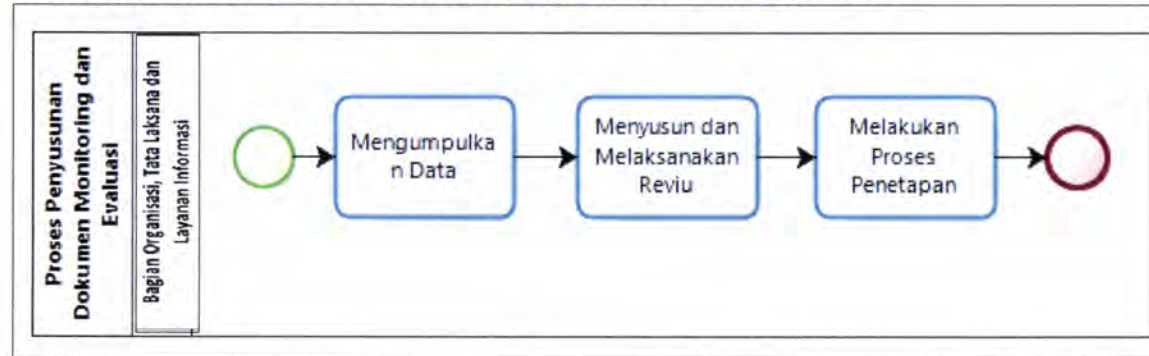
O.2 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ORGANISASI



Proses ini merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi, terdiri dari 3 kelompok proses:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Menyusun Kompilasi;
3. Proses Menetapkan Dokumen.

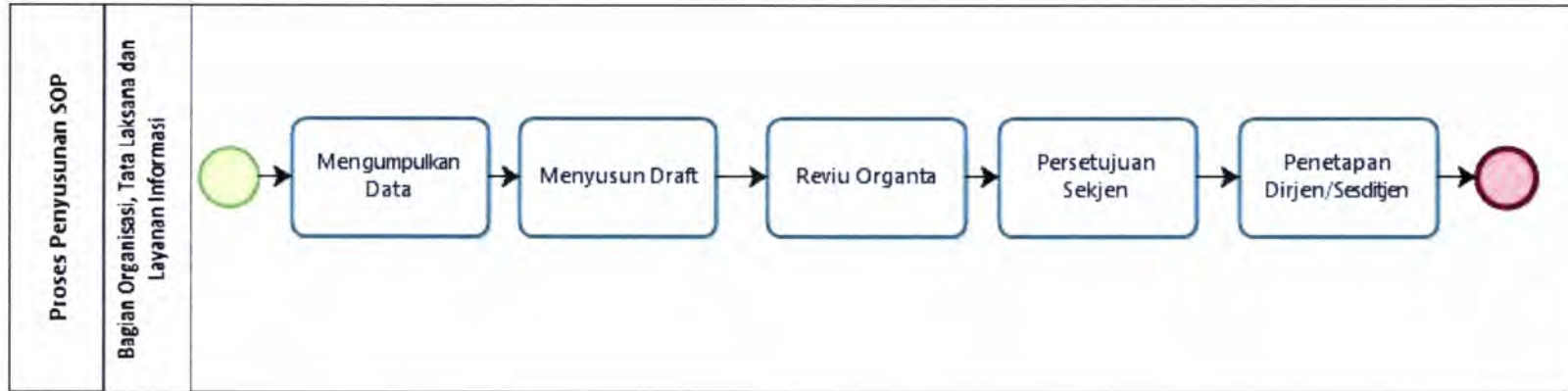
O.3 PENYUSUNAN DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI



Merupakan proses untuk menyusun dokumen monitoring dan evaluasi dari organisasi, antara lain berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Analisis Beban Kerja. Terdiri dari proses:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. hkbnProses Menyusun dan Melaksanakan Reviu;
3. Proses Melakukan Penetapan.

O.4 PENYUSUNAN SOP



Proses ini merupakan proses penyusunan dan penetapan *standar operating procedure* di lingkungan DJPPR. Terdiri dari 5 Proses:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Menyusun Draft;
3. Proses Reviu Organta;
4. Proses Persetujuan Sekjen;
5. Proses Penetapan Dirjen/ Sesditjen.

P. PERATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

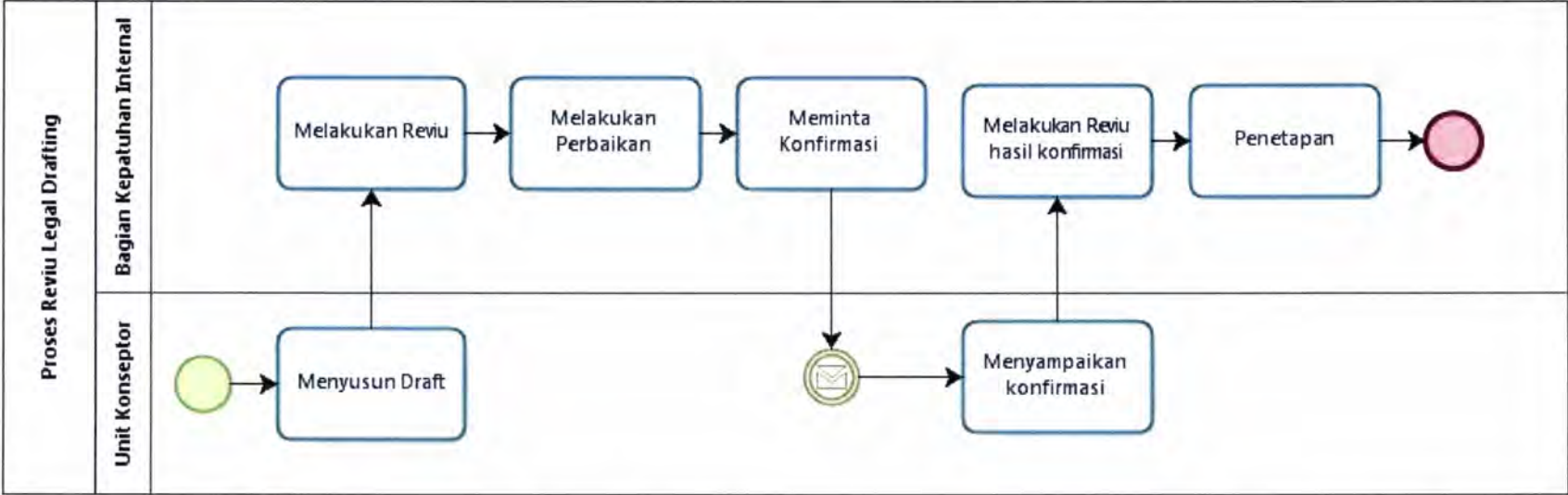
P.1 PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN



Merupakan proses penyusunan draft peraturan dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis di DJPPR. Terdiri dari 4 proses:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Melakukan Analisa;
3. Proses Melakukan Pembahasan;
4. Proses Menyusun Draft.

P.2 REVIU LEGAL DRAFTING

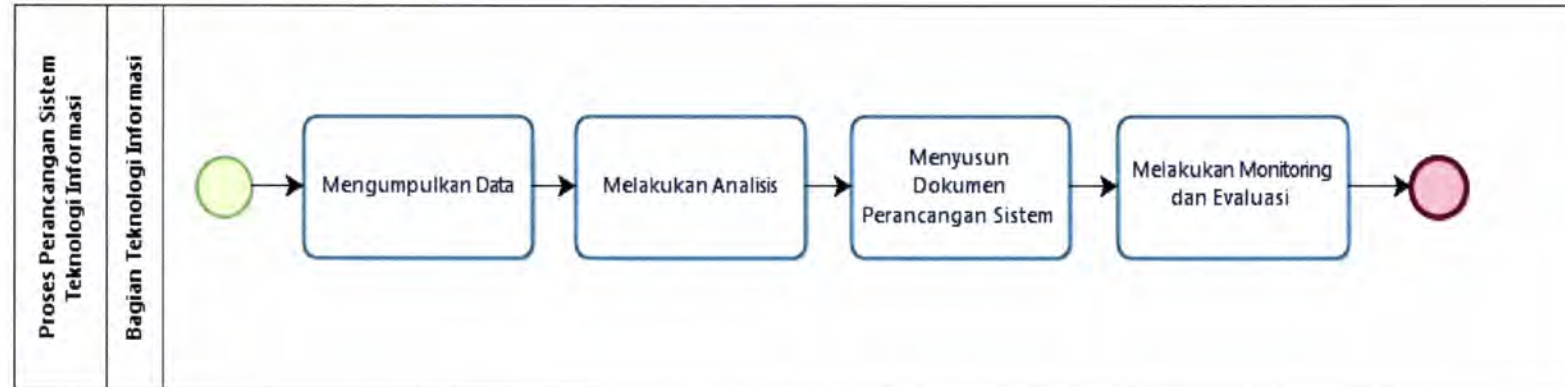


Proses Reviu Legal Drafting merupakan proses penelaahan rancangan peraturan/keputusan tingkat dirjen maupun tingkat kementerian. Terdiri dari:

1. Proses Menyusun Draft;
2. Proses Melakukan Reviu;
3. Proses Melakukan Perbaikan;
4. Proses Meminta Konfirmasi;
5. Proses Menyampaikan Konfirmasi;
6. Proses Melakukan Reviu Hasil Konfirmasi;
7. Proses Penetapan.

Q. TEKNOLOGI INFORMASI

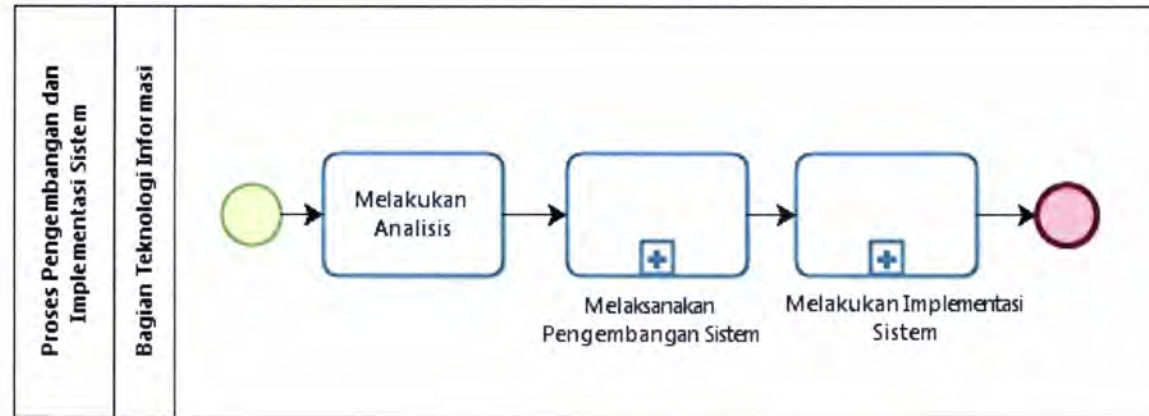
Q.1 PERANCANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI



Merupakan proses menganalisis serta merancang dokumen system. Selain itu proses ini juga terdiri dari proses monitoring dan evaluasi. Terdiri dari 4 proses:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Melakukan Analisis;
3. Proses Menyusun Dokumen Perancangan Sistem;
4. Proses Melakukan Monitoring dan Evaluasi.

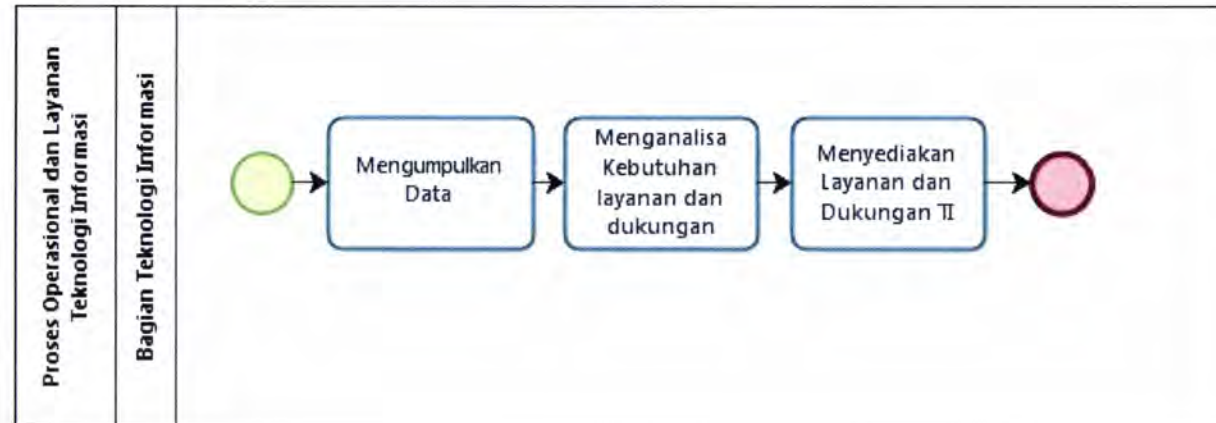
Q.2 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM



Merupakan proses untuk mengembangkan sistem informasi, sekaligus merencanakan dan mengawal implementasi dari sistem informasi. Terdiri dari 3 Proses yaitu:

1. Proses Melakukan Analisis;
2. Proses Melaksanakan Pengembangan Sistem;
3. Proses Melakukan Implementasi.

Q.3 OPERASIONAL DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

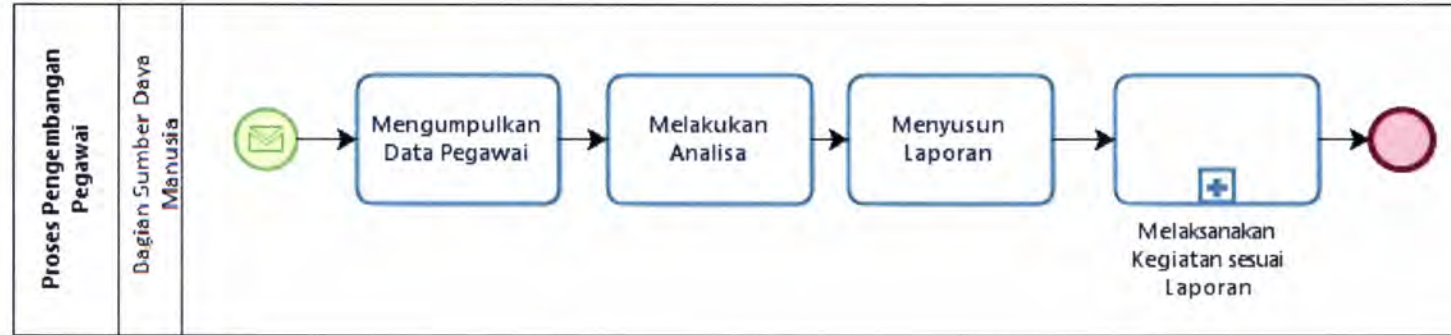


Merupakan proses untuk mengelola layanan teknologi informasi dan dukungan kegiatan operasional teknologi informasi di Lingkungan DJPPR. Terdiri dari 3 Proses yaitu:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Menganalisa Kebutuhan Layanan dan Dukungan;
3. Proses Menyediakan Layanan dan Dukungan TI.

R. KEPEGAWAIAN

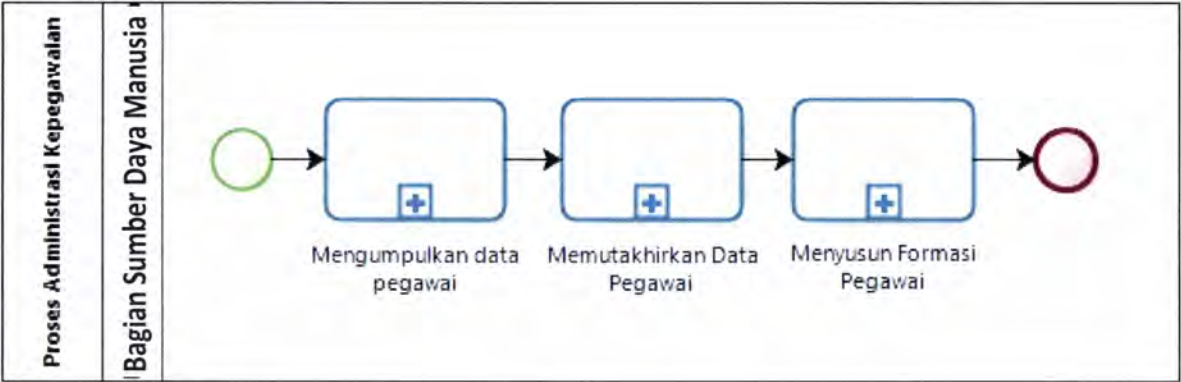
R.1 PENGEMBANGAN PEGAWAI



Proses yang dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan potensi dan kompetensi pegawai dengan pelaksanaan diklat serta mengatur dan melaksanakan pola mutasi. Terdiri dari 4 Proses yaitu:

1. Proses Mengumpulkan Data Pegawai;
2. Proses Melakukan Analisa;
3. Proses Menyusun Laporan;
4. Proses Melaksanakan Kegiatan Sesuai Laporan.

R.2 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

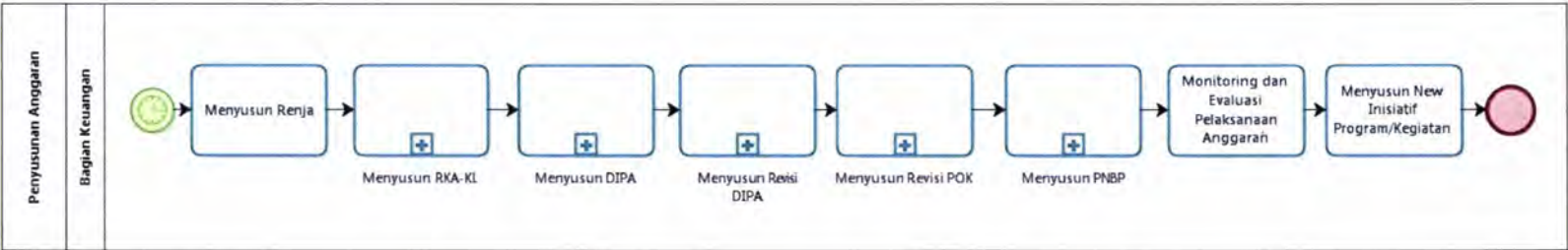


Proses untuk mengelola data administratif pegawai (data penghargaan dan hukuman disiplin pegawai). Proses ini dibantu dengan aplikasi SIMPEG (Sistem InforMasi KePEGawaian). Terdapat 3 Proses yaitu:

- 1. Proses Mengumpulkan Data Pegawai;
- 2. Proses Memutakhirkan Data Pegawai;
- 3. Proses Menyusun Formasi Pegawai.

S. PENGELOLAAN KEUANGAN

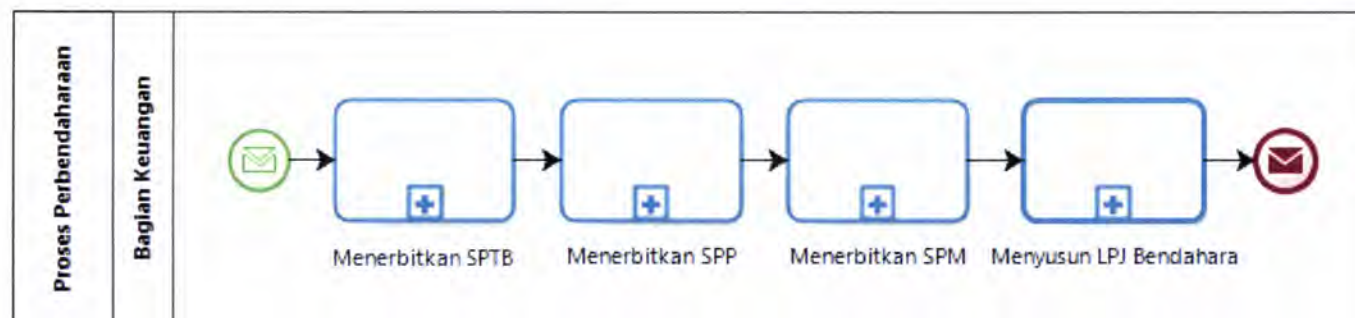
S.1 PENYUSUNAN ANGGARAN



Proses yang bertujuan untuk menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran DJPPR. Diantaranya terdapat proses penyusunan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) , DIPA(Daftar Isian Pelaksanaan Anggggaran), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan Revisi Anggaran. Terdiri dari 8 Proses yaitu:

1. Proses Menyusun Renja;
2. Proses Menyusun RKA-kl;
3. Proses Menyusun DIPA;
4. Proses Menyusun Revisi DIPA;
5. Proses Menyusun Revisi POK;
6. Proses Menyusun PNBP;
7. Proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
8. Proses Menyusun New Inisiatif Program /Kegiatan.

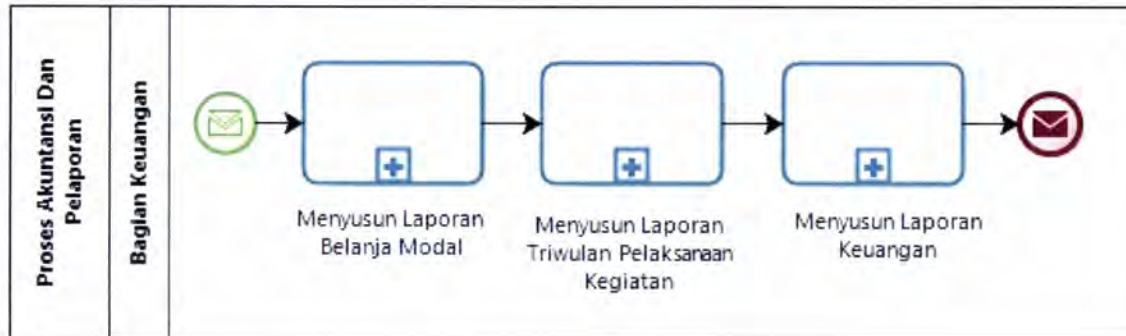
S.2 PERBENDAHARAAN



Merupakan proses yang bertujuan untuk menyelesaikan urusan perbendaharaan dan penerbitan dokumen pembayaran. Terdiri dari 4 Kelompok Proses yaitu:

1. Proses Menerbitkan SPTB;
2. Proses Menerbitkan SPP;
3. Proses Menerbitkan SPM;
4. Proses Menyusun LPJ Bendahara.

S.3 AKUNTANSI DAN PELAPORAN

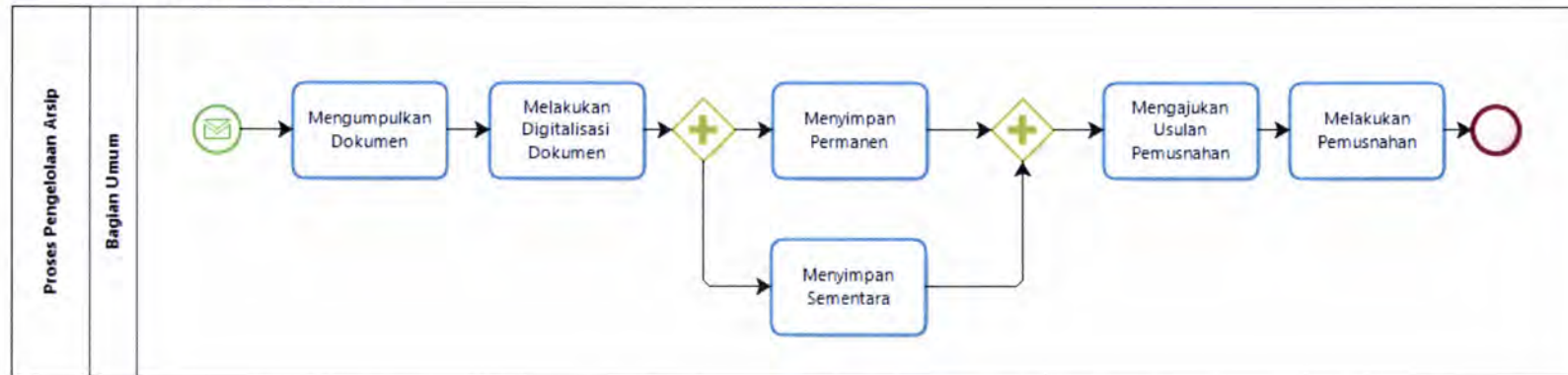


Proses yang bertujuan untuk melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Terdiri dari:

1. Proses Menyusun Laporan Belanja Modal;
2. Proses Menyusun Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan;
3. Proses Menyusun Laporan Keuangan.

T. ADMINISTRASI UMUM

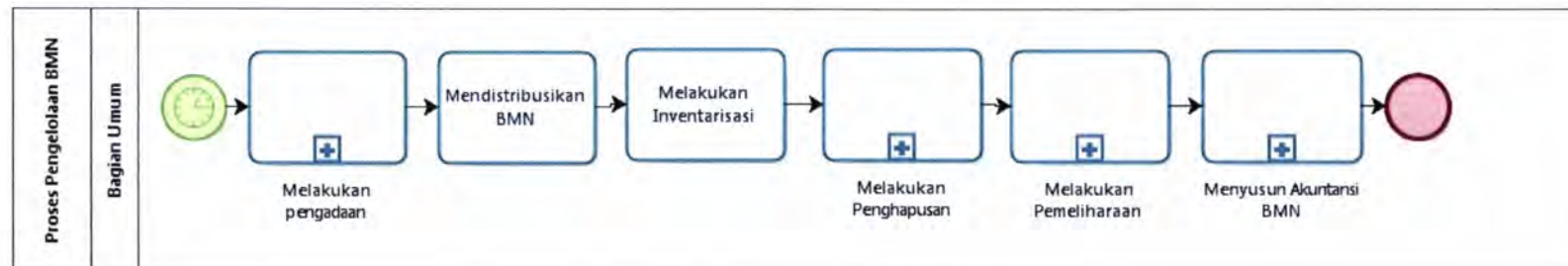
T.1 PENGELOLAAN ARSIP



Proses yang bertujuan untuk mengelola dokumen arsip DJPPR termasuk pemusnahan arsip yang tidak lagi digunakan. Menggunakan Aplikasi EFS (Electronic Filling System). Terdiri dari proses:

1. Proses Mengumpulkan Dokumen;
2. Proses Melakukan Digitalisasi Dokumen;
3. Proses Menyimpan Permanen;
4. Proses Menyimpan Sementara;
5. Proses Mengajukan Usulan Pemenuhan;
6. Proses Melakukan Pemusnahan.

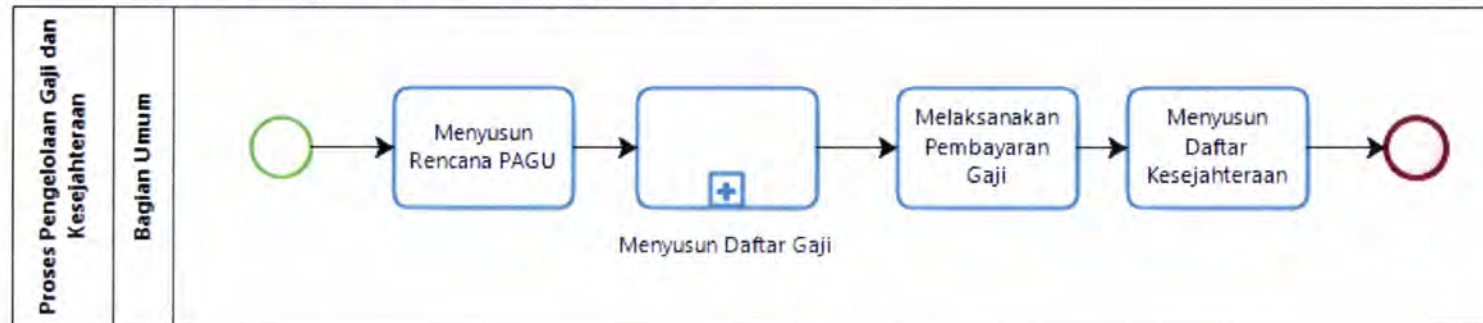
T.2 PENGELOLAAN BMN



Merupakan proses pengelolaan barang milik negara dimulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, penghapusan serta pelaksanaan akuntansi BMN, proses ini dibantu menggunakan aplikasi SIMAK. Terdiri dari proses:

1. Proses Melakukan Pengadaan;
2. Proses Mendistribusikan BMN;
3. Proses Melakukan Inventarisasi;
4. Proses Melakukan Penghapusan;
5. Proses Melakukan Pemeliharaan;
6. Proses Menyusun Akuntansi BMN.

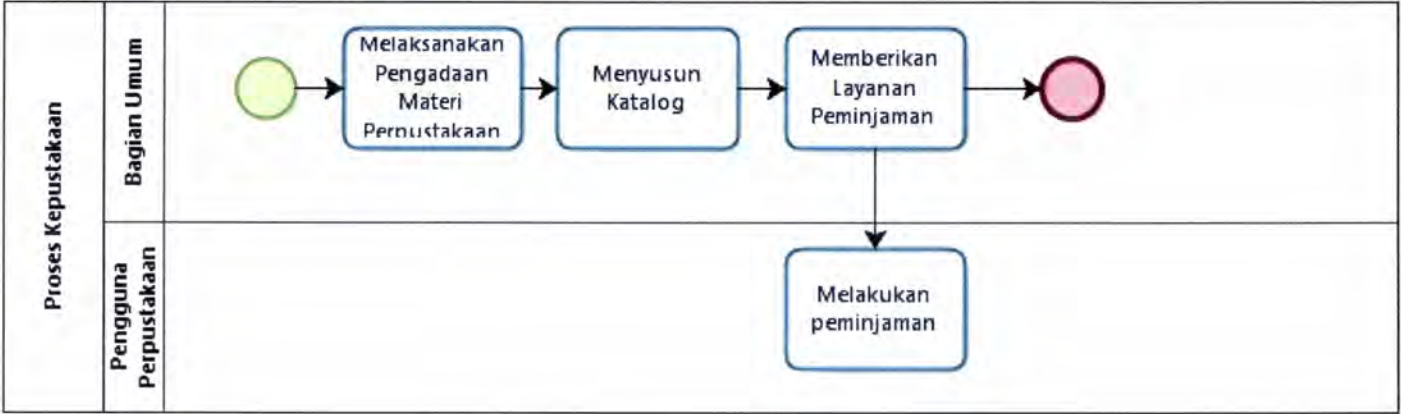
T.3 PENGELOLAAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN



Proses ini merupakan proses yang meliputi fungsi berupa penyusunan Pagu anggaran belanja pegawai, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, serta pengelolaan dokumen pembayaran terkait belanja pegawai. Selain itu, juga mengelola hal lain berkaitan dengan kesejahteraan pegawai seperti uang makan dan lembur. Terdiri dari Proses:

1. Proses Menyusun Rencana PAGU;
2. Proses Menyusun Daftar Gaji;
3. Proses Melaksanakan Pembayaran Gaji;
4. Proses Menyusun Daftar Kesejahteraan.

T.4 KEPUSTAKAAN



Proses yang bertujuan untuk mengelola perpustakaan yang terdiri dari pengadaan materi perpustakaan, penyusunan katalog dan operasional perpustakaan seperti peminjaman buku dan lainnya. Terdiri dari 4 Proses yaitu:

- 1. Proses Melaksanakan Pengadaan Materi Perpustakaan;
- 2. Proses Menyusun Katalog;
- 3. Proses Memberikan Layanan Peminjaman;
- 4. Proses Melakukan Peminjaman.

U. KESEKRETARIATAN

U.1 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN



Proses yang melakukan pengelolaan hal yang berkaitan dengan fungsi sekretaris seperti penatausahaan surat, penyusunan dan penyiapan dukungan rapat, administrasi absensi pegawai dan lainnya. Terdiri dari 3 proses yaitu:

1. Proses Mengumpulkan Data;
2. Proses Menyusun Daftar Kebutuhan Kesekretariatan;
3. Proses Menyediakan Dukungan Kebutuhan Kesekretariatan.

U.2 PROTOKOLER



Proses yang bertujuan menyediakan fasilitas layanan terhadap pimpinan dan tamu penting di lingkungan DJPPR. Terdiri dari proses:

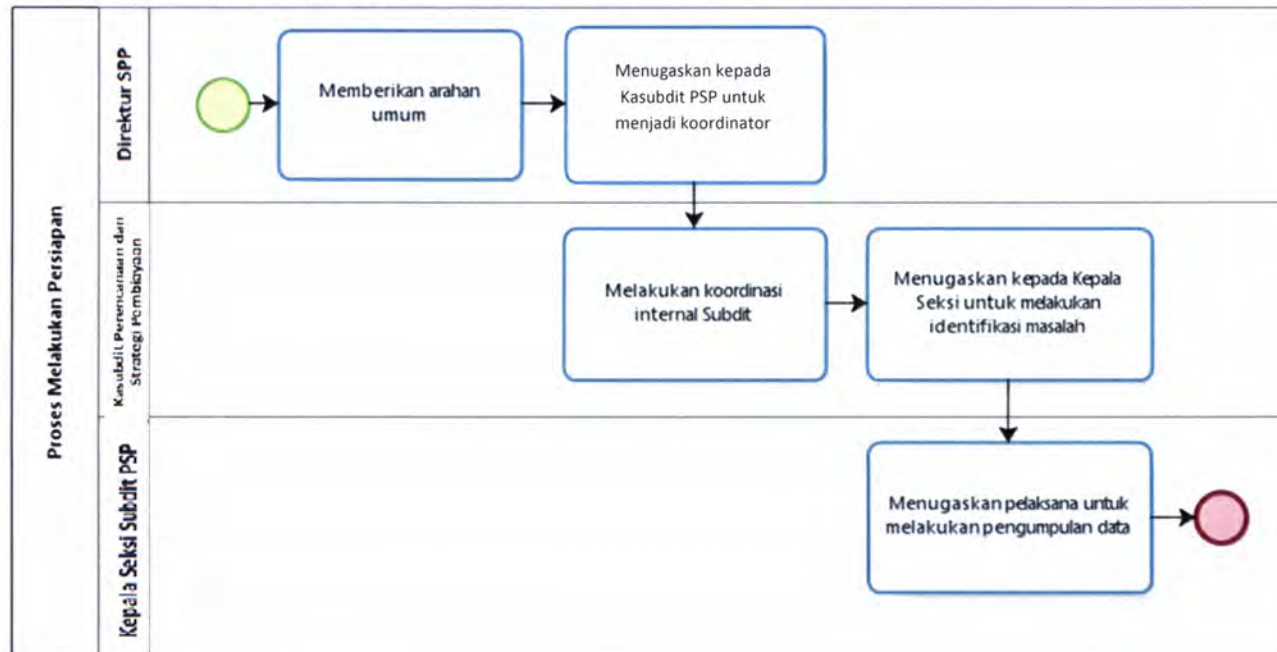
1. Proses Menyiapkan Dokumen Perjalanan;
2. Proses Menyiapkan Dukungan Akomodasi Transportasi;
3. Proses Melakukan Pendampingan Pejabat.

BAB V PROSES BISNIS LEVEL 3

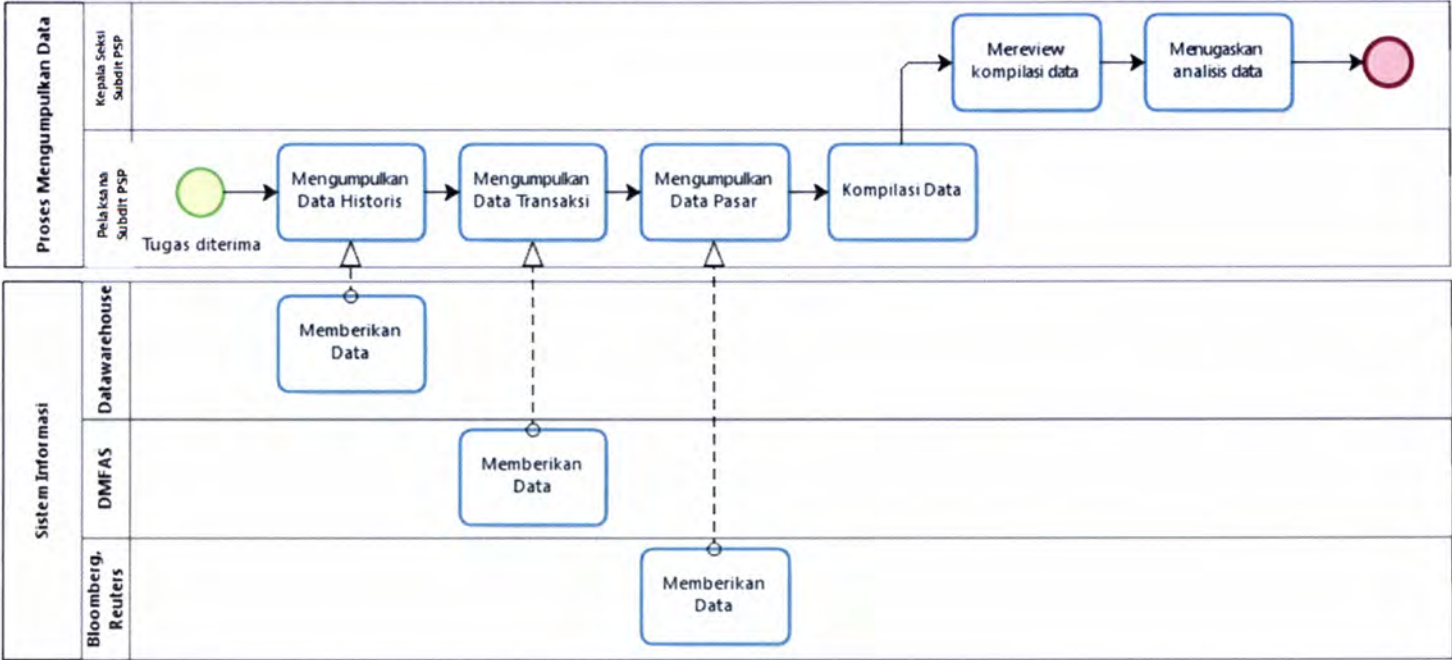
A. PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN

A.1 PENYUSUNAN STRATEGI UTANG JANGKA MENENGAH

A.1.01 MELAKUKAN PERSIAPAN

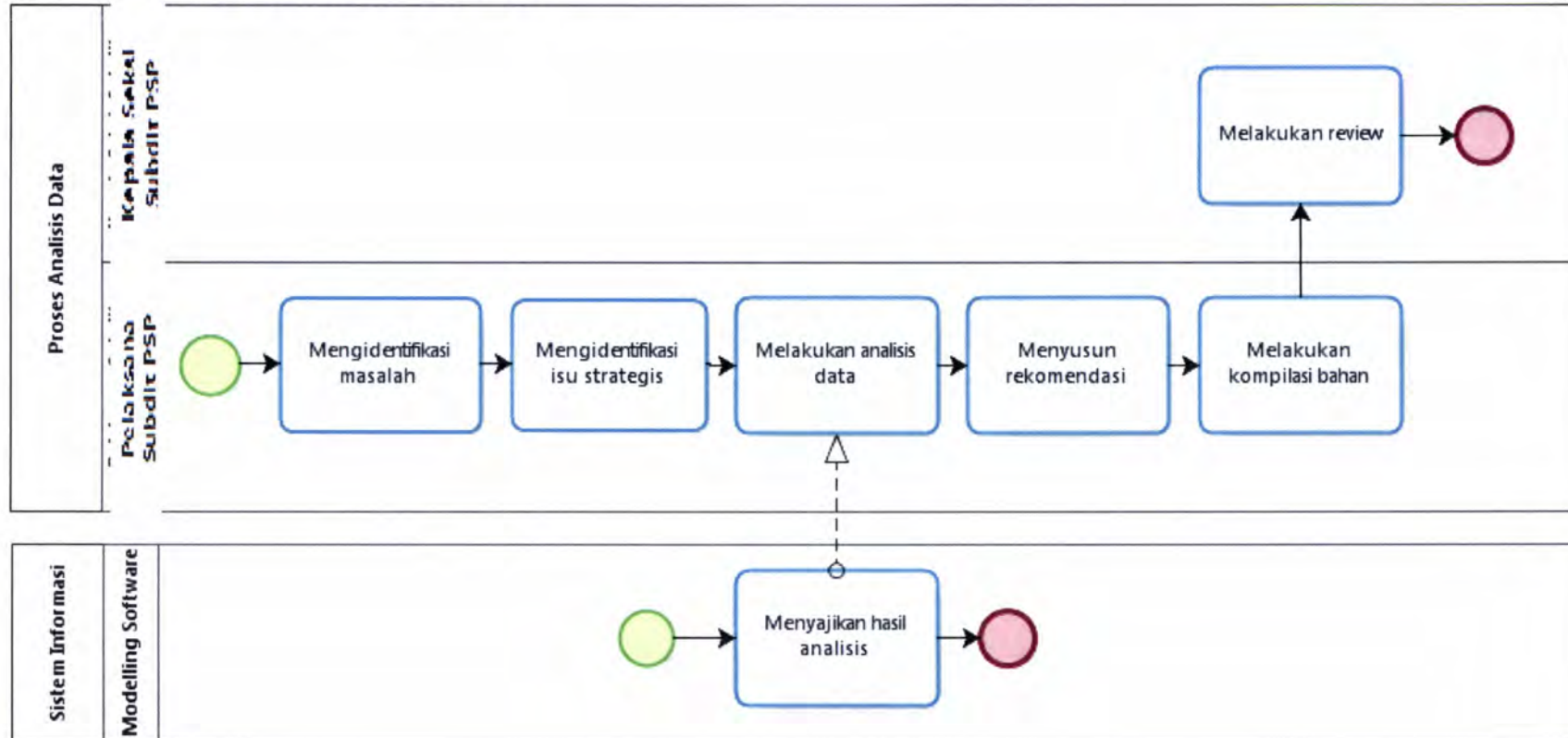


A.1.02 MENGUMPULKAN DATA

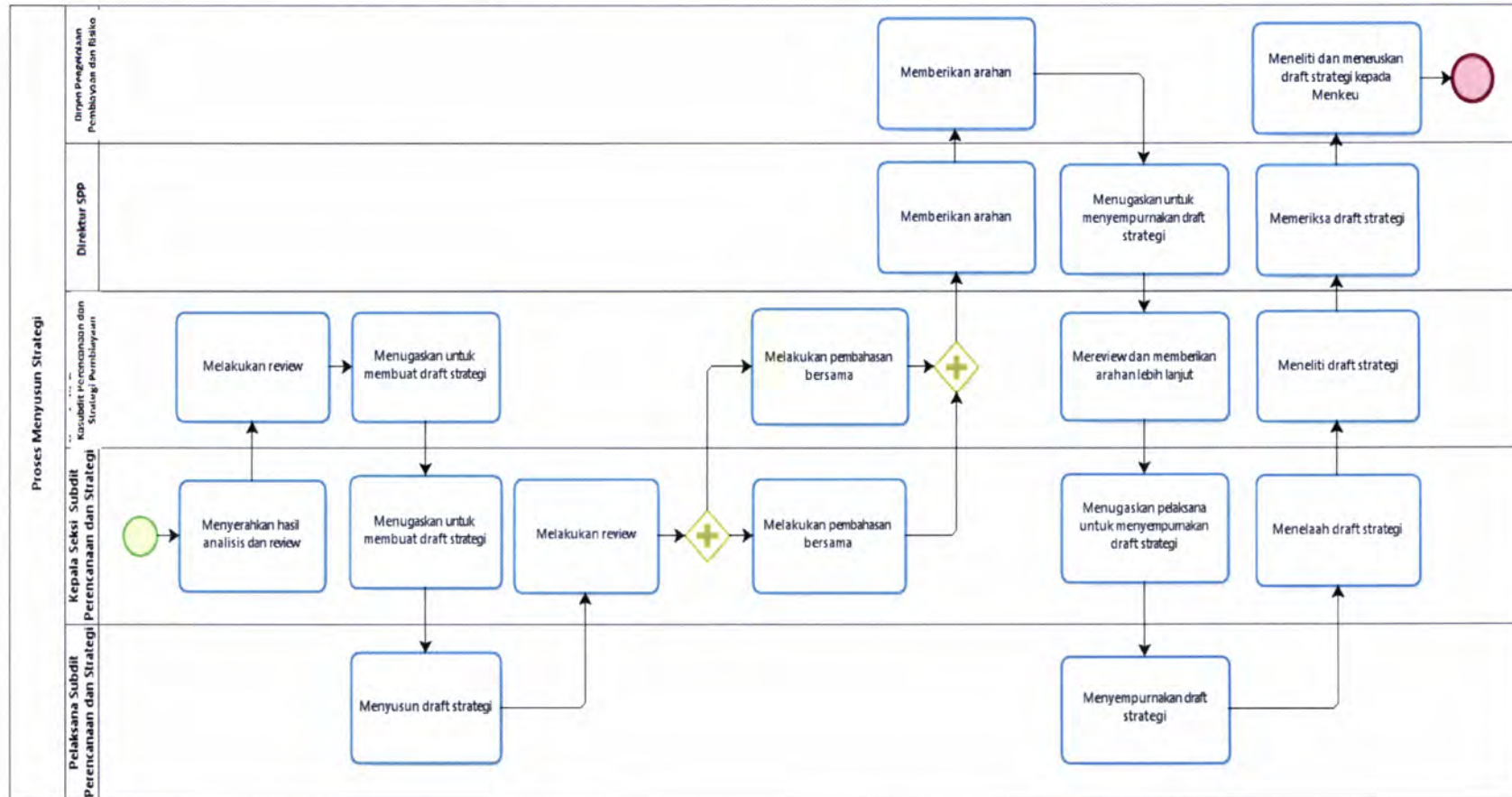


Handwritten signature

A.1.03 MENGANALISIS DATA

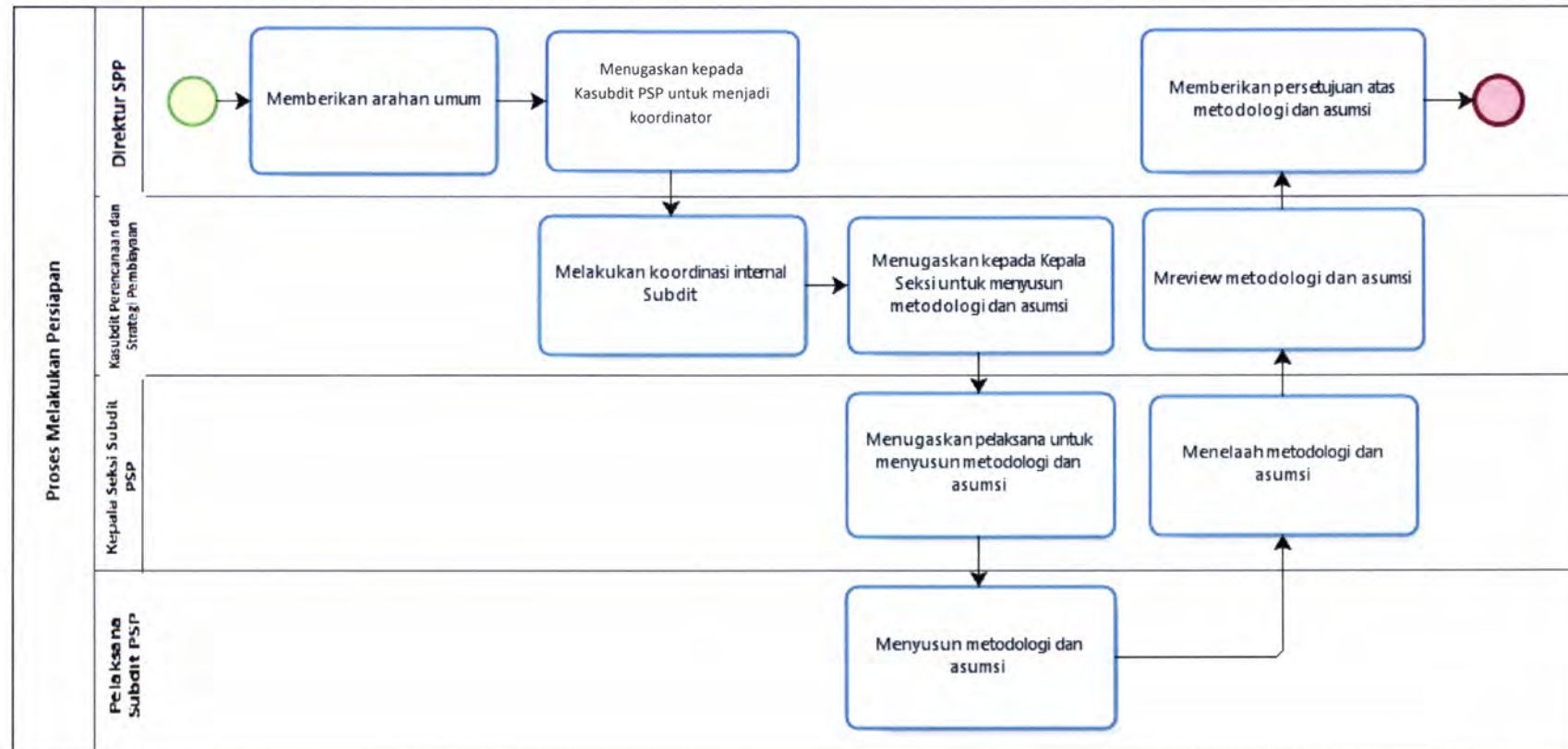


A.1.04 MENYUSUN STRATEGI

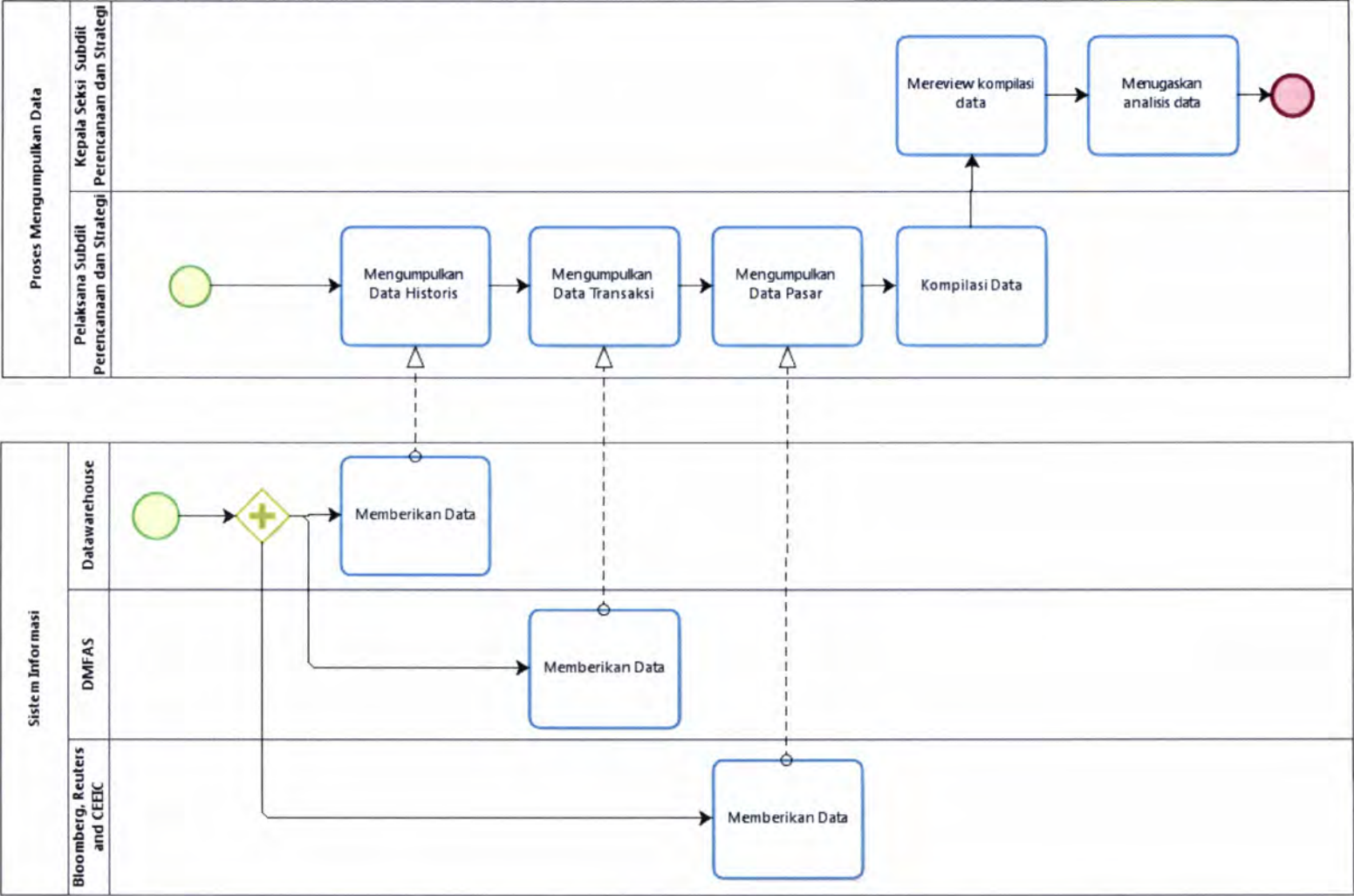


A.2 PENYUSUNAN STRATEGI UTANG TAHUNAN

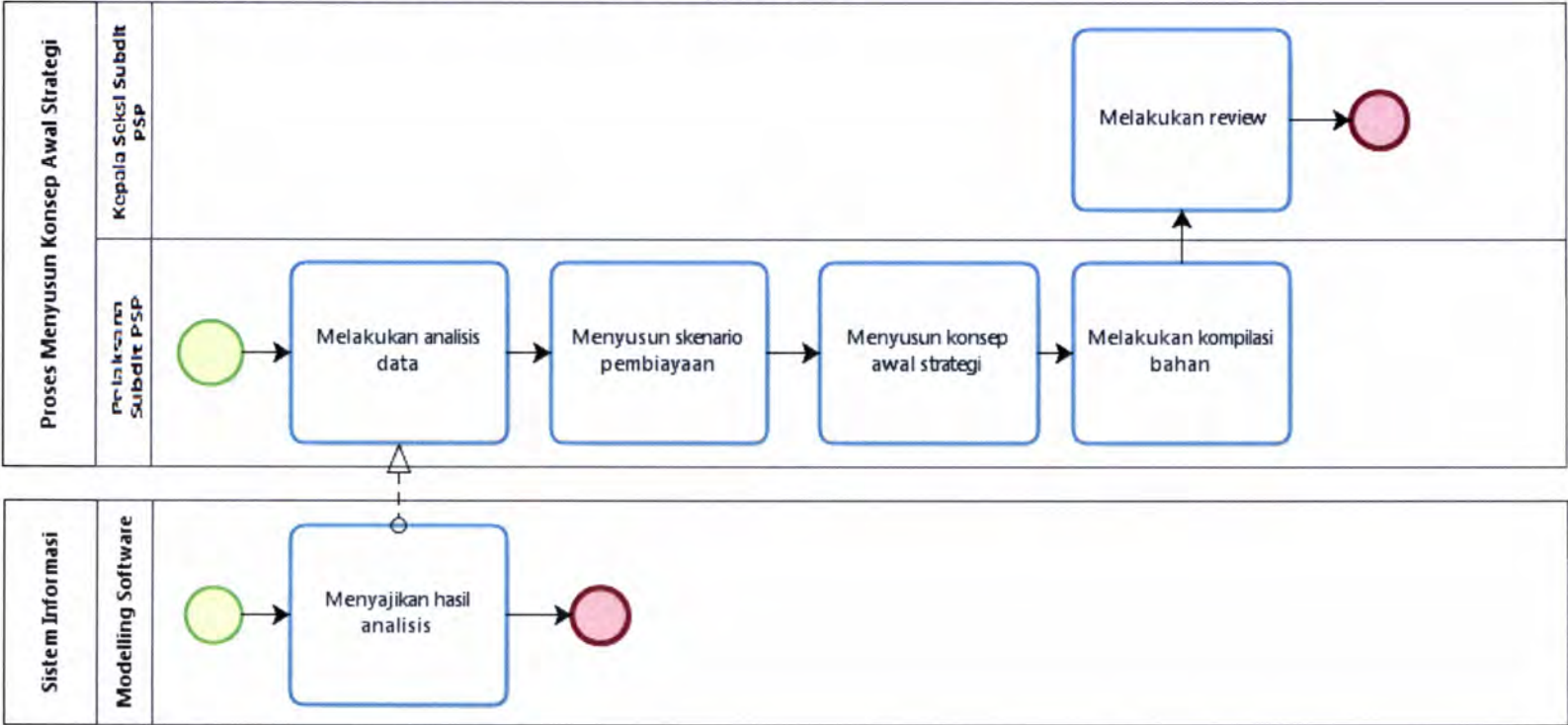
A.2.01 MELAKUKAN PERSIAPAN



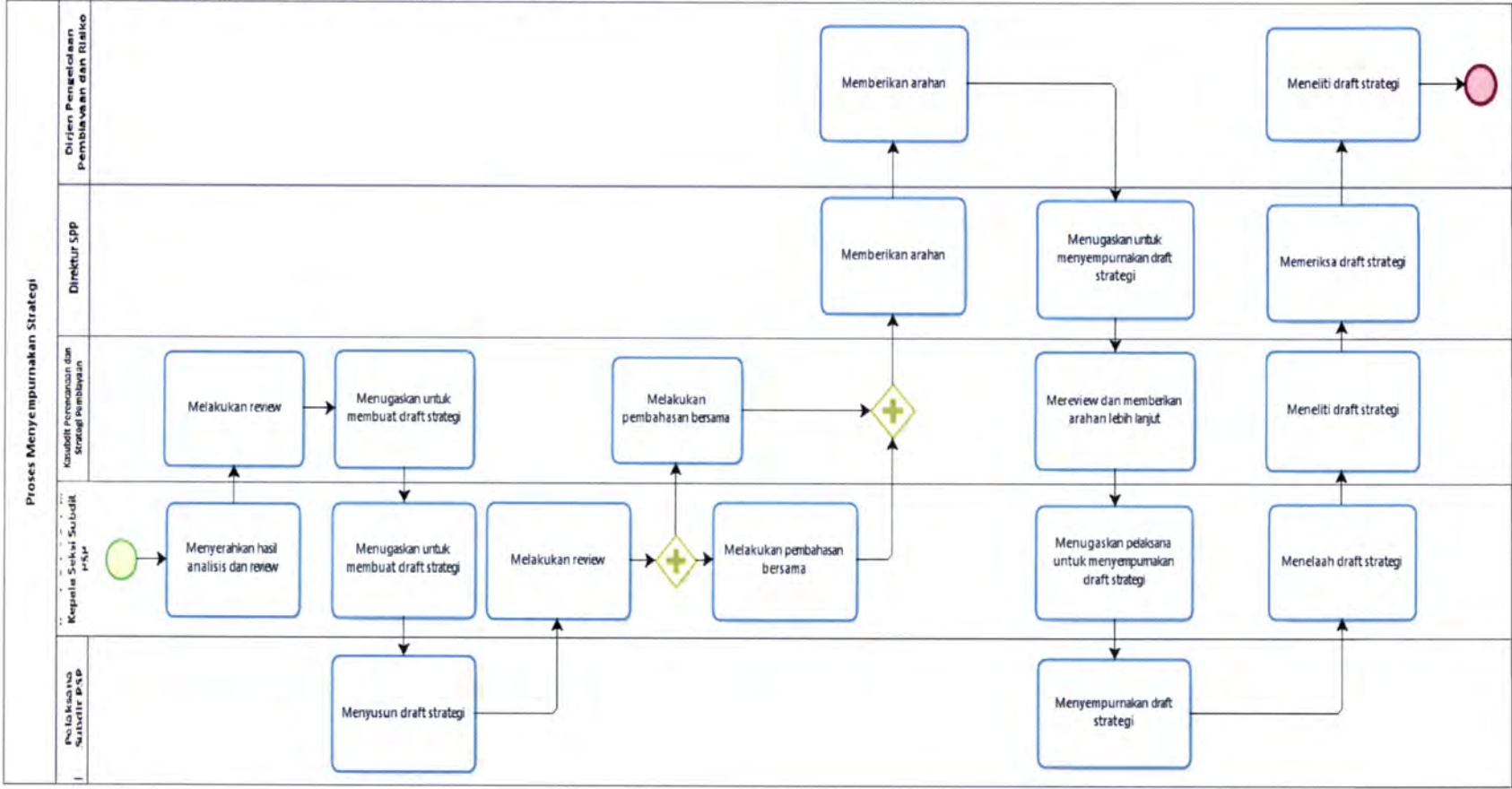
A.2.02 MENGUMPULKAN DATA



A.2.03 MENYUSUN KONSEP AWAL STRATEGI

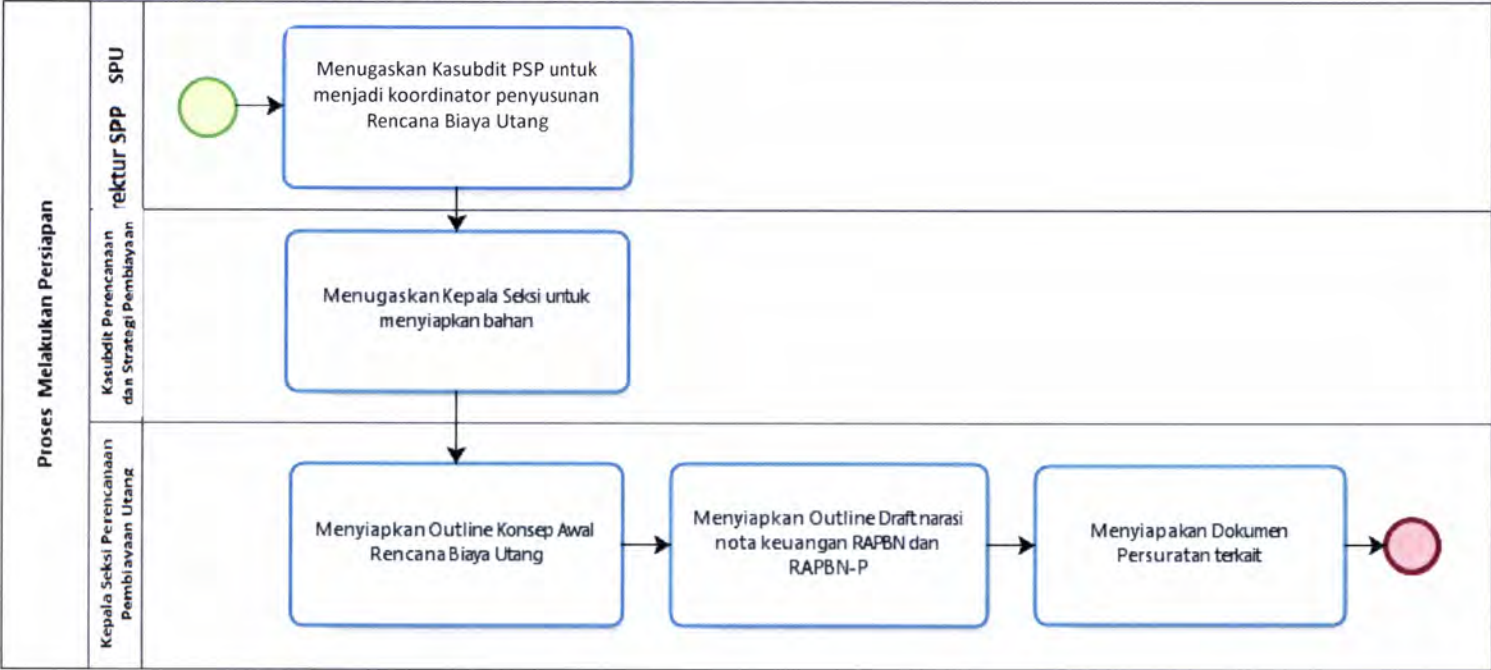


A.2.04 MENYEMPURNAKAN STRATEGI

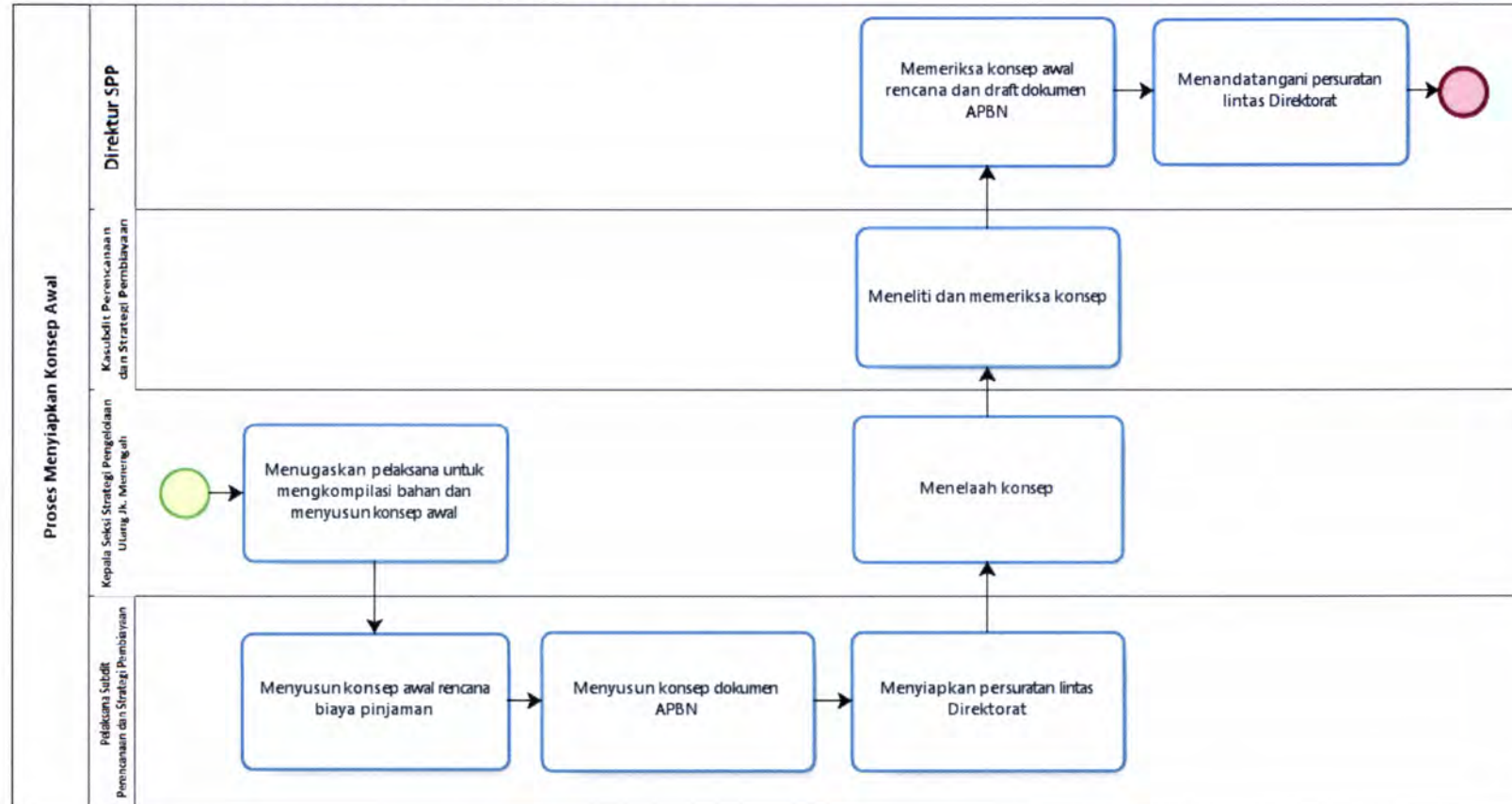


A.3 PENYUSUNAN RENCANA BIAYA UTANG

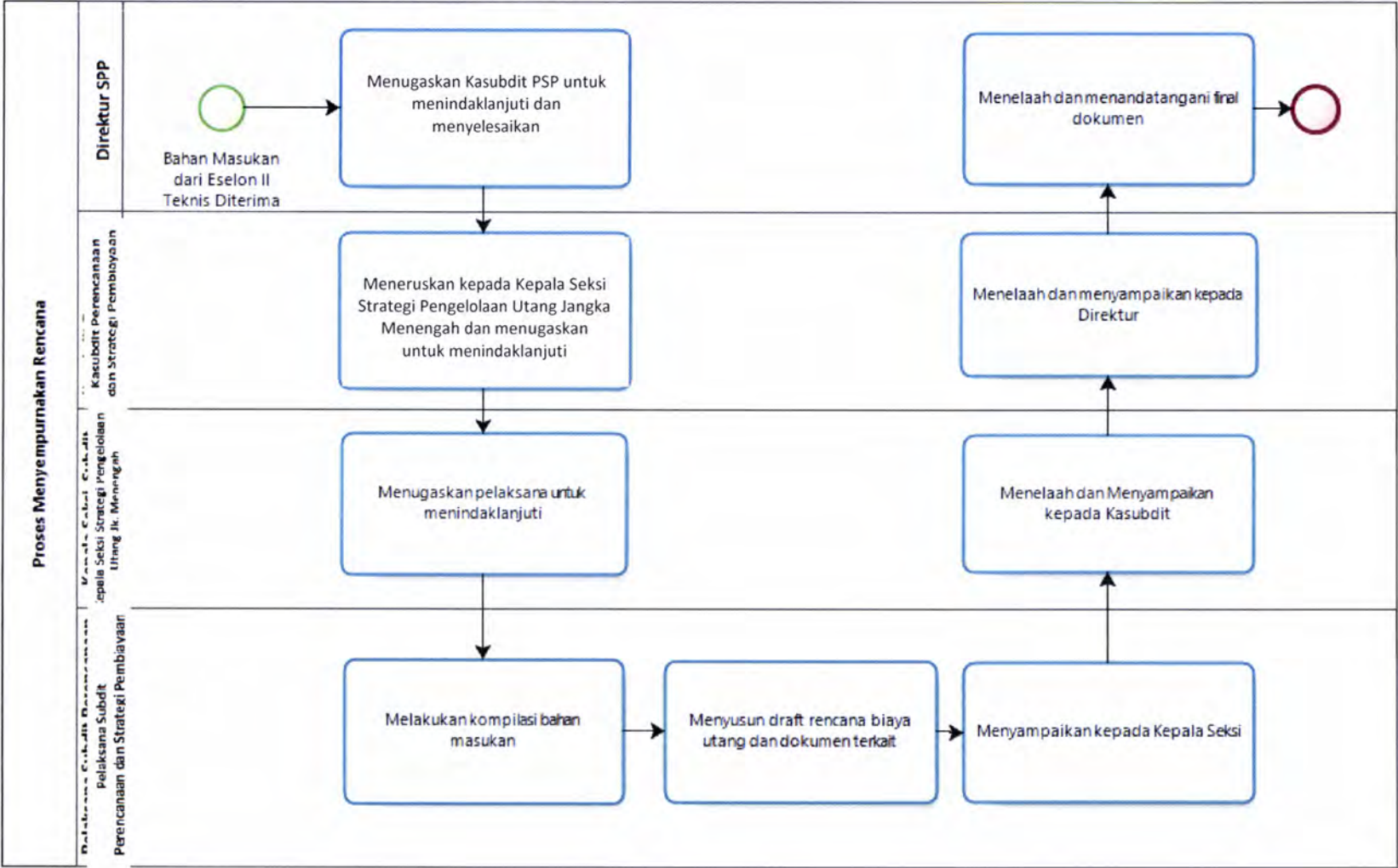
A.3.01 MELAKUKAN PERSIAPAN



A.3.02 MENYIAPKAN KONSEP AWAL

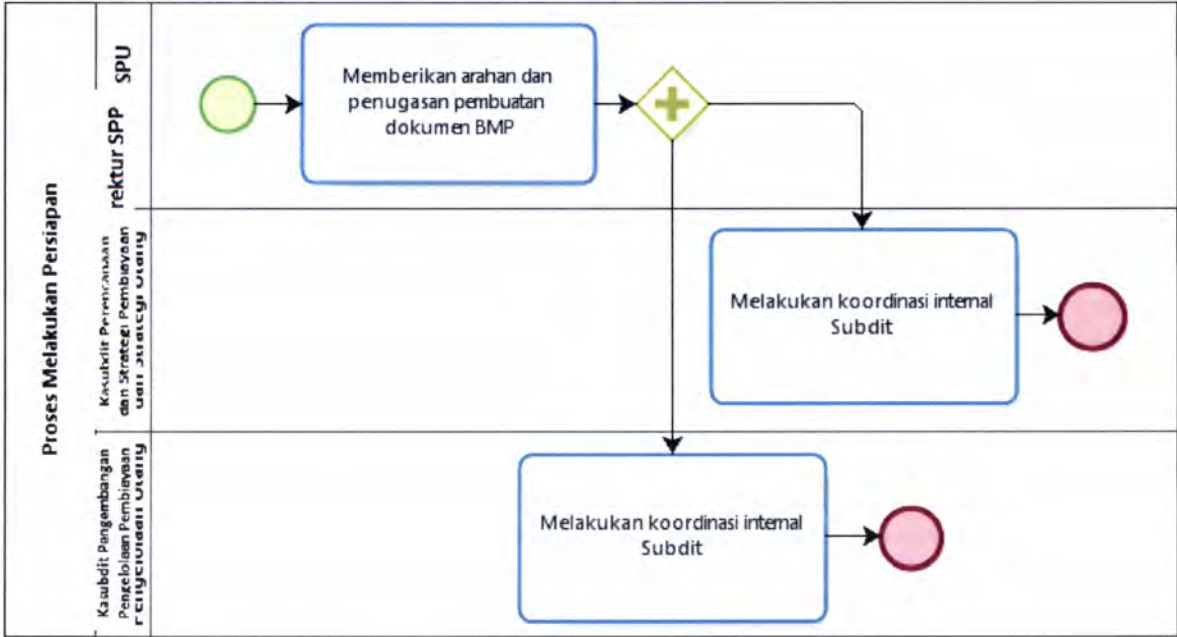


A.3.03 MENYEMPURNAKAN RENCANA



A.4 PENYUSUNAN DOKUMEN BATAS MAKSIMUM PINJAMAN

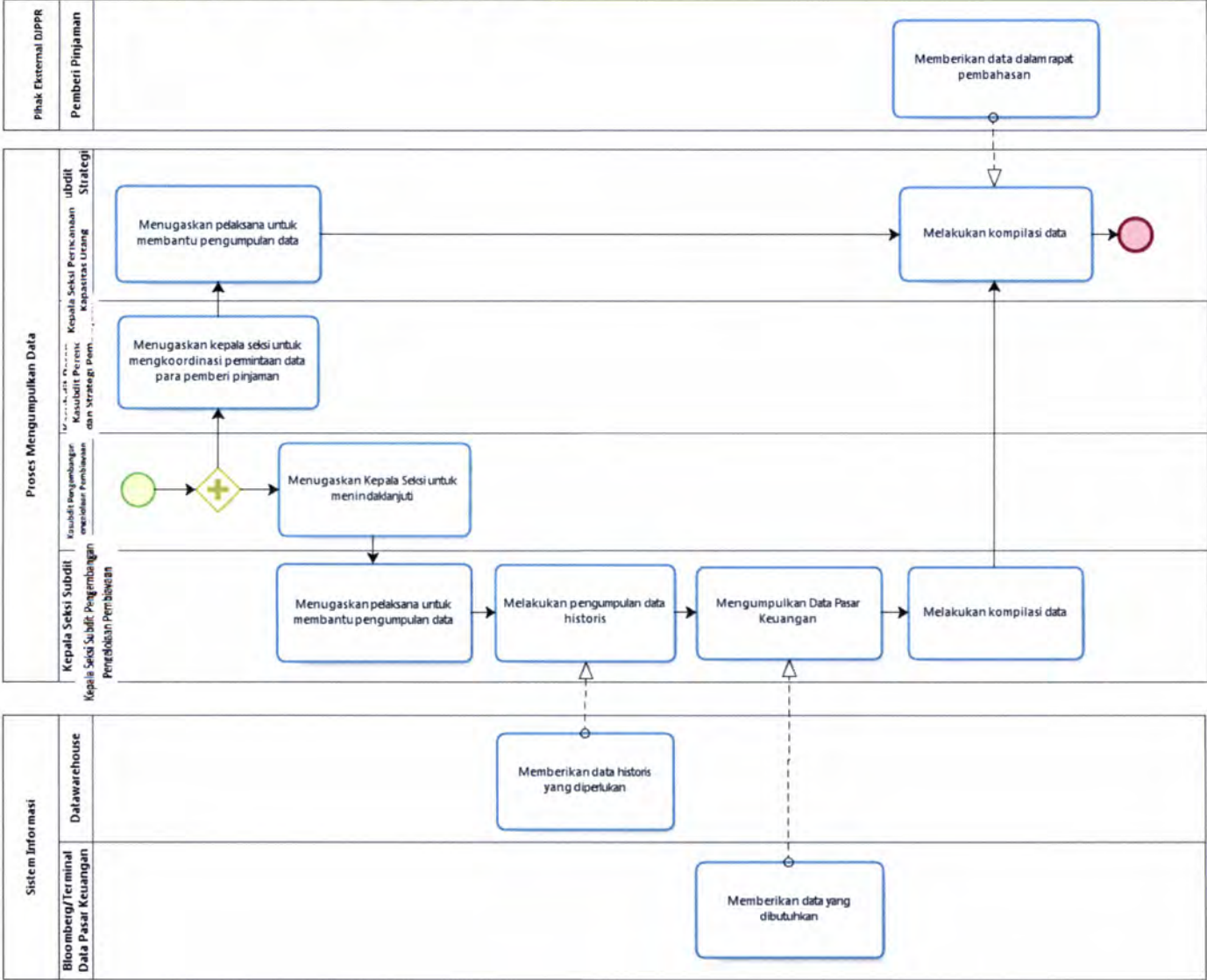
A.4.01 MELAKUKAN PERSIAPAN



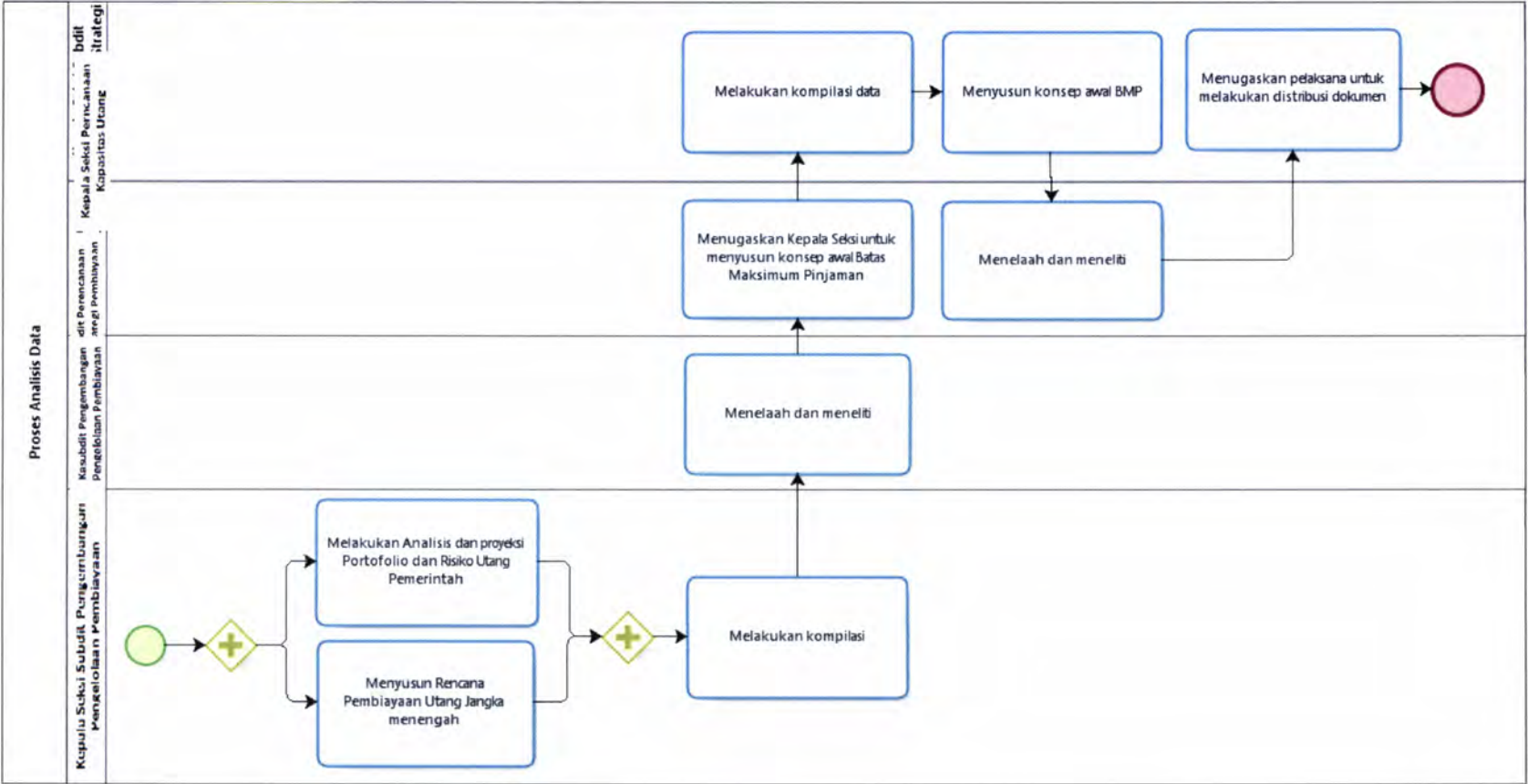
2T

Agus

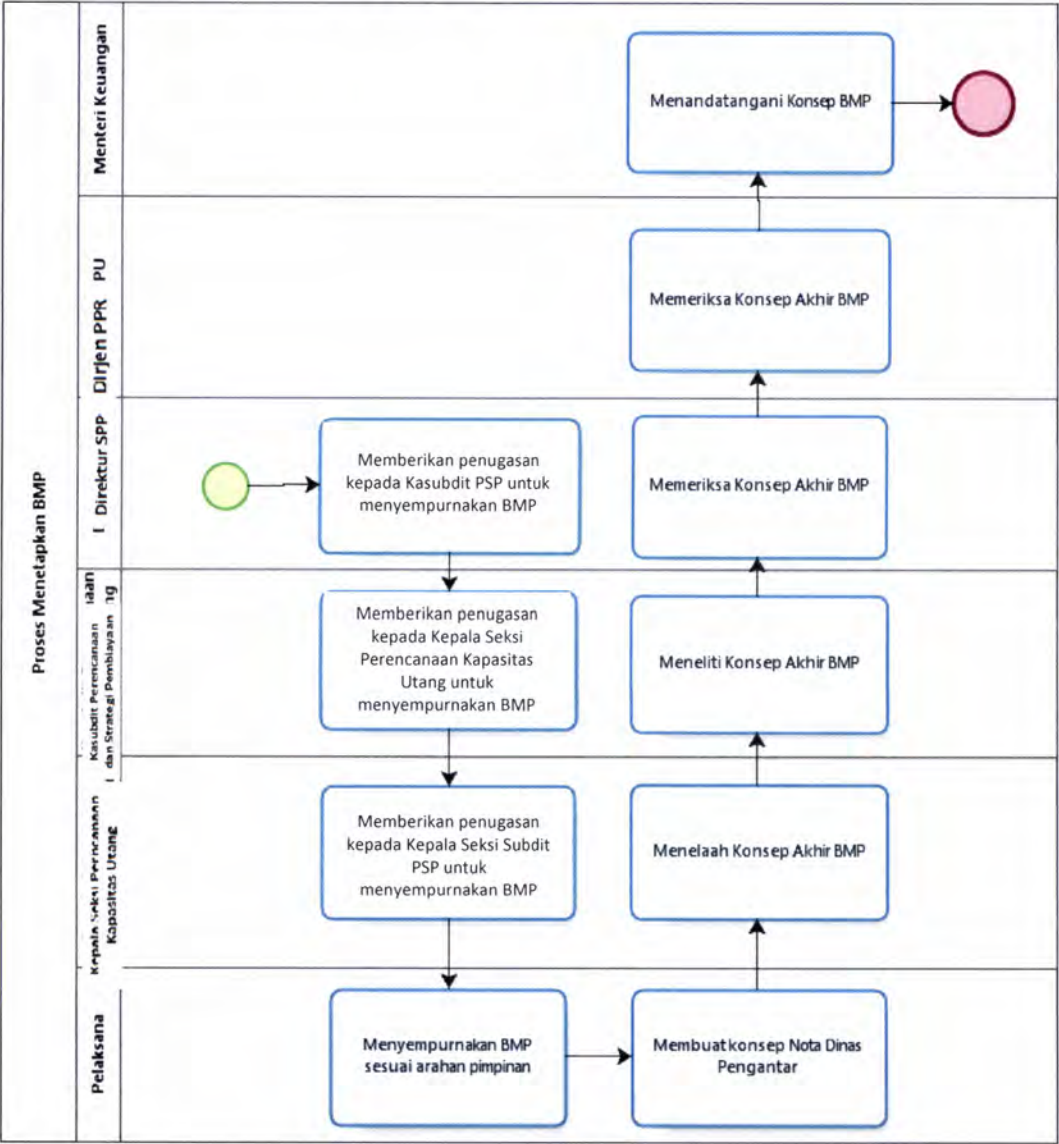
A.4.02 MENGUMPULKAN DATA



A.4.03 MENGANALISIS DATA

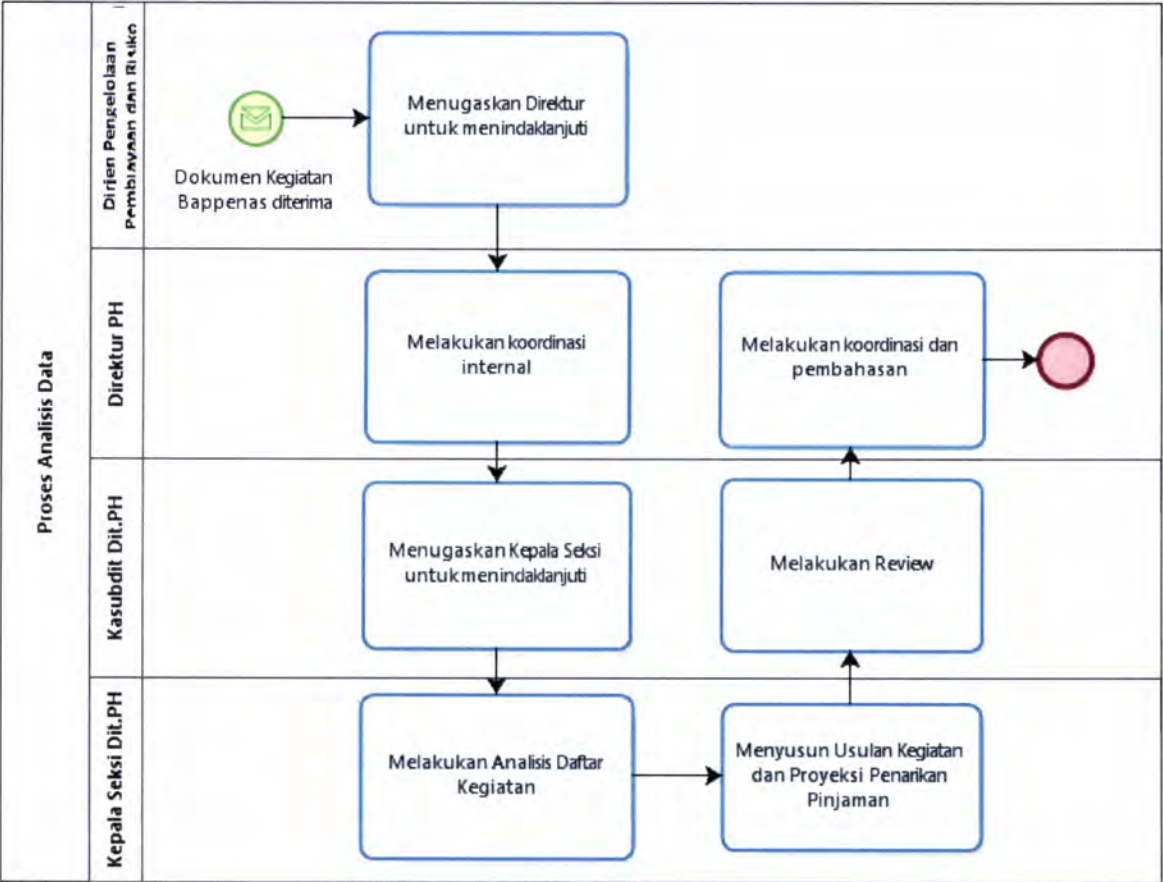


A.4.04 MENETAPKAN BMP

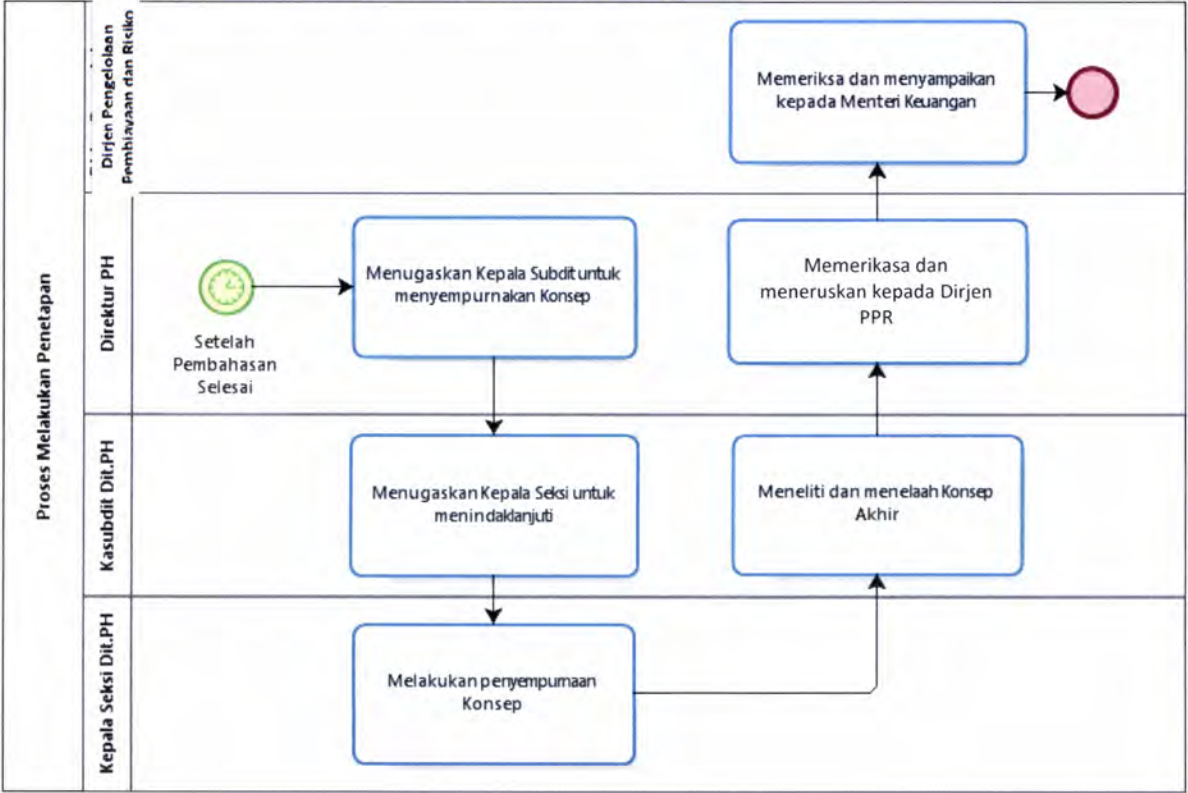


A.5 PENYIAPAN USULAN KEGIATAN DAN PROYEKSI PENARIKAN PINJAMAN

A.5.01 ANALISIS DATA

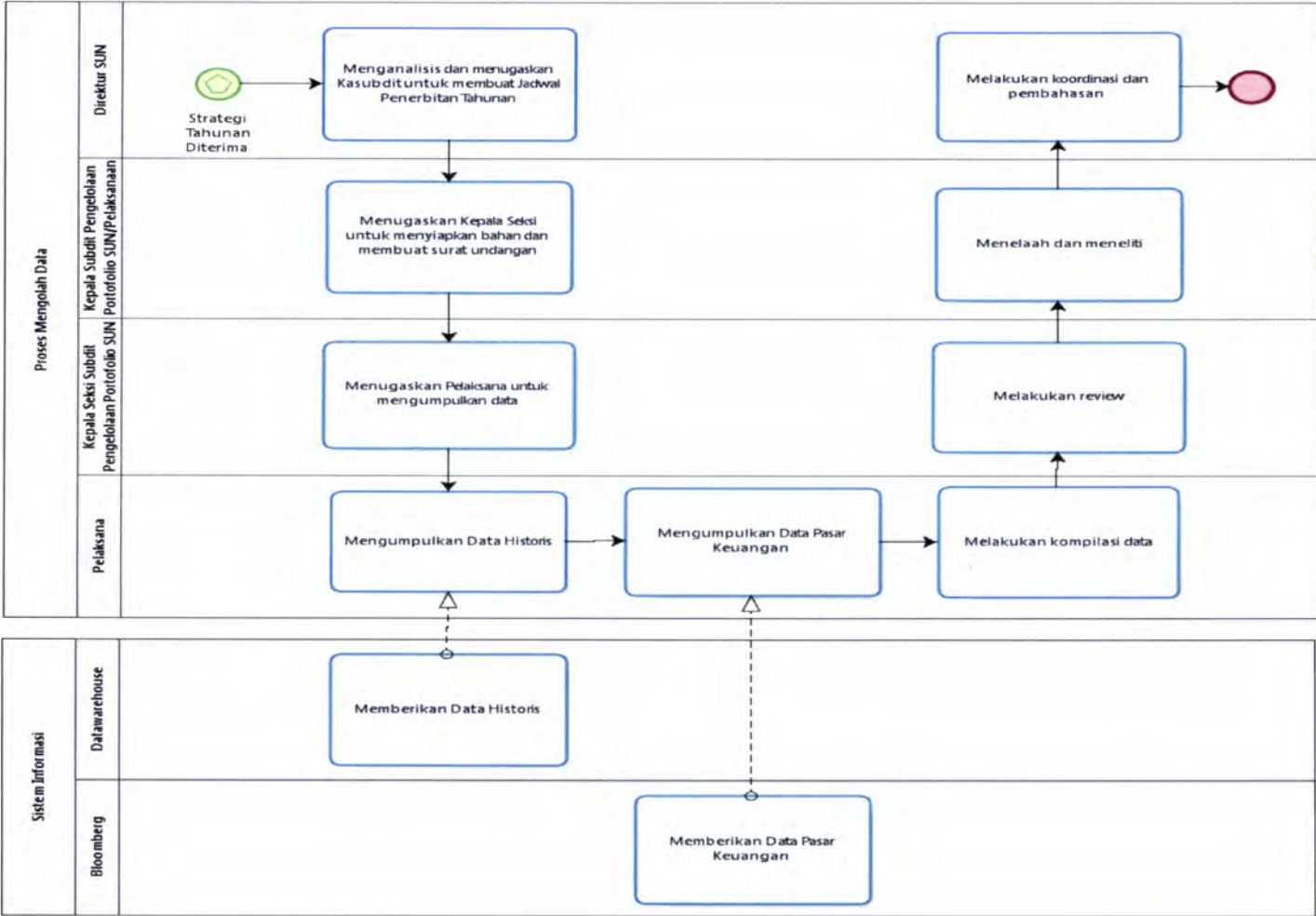


A.5.02 MELAKUKAN PENETAPAN



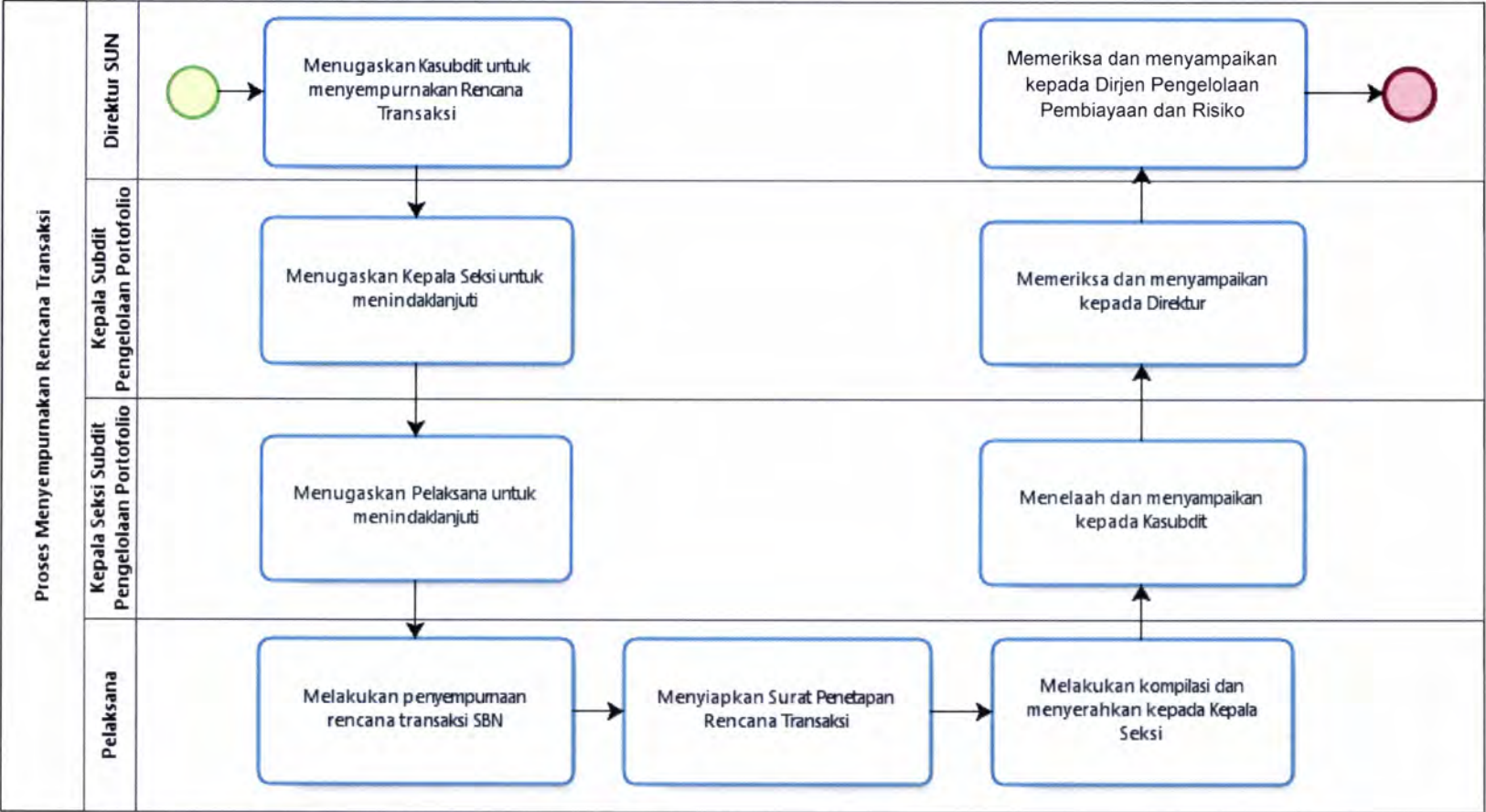
A.6 PENYUSUNAN RENCANA TRANSAKSI SBN

A.6.01 MENGOLAH DATA



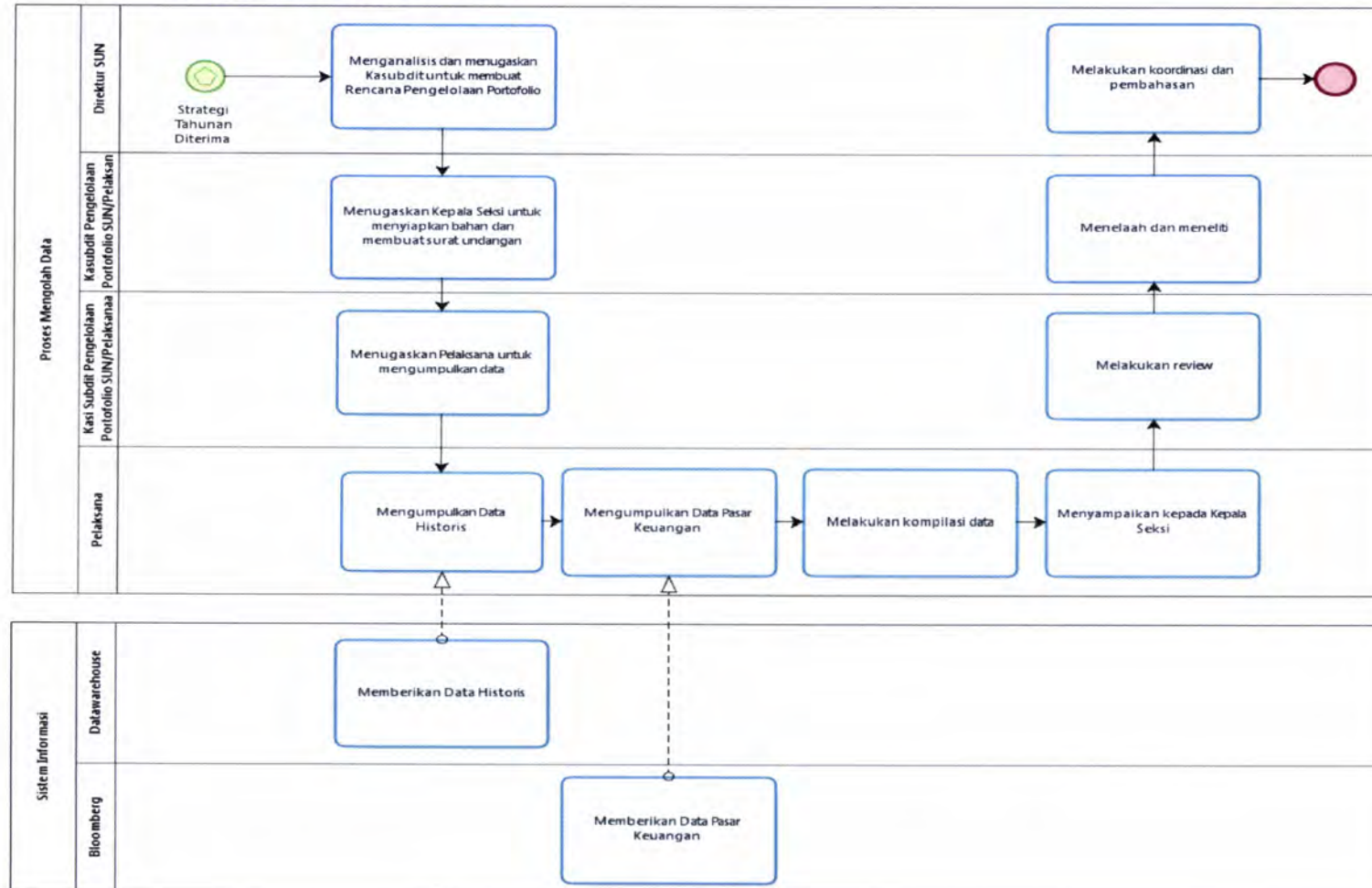
By

A.6.02 MENYEMPURNAKAN RENCANA TRANSAKSI

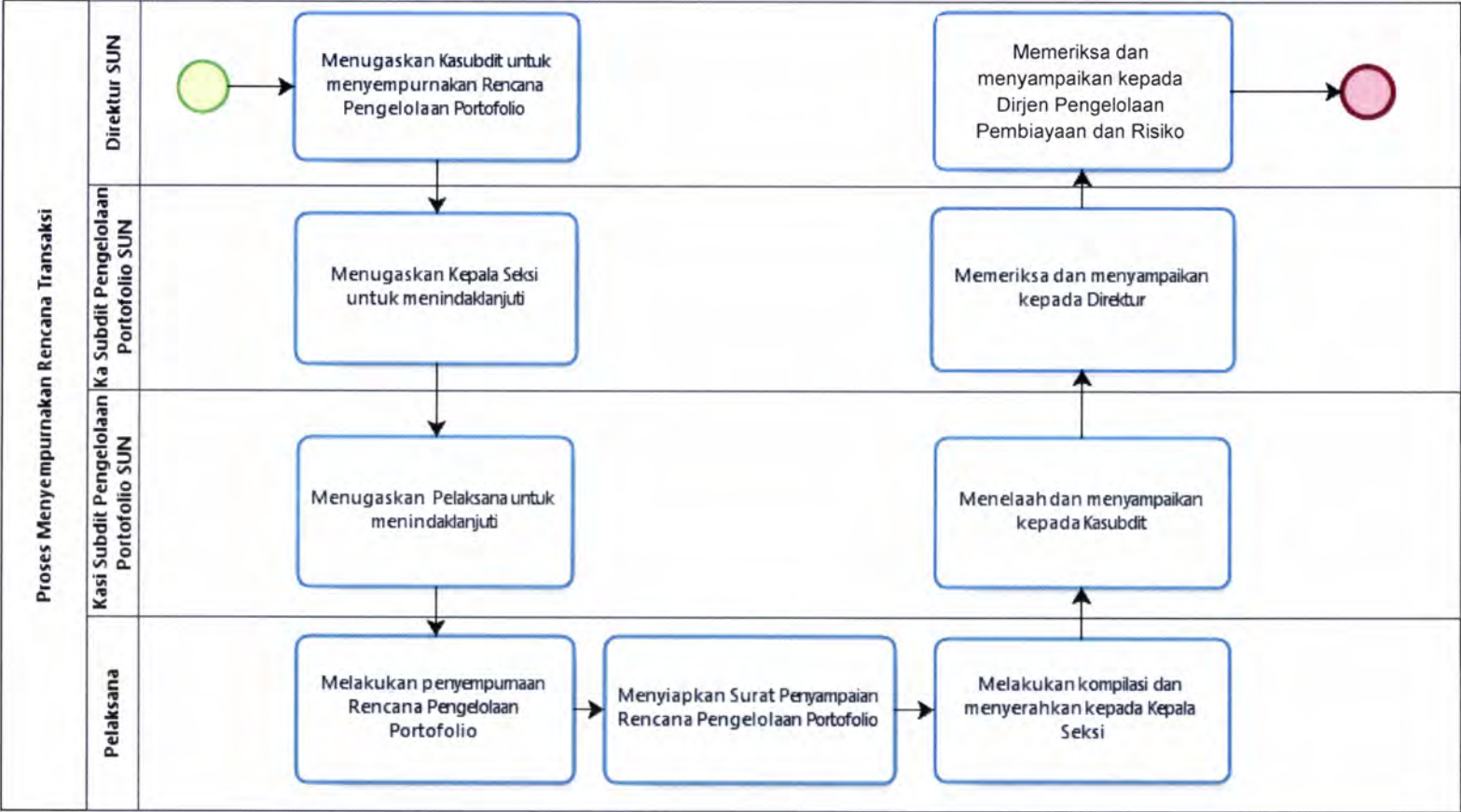


A.7 PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PORTOFOLIO

A.7.01 MENGOLAH DATA

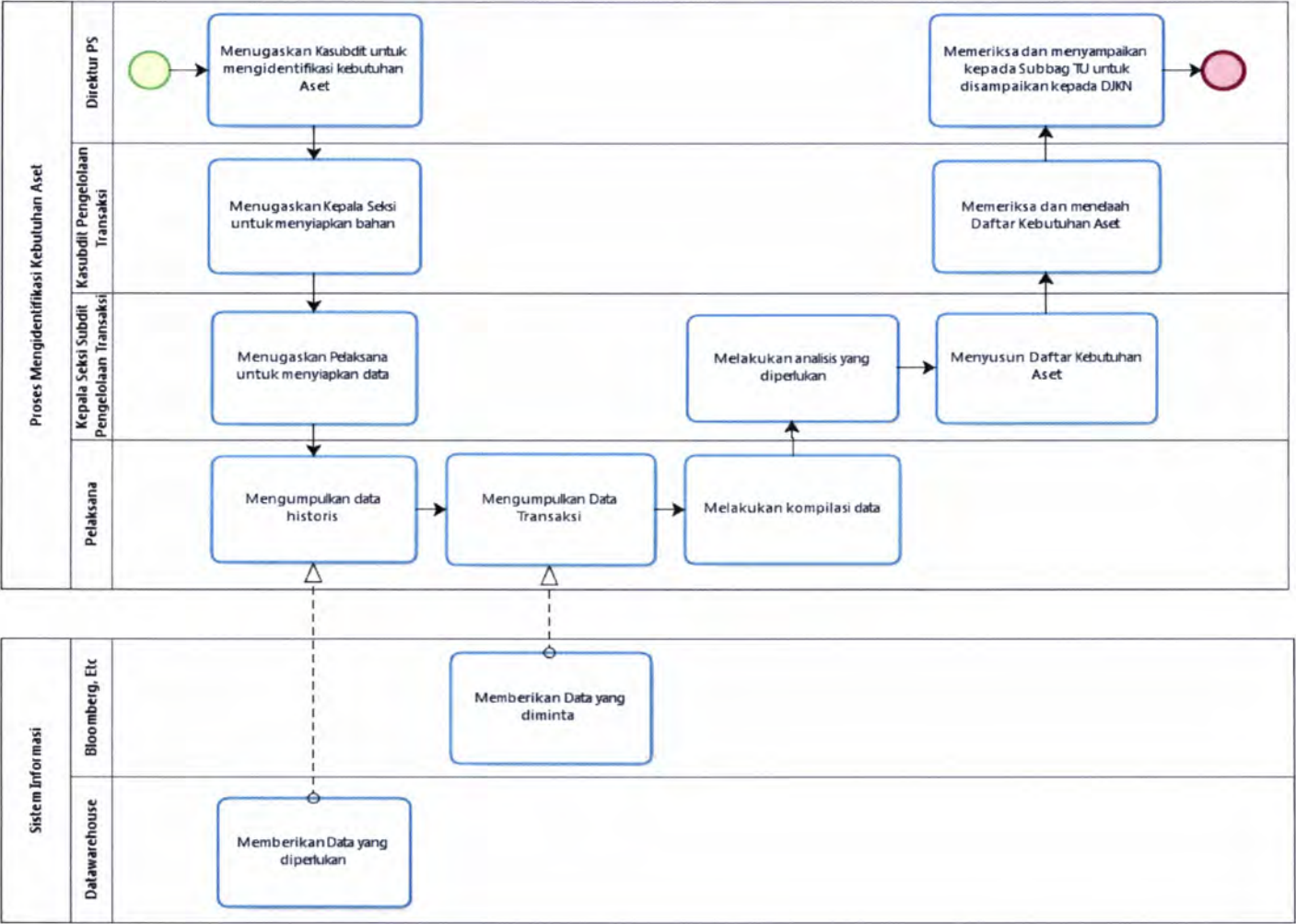


A.7.02 MENYEMPURNAKAN RENCANA TRANSAKSI



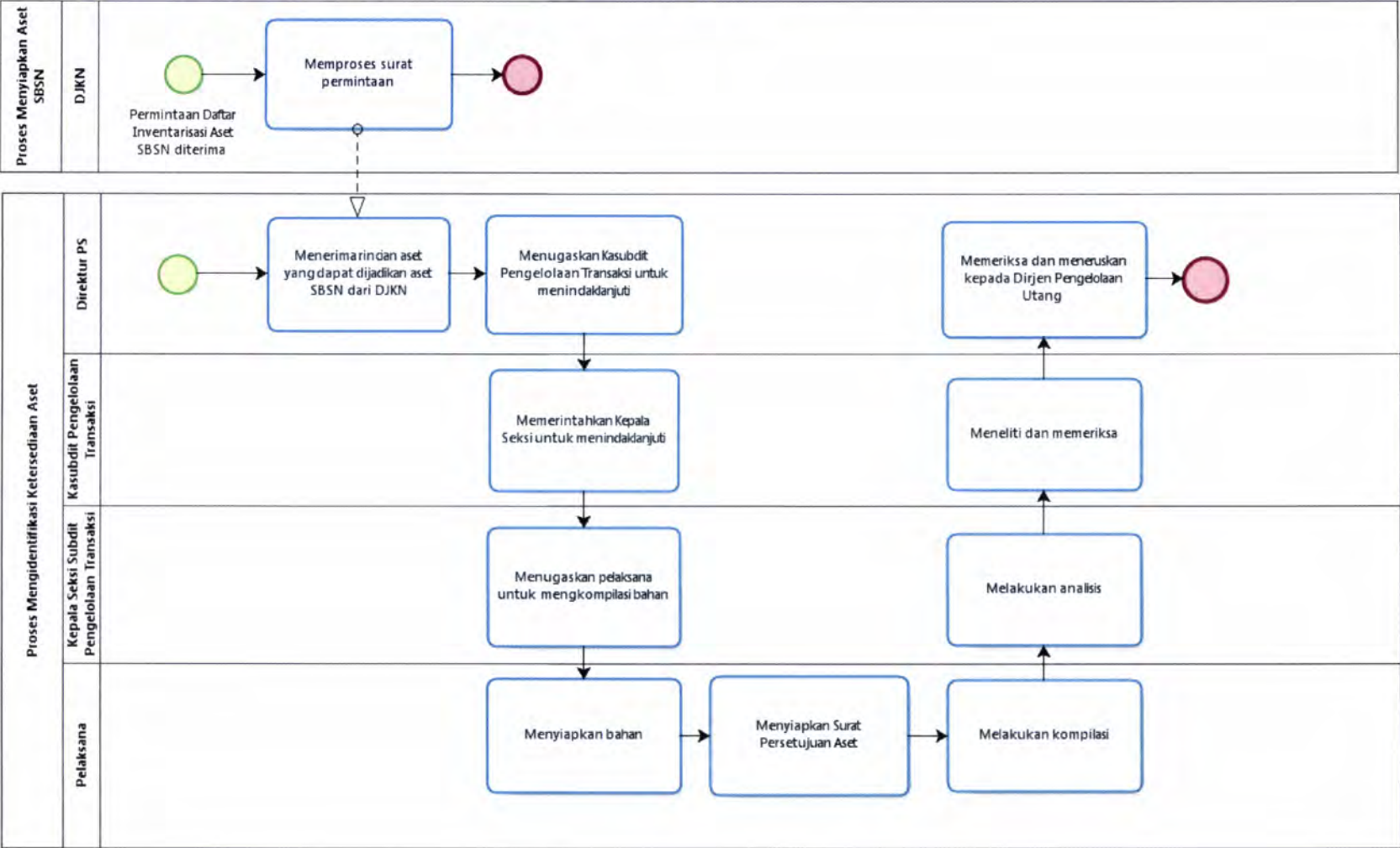
A.8 PENYIAPAN UNDERLYING ASET

A.8.01 MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN ASET

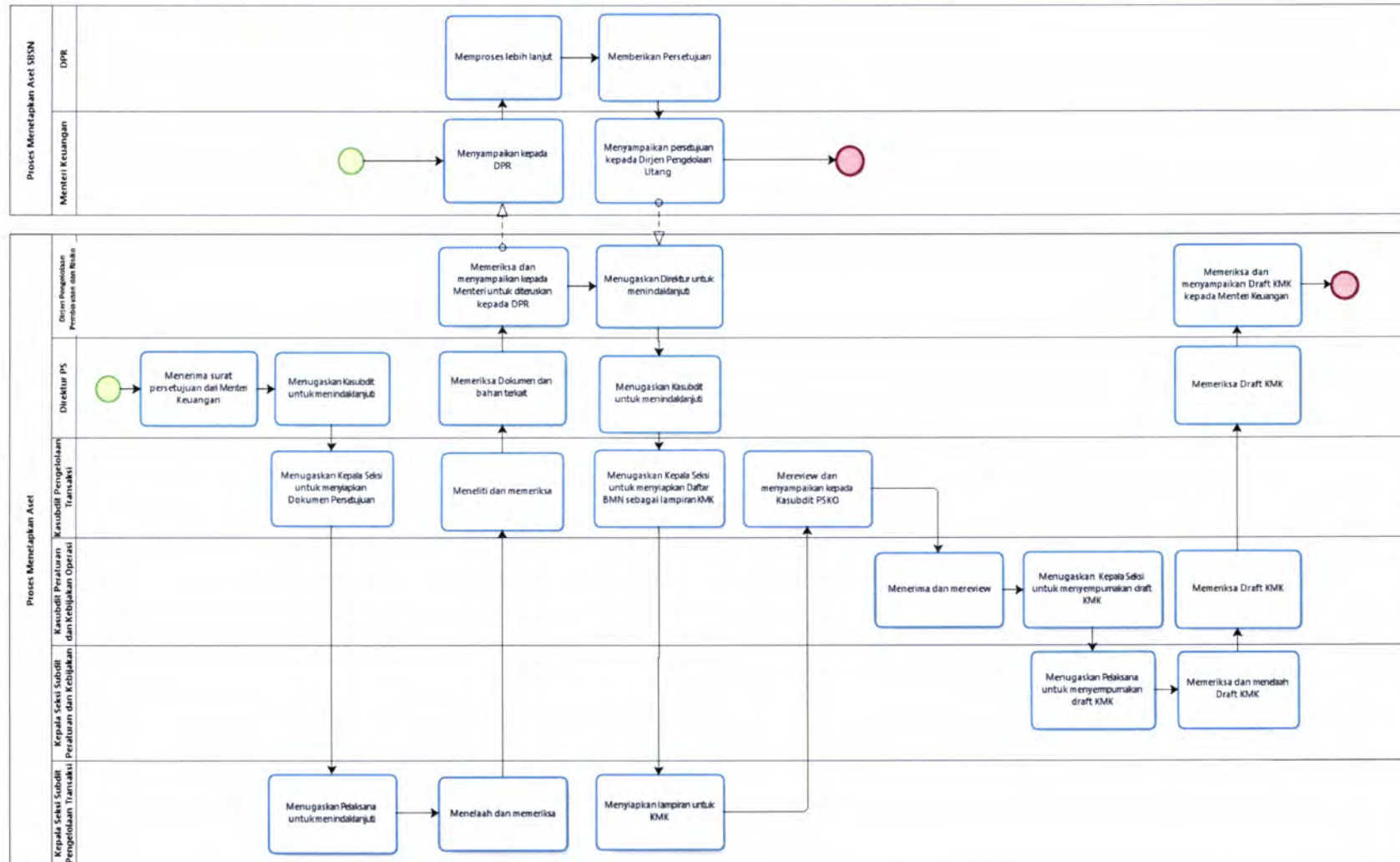


Apr

A.8.02 MENGIDENTIFIKASI KETERSEDIAAN ASET

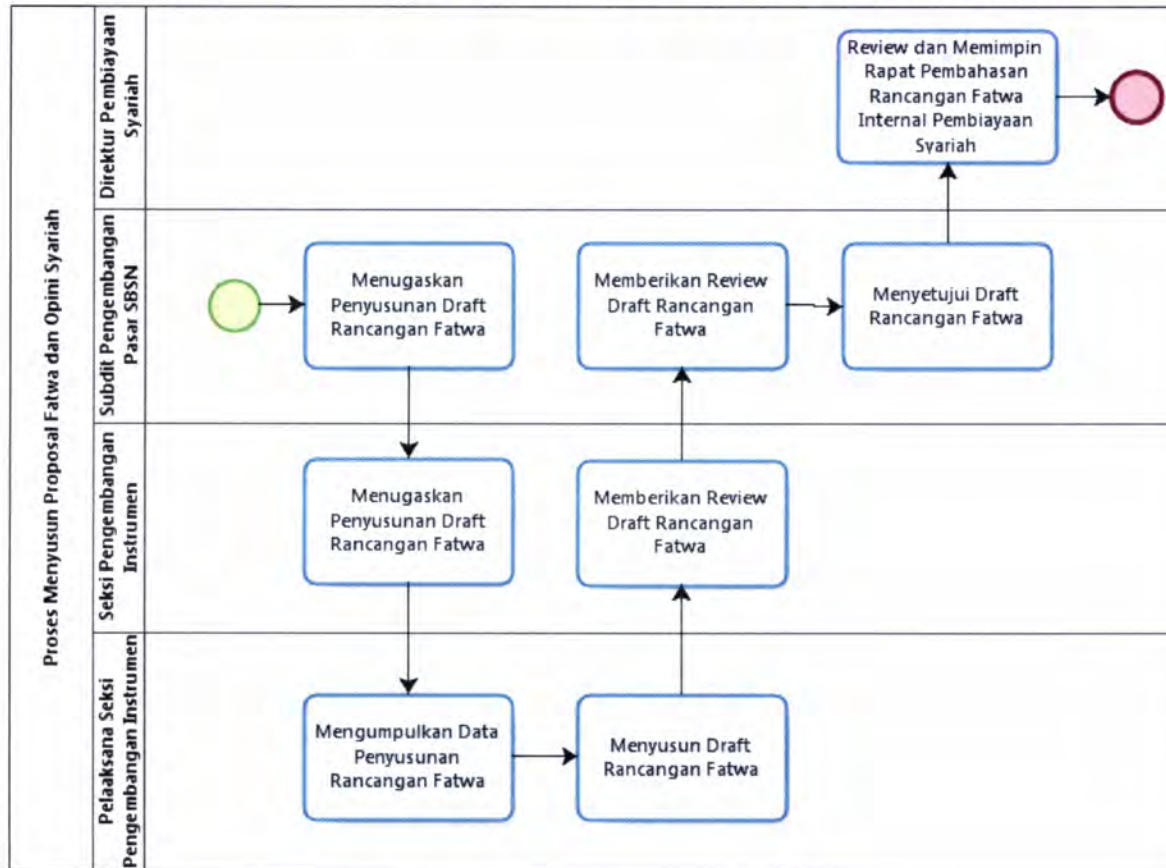


A.8.03 MENETAPKAN ASET



A.9 PENYIAPAN FATWA DAN OPINI SYARIAH

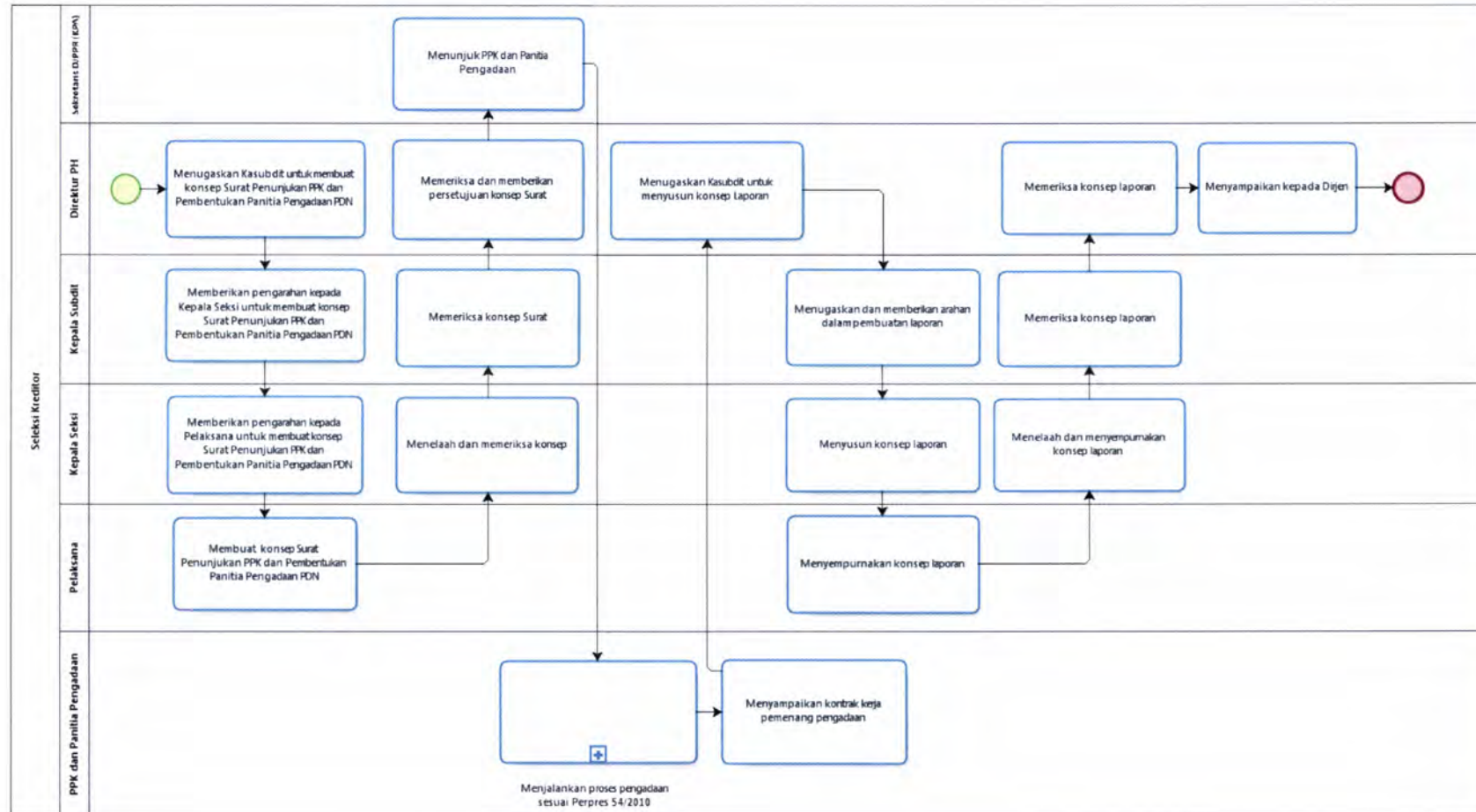
A.9.01 MENYUSUN PROPOSAL FATWA DAN OPINI SYARIAH



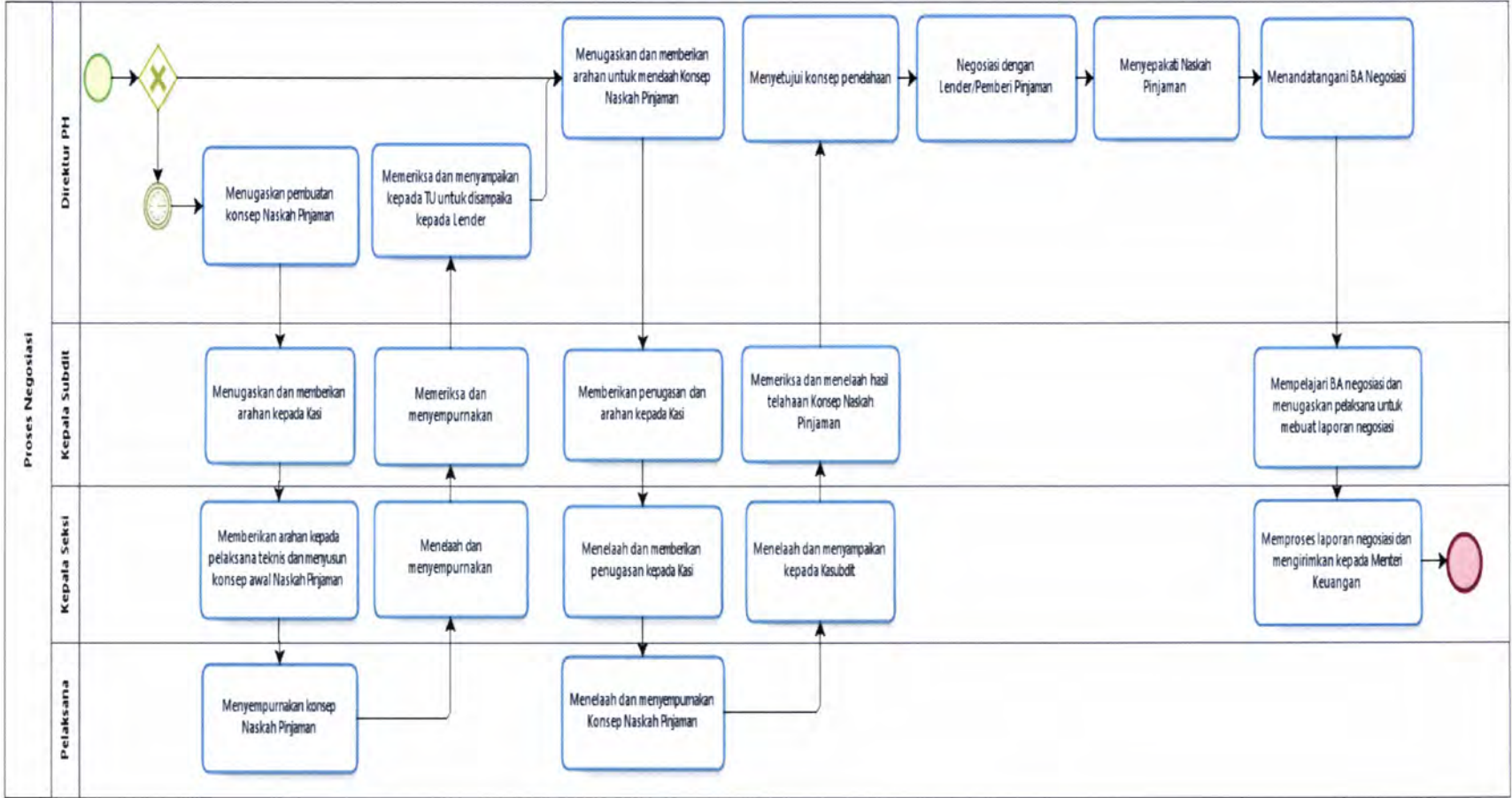
B. PENGADAAN PEMBIAYAAN MELALUI SBN DAN PINJAMAN

B.1 PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

B.1.01 SELEKSI KREDITOR

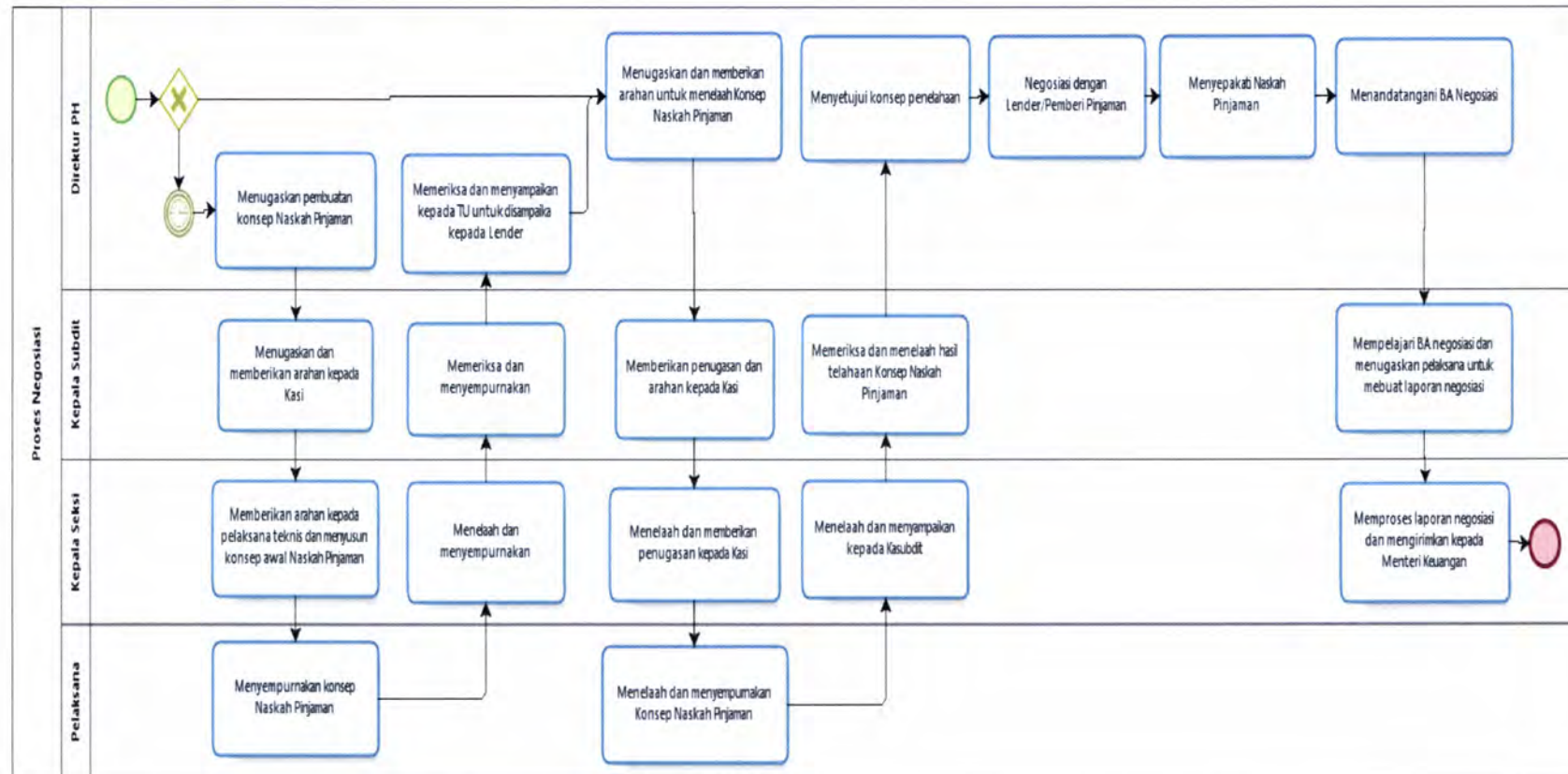


B.1.02 NEGOSIASI

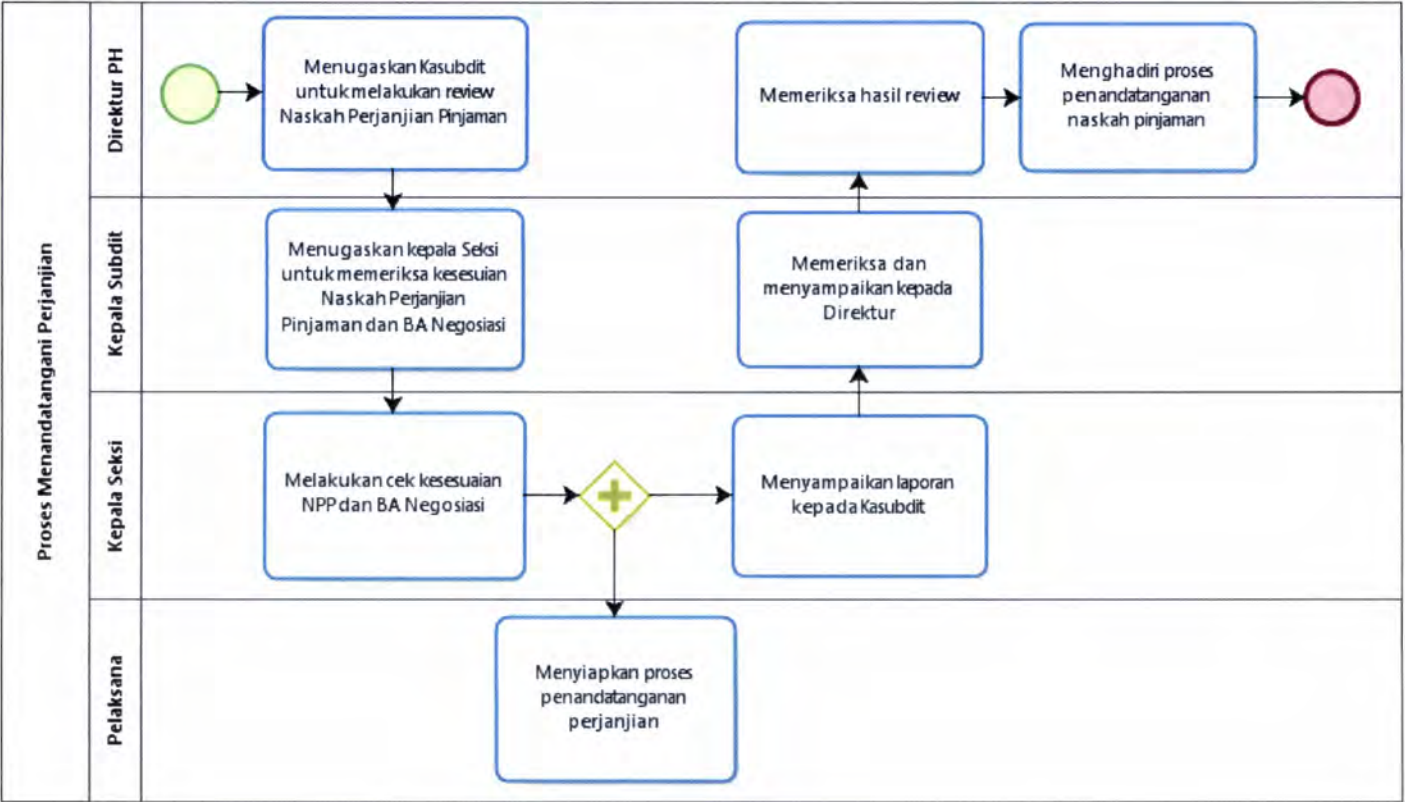


B.2 PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

B.2.01 NEGOSIASI



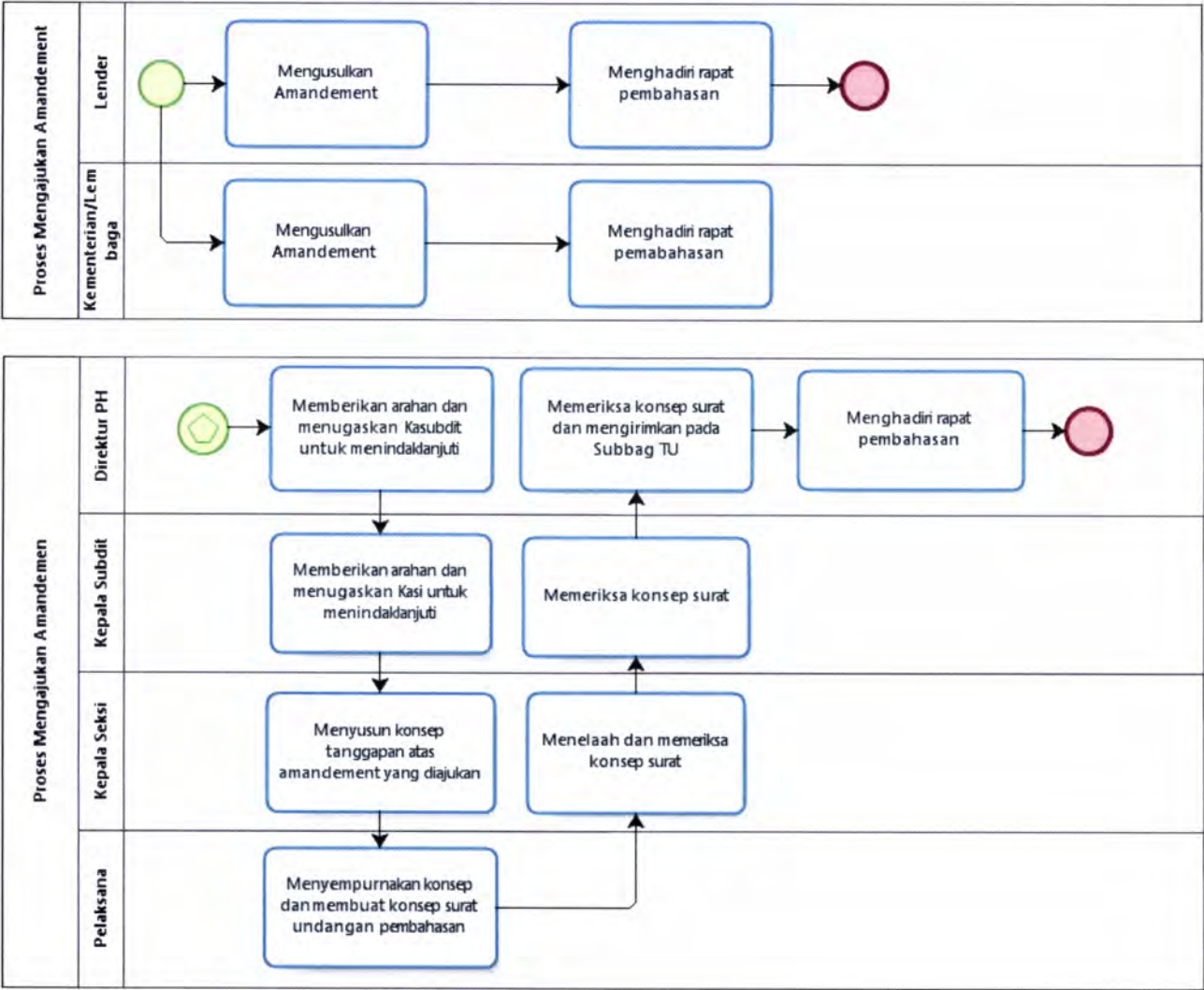
B.2.02 MENANDATANGANI PERJANJIAN



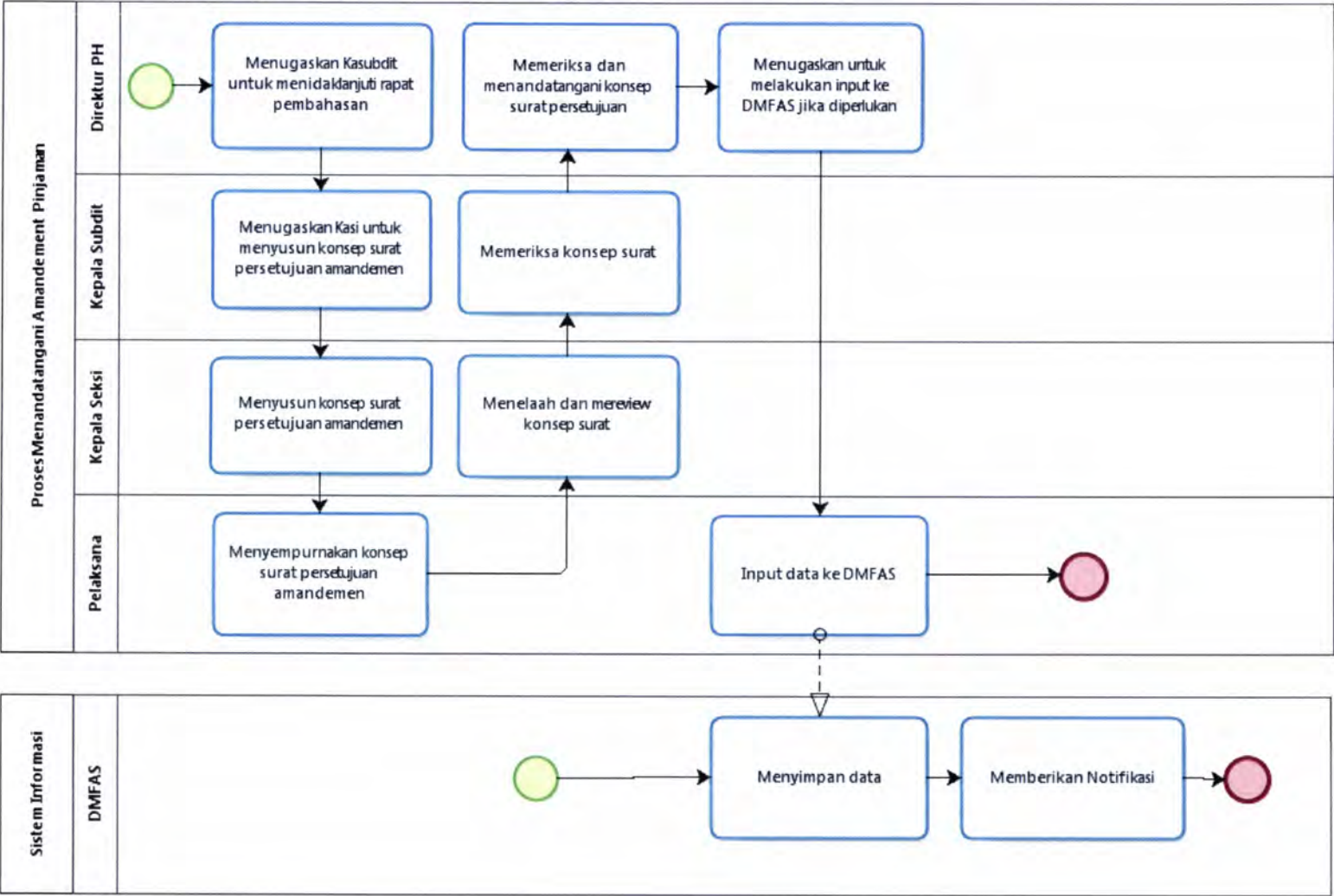
Am

B.3 AMANDEMENT PINJAMAN

B.3.01 MENGAJUKAN AMANDEMENT PINJAMAN

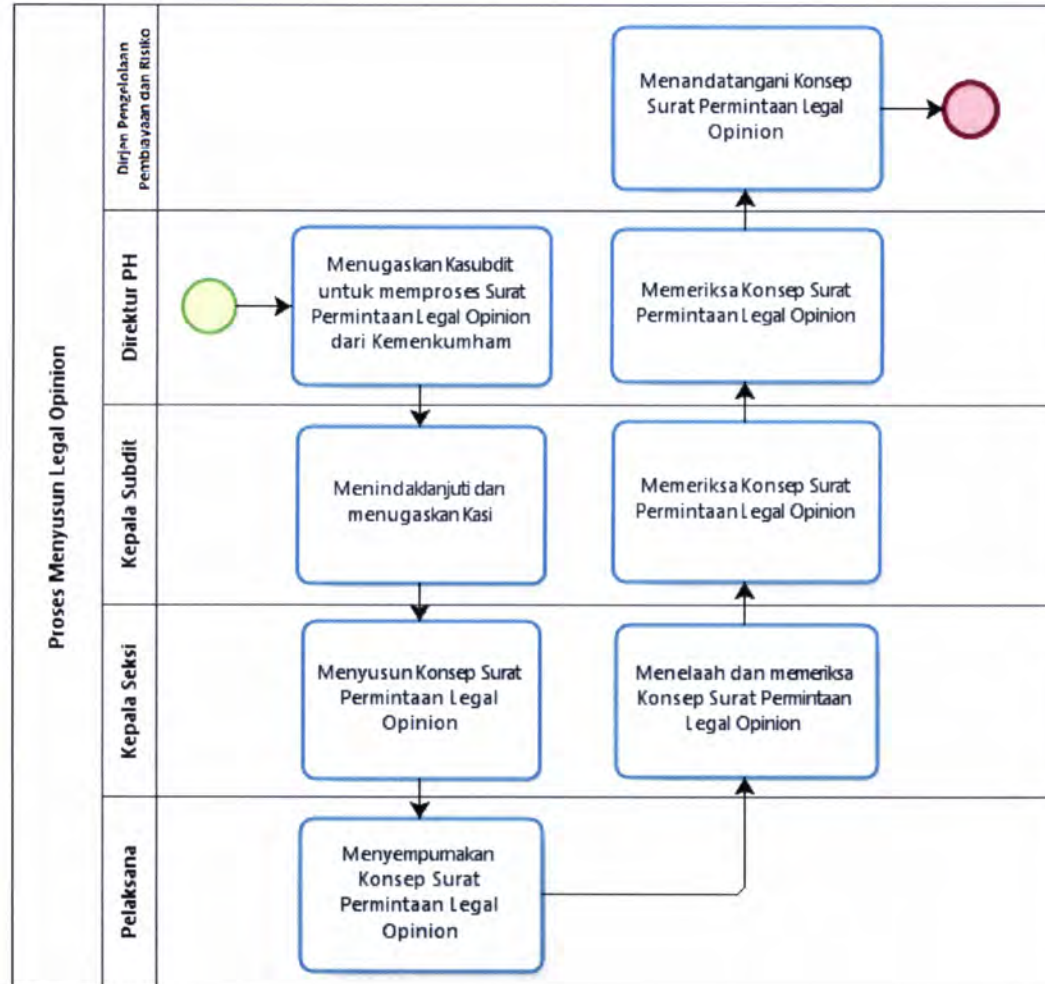


B.3.02 MENANDATANGANI AMANDEMENT PINJAMAN

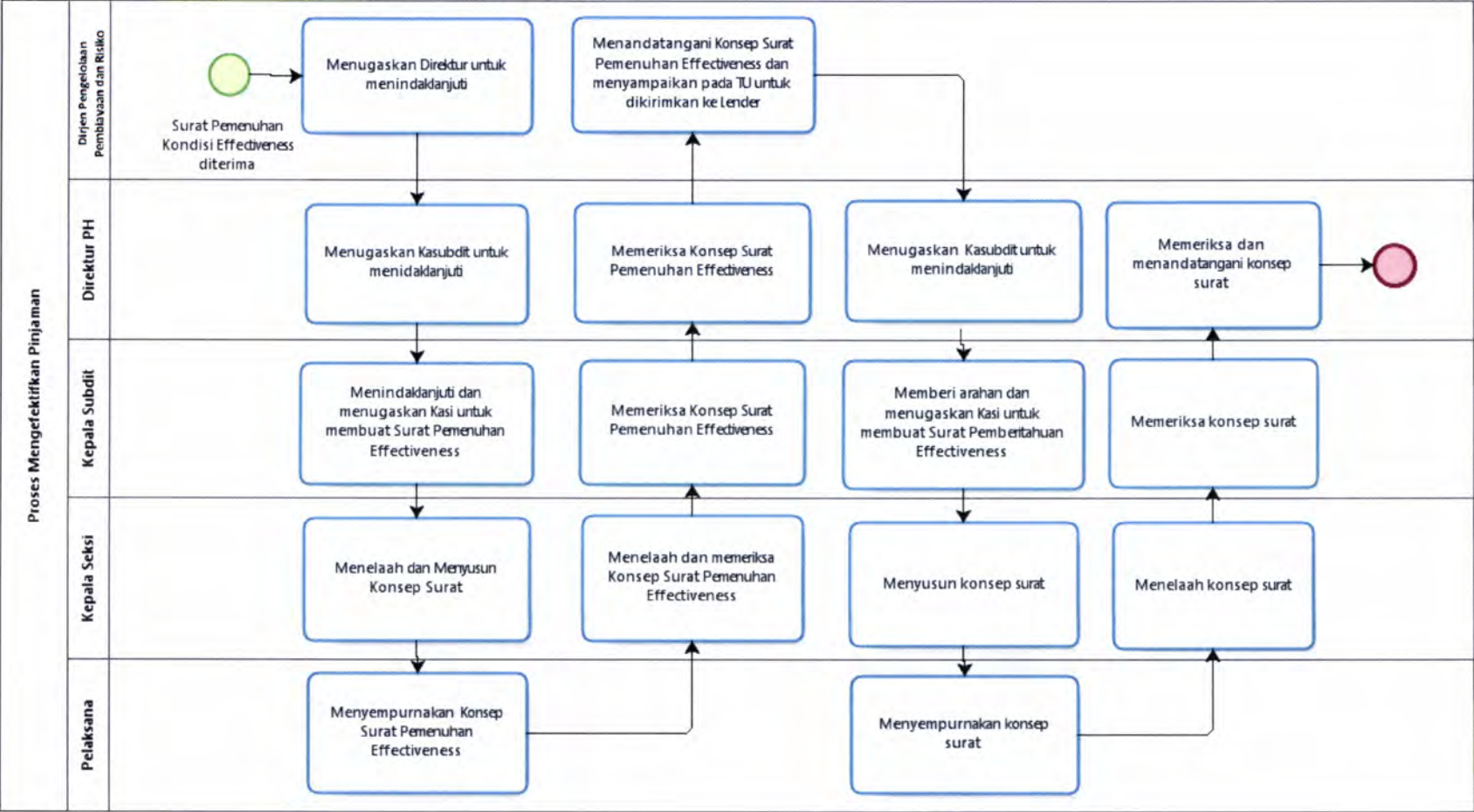


B.4 PENGEFEKTIFAN PINJAMAN

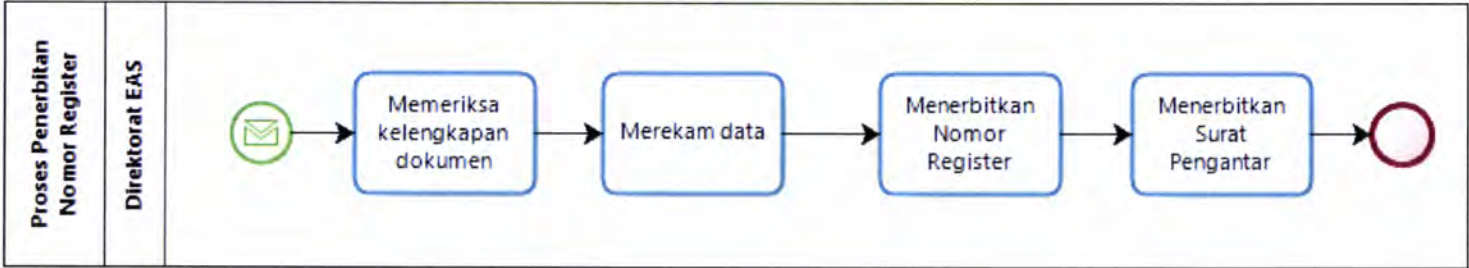
B.4.01 MENYUSUN LEGAL OPINION



B.4.02 MENGEFEKTIFKAN PINJAMAN

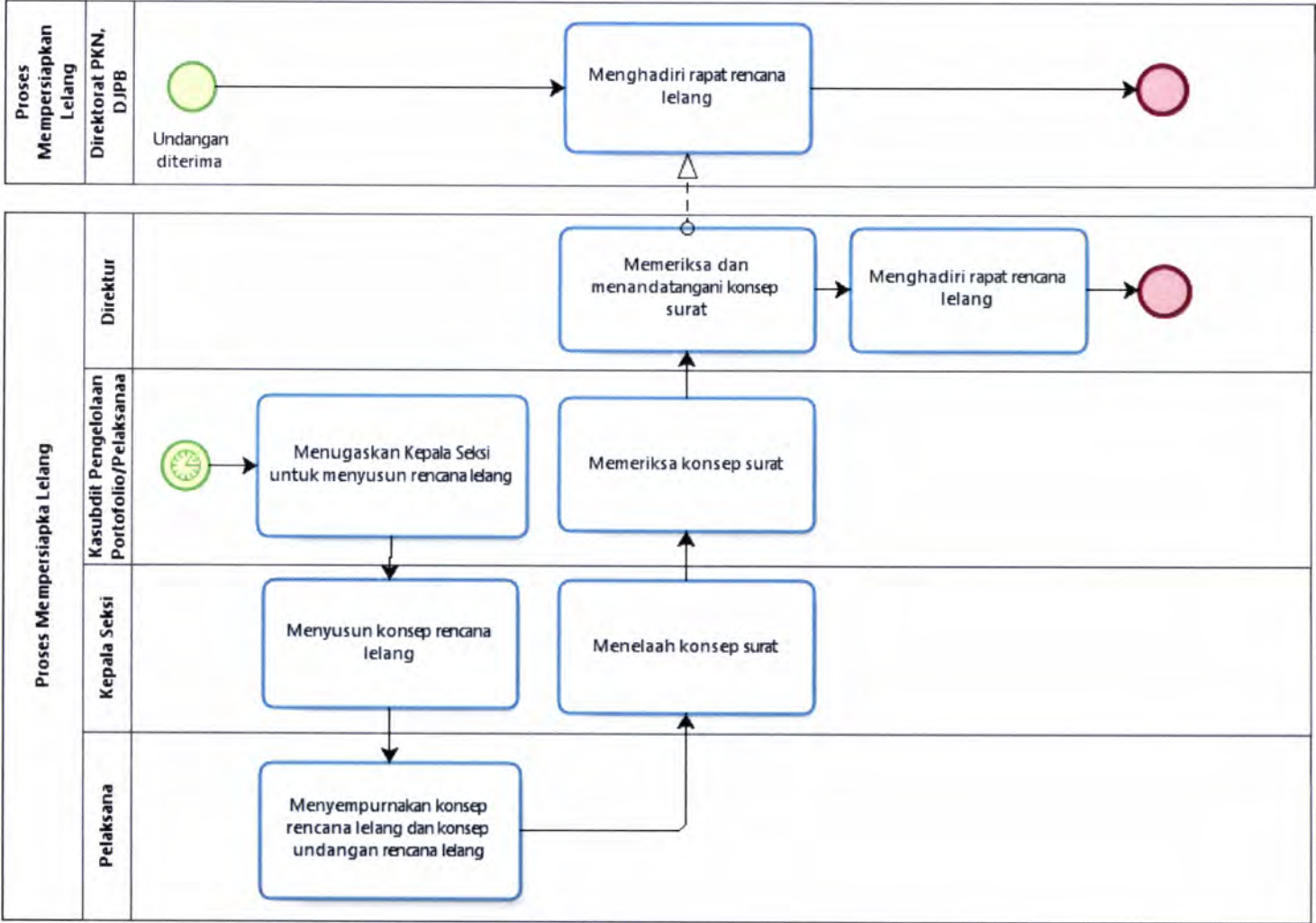


B.5 PENERBITAN NOMOR REGISTER PINJAMAN

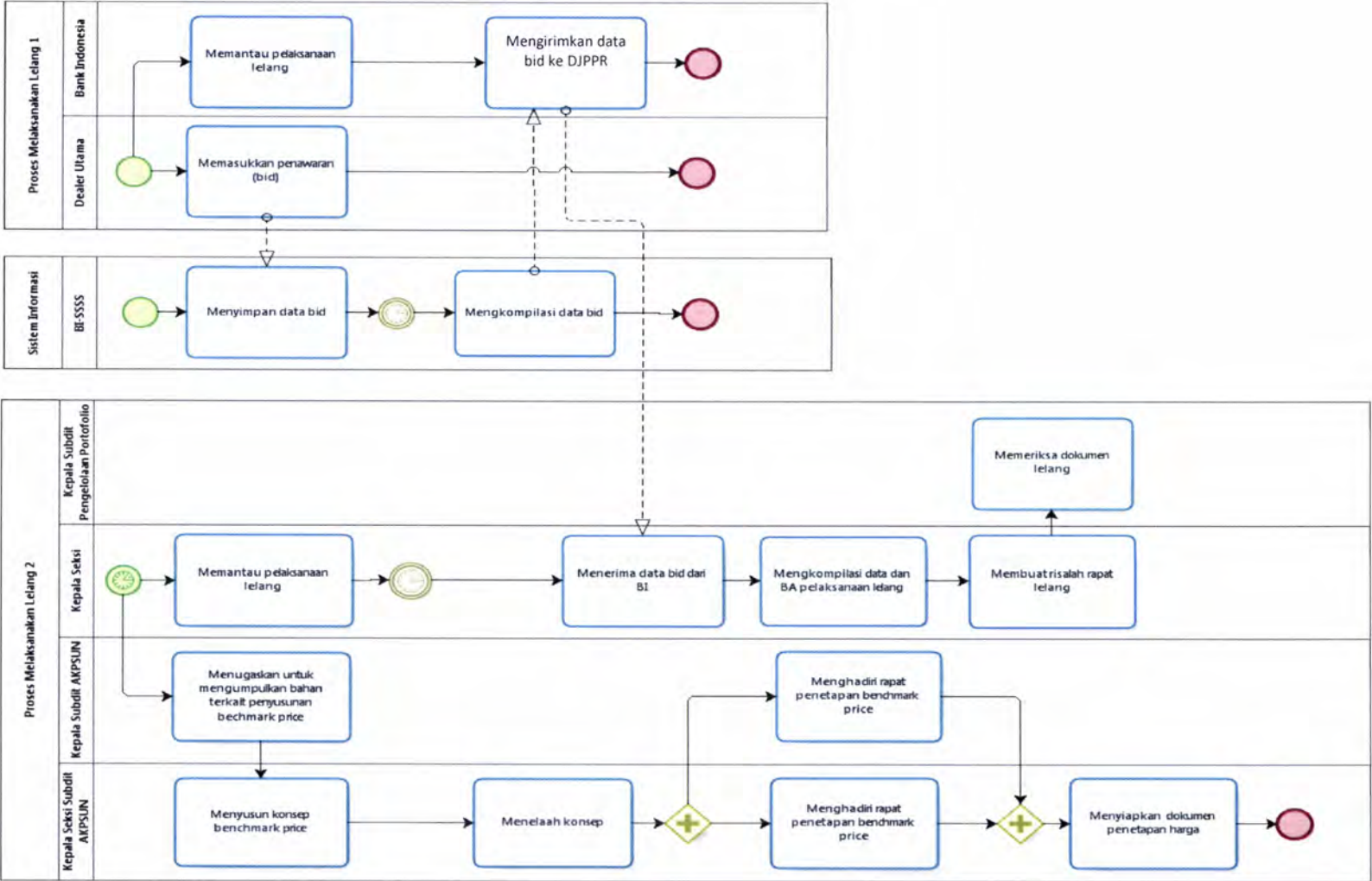


B.6 TRANSAKSI LELANG DI PASAR PERDANA

B.6.01 MEMPERSIAPKAN LELANG

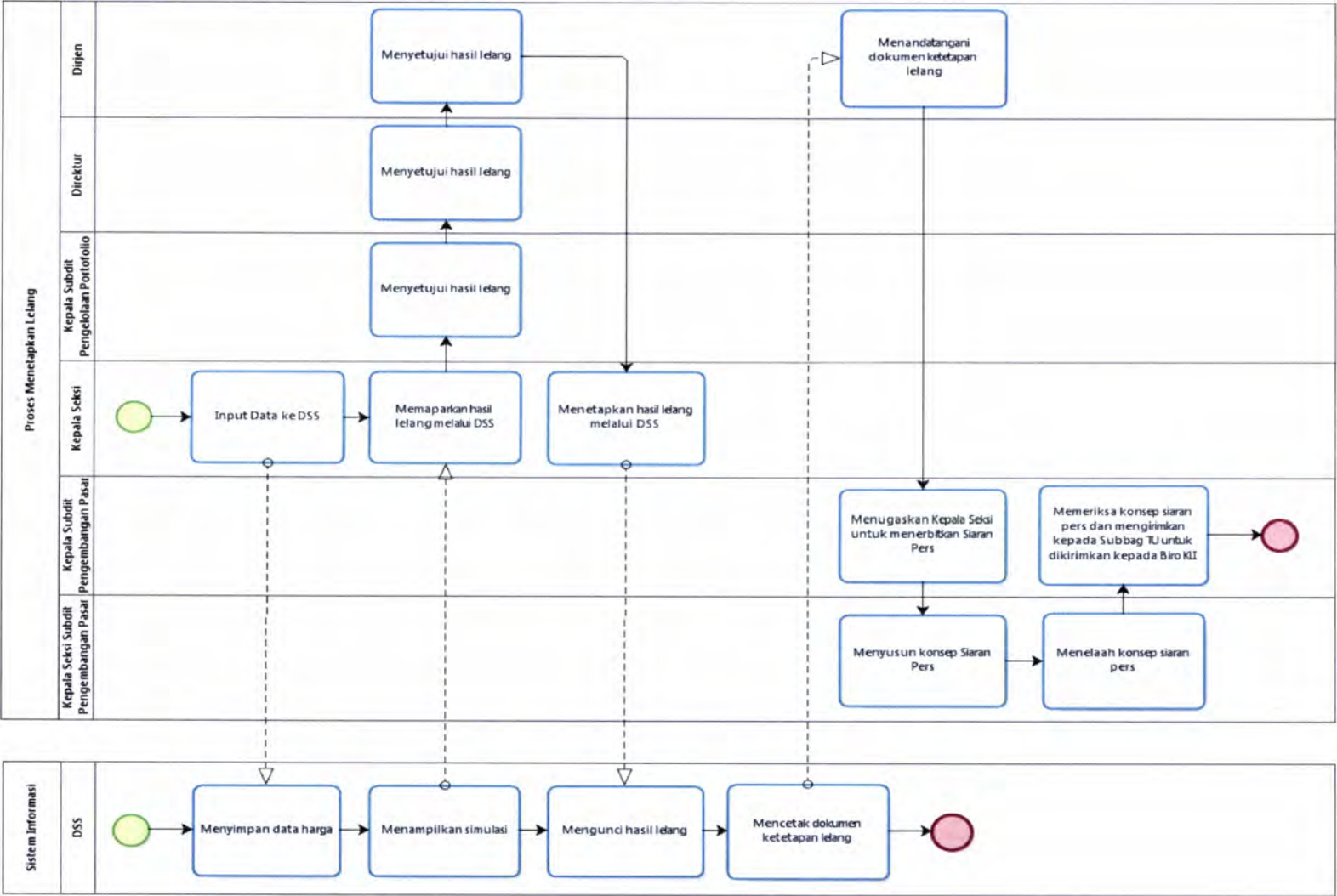


B.6.02 MELAKSANAKAN LELANG



Apr

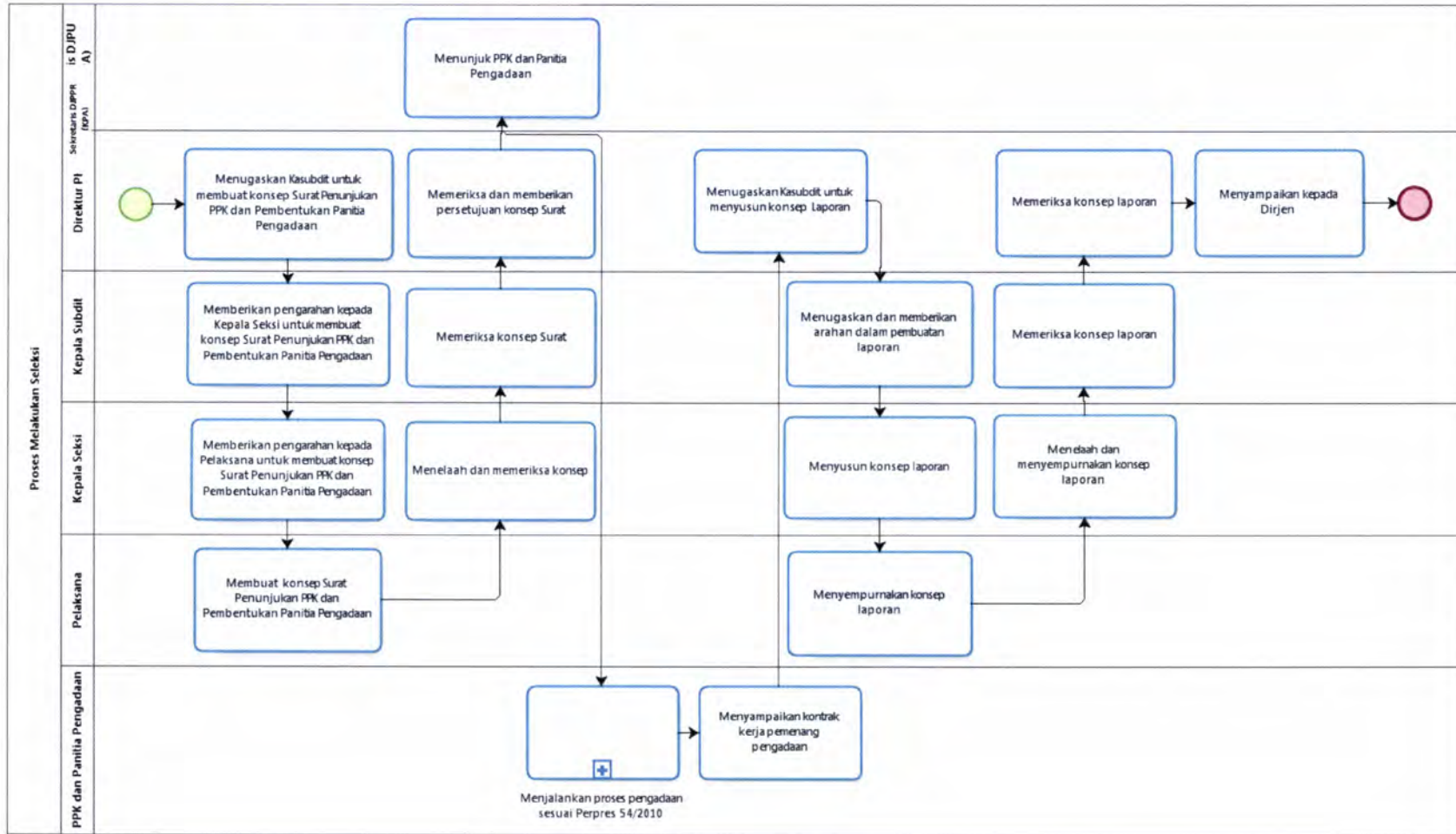
B.6.03 MENETAPKAN PEMENANG LELANG



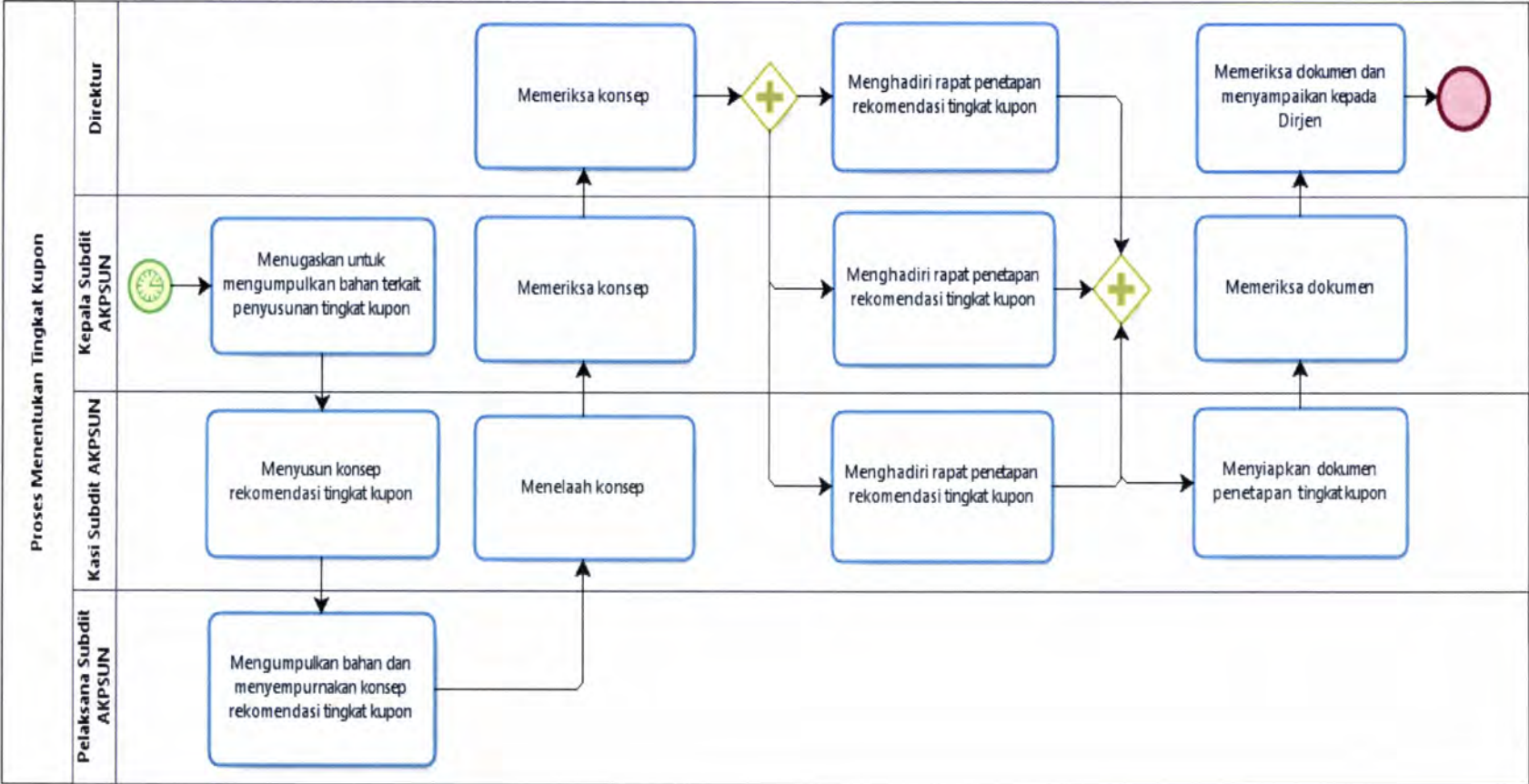
Dyl

B.7 TRANSAKSI BOOK BUILDING

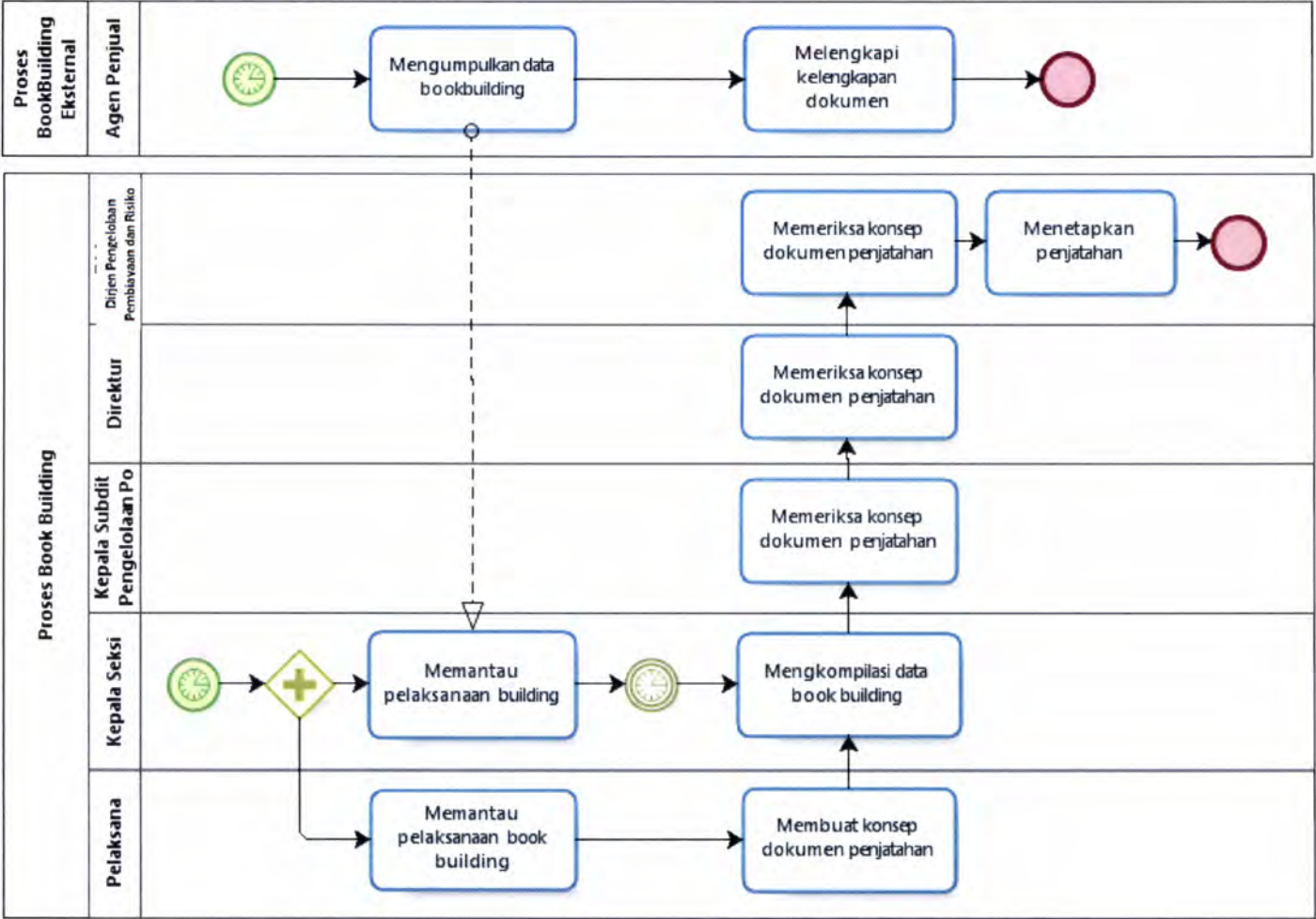
B.7.01 MELAKUKAN SELEKSI



B.7.02 MENENTUKAN TINGKAT KUPON

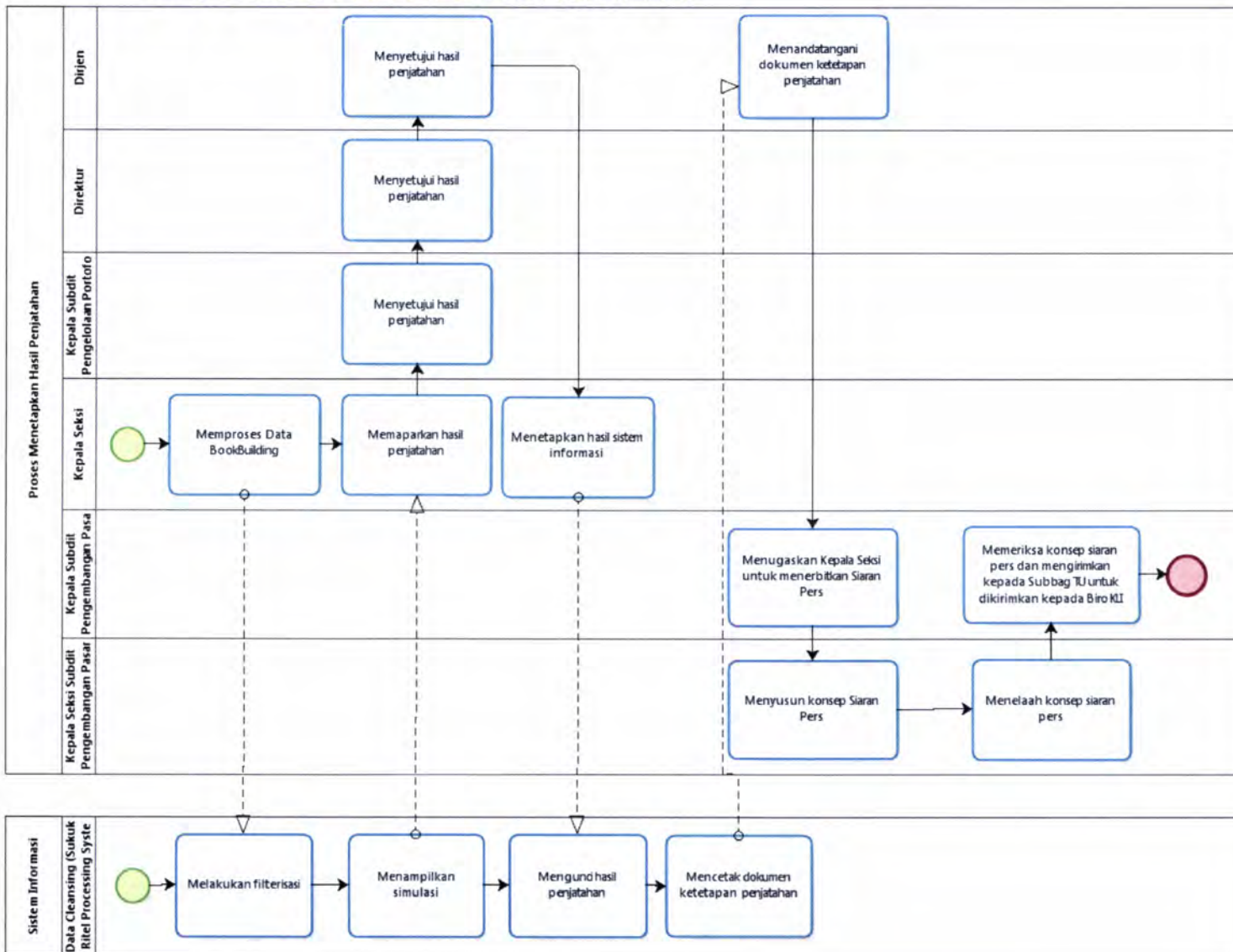


B.7.03 BOOK BUILDING



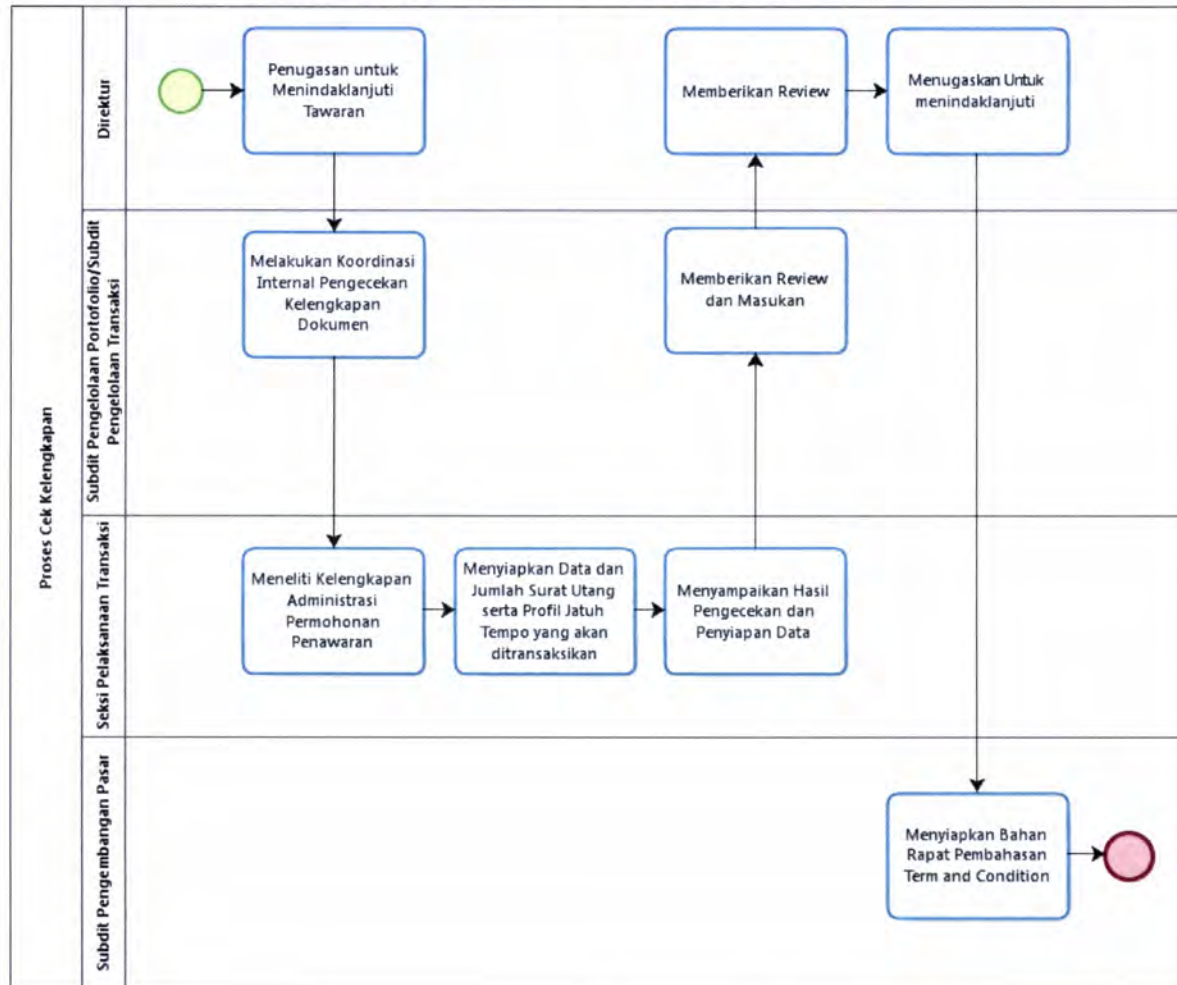
Bye

B.7.04 MENETAPKAN HASIL PENJATAHAN

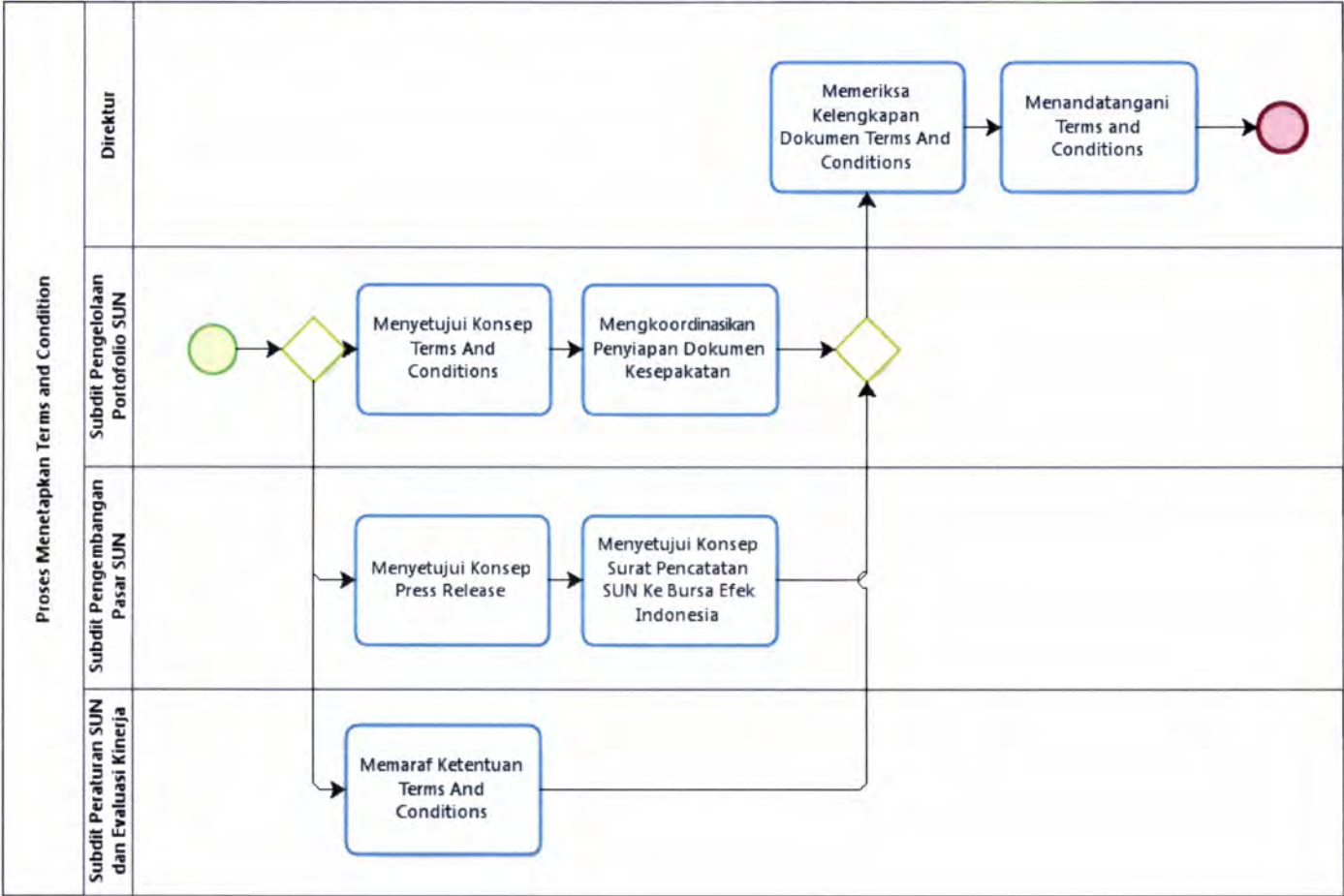


B.8 TRANSAKSI PRIVATE PLACEMENT

B.8.01 MELAKUKAN CEK KELENGKAPAN



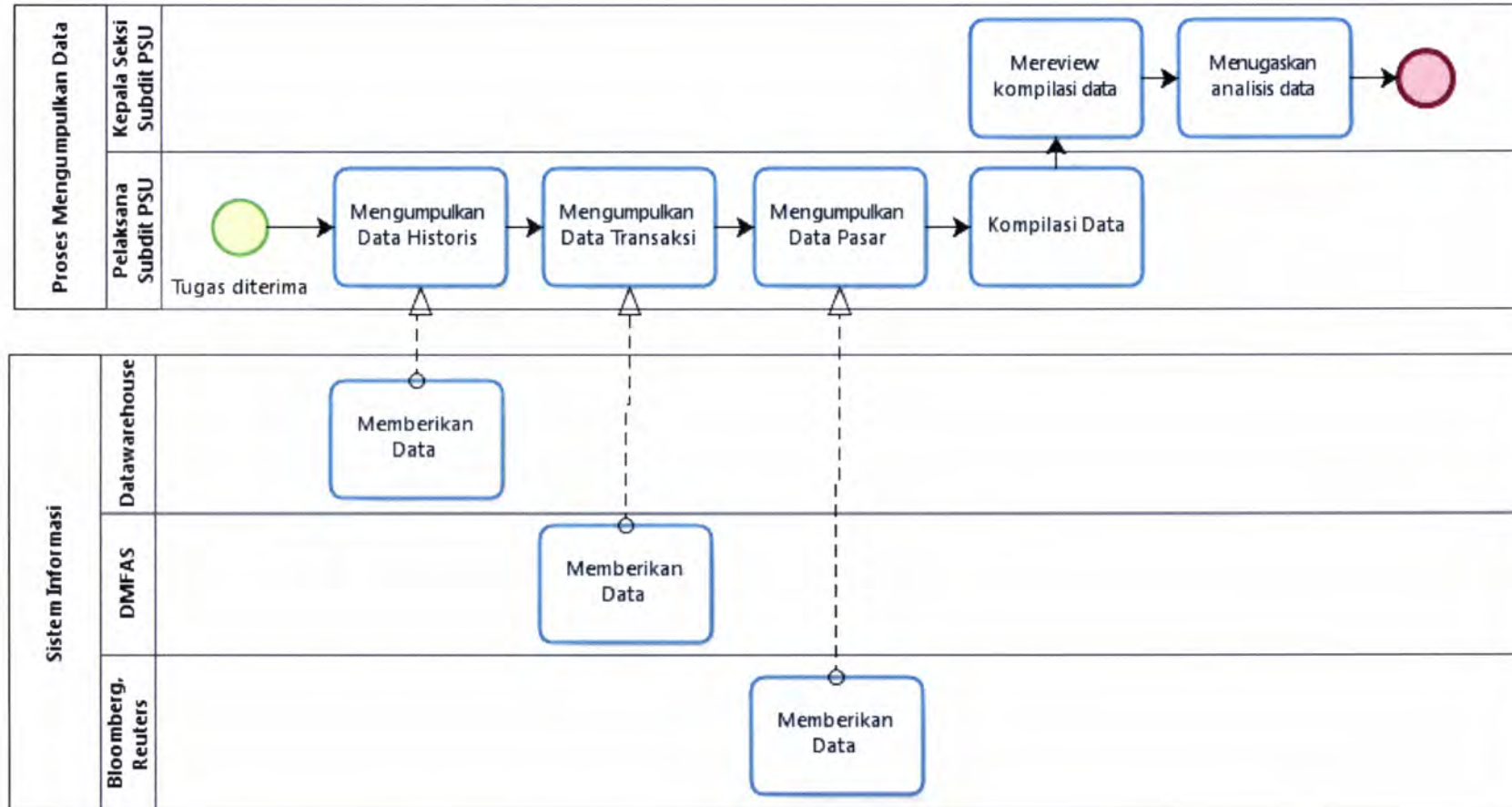
B.8.02 MENETAPKAN TERMS AND CONDITIONS



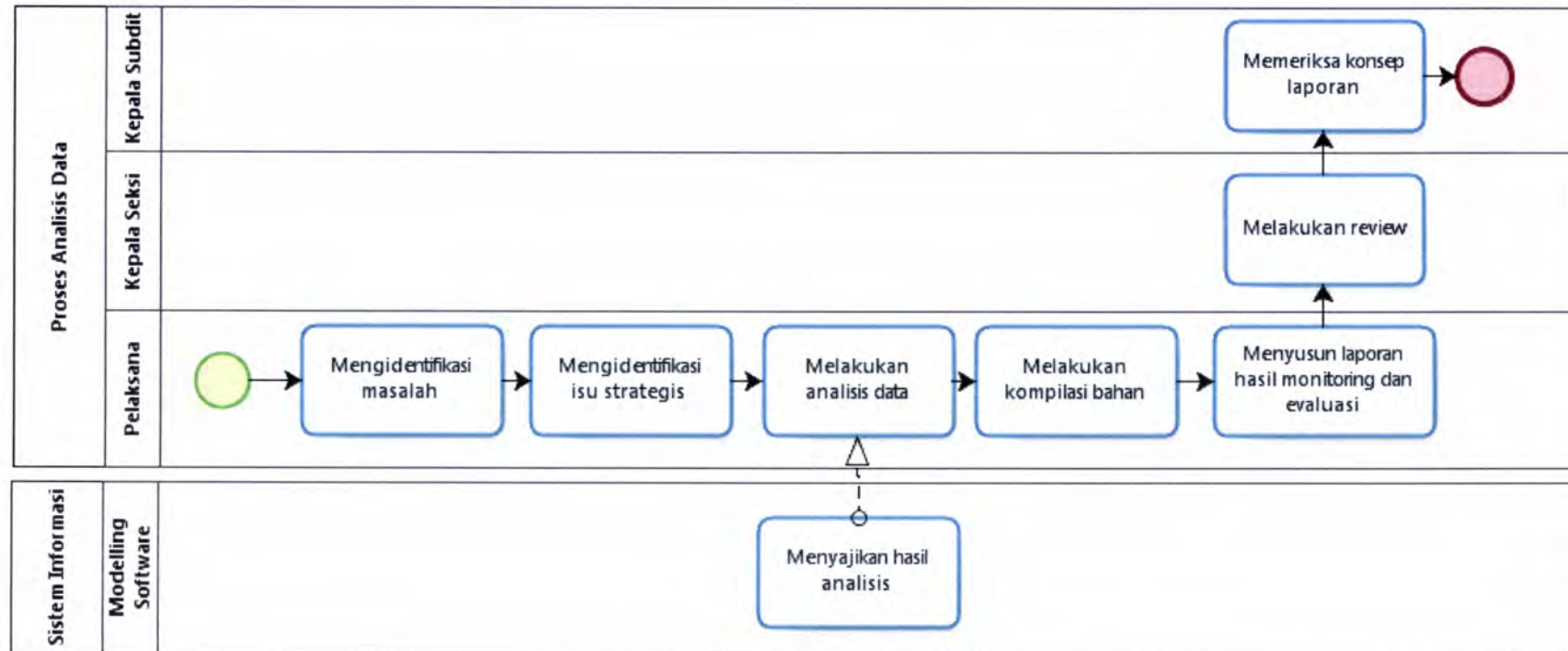
C. PENGELOLAAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

C.1 MONITORING DAN EVALUASI PORTOFOLIO UTANG

C.1.01 MENGUMPULKAN DATA

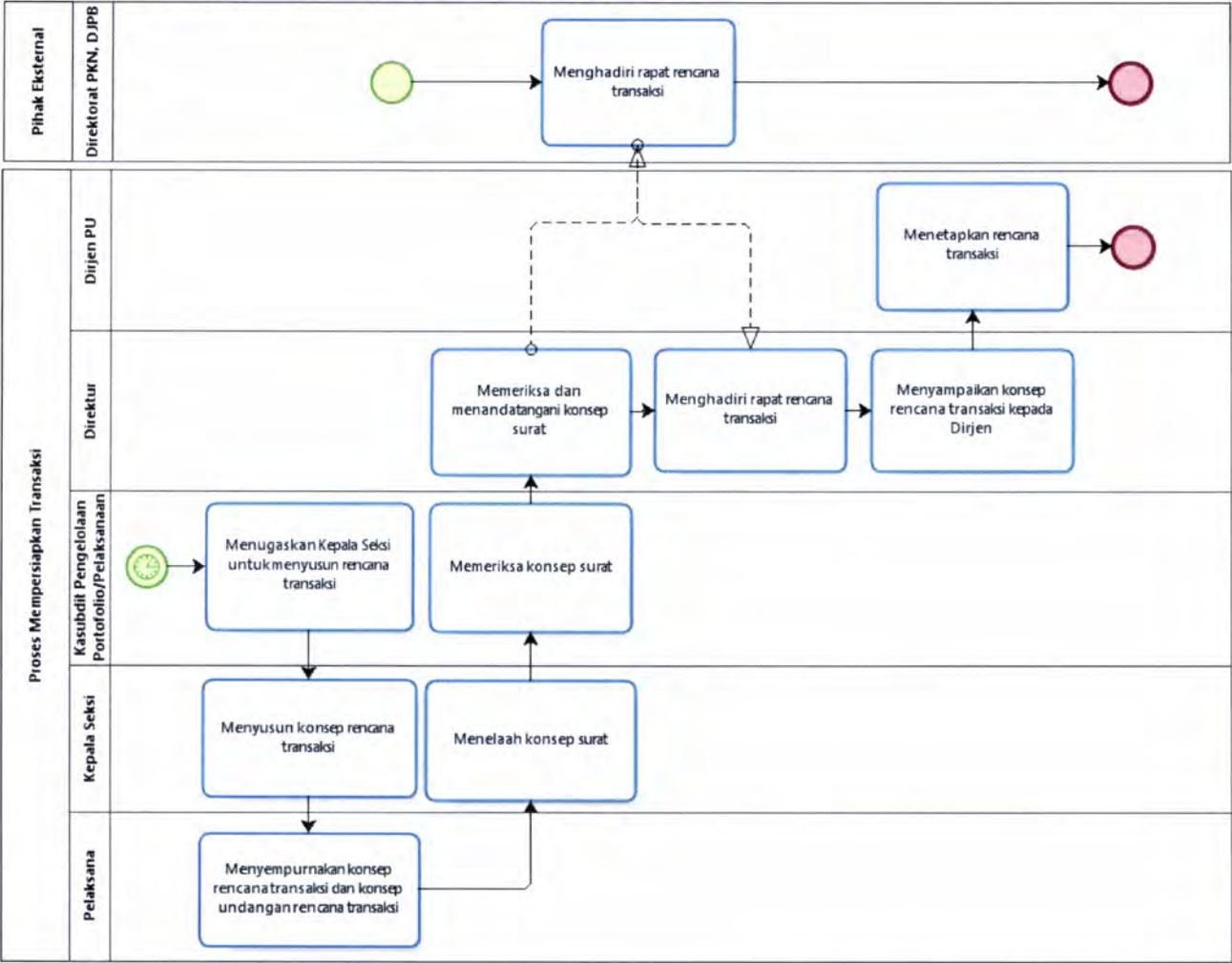


C.1.02 MENGANALISIS DATA



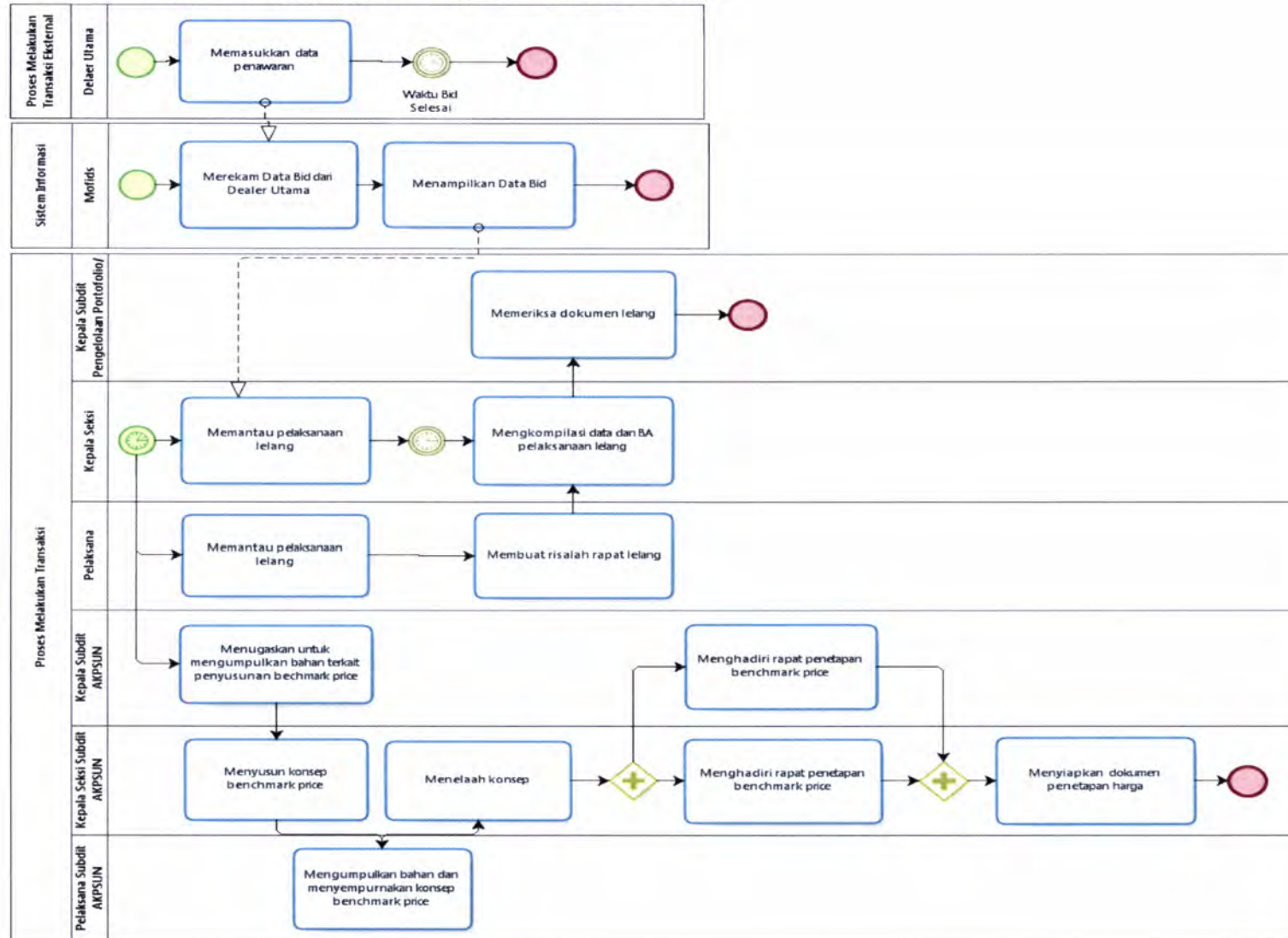
C.2 TRANSAKSI BUY BACK

C.2.01 MEMPERSIAPKAN TRANSAKSI

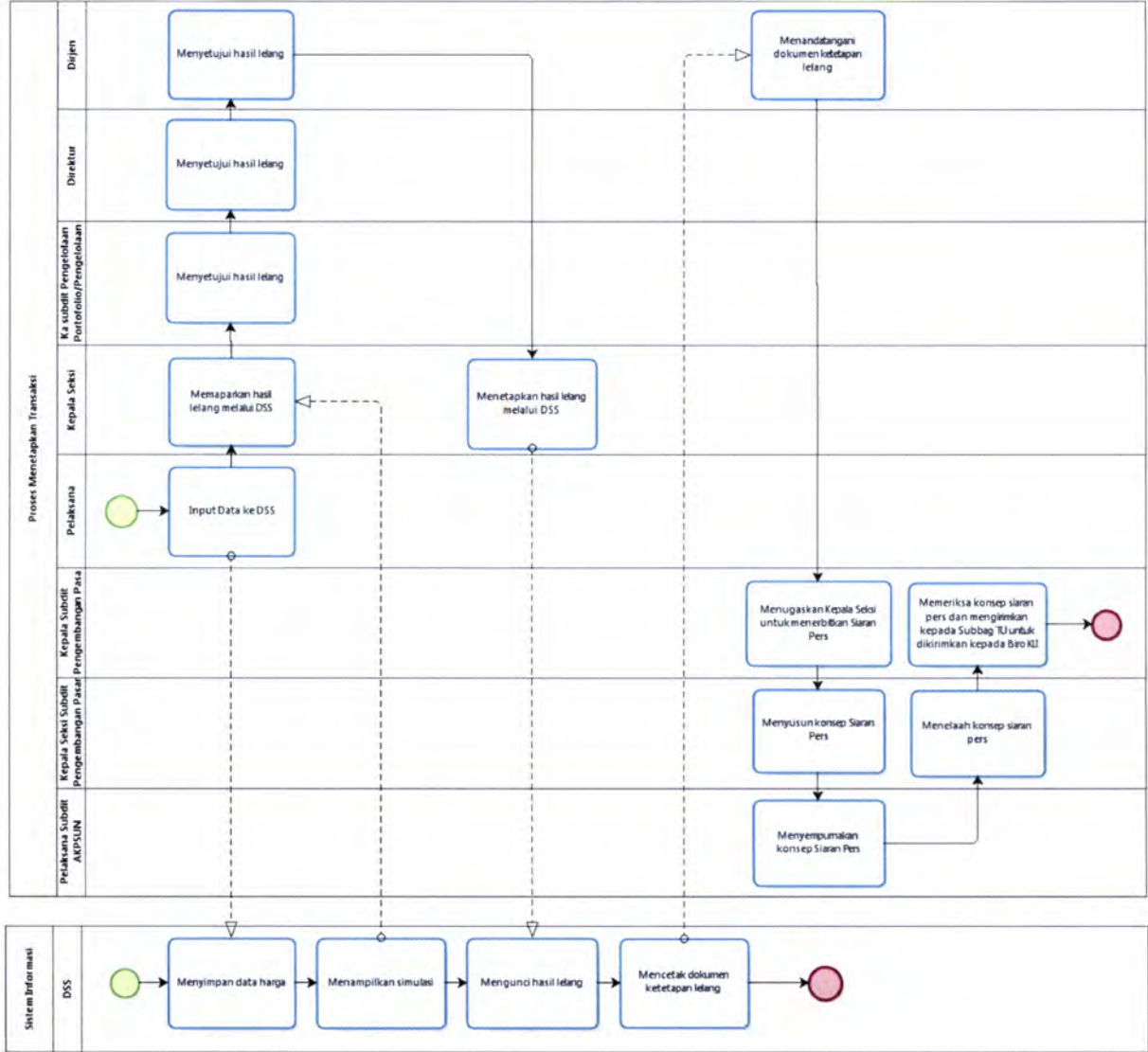


Am

C.2.02 MELAKUKAN TRANSAKSI BUY BACK

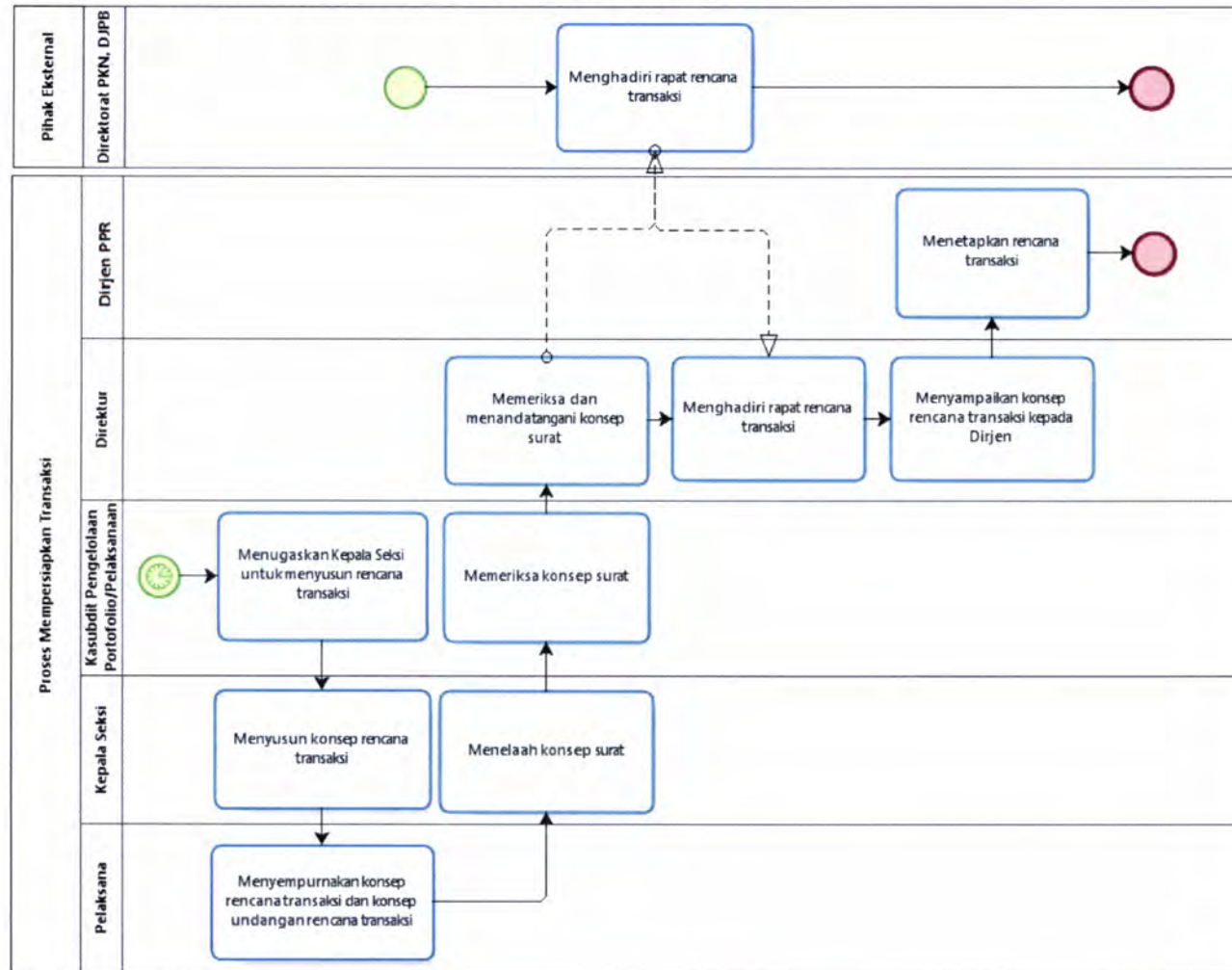


C.2.03 MENETAPKAN HASIL TRANSAKSI

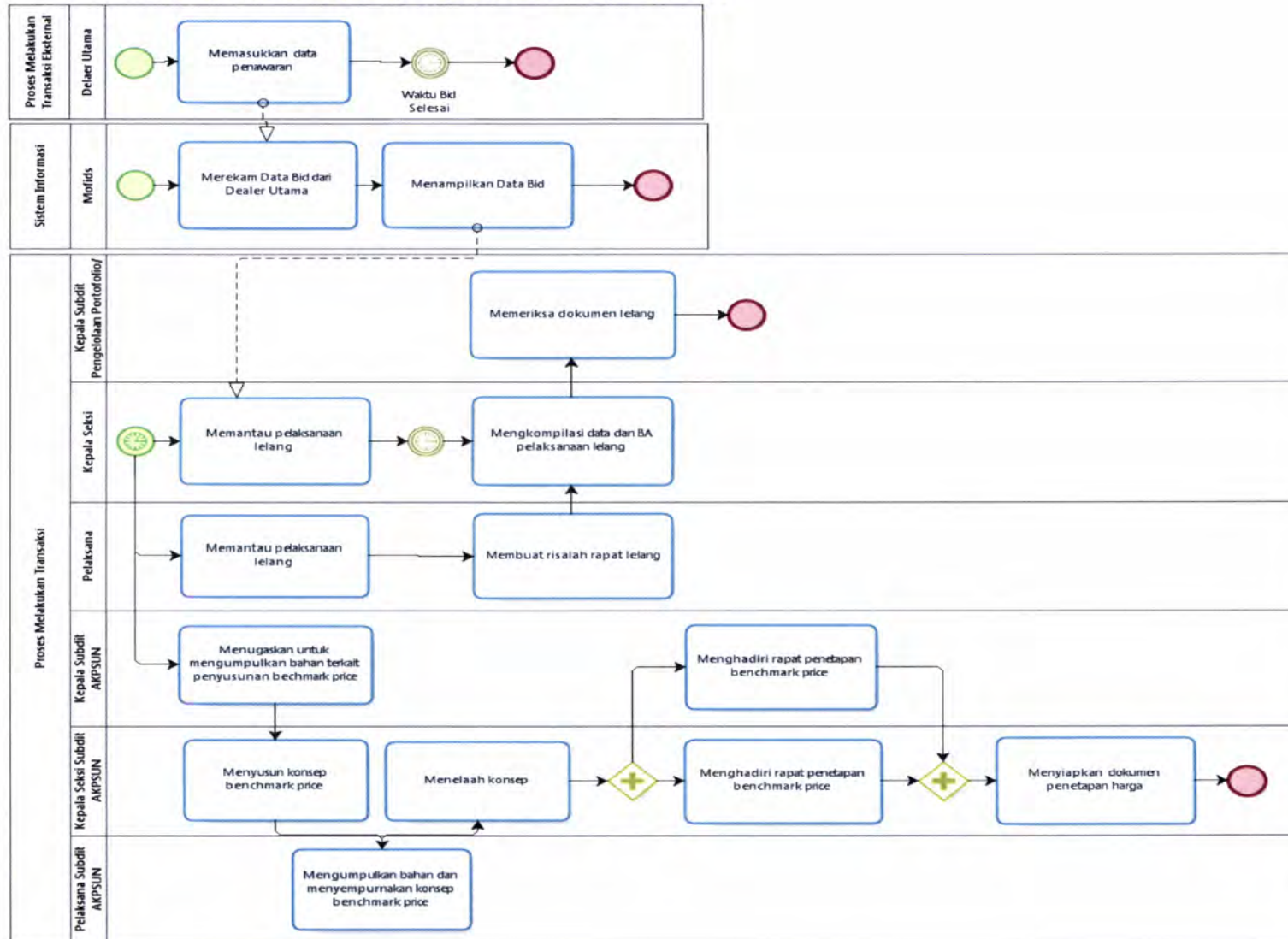


C.3 TRANSAKSI SWITCHING

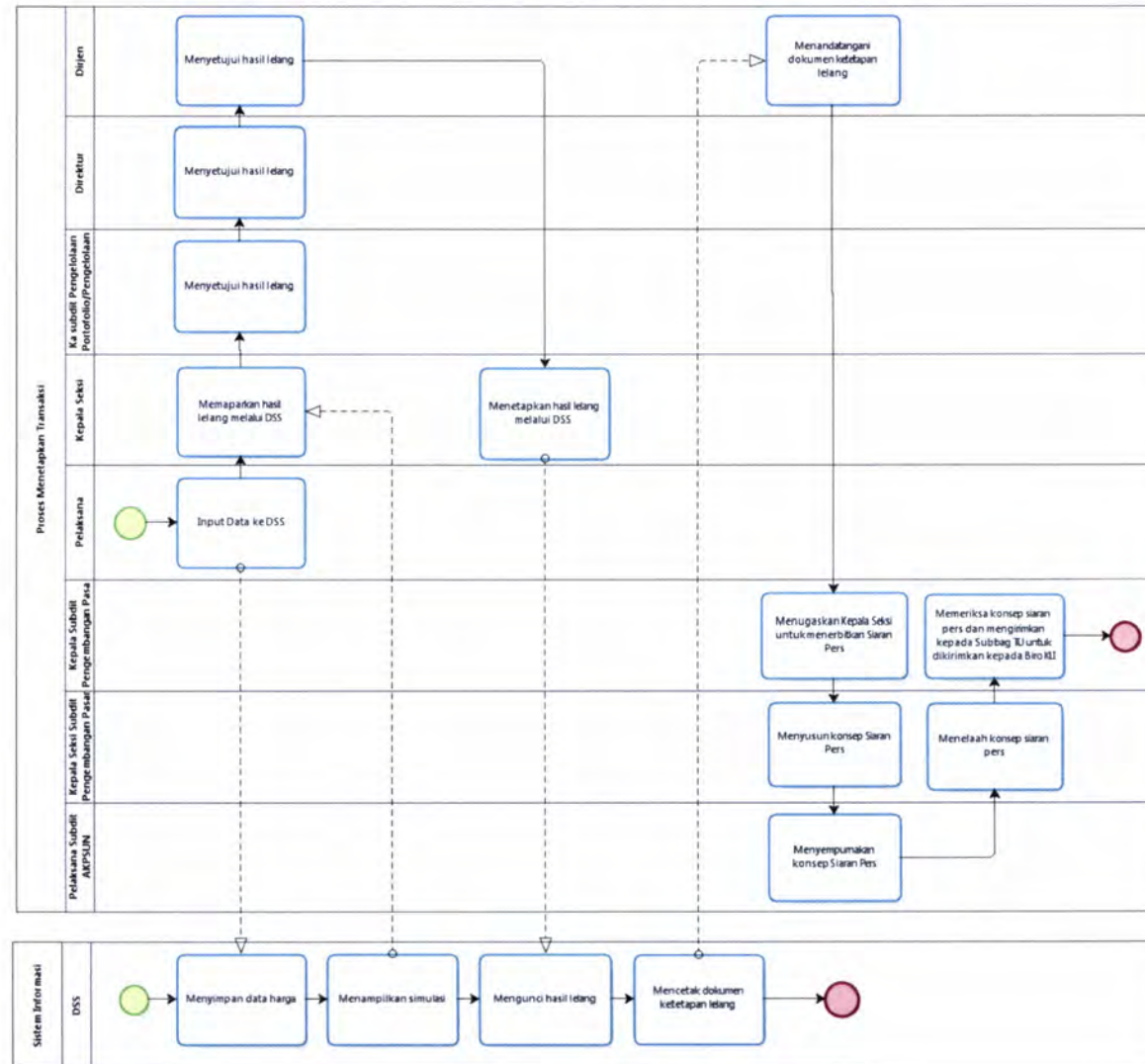
C.3.01 MEMPERSIAPKAN TRANSAKSI



C.3.02 MELAKUKAN TRANSAKSI SWITCHING



C.3.03 MENETAPKAN HASIL TRANSAKSI



Are

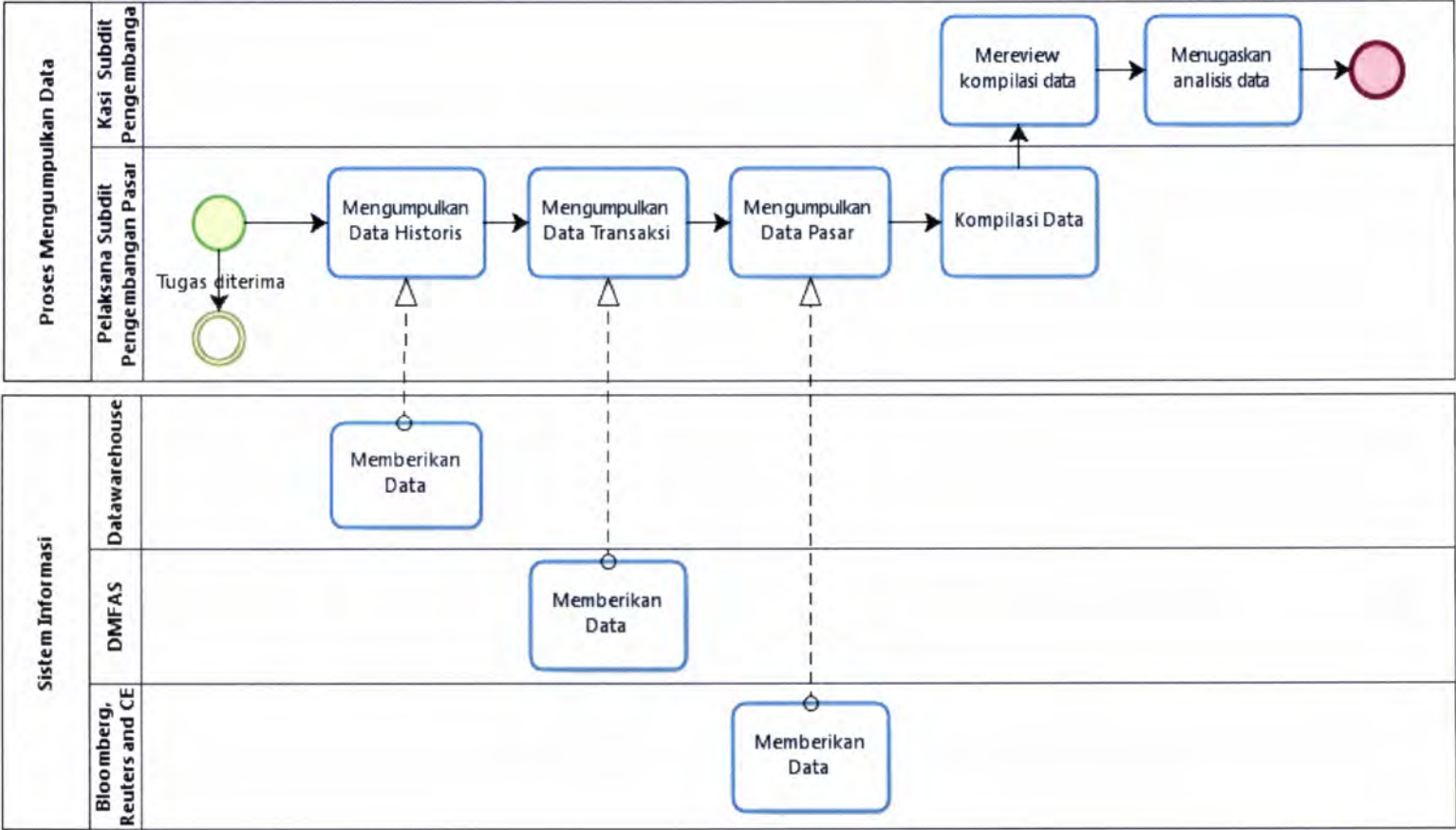
C.4 DEBT SWAP

C.5 PREPAYMENT

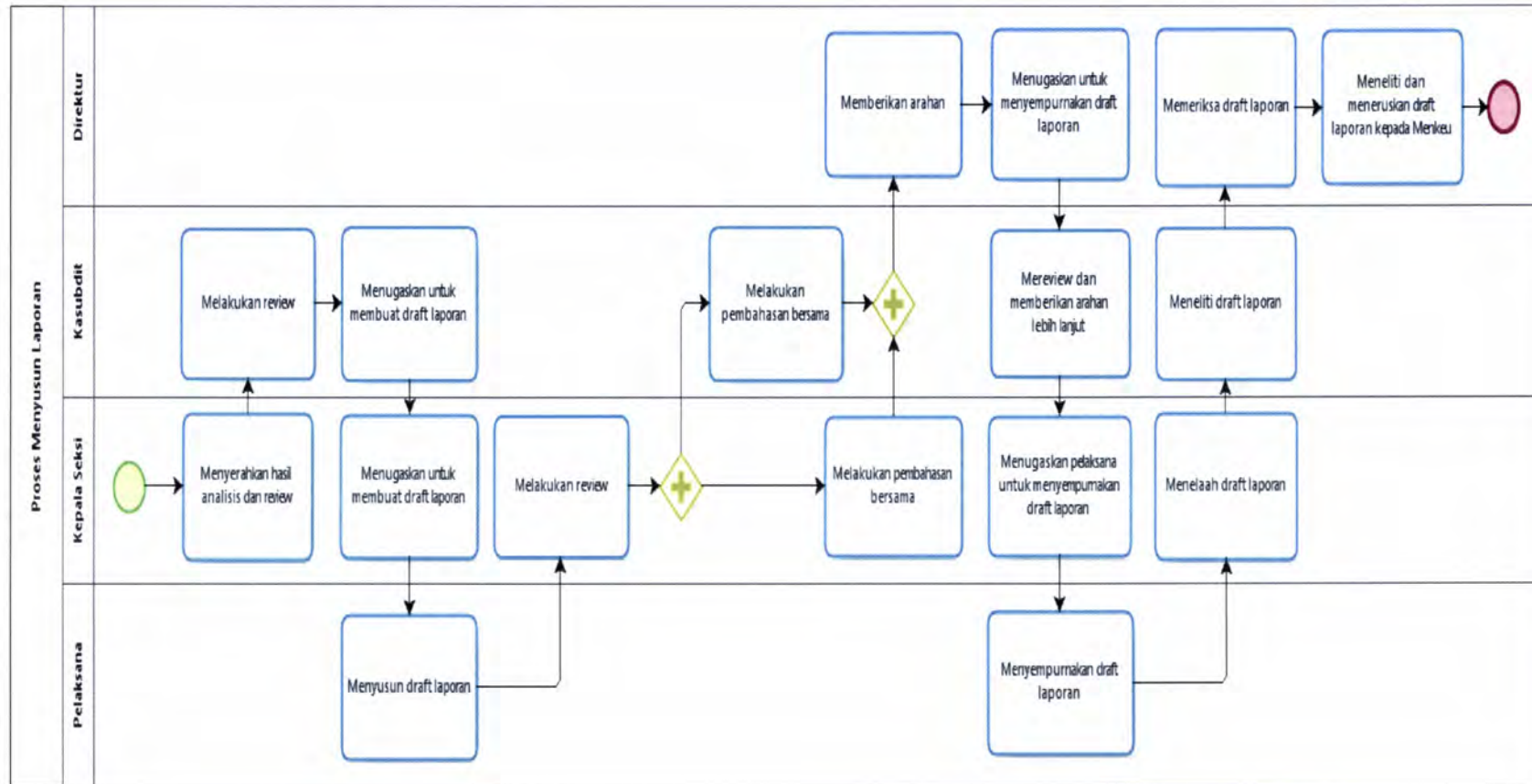
D. PENGEMBANGAN PASAR SBN

D.1 PENGEMBANGAN INSTRUMEN

D.1.01 MENGUMPULKAN DATA

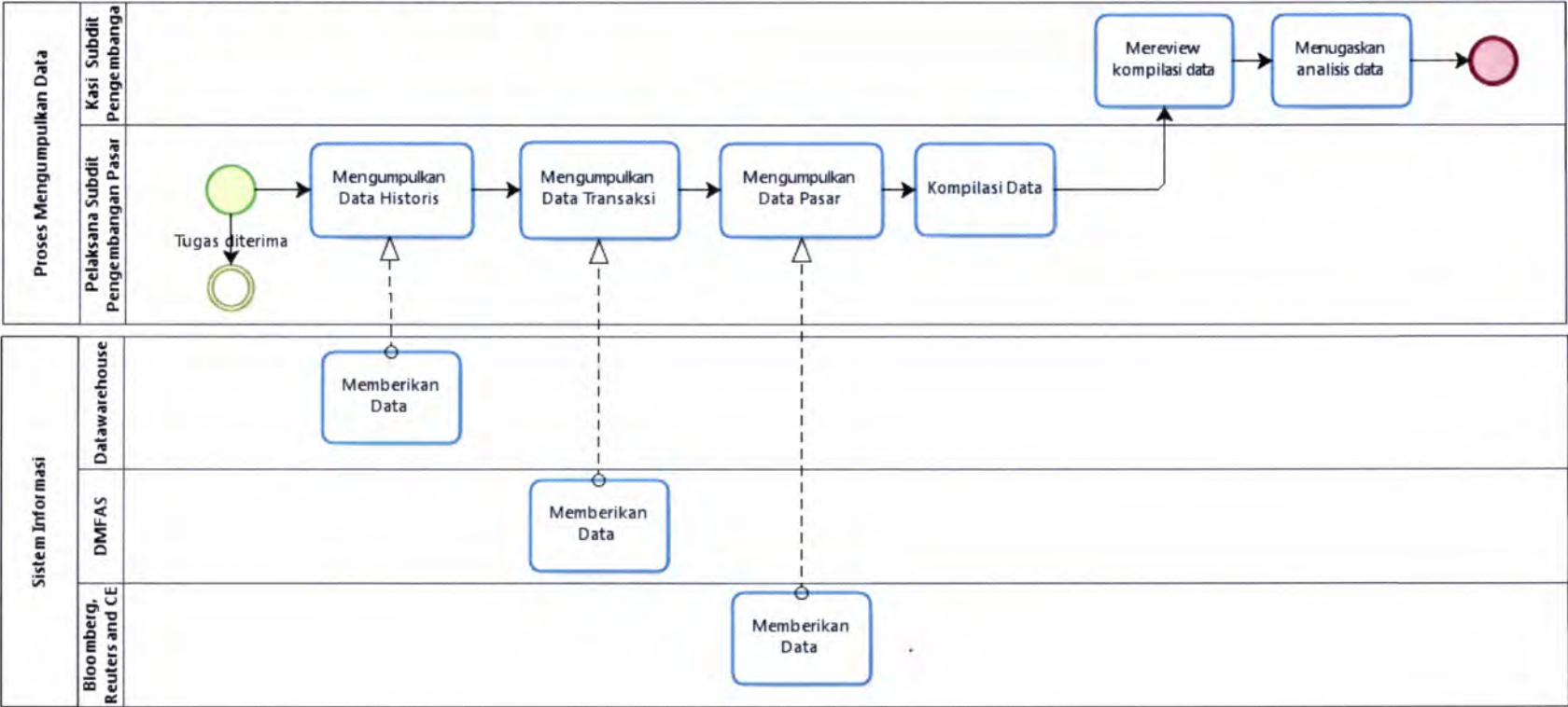


D.1.02 MENYUSUN LAPORAN



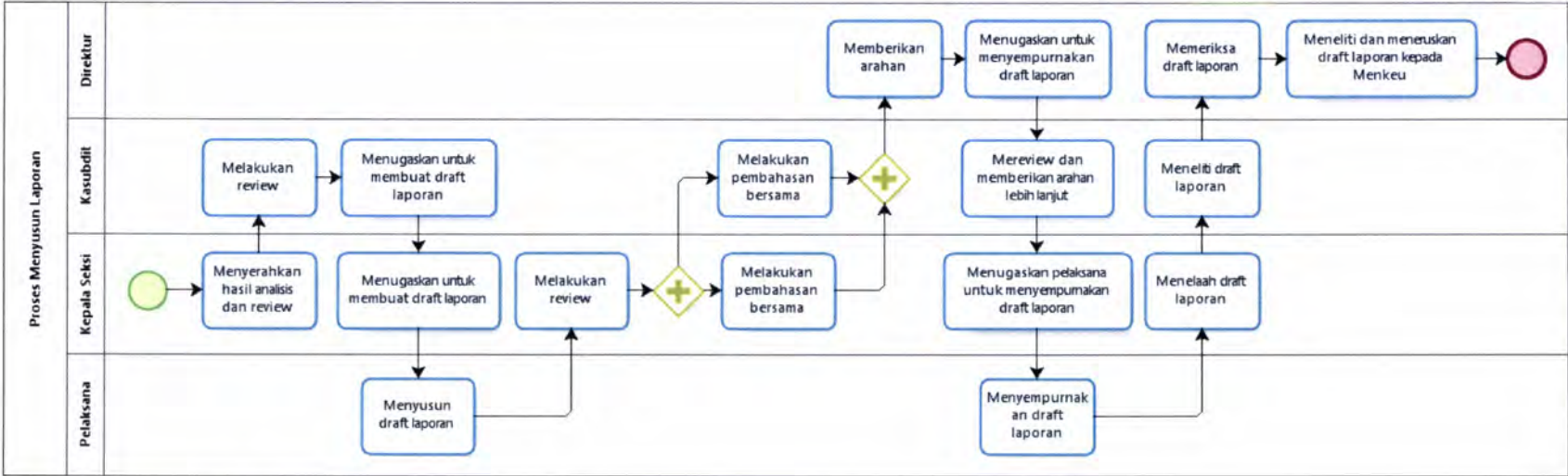
D.2 PENGEMBANGAN BASIS INVESTOR

D.2.01 MENGUMPULKAN DATA



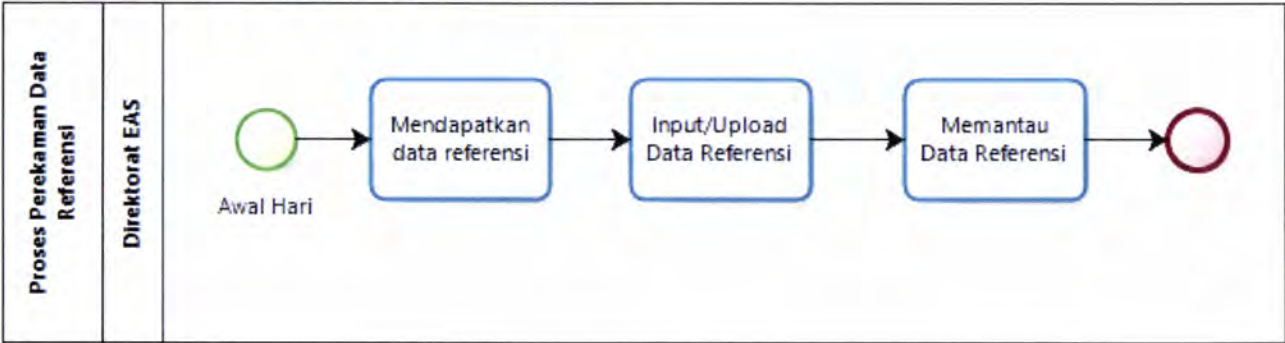
Bye

D.2.02 MENYUSUN LAPORAN



E. SETELMEN UTANG

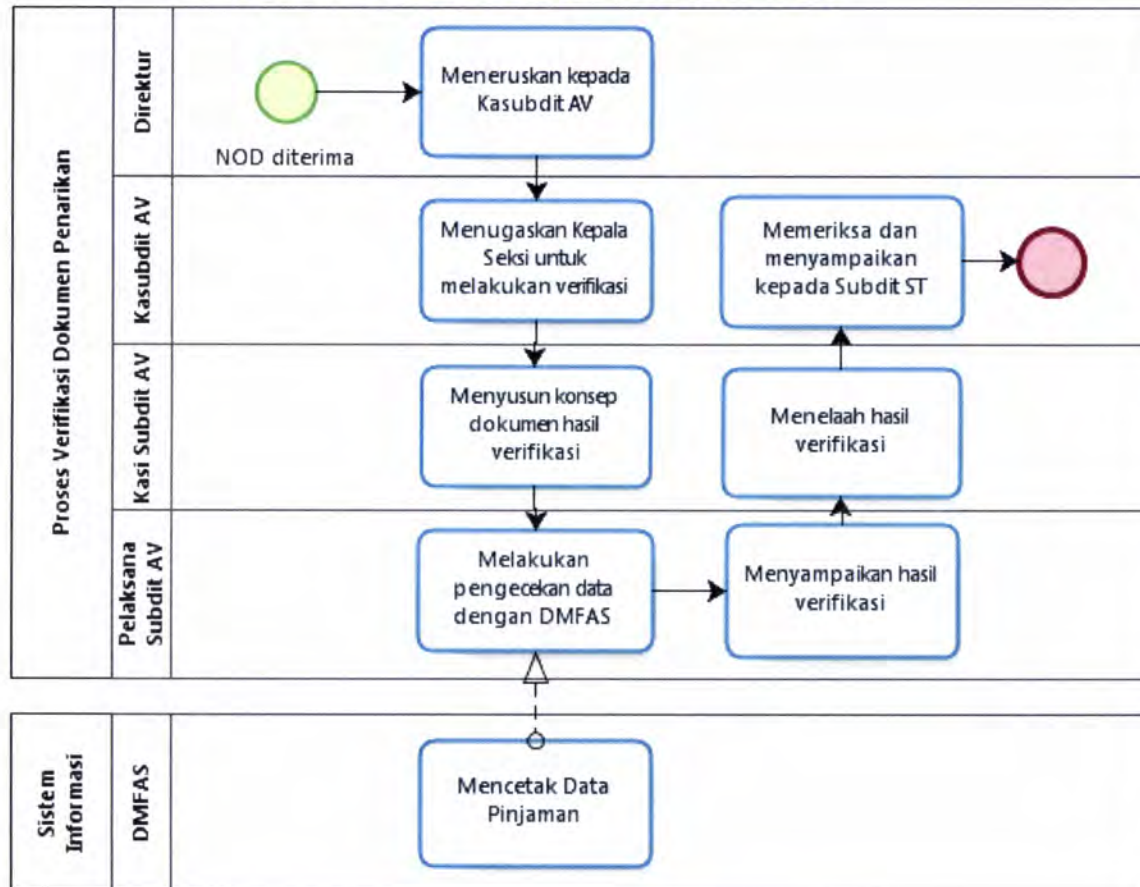
E.1 PEREKAMAN DATA REFERENSI



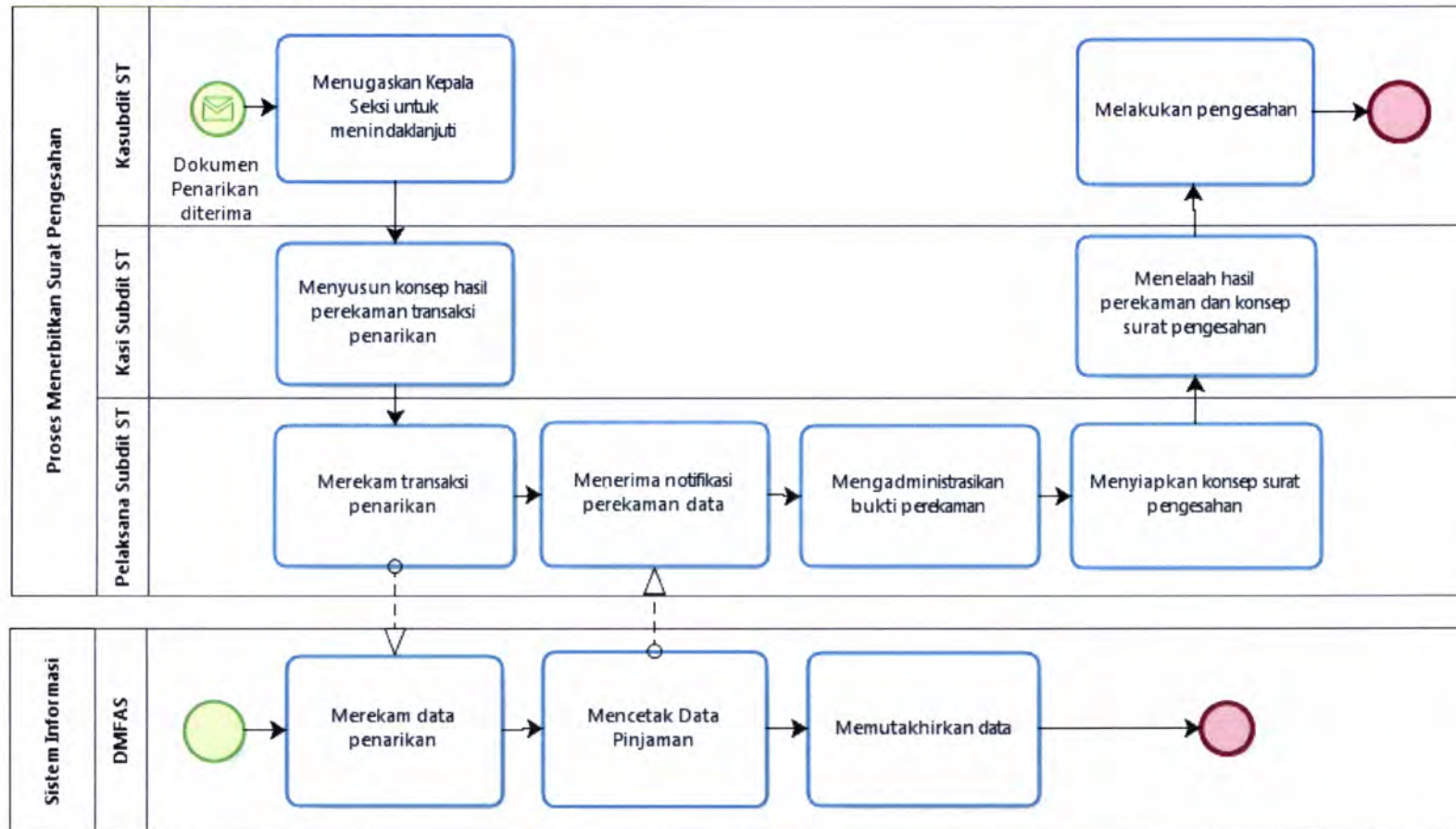
Handwritten signature

E.2 SETELMEN TRANSAKSI PENARIKAN PINJAMAN

E.2.01 VERIFIKASI DOKUMEN PENARIKAN

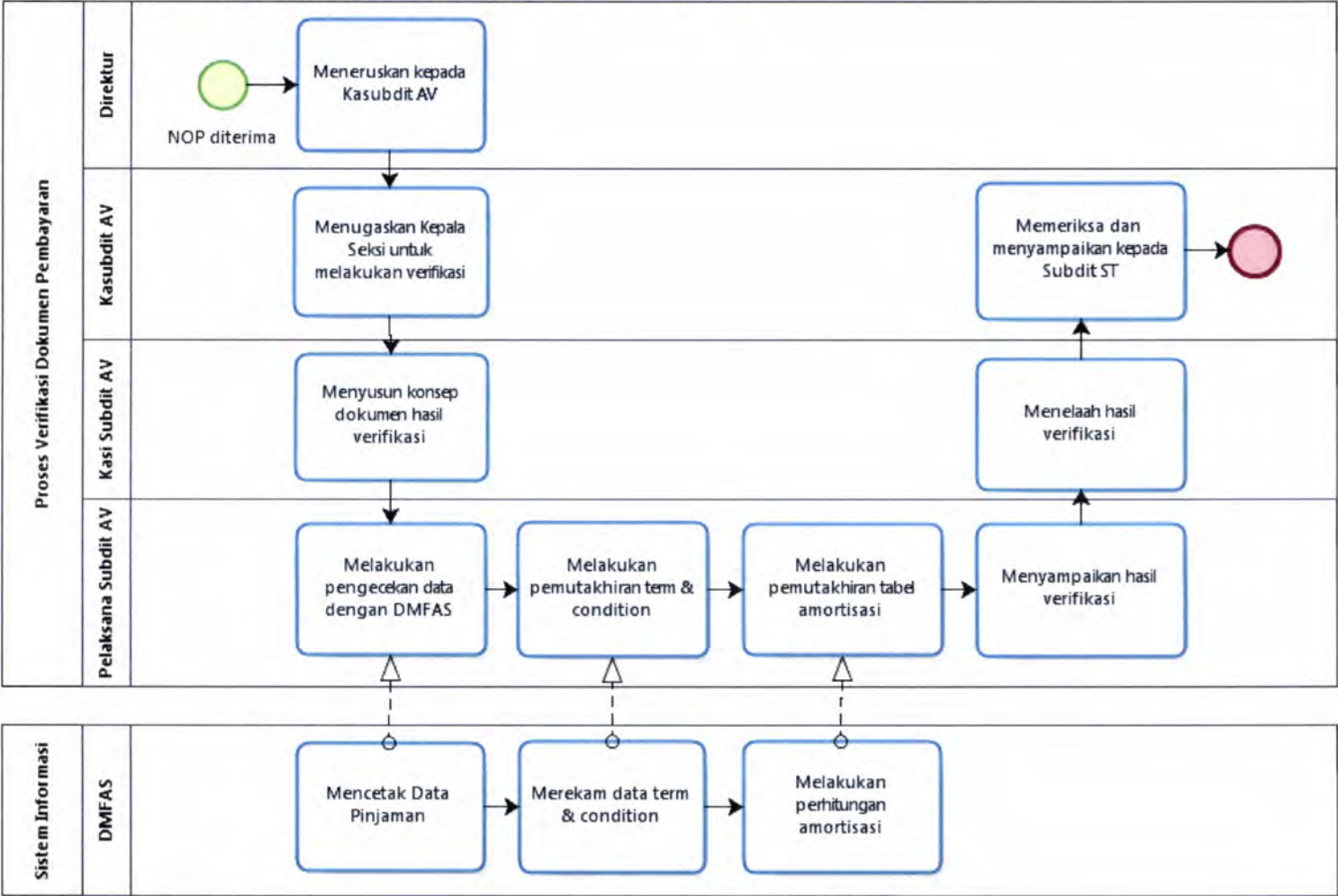


E.2.02 MENERBITKAN SP4HLN

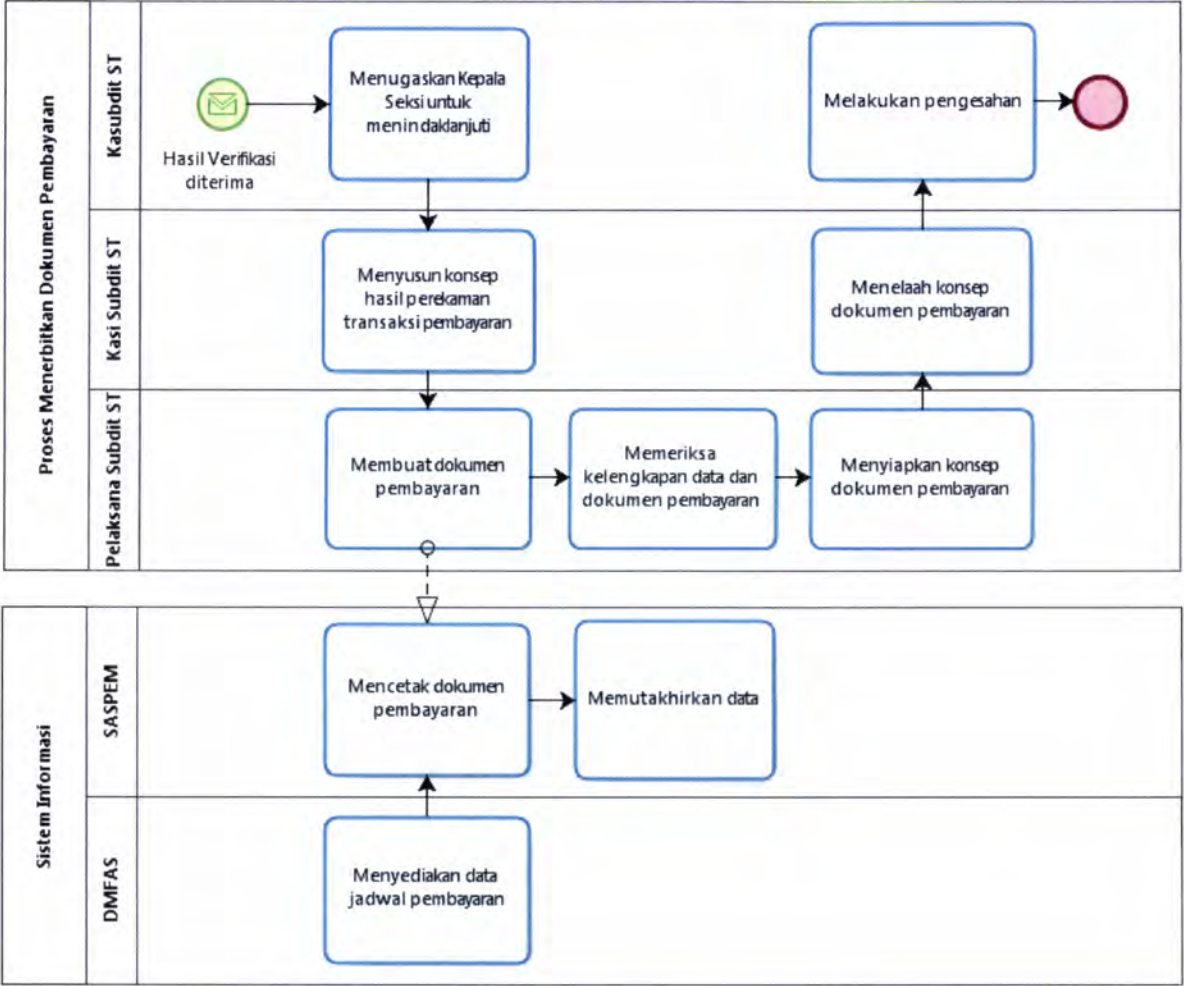


E.3 SETELMEN TRANSAKSI PEMBAYARAN UTANG

E.3.01 VERIFIKASI DOKUMEN PEMBAYARAN



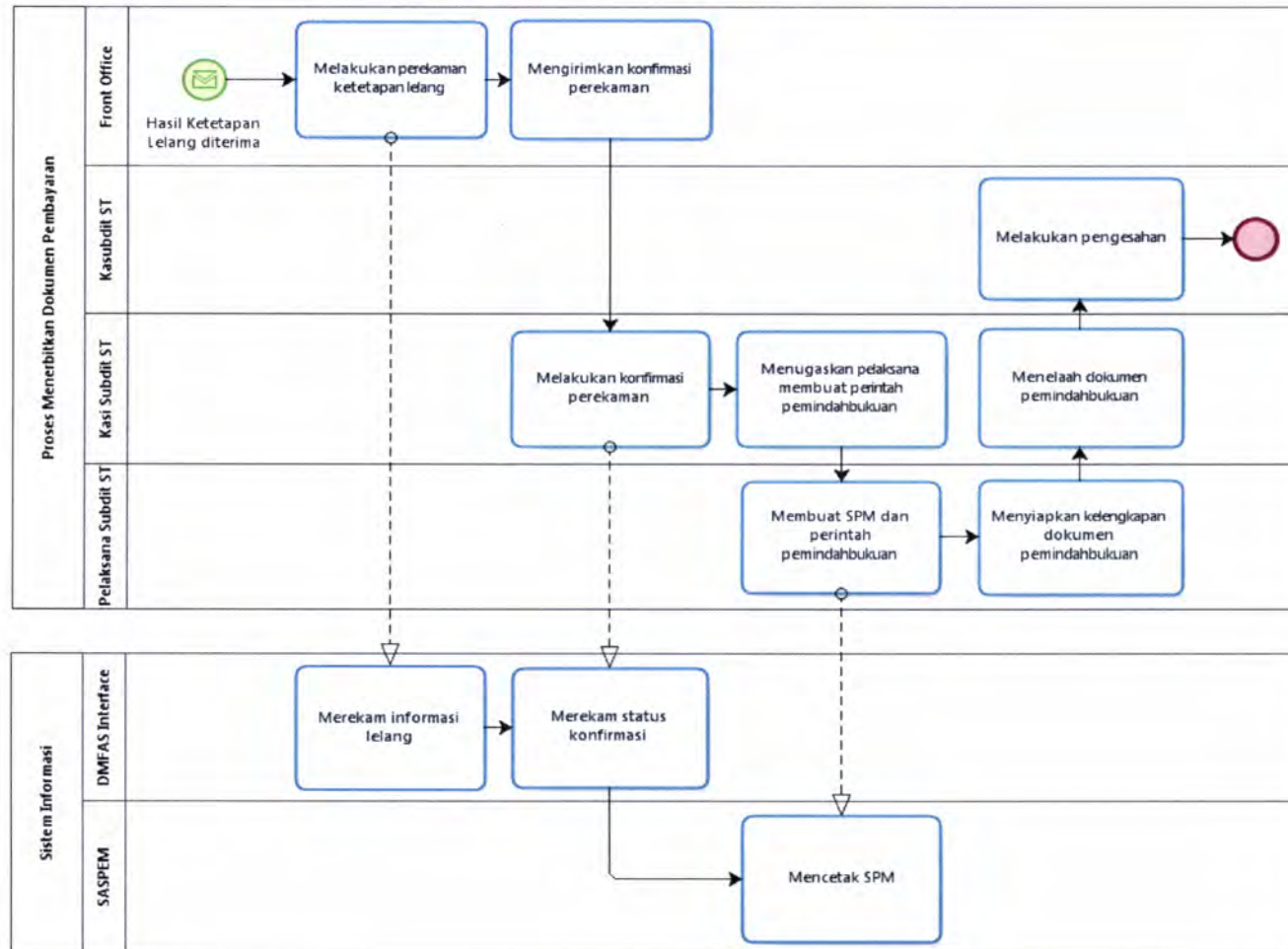
E.3.02 MENERBITKAN DOKUMEN PEMBAYARAN



Handwritten signature

E.4 SETELMEN TRANSAKSI PENERBITAN UTANG

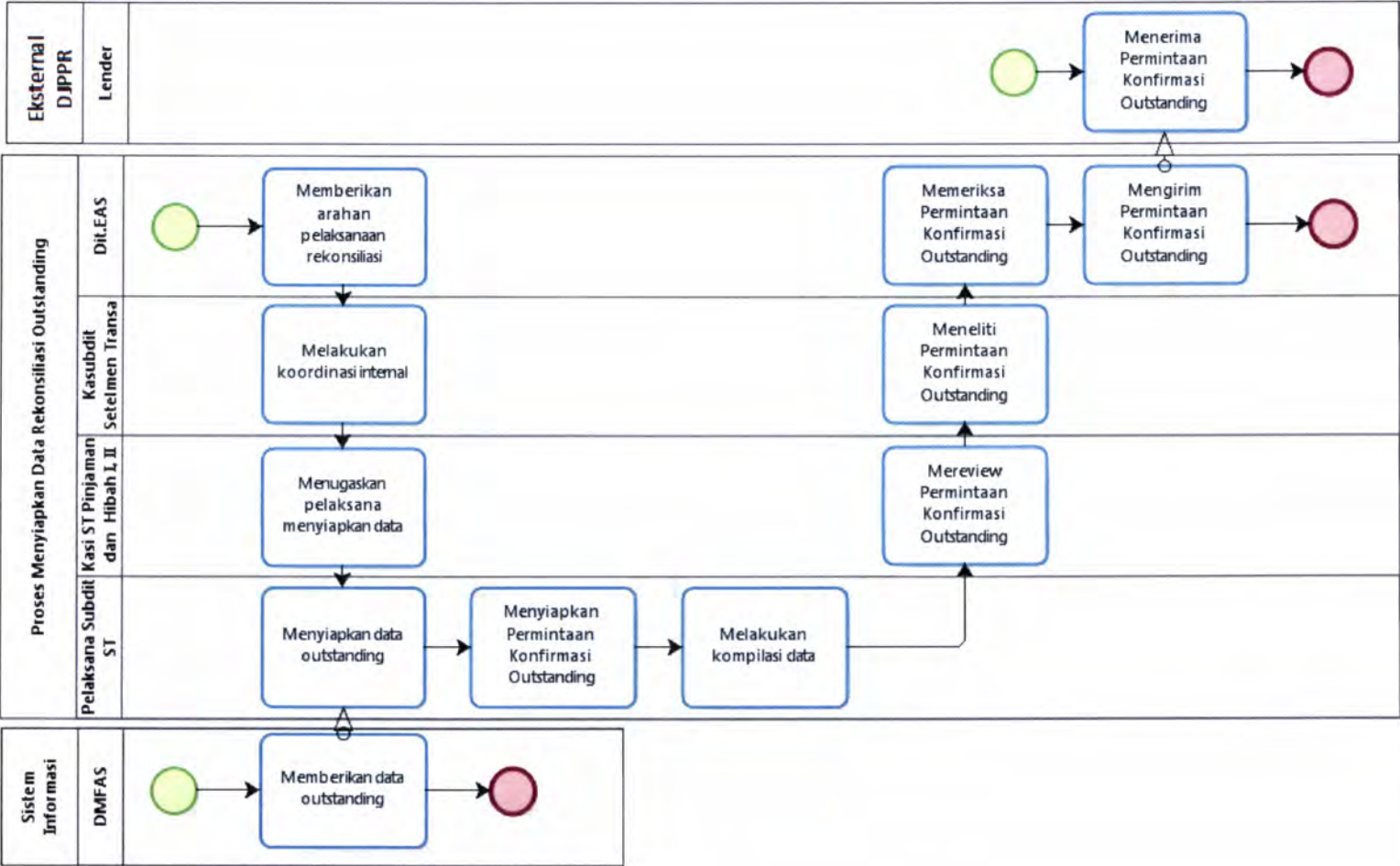
E.4.01 MENERBITKAN DOKUMEN PEMBAYARAN



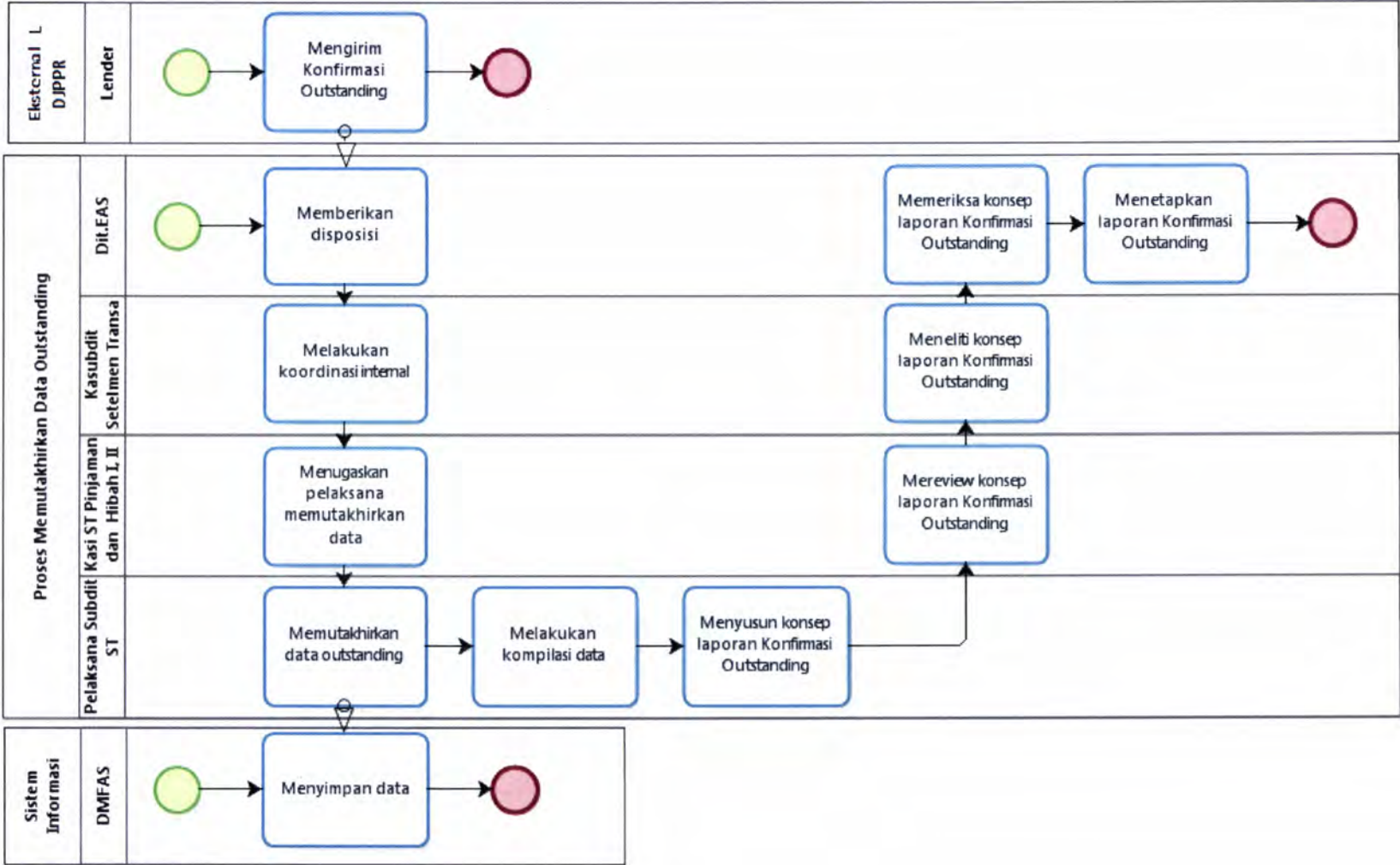
F. AKUNTABILITAS UTANG

F.1 REKONSILIASI DATA OUTSTANDING

F.1.01 MEMPERSIAPKAN DATA REKONSILIASI OUTSTANDING

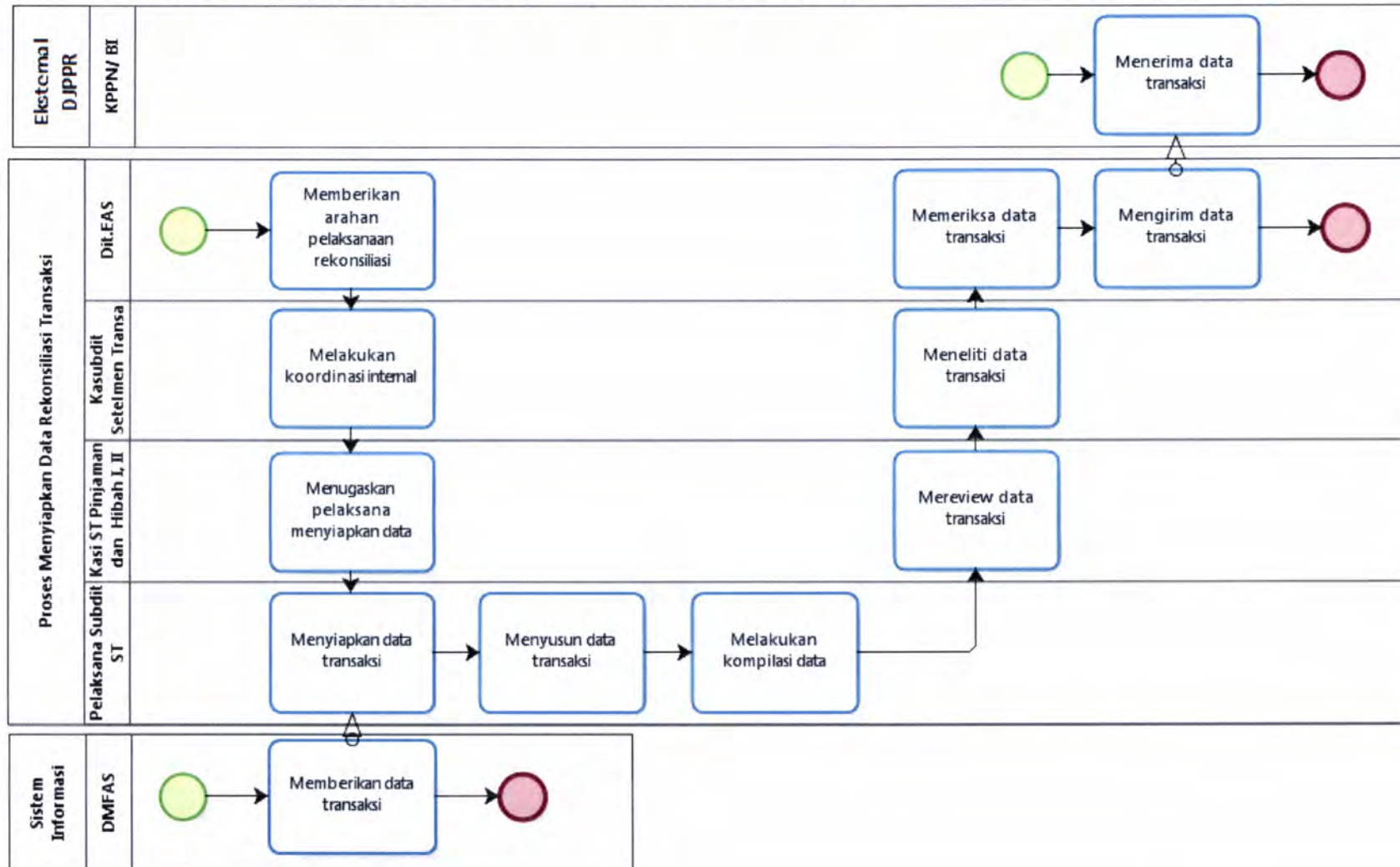


F.1.02 MEMUTAKHIRKAN DATA OUTSTANDING

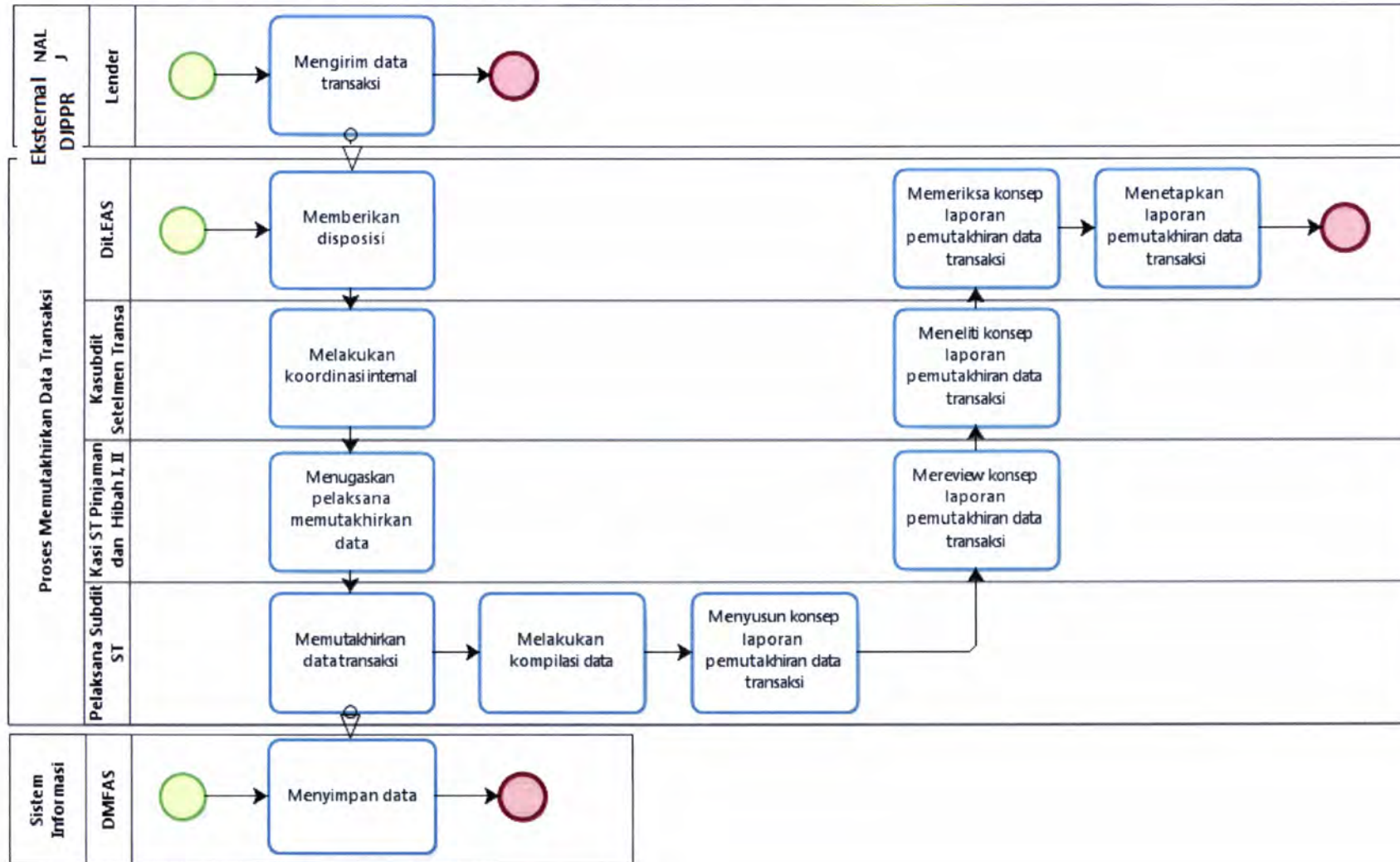


F.2 REKONSILIASI DATA TRANSAKSI

F.2.01 MEMPERSIAPKAN DATA REKONSILIASI TRANSAKSI

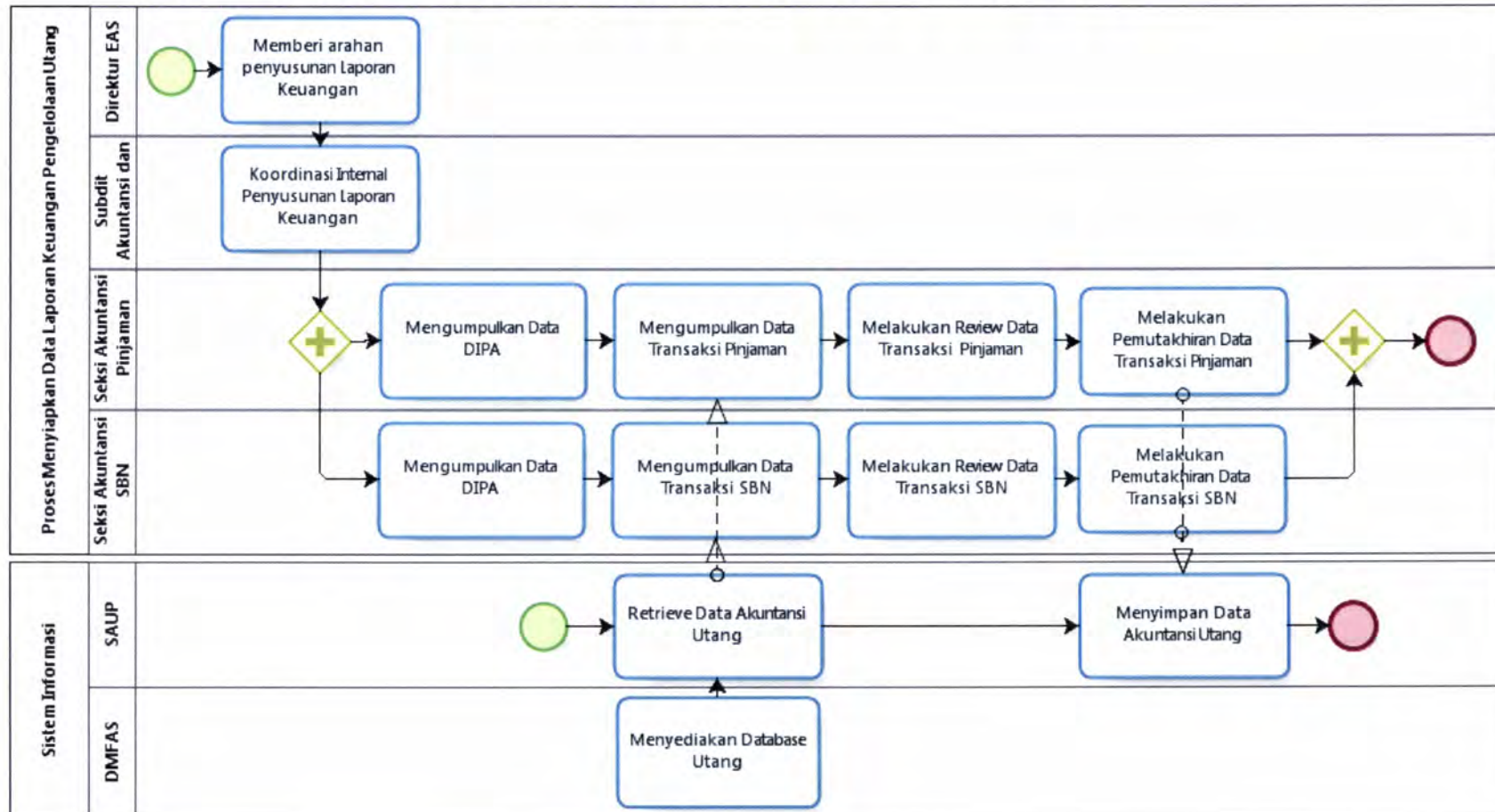


F.2.02 MEMUTAKHIRKAN DATA TRANSAKSI

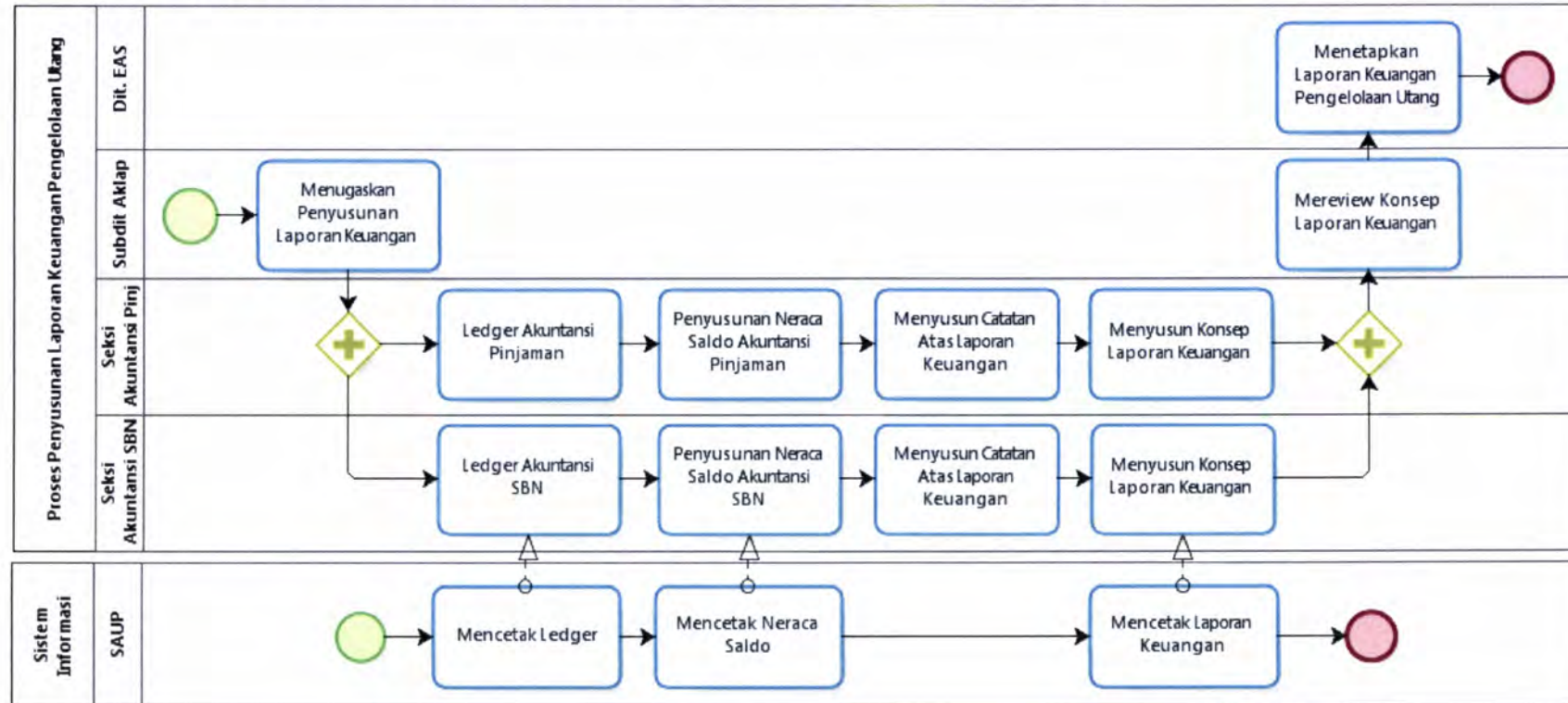


F.3 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN UTANG

F.3.01 PENYIAPAN DATA LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN UTANG

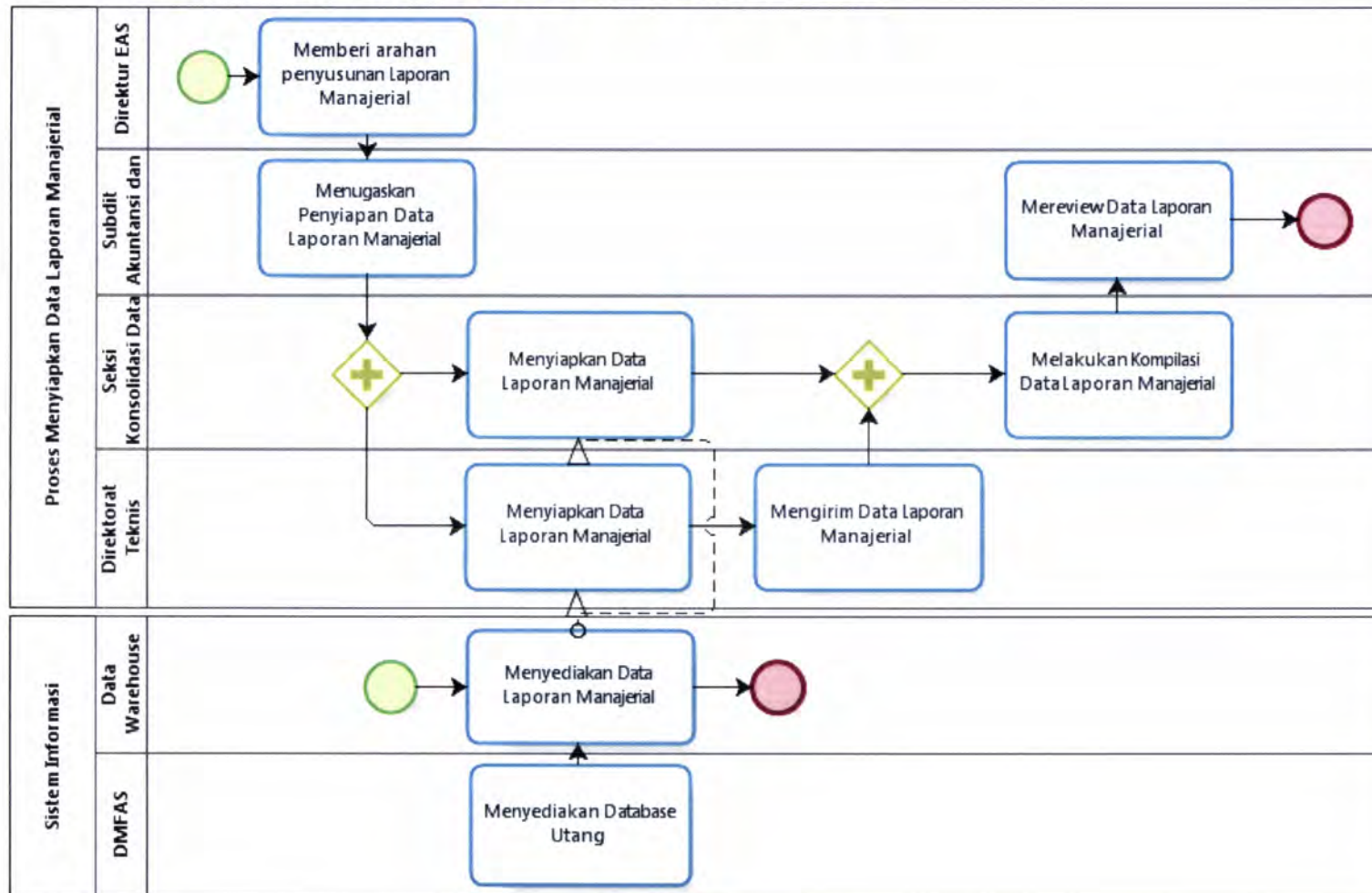


F.3.02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN UTANG

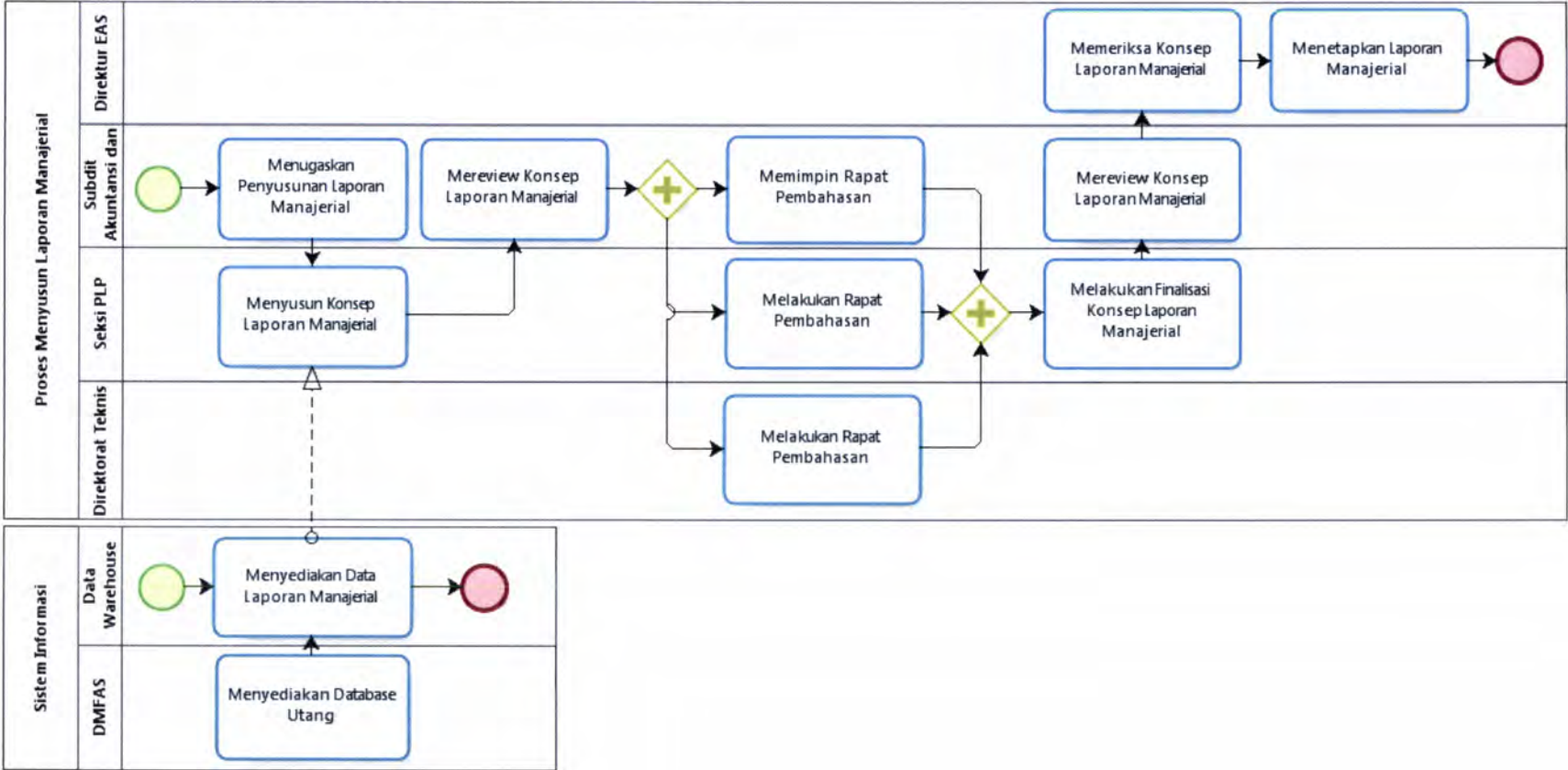


F.4 PENYUSUNAN LAPORAN MANAJERIAL

F.4.01 MENYIAPKAN DATA LAPORAN MANAJERIAL



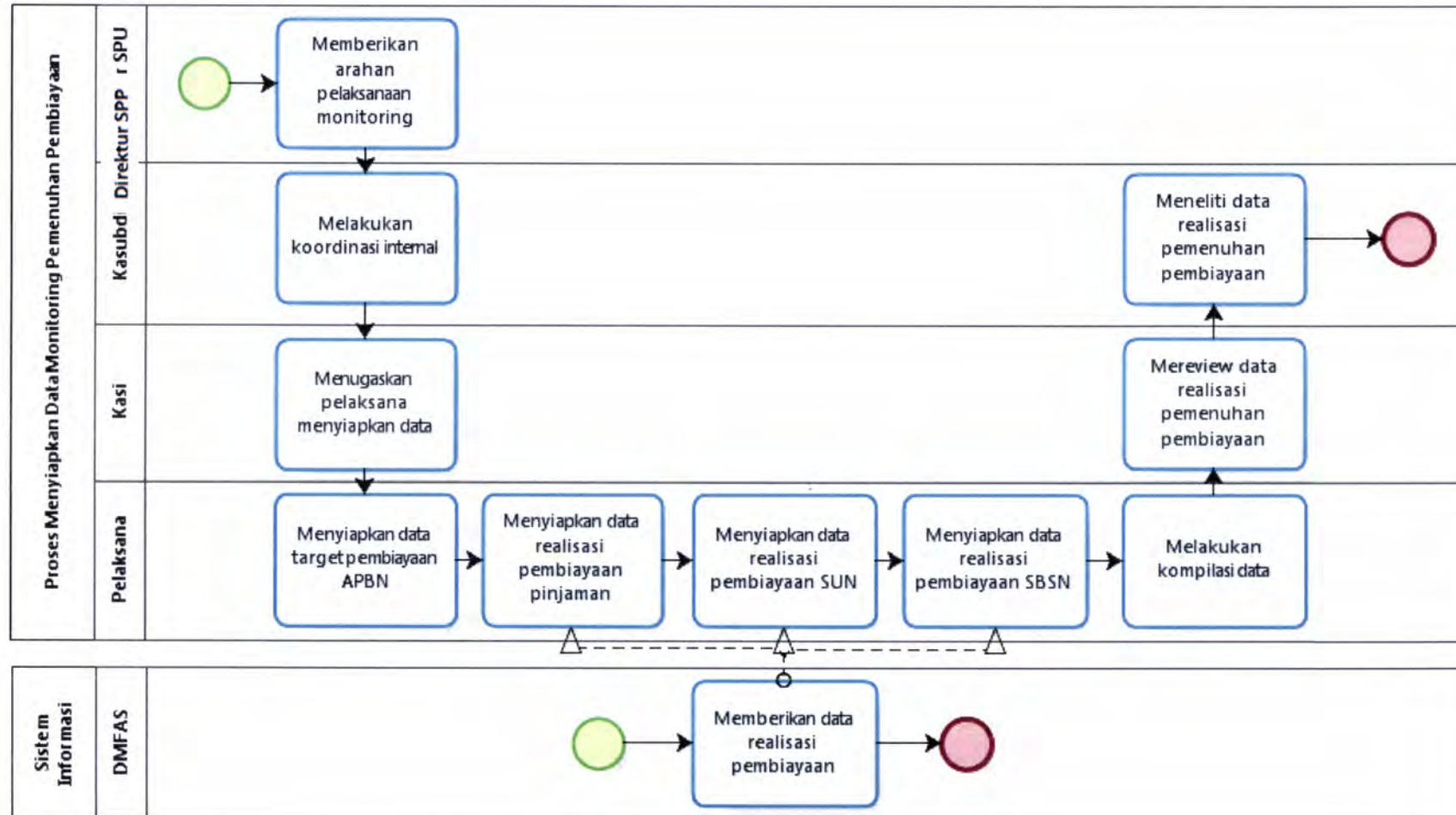
F.4.02 MENYUSUN LAPORAN MANAJERIAL



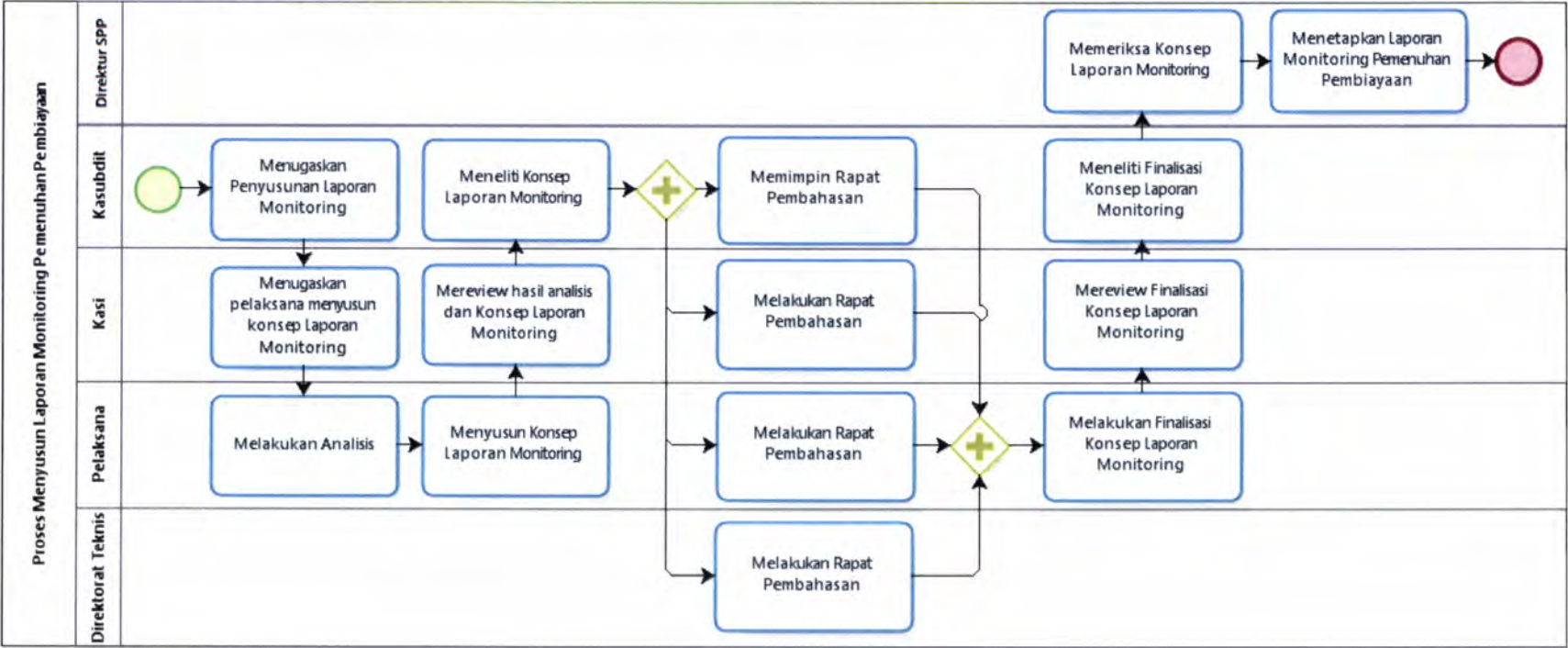
G. MONITORING DAN EVALUASI

G.1 MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN

G.1.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN



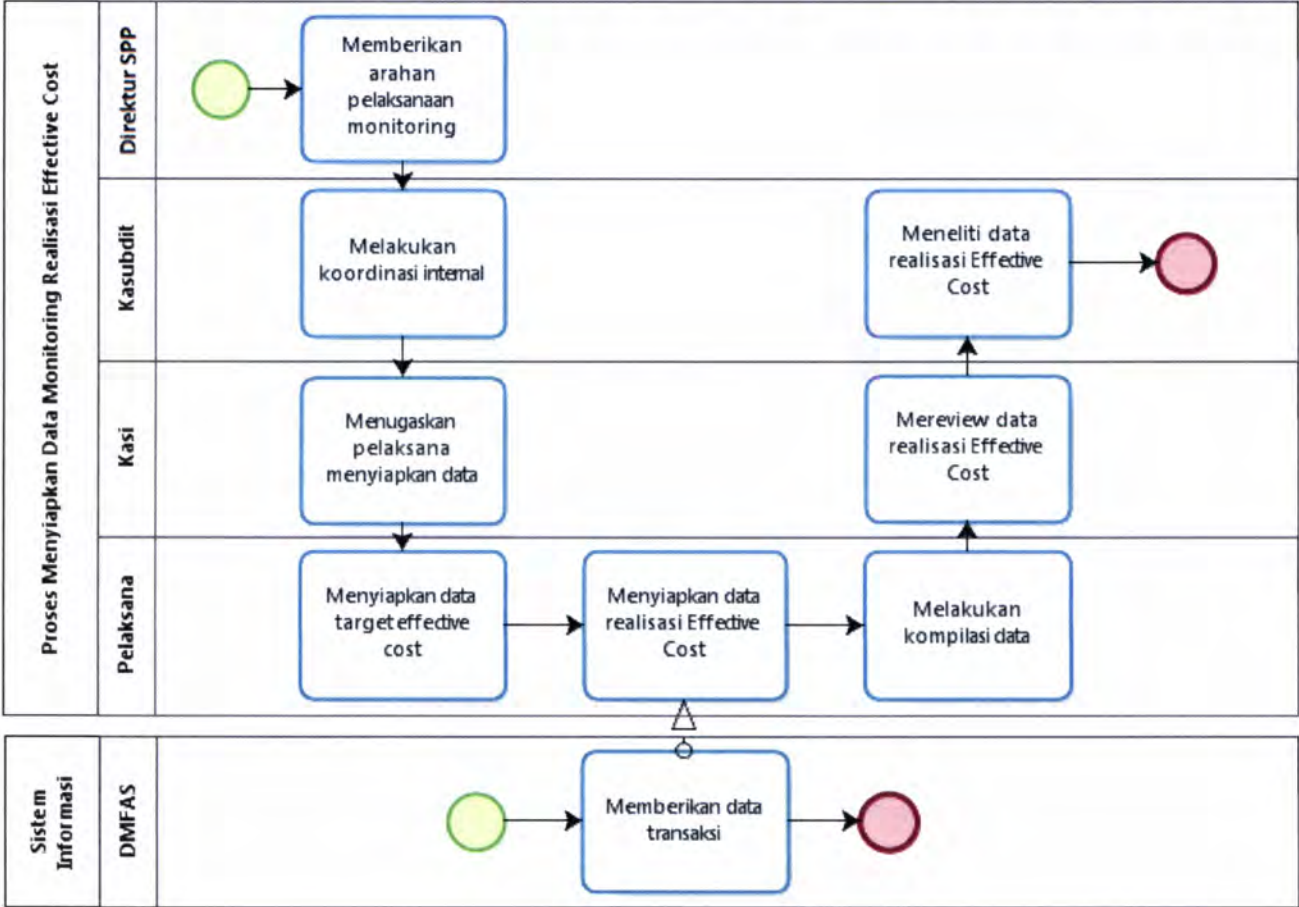
G.1.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING PEMENUHAN PEMBIAYAAN



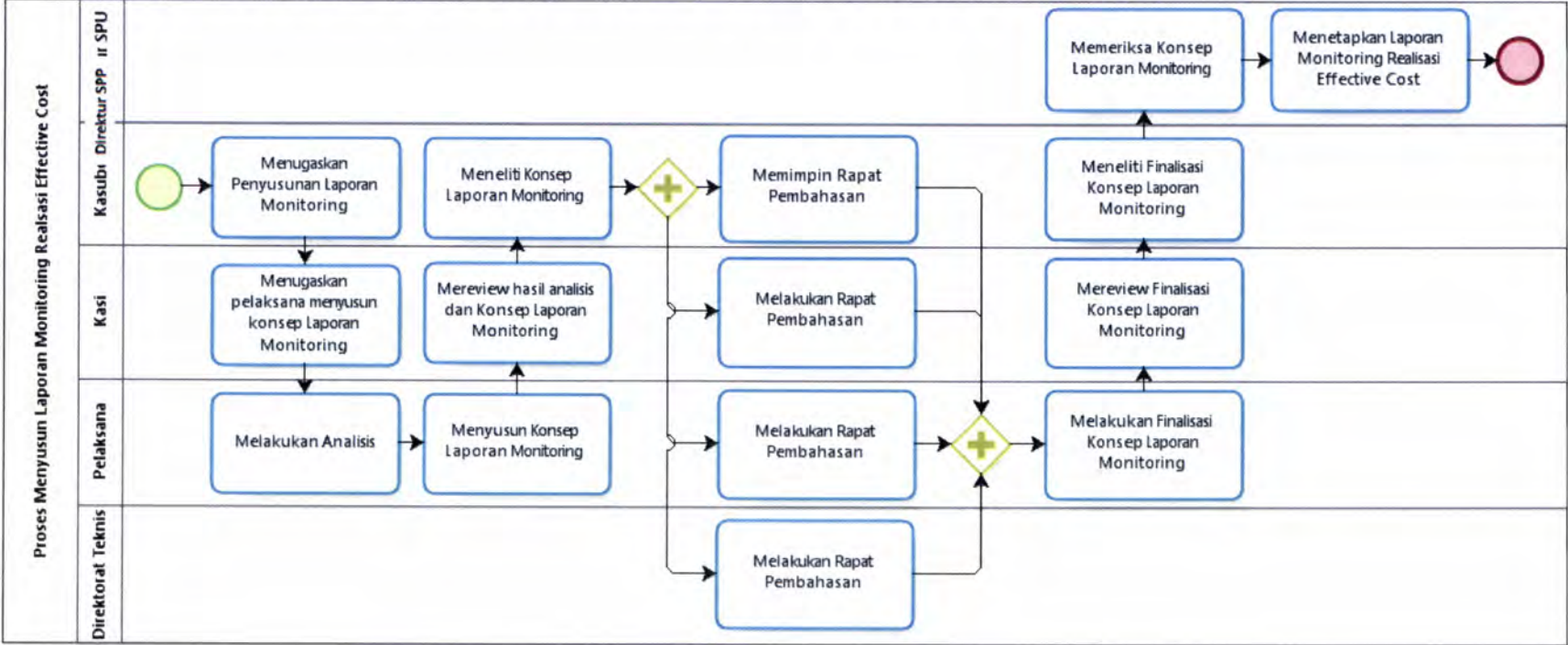
Am

G.2 MONITORING REALISASI *EFFECTIVE* COST

G.2.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING REALISASI *EFFECTIVE* COST

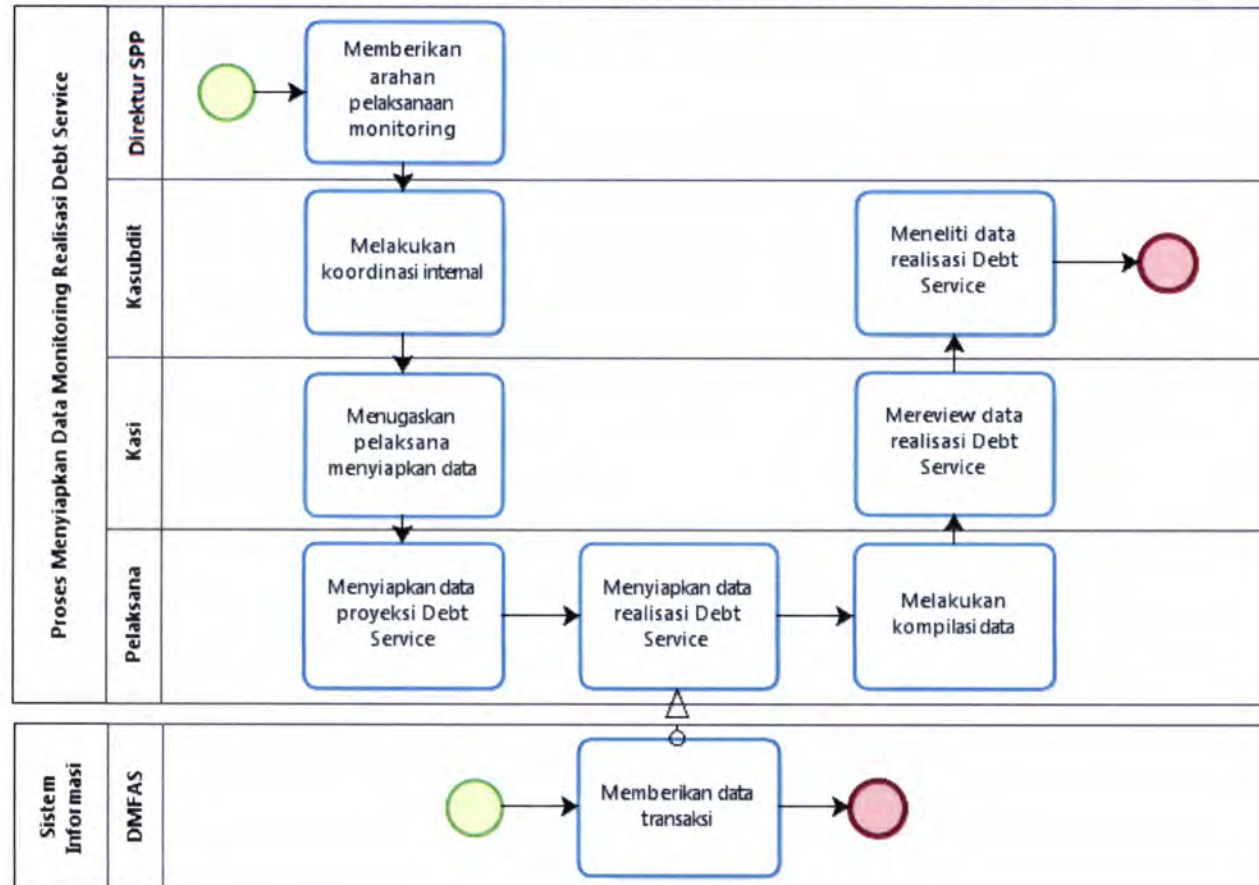


G.2.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING REALISASI *EFFECTIVE COST*

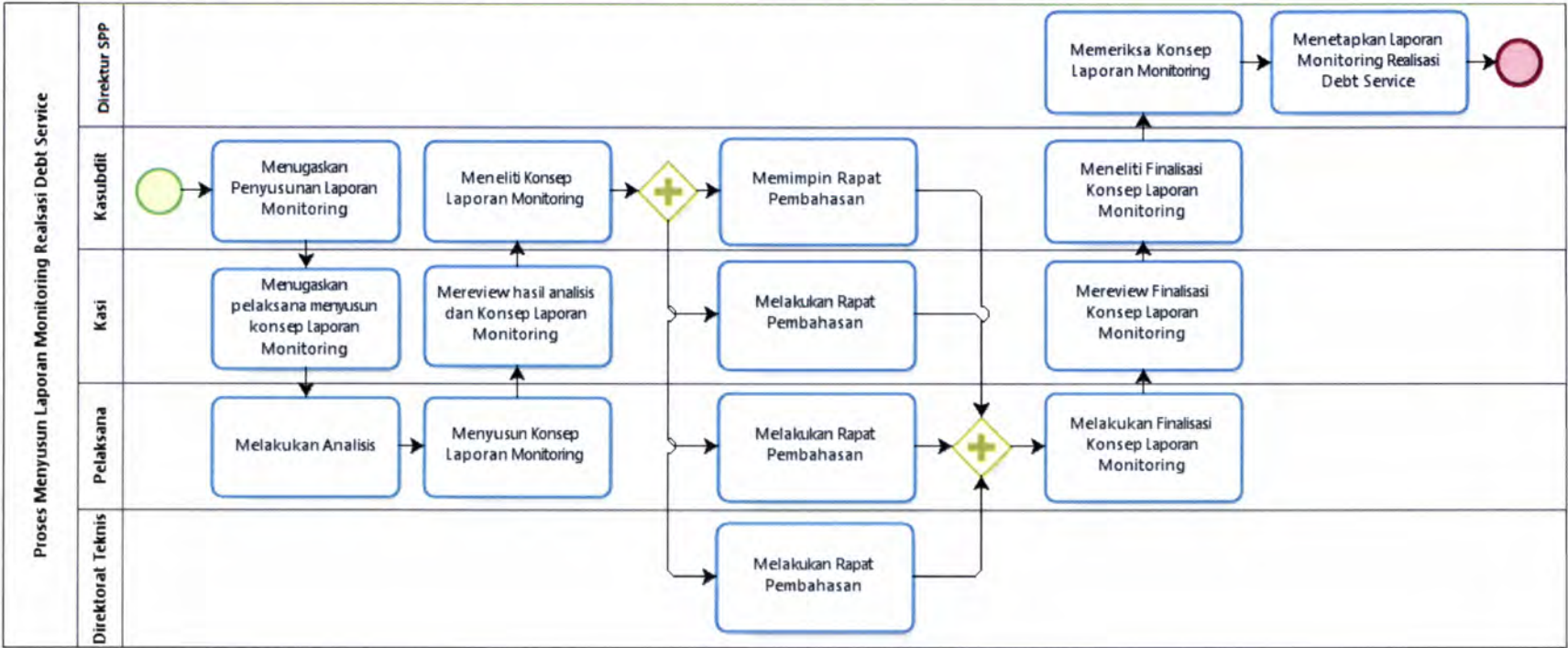


G.3 MONITORING REALISASI DAN PROYEKSI *DEBT SERVICE*

G.3.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING REALISASI *DEBT SERVICE*

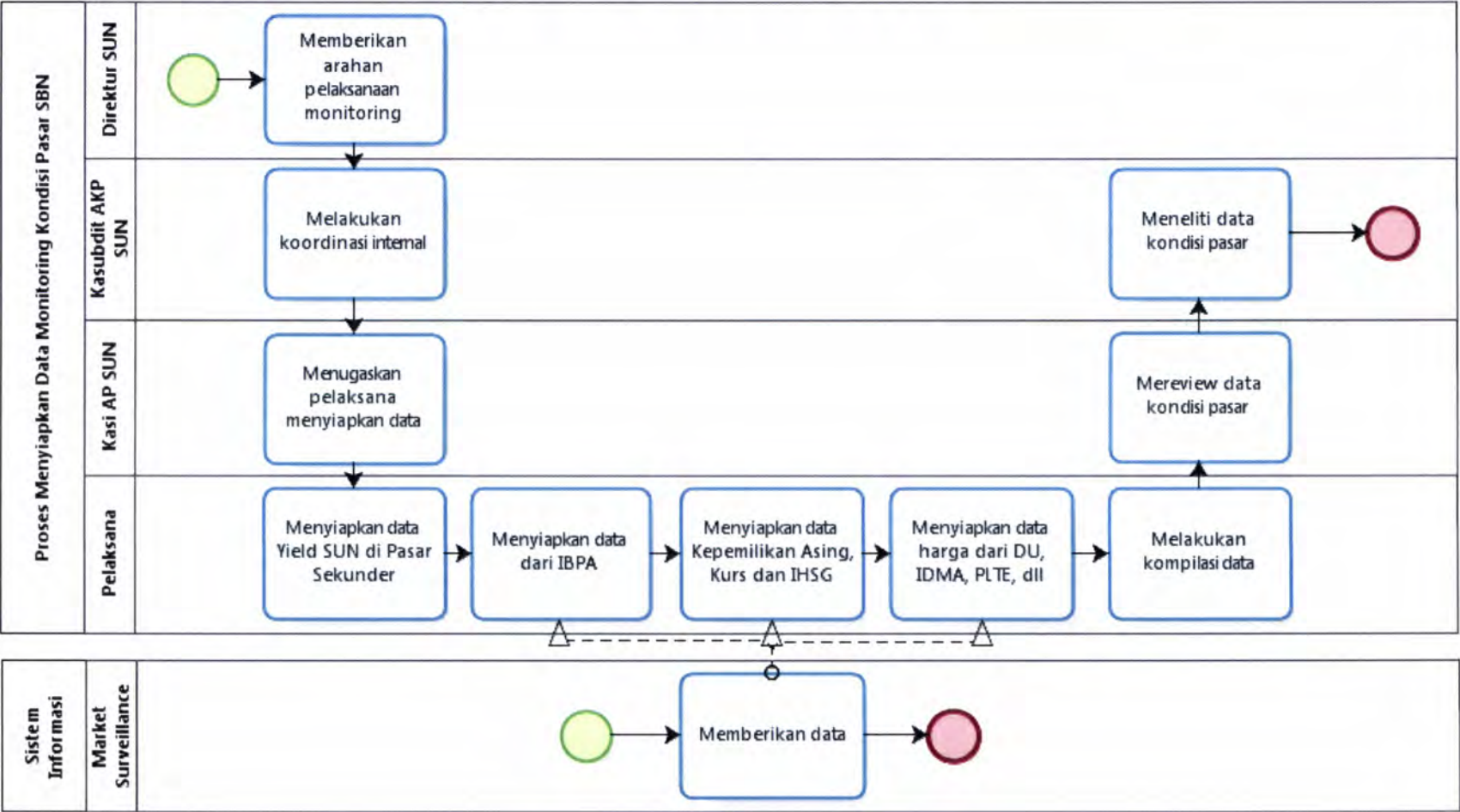


G.3.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING REALISASI DEBT SERVICE



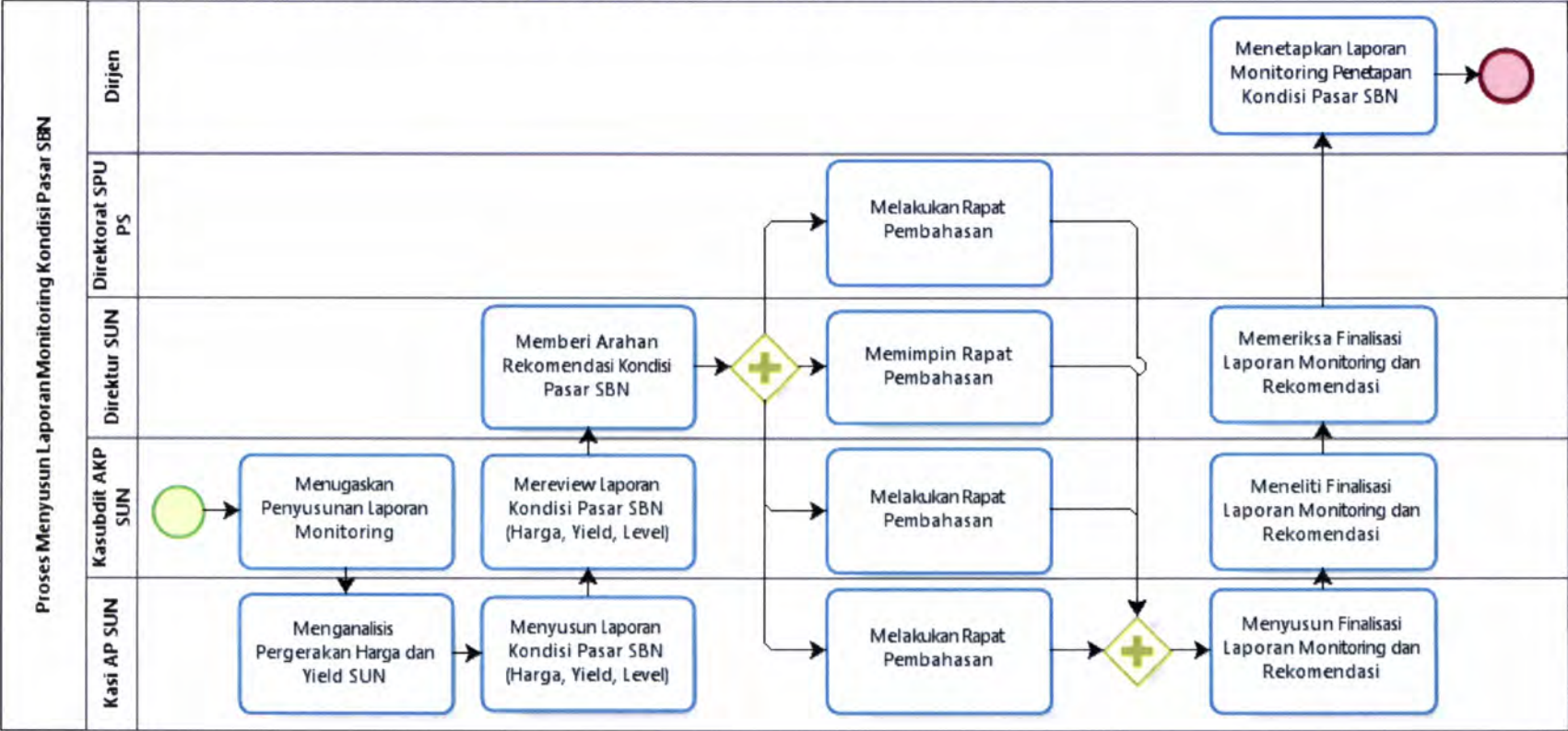
G.4 MONITORING KONDISI PASAR SBN

G.4.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING KONDISI PASAR SBN



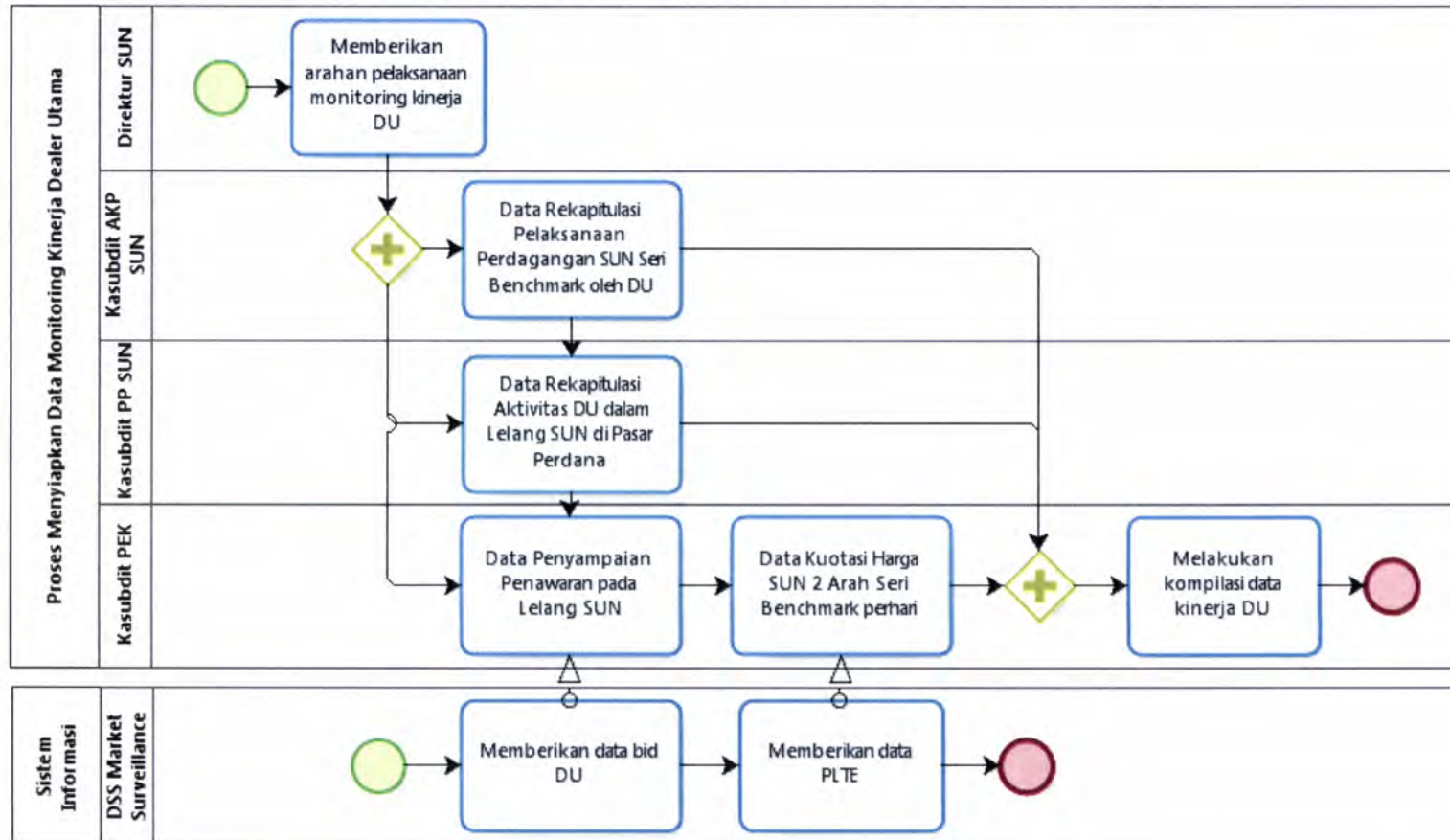
Ape,

G.4.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING KONDISI PASAR SBN



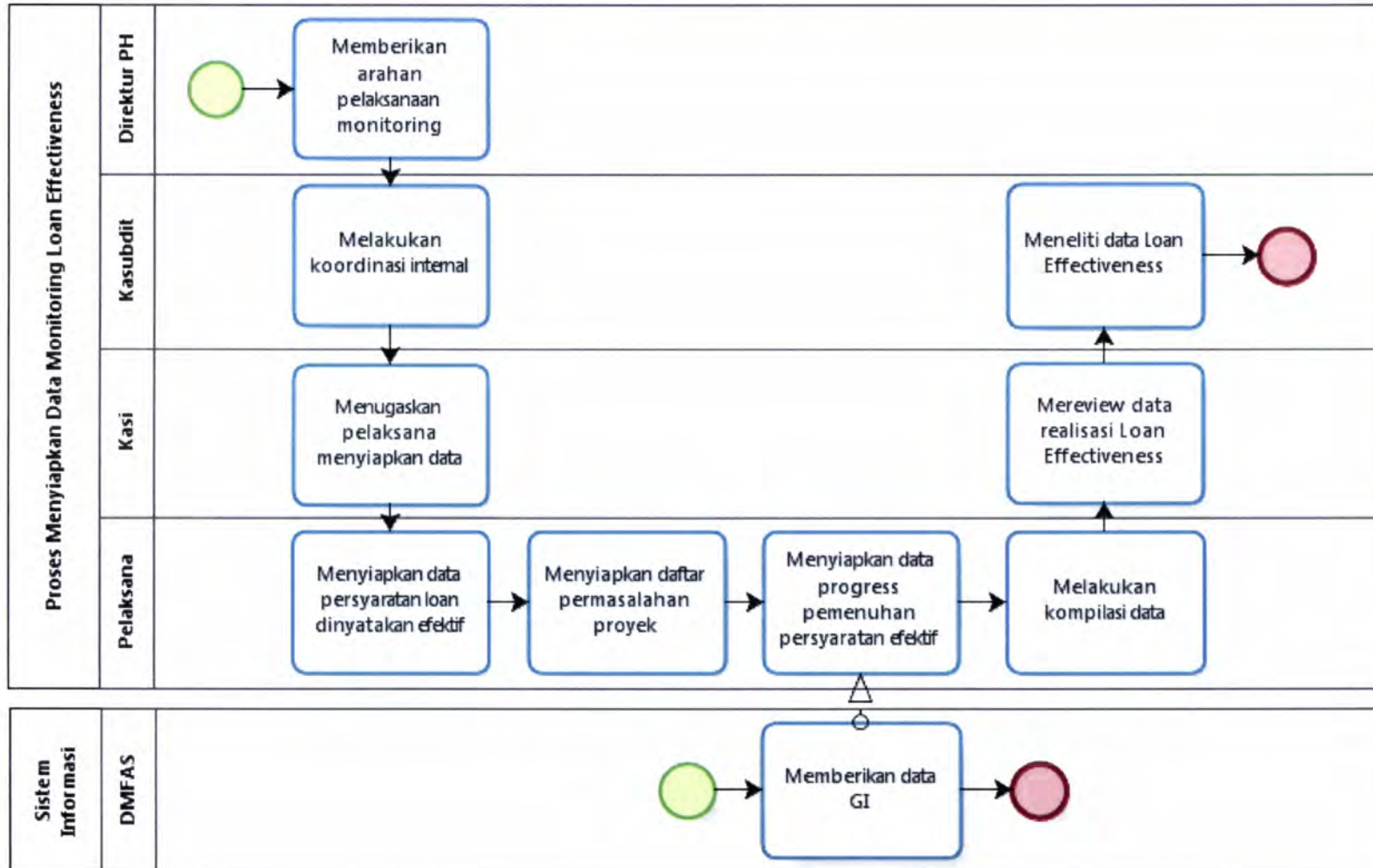
G.5 MONITORING KINERJA DEALER UTAMA

G.5.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING KINERJA DEALER UTAMA

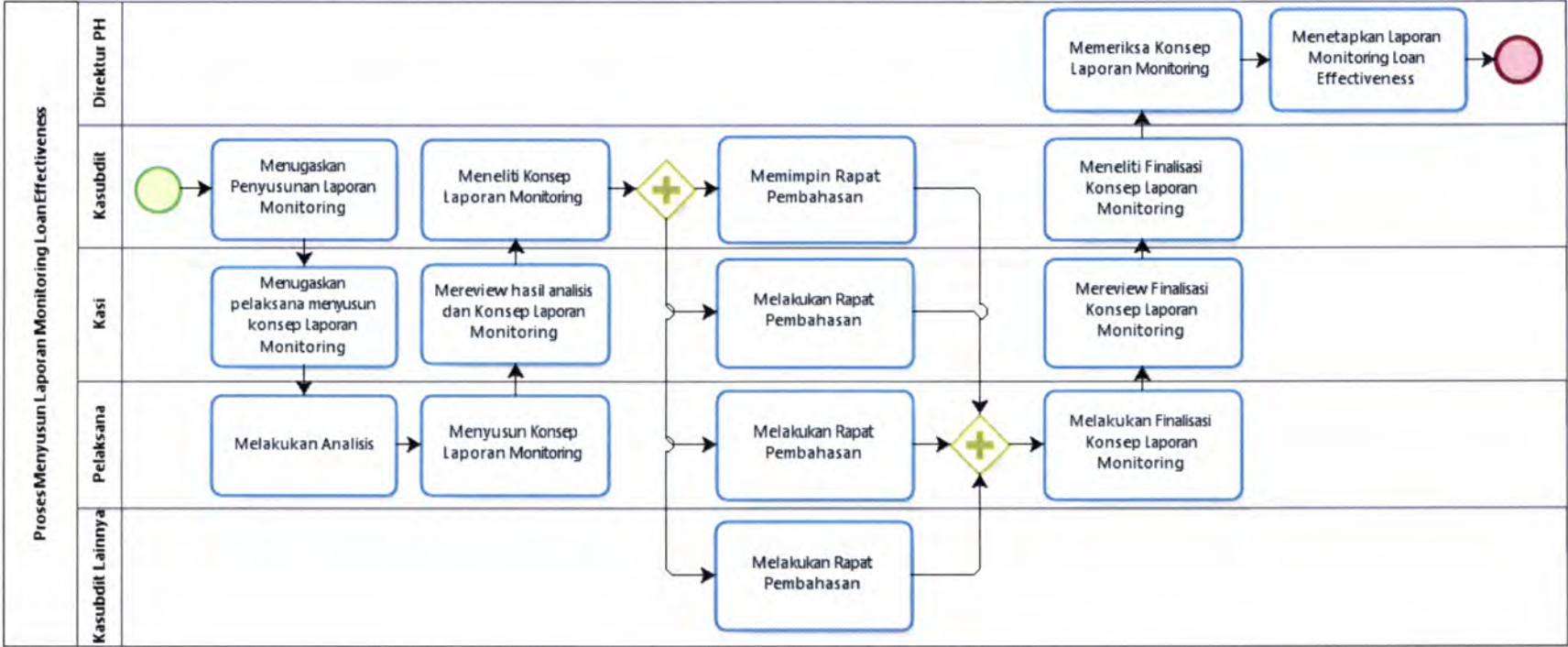


G.6 MONITORING LOAN EFFECTIVENESS

G.6.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING LOAN EFFECTIVENESS



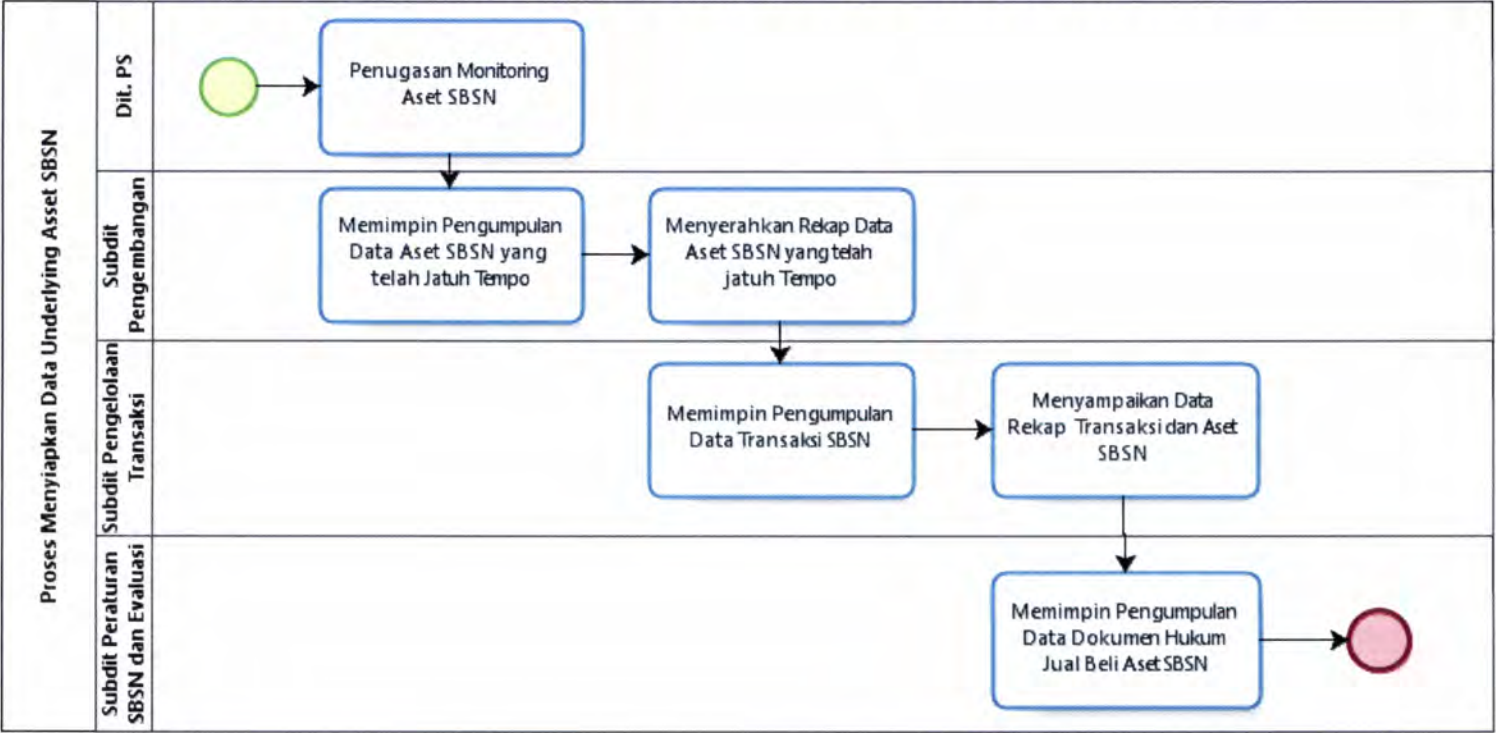
G.6.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING *LOAN EFFECTIVENESS*



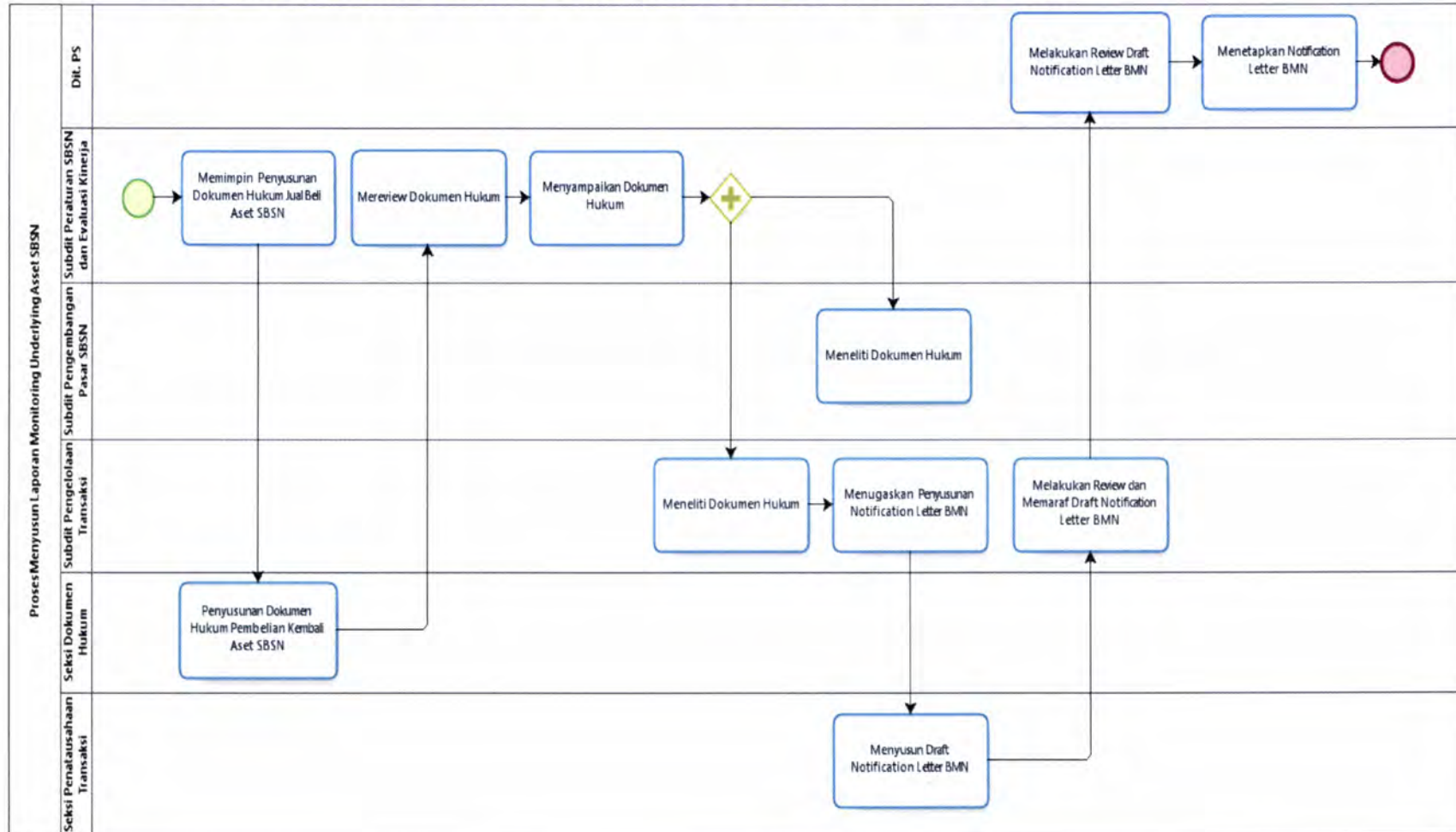
AB

G.7 MONITORING UNDERLYING ASSET SBSN

G.7.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING UNDERLYING ASSET SBSN

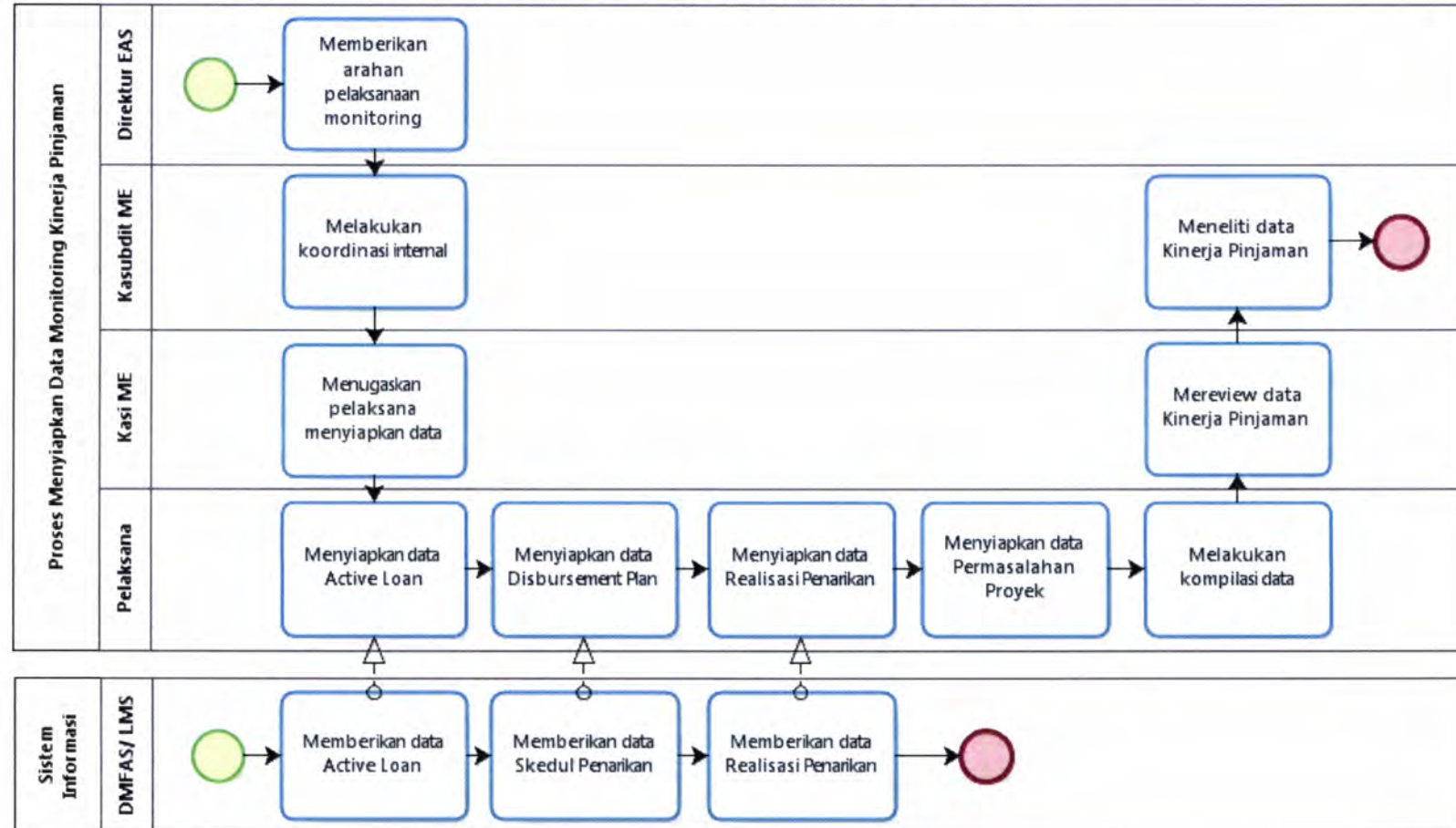


G.7.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING UNDERLYING ASSET SBSN

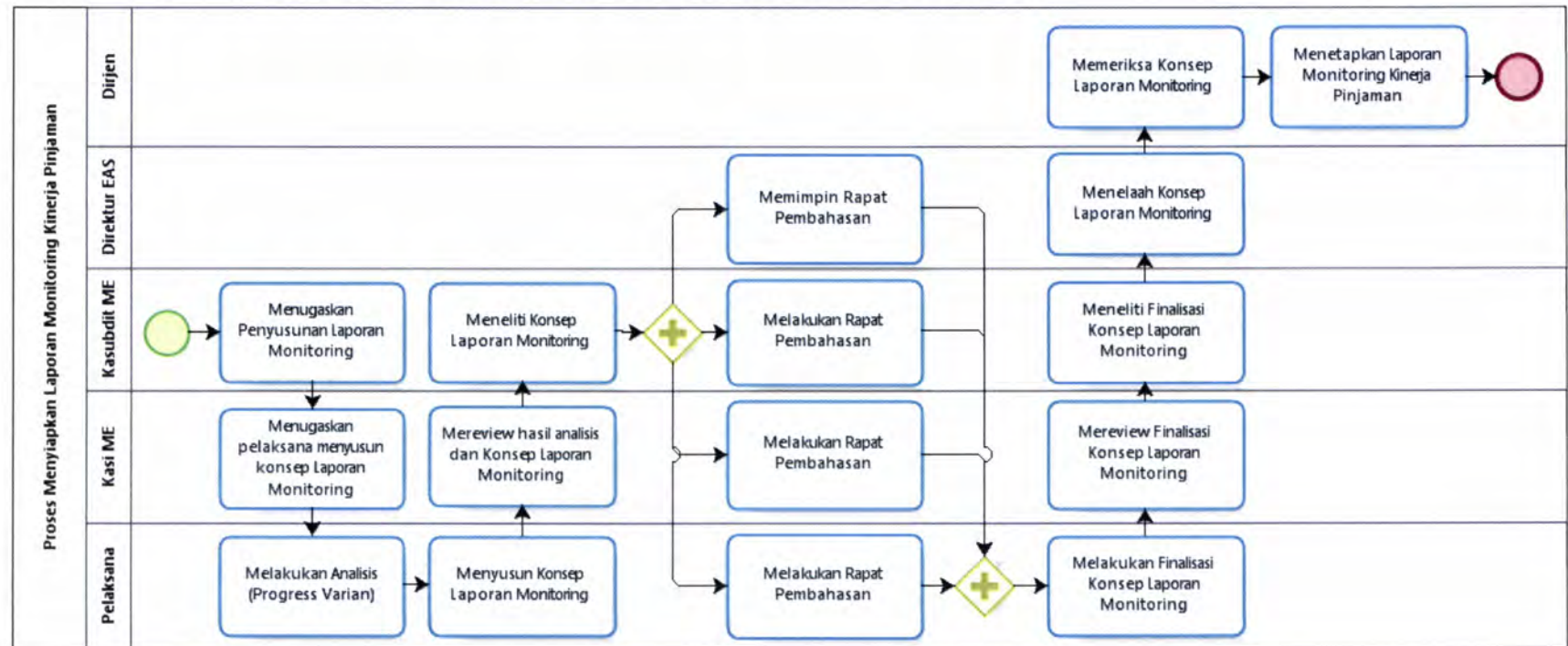


G.8 MONITORING KINERJA PINJAMAN

G.8.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING KINERJA PINJAMAN



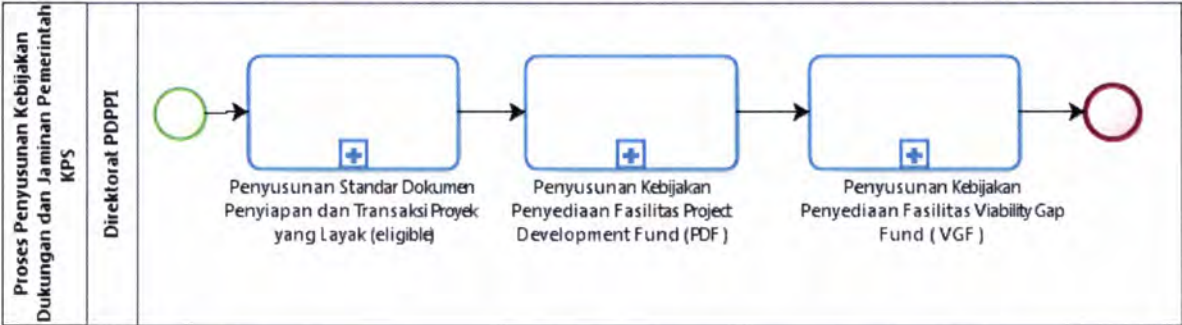
G.8.02 MENYUSUN LAPORAN MONITORING KINERJA PINJAMAN



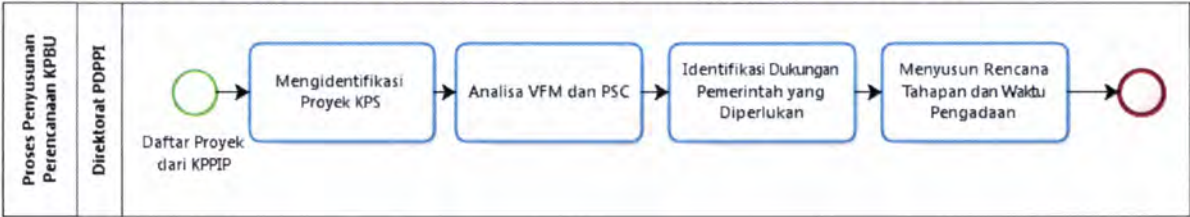
H. DUKUNGAN PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR

H.1 PENYIAPAN KPS/ KPBU

H.1.01 MENYUSUN KEBIJAKAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH KPS/ KPBU



H.1.02 MENYUSUN PERENCANAAN KERJASAMA KPS/ KPBU



H.1.03 PENGELOLAAN DANA PENYIAPAN PROYEK



H.2 ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH KPS/ KPB

H.2.01 ANALISA DAN PERSETUJUAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK (PDF)



H.2.02 ANALISA DAN PERSETUJUAN FASILITAS VIABILITY GAP FUND (VGF)



H.2.03 ANALISA DAN PERSETUJUAN PENJAMINAN PEMERINTAH



Ar

H.3 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH NON KPS/ NON KPBU

H.3.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN PROYEK NON KPS/NON KPBU

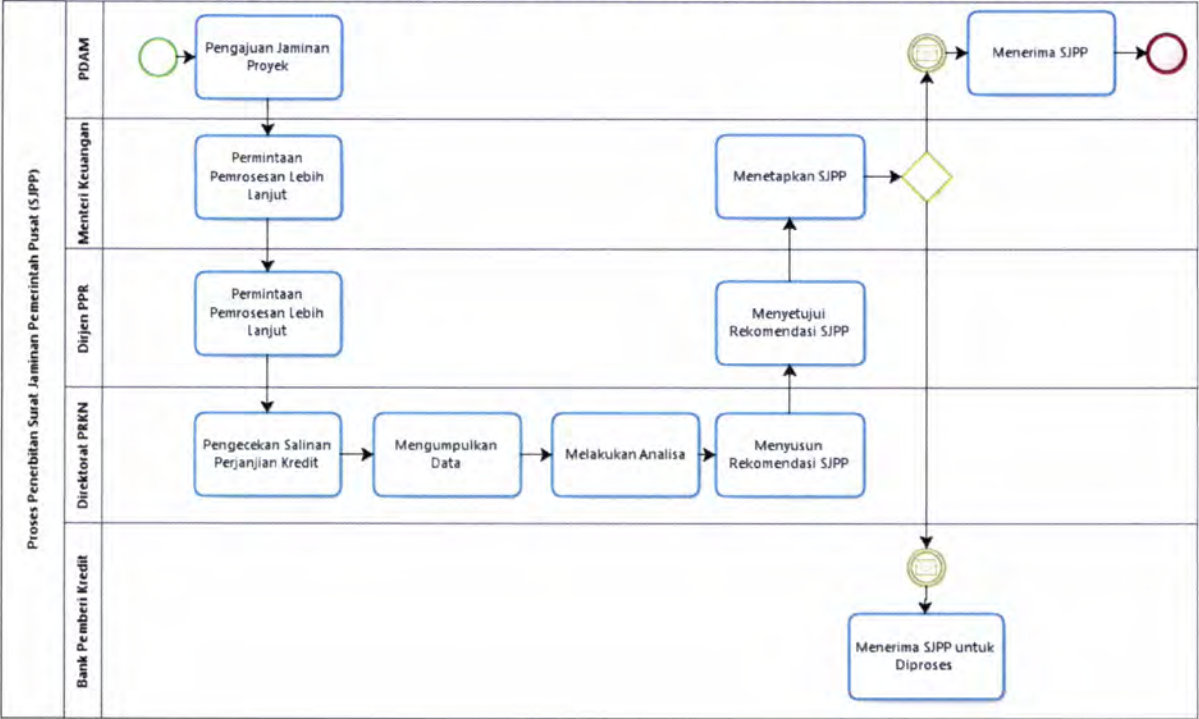


H.3.02 PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PROYEK NON KPS/ NON KPBU

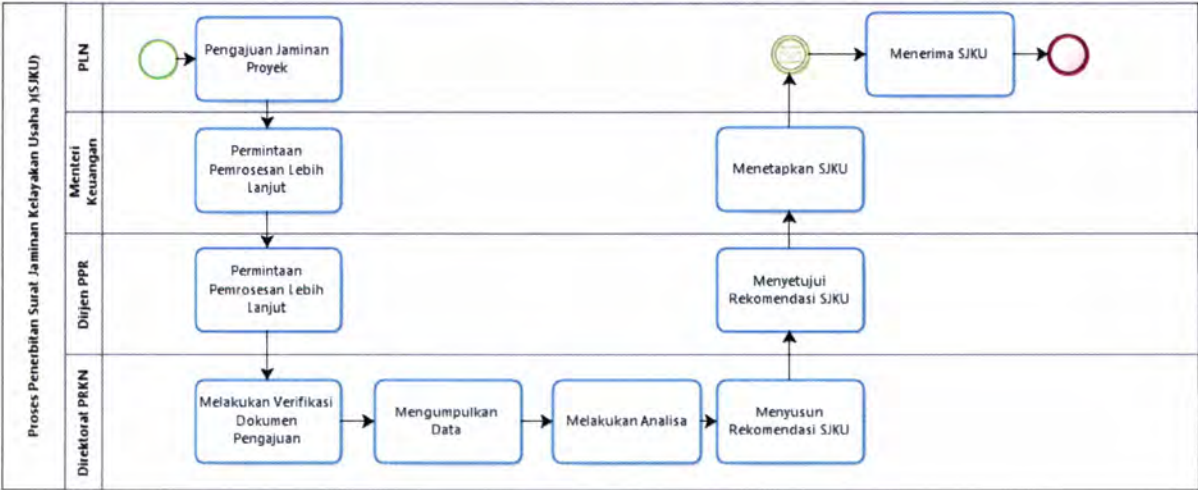


H.4 ANALISA DAN PERSETUJUAN DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH KPS / KPBU

H.4.01 ANALISA DAN PENERBITAN SURAT JAMINAN PEMERINTAH PUSAT



H.4.02 ANALISA DAN PENERBITAN SURAT JAMINAN KELAYAKAN USAHA (SJKU)



H.5 PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN PBS

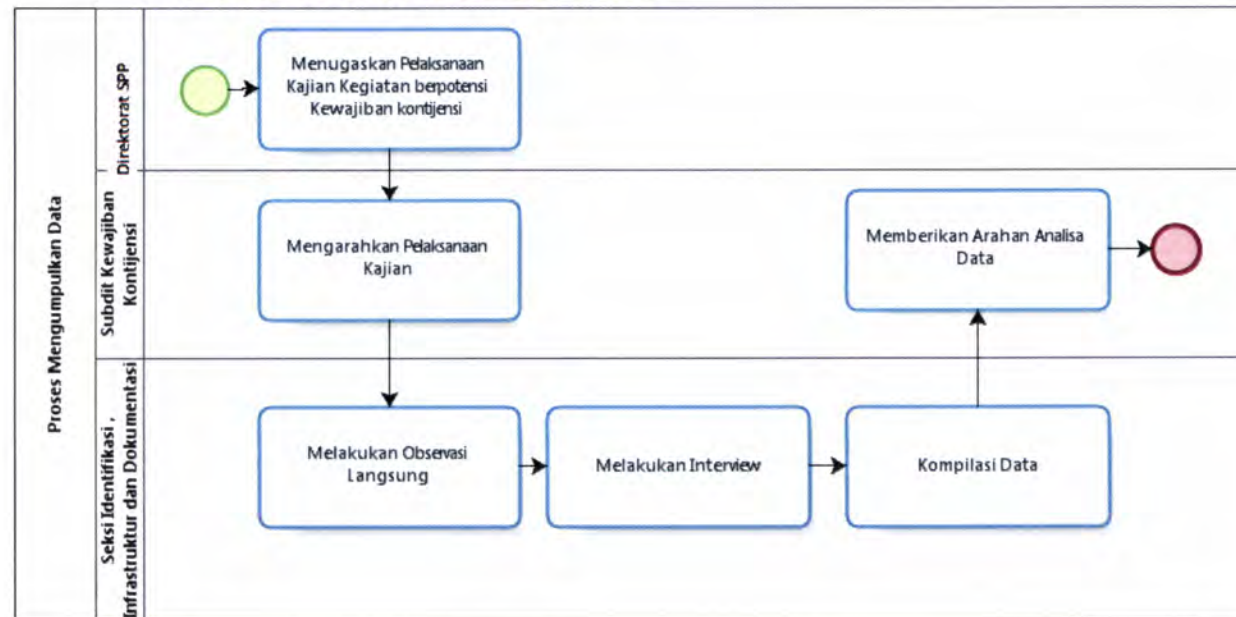
H.6 PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN

I. PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA

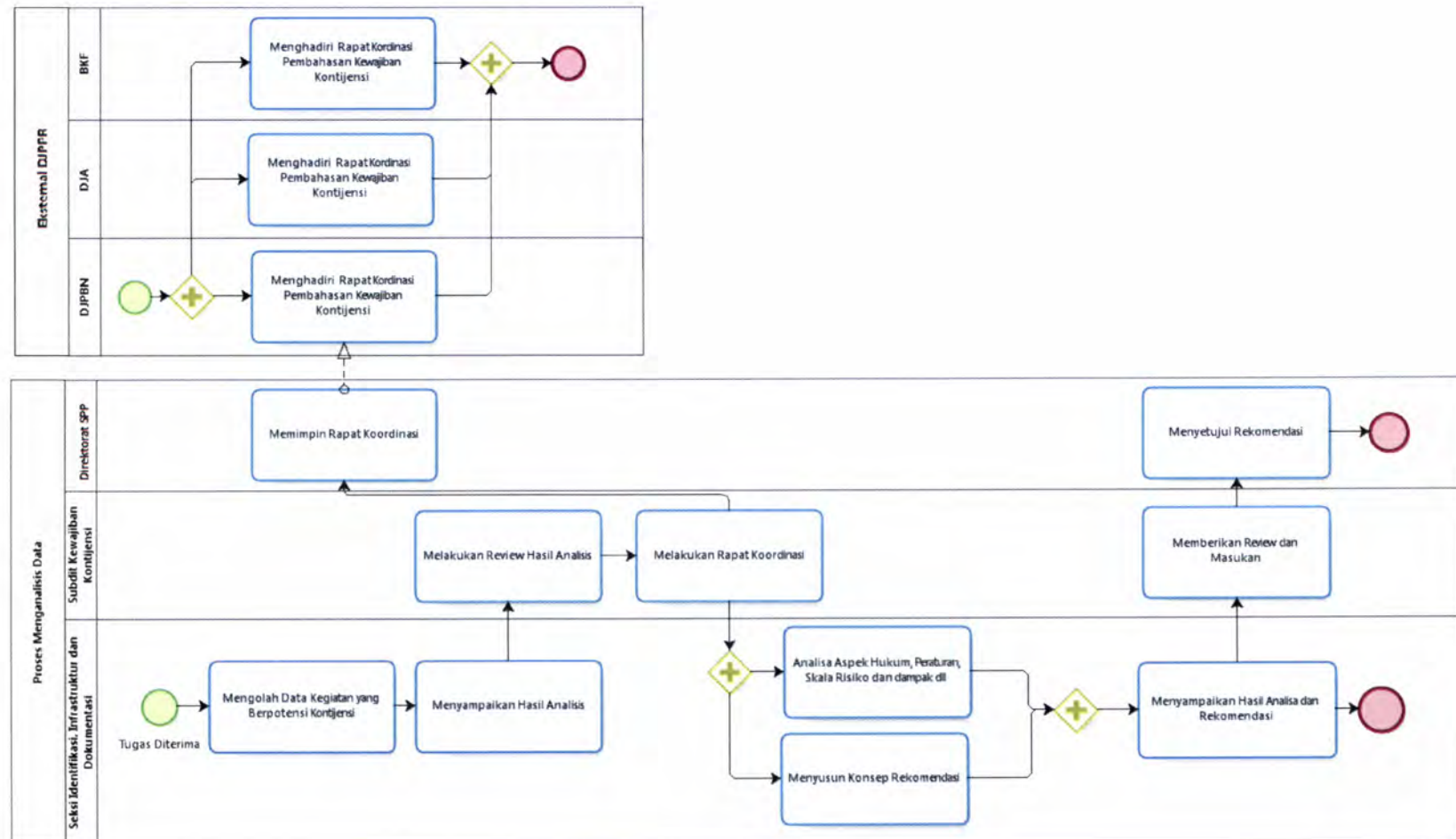
J. PENGELOLAAN PENJAMINAN PEMERINTAH

J.1 IDENTIFIKASI KEWAJIBAN KONTIJENSI

J.1.01 MENGUMPULKAN DATA

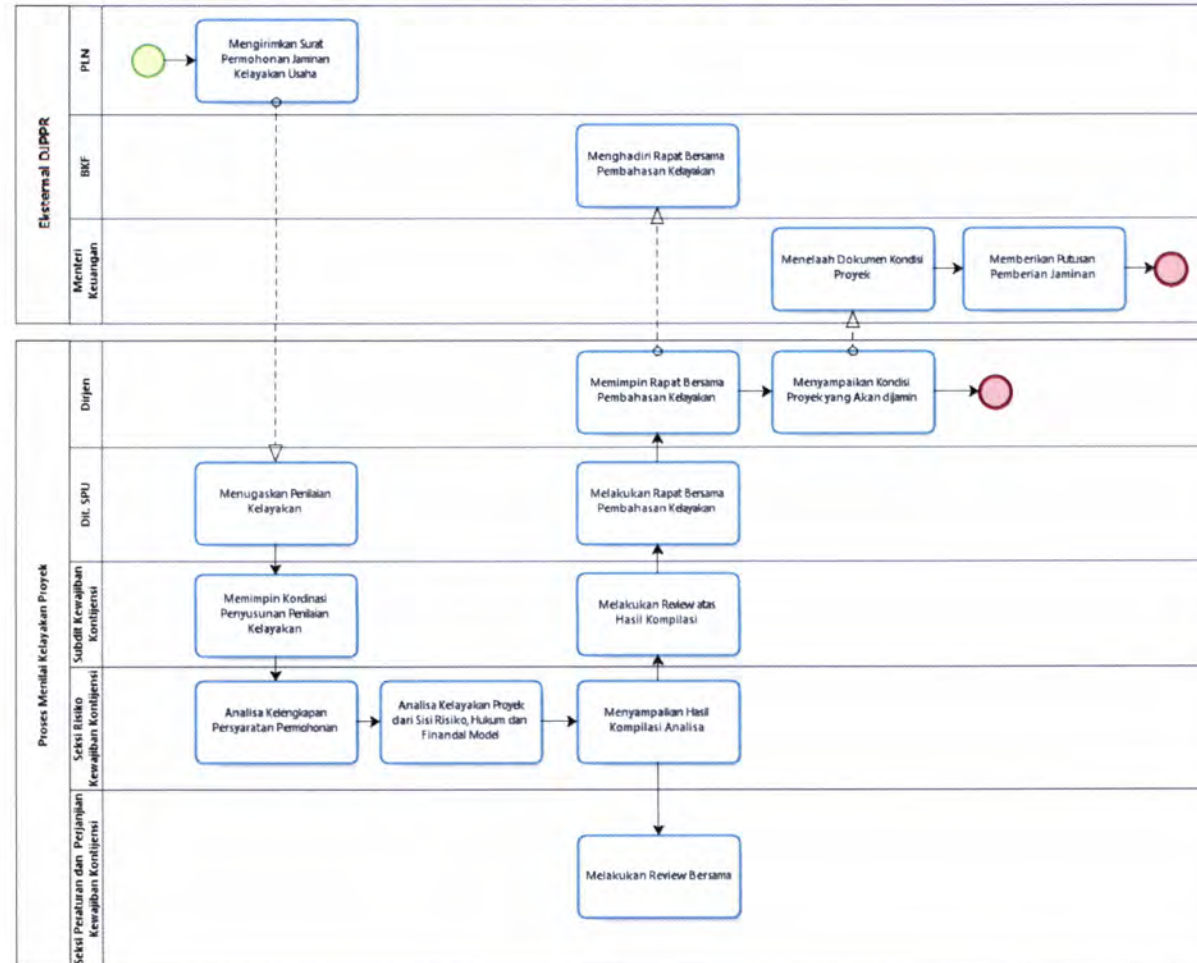


J.1.02 MENGANALISIS DATA

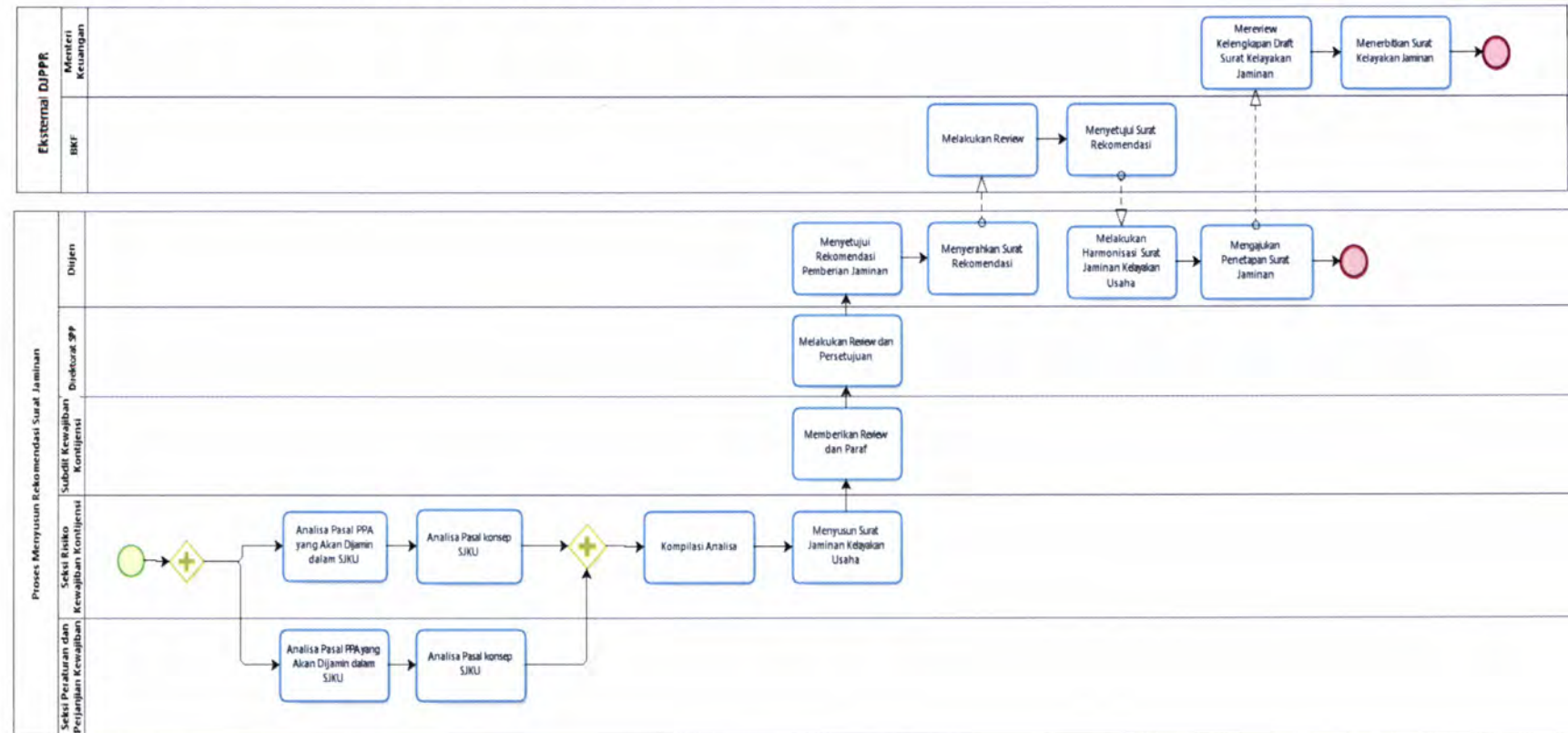


J.2 MENYUSUN REKOMENDASI PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH

J.2.01 MENILAI KELAYAKAN PROYEK

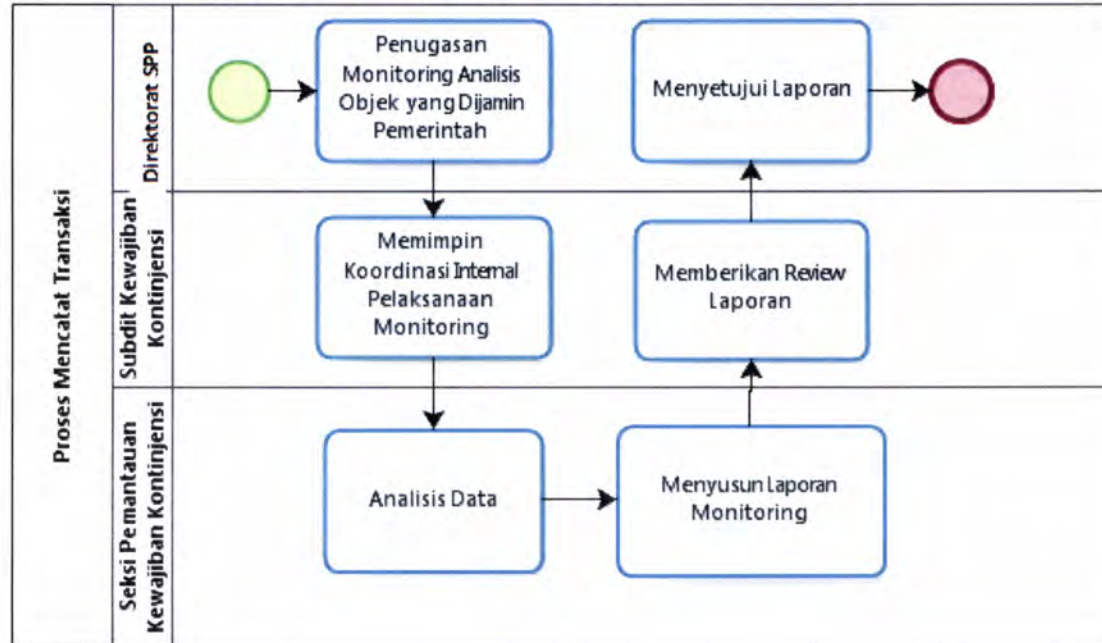


J.2.02 MENYUSUN REKOMENDASI SURAT JAMINAN



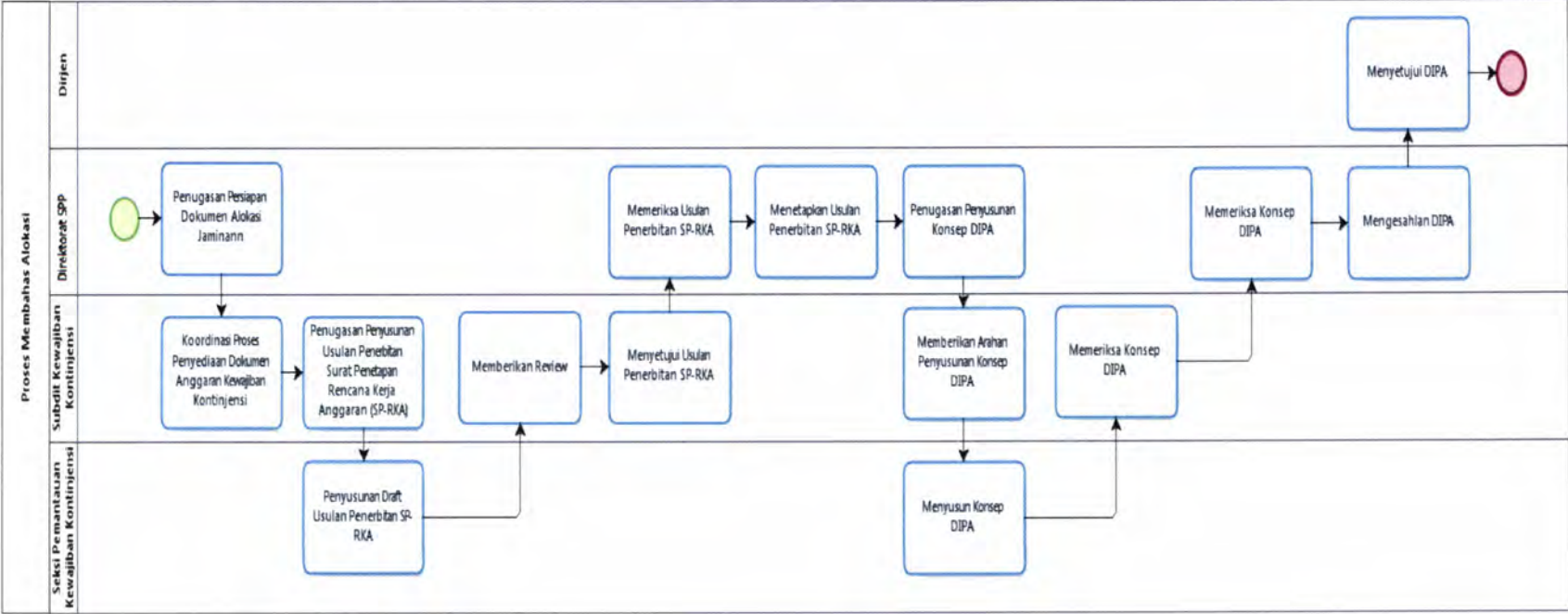
J.3 MONITORING JAMINAN PEMERINTAH

J.3.01 MENCATAT TRANSAKSI



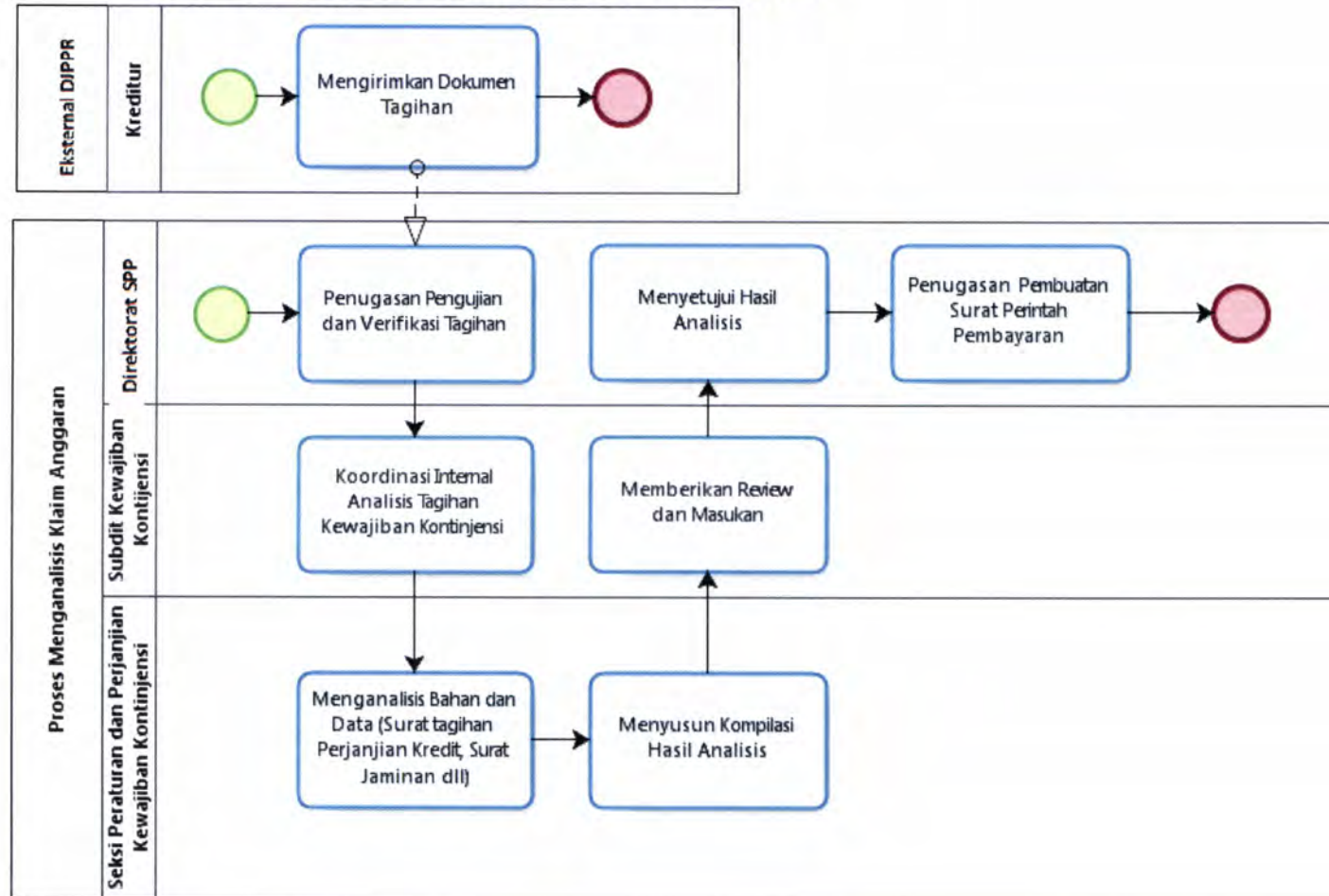
J.4 PENYUSUNAN ALOKASI JAMINAN PEMERINTAH KE APBN

J.4.01 MEMBAHAS ALOKASI

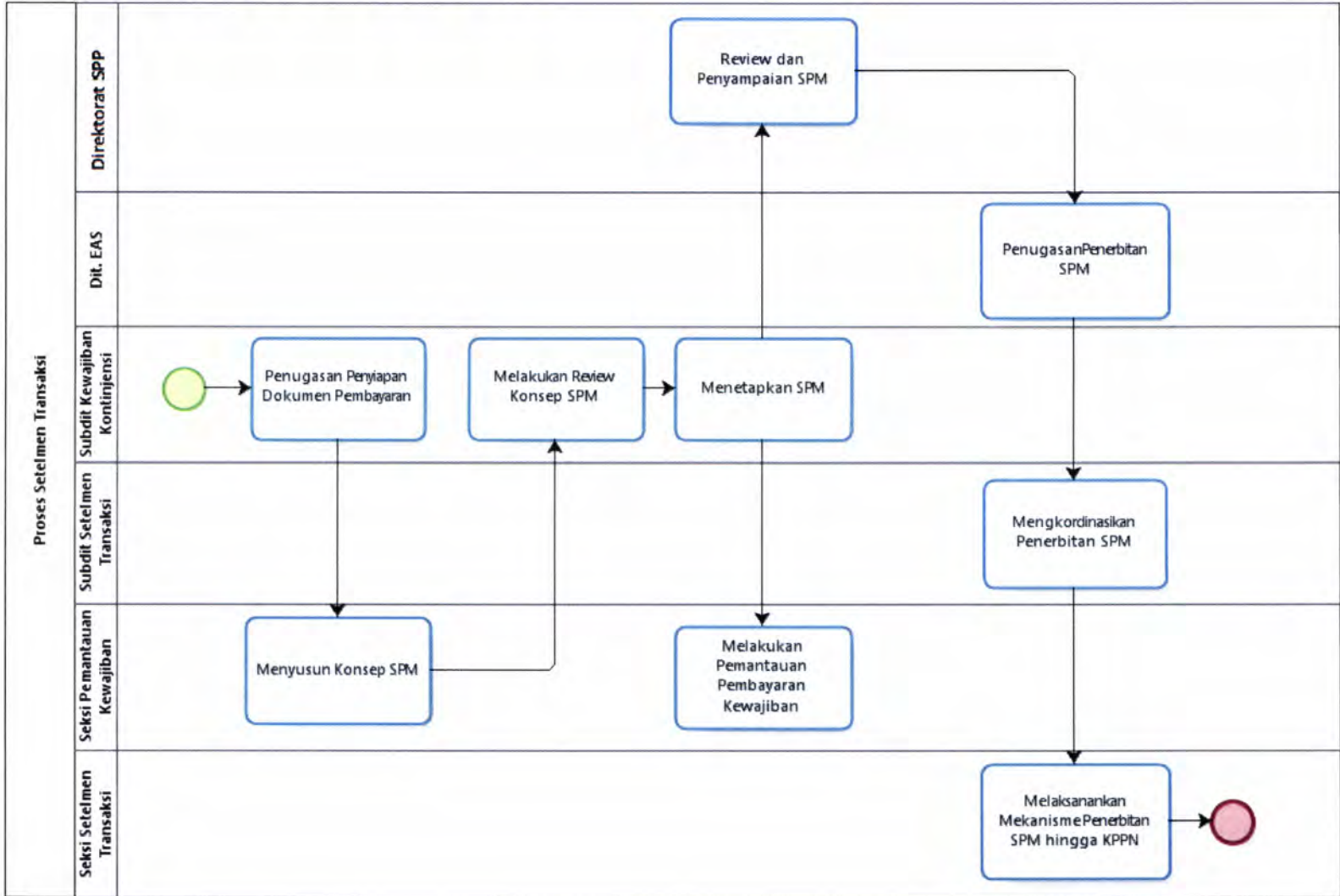


J.5 PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN

J.5.01 MENGANALISIS KLAIM PEMBAYARAN

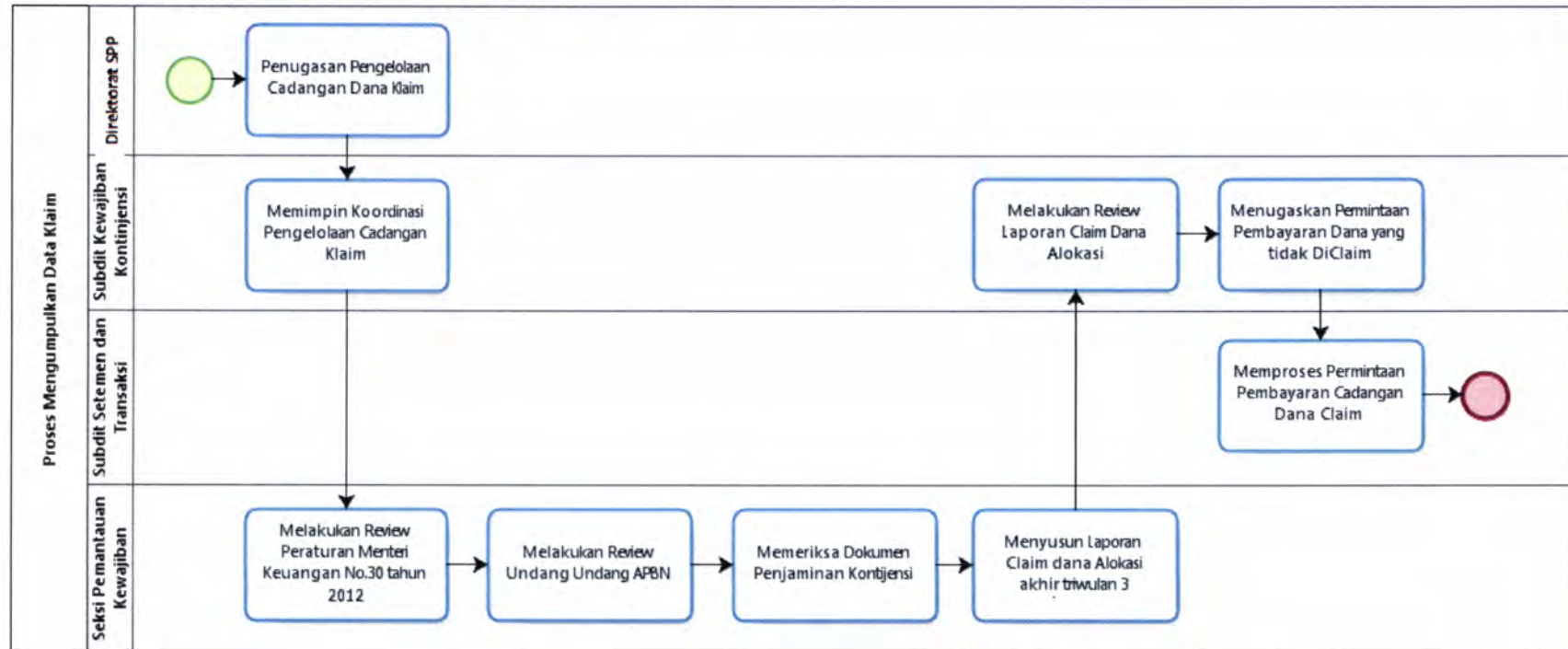


J.5.02 SETELMEN TRANSAKSI



J.6 PENGELOLAAN CADANGAN DANA KLAIM

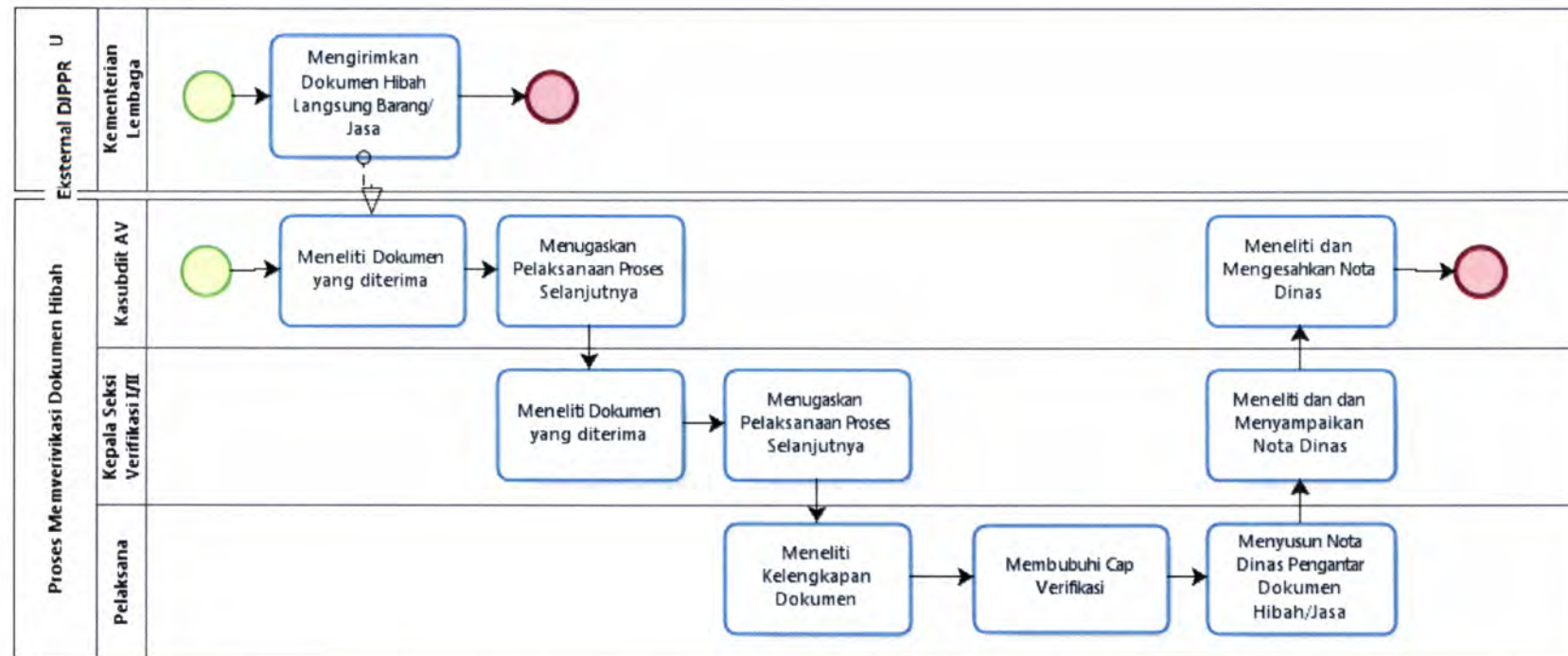
J.6.01 MENGUMPULKAN DATA



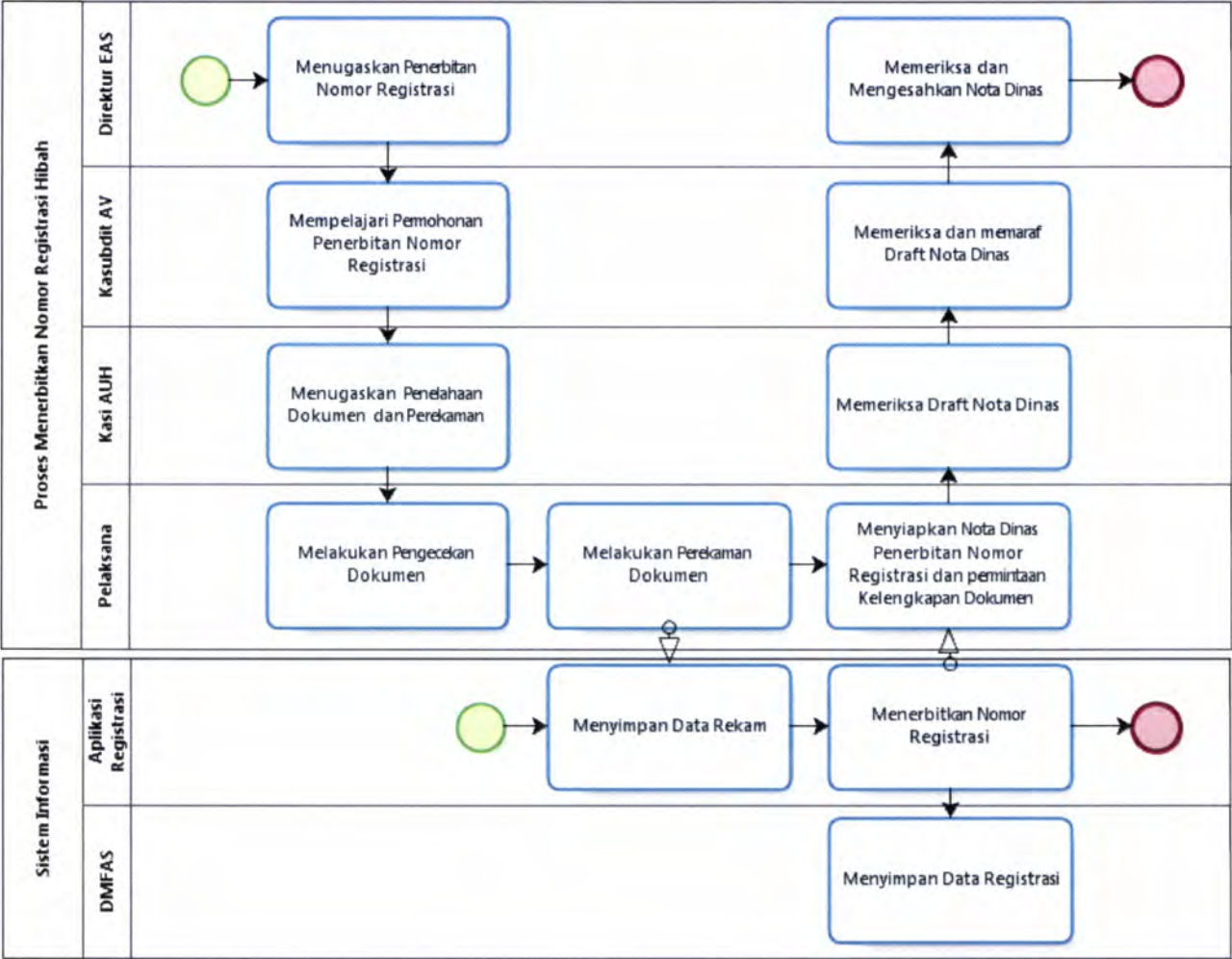
K. PENGELOLAAN HIBAH

K.1 PENERBITAN NOMOR REGISTER HIBAH

K.1.01 MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN HIBAH

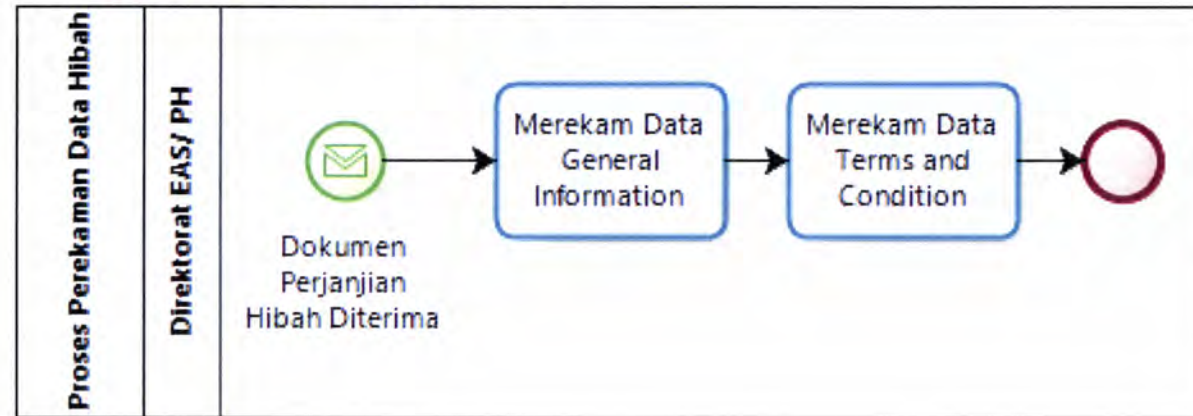


K.1.02 MENERBITKAN NOMOR REGISTER HIBAH



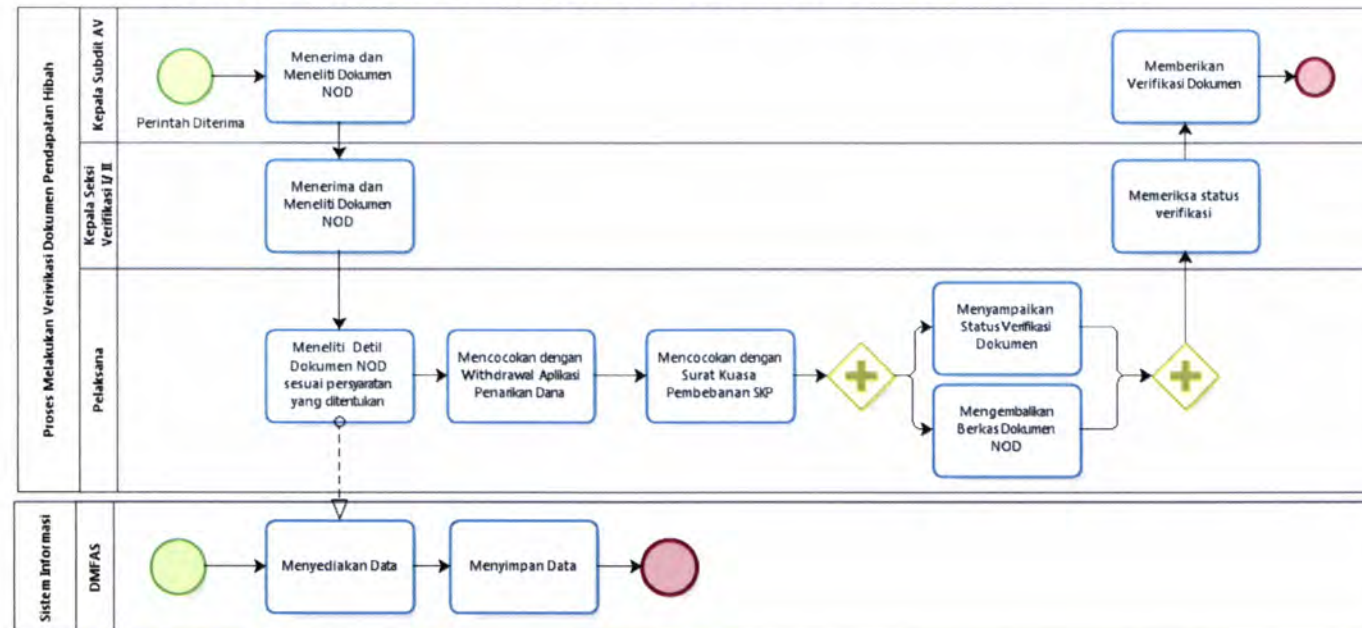
By

K.2 PEREKAMAN DATA HIBAH

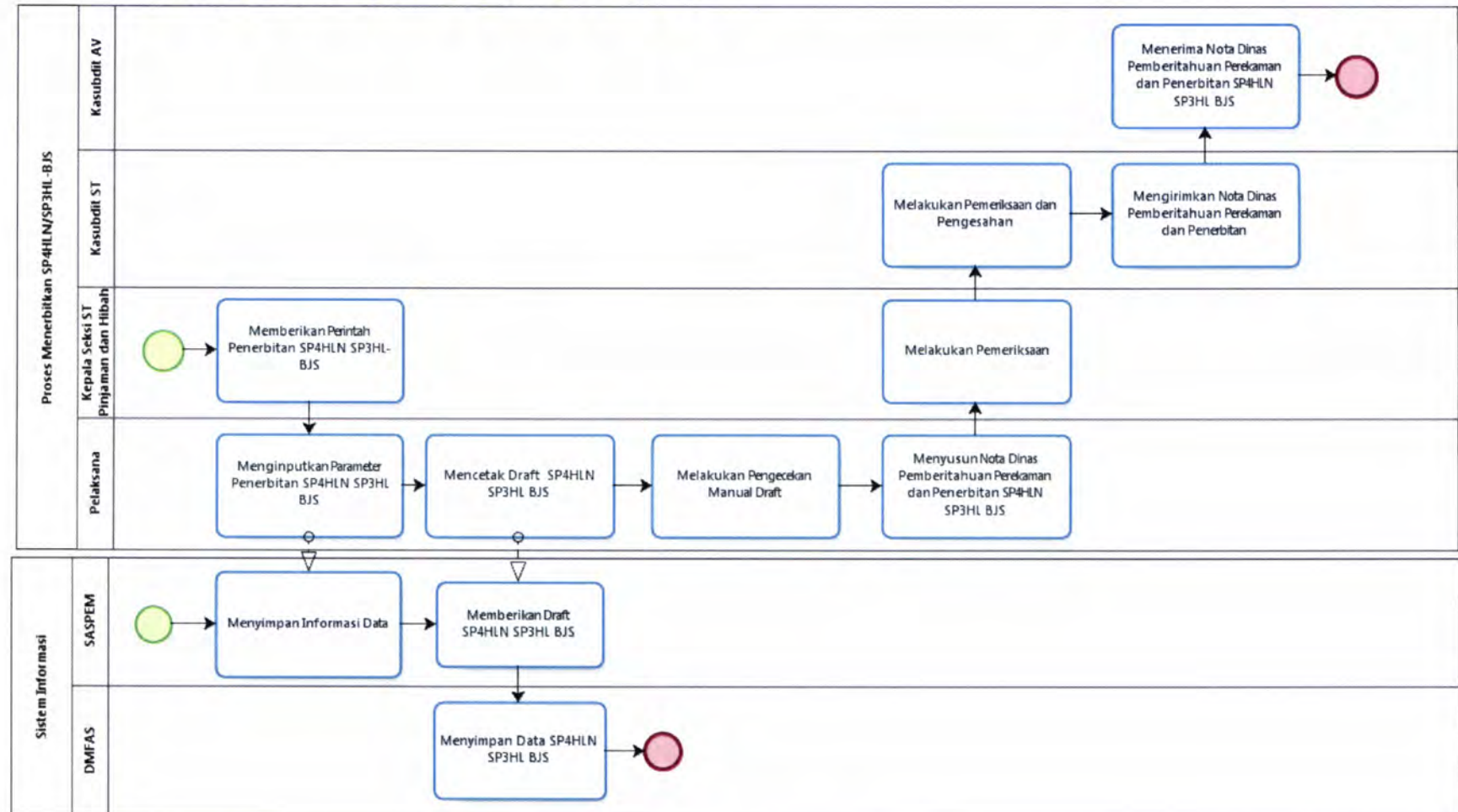


K.3 PENYELESAIAN TRANSAKSI PENDAPATAN HIBAH

K.3.01 MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN PENDAPATAN HIBAH

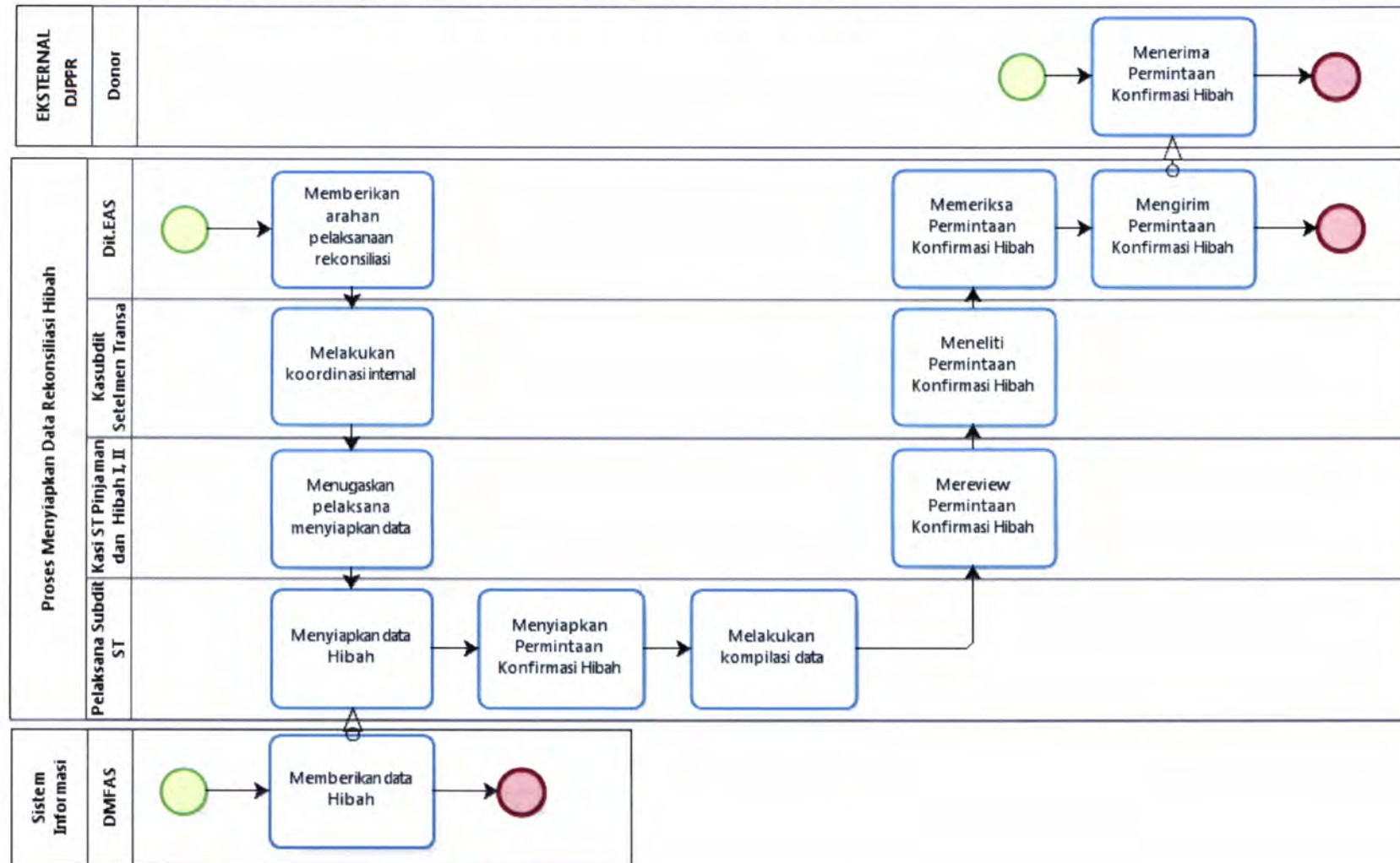


K.3.02 MENERBITKAN SP4HLN/SP3HL-BJS

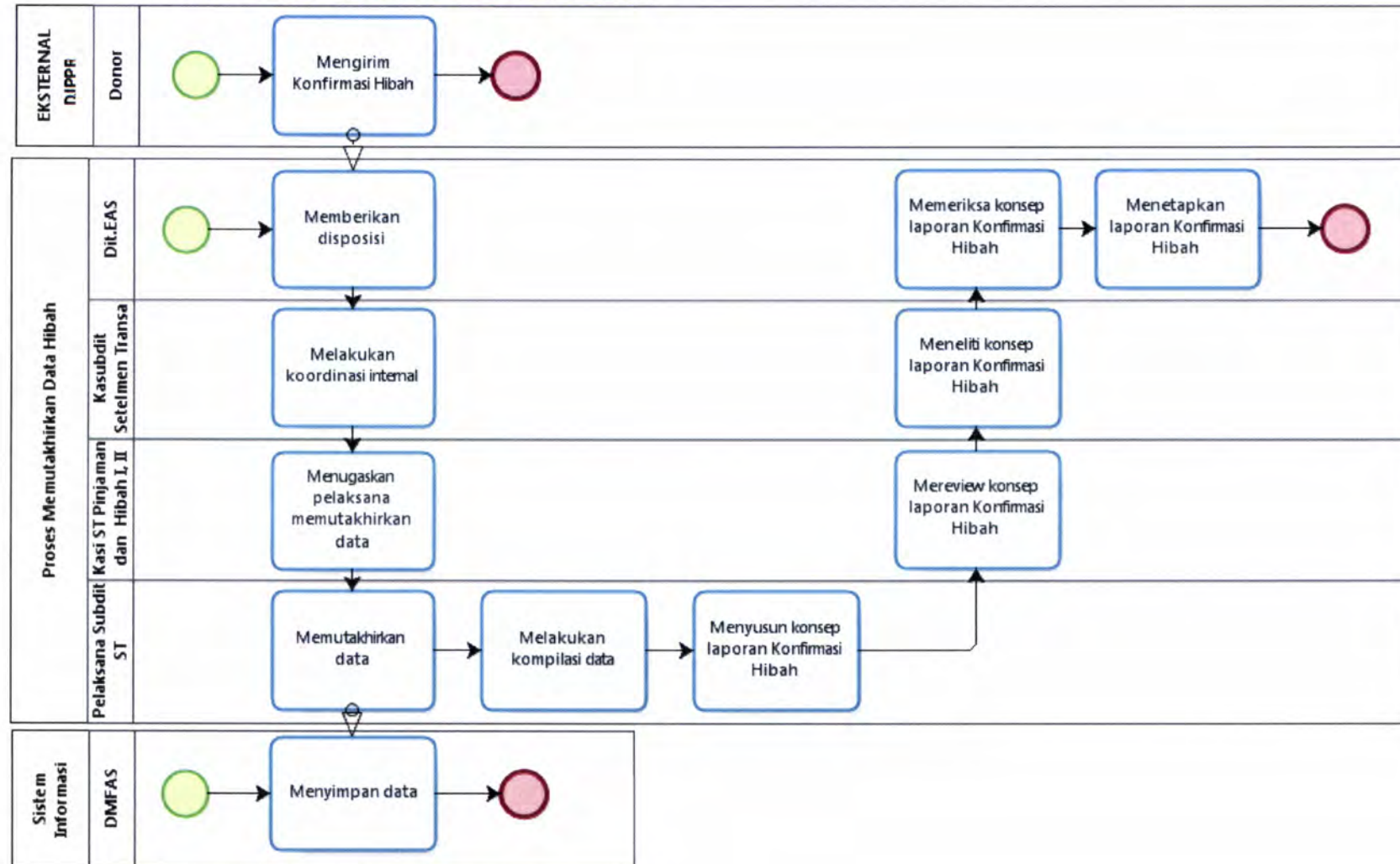


K.4 REKONSILIASI DATA HIBAH

K.4.01 MEMPERSIAPKAN DATA REKONSILIASI HIBAH

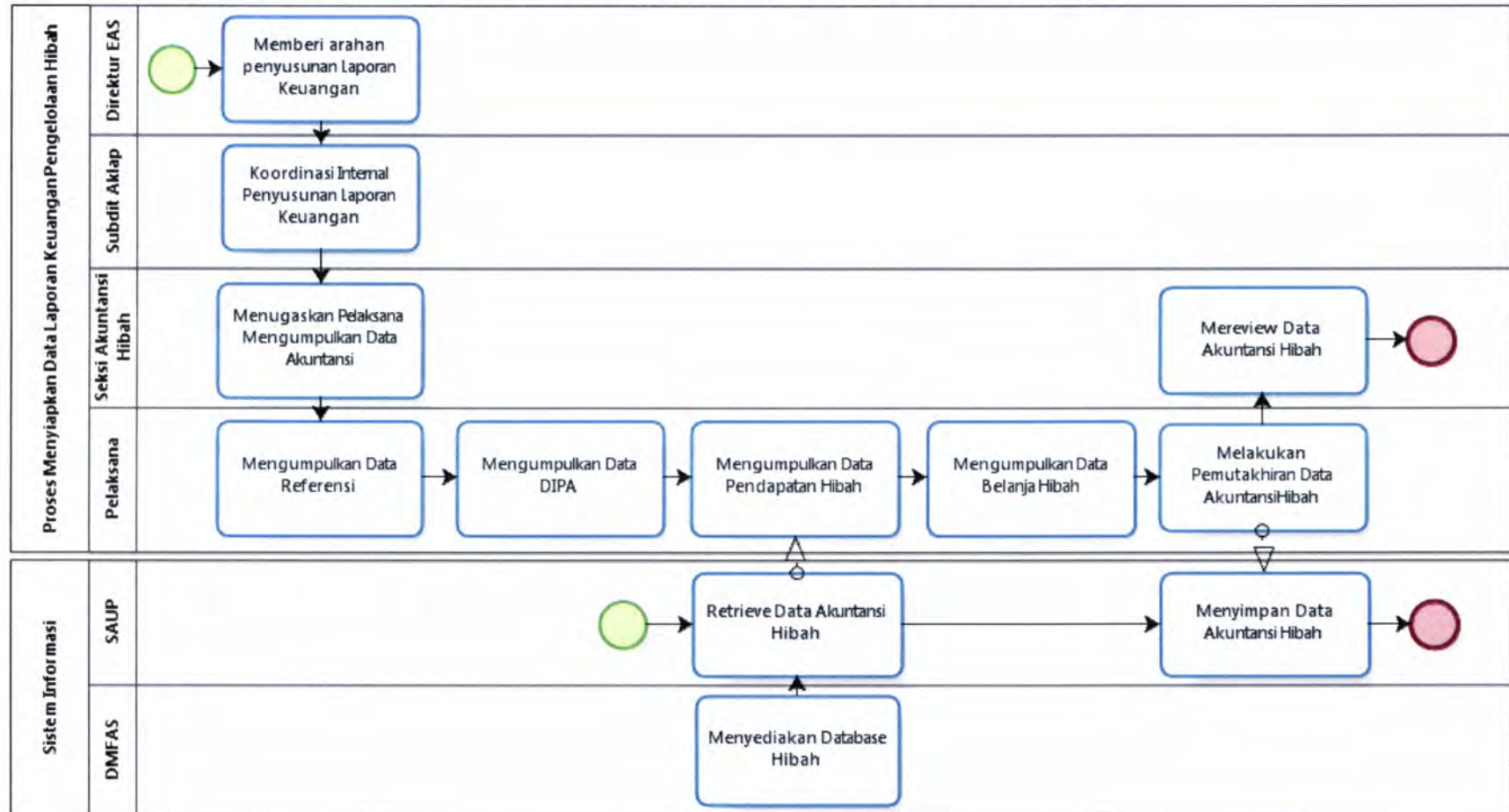


K.4.02 MEMUTAKHIRKAN DATA HIBAH

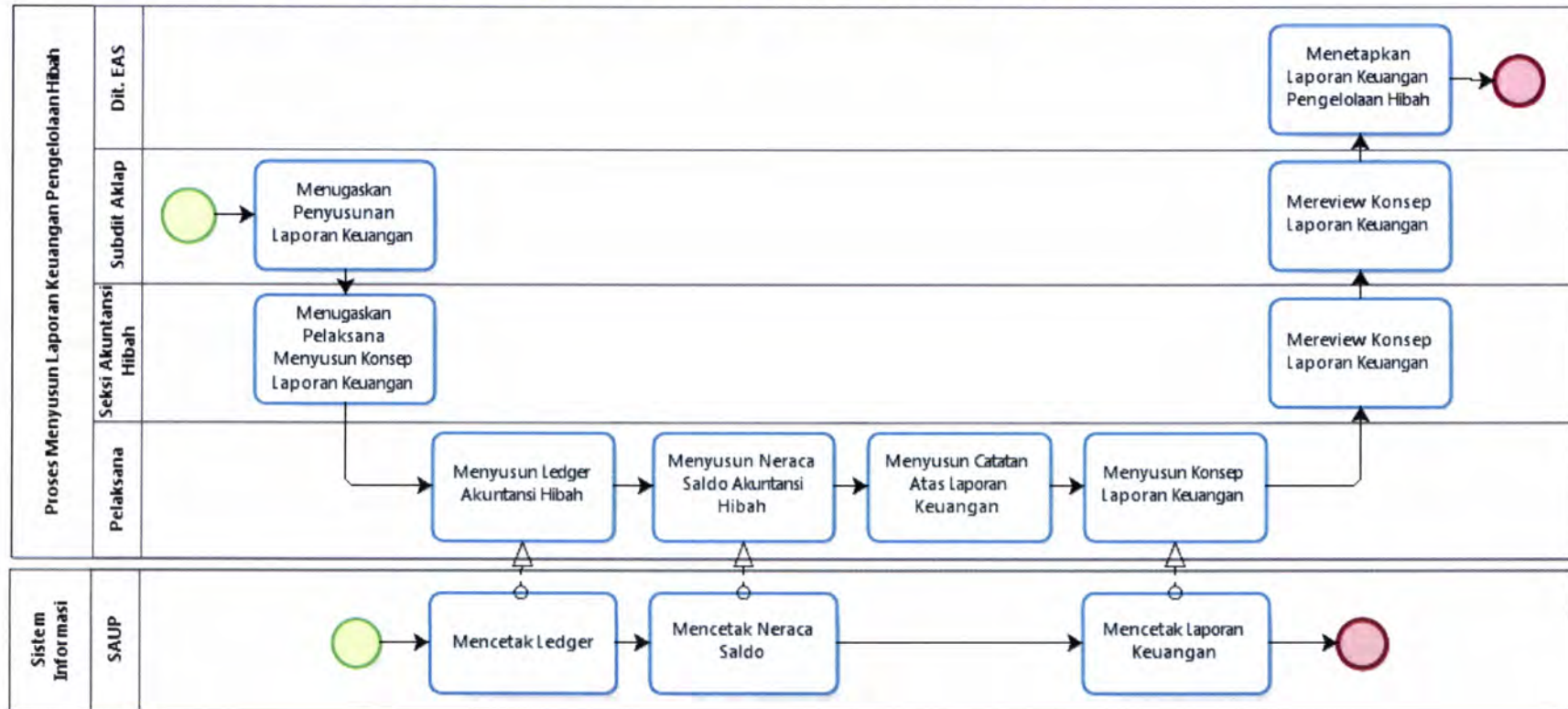


K.5 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HIBAH

K.5.01 PENYIAPAN DATA LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HIBAH

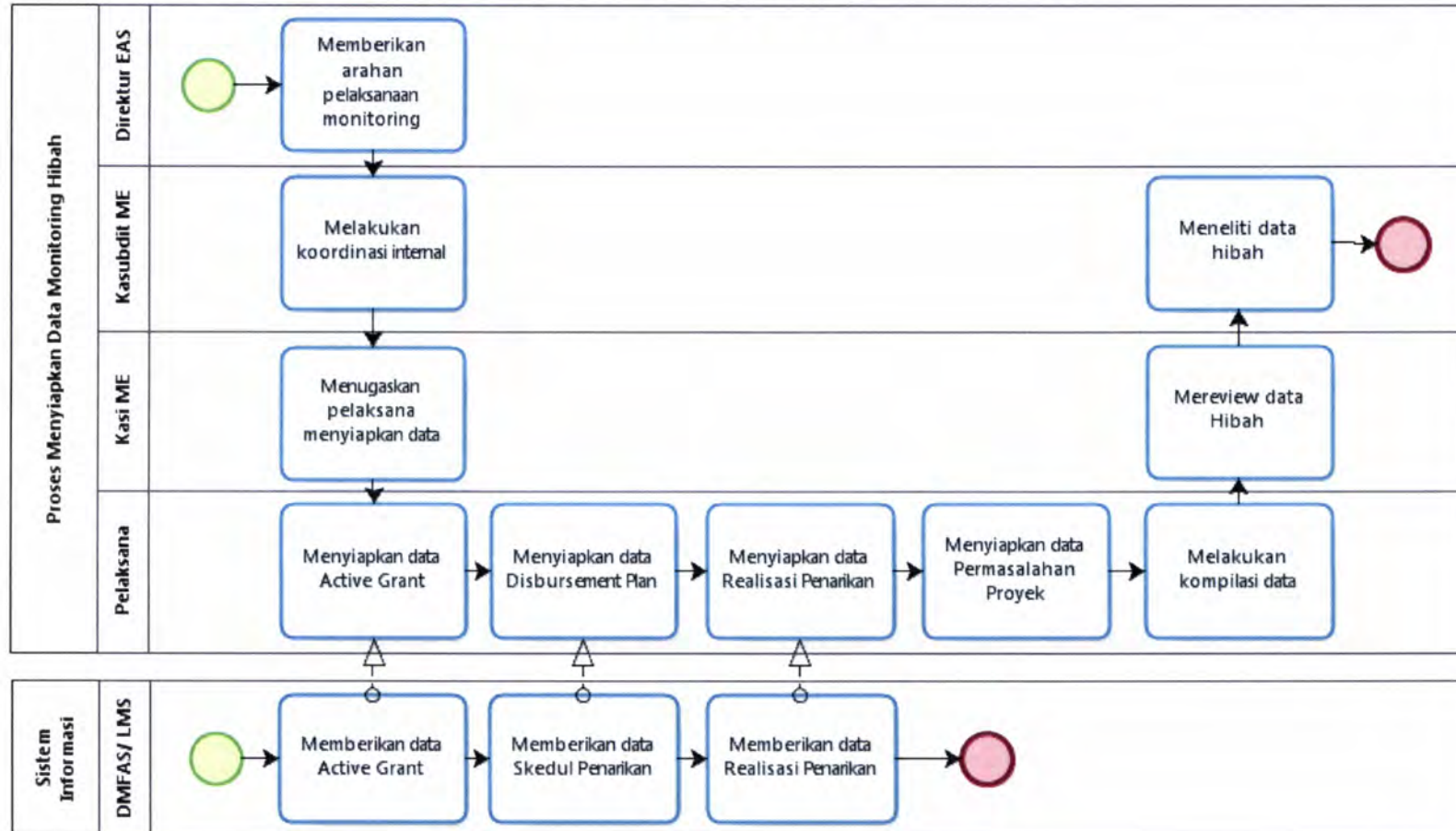


K.5.02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HIBAH

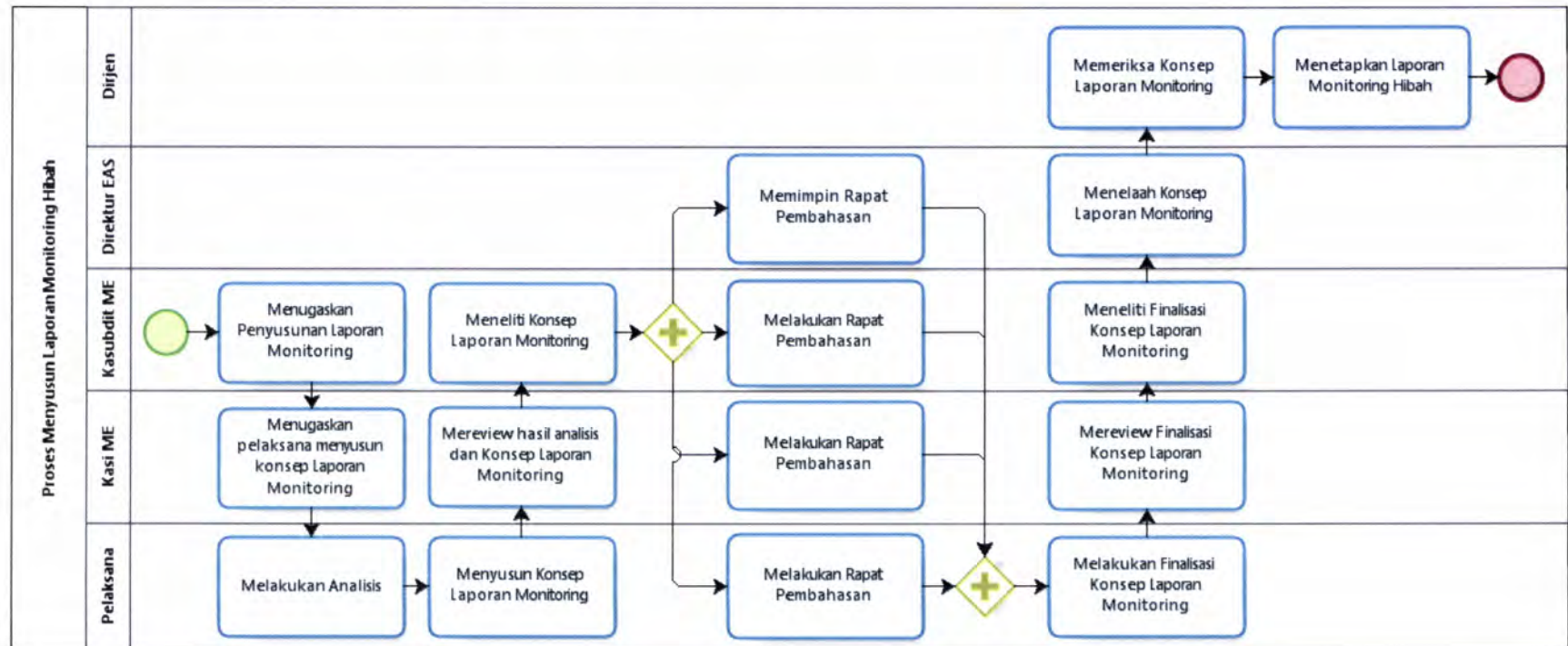


K.6 MONITORING HIBAH

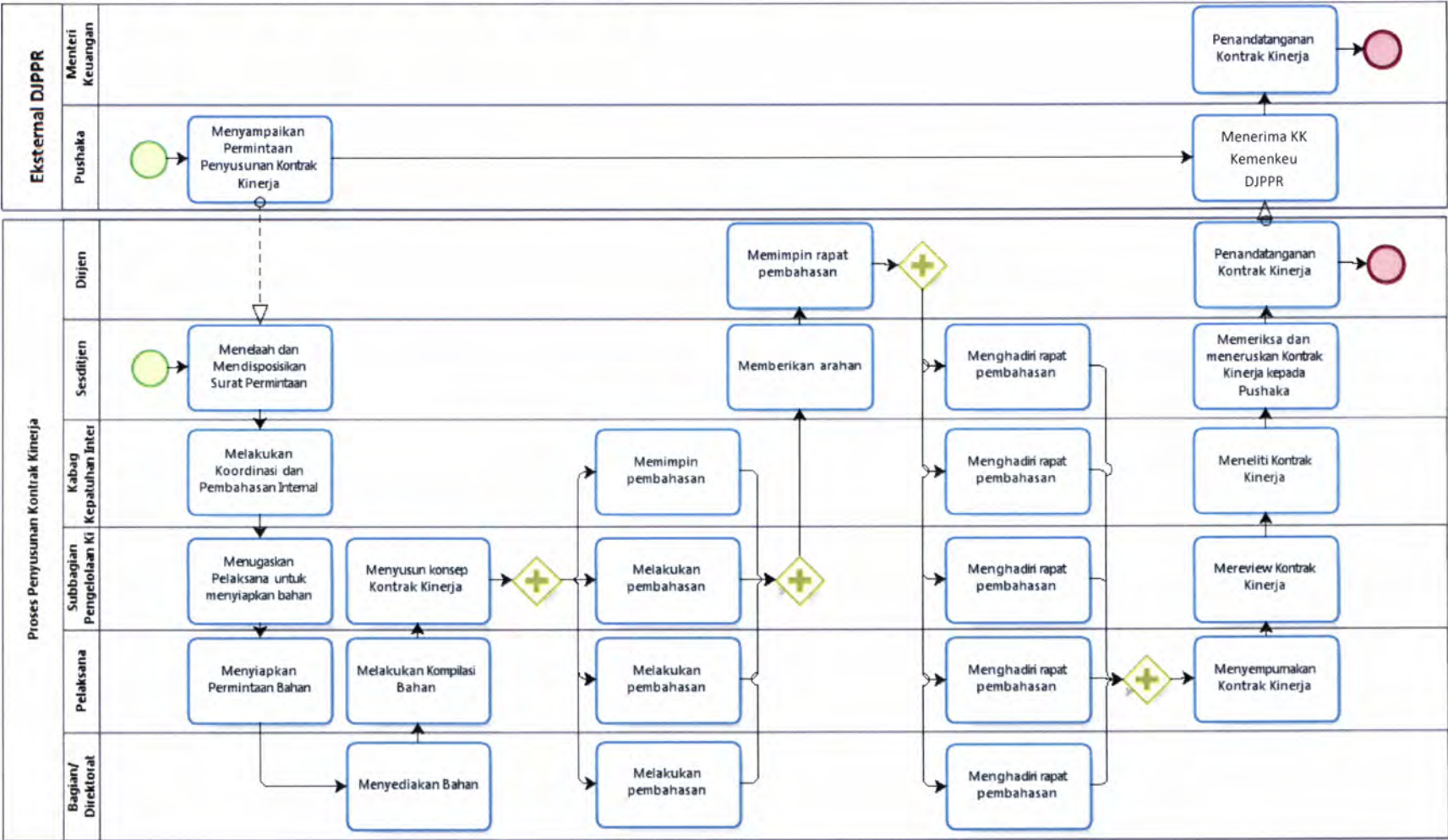
K.6.01 MENYIAPKAN DATA MONITORING HIBAH



K.6.02 PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING HIBAH

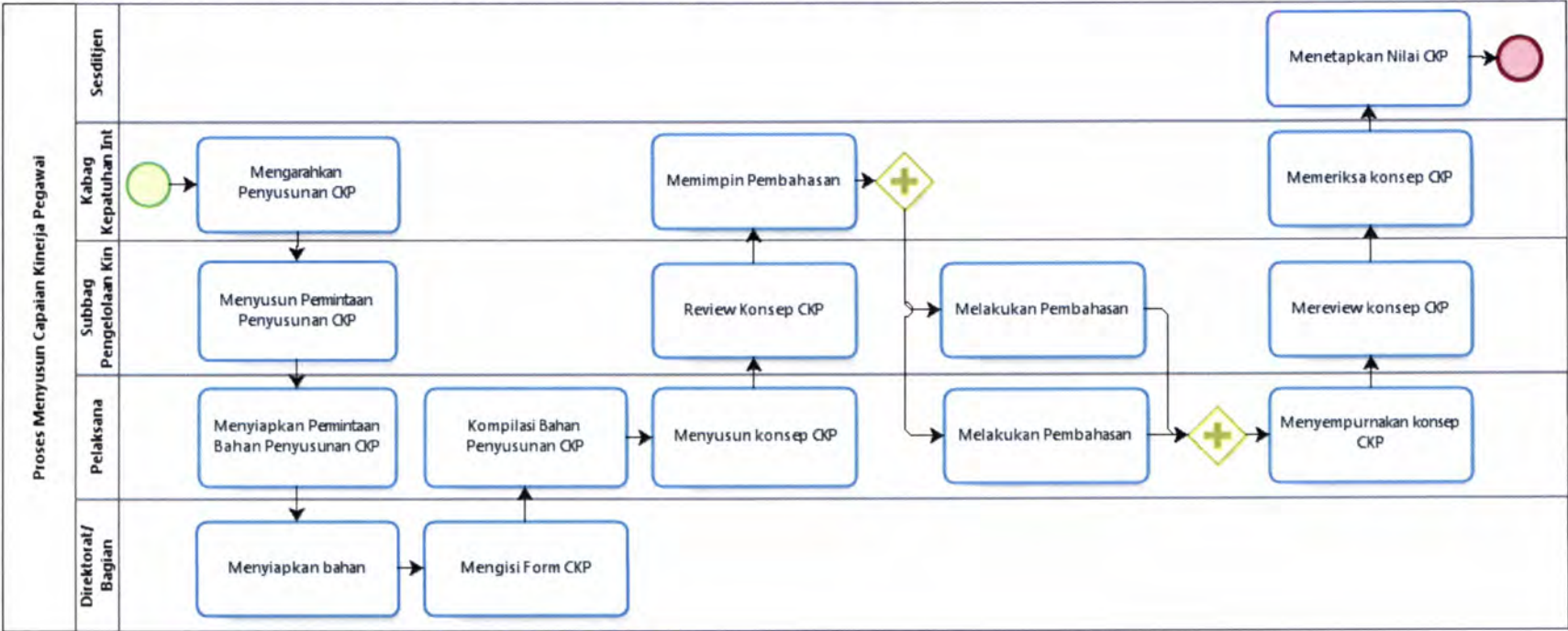


L.1.02 MENYUSUN KONTRAK KINERJA

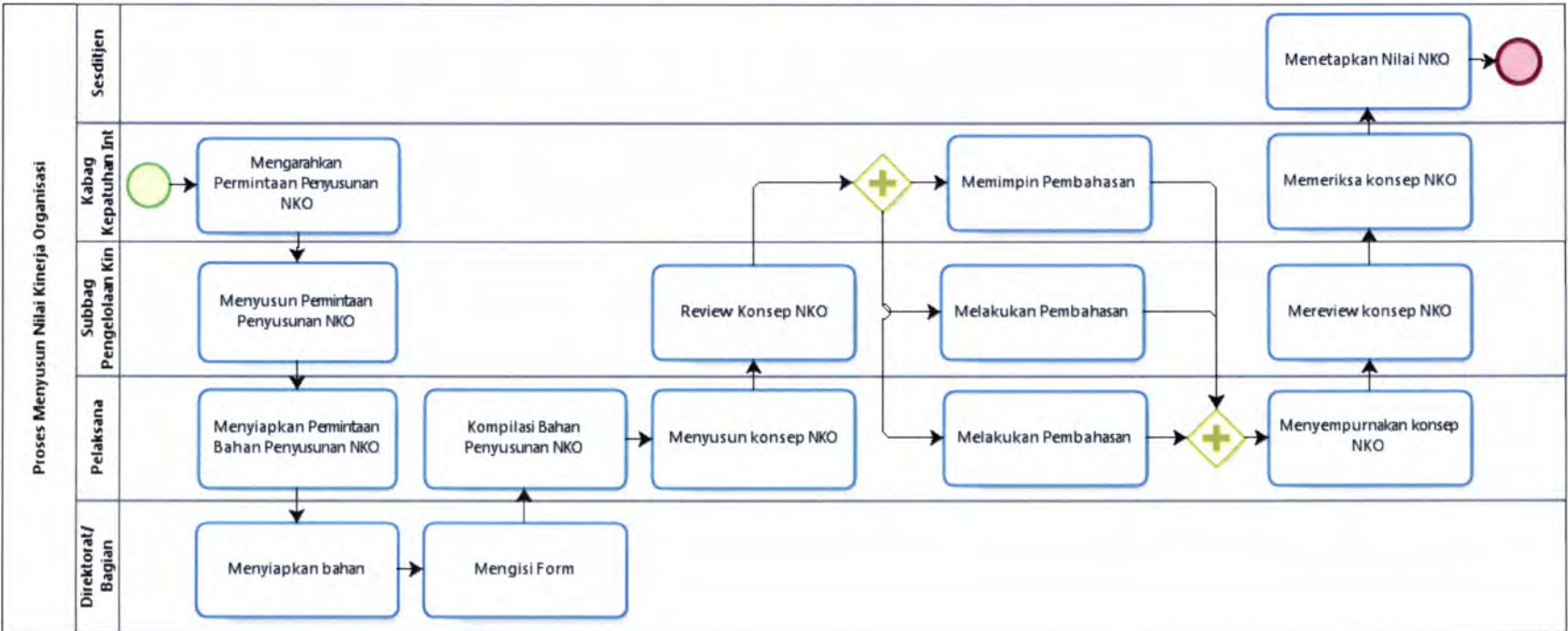


L.2 MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

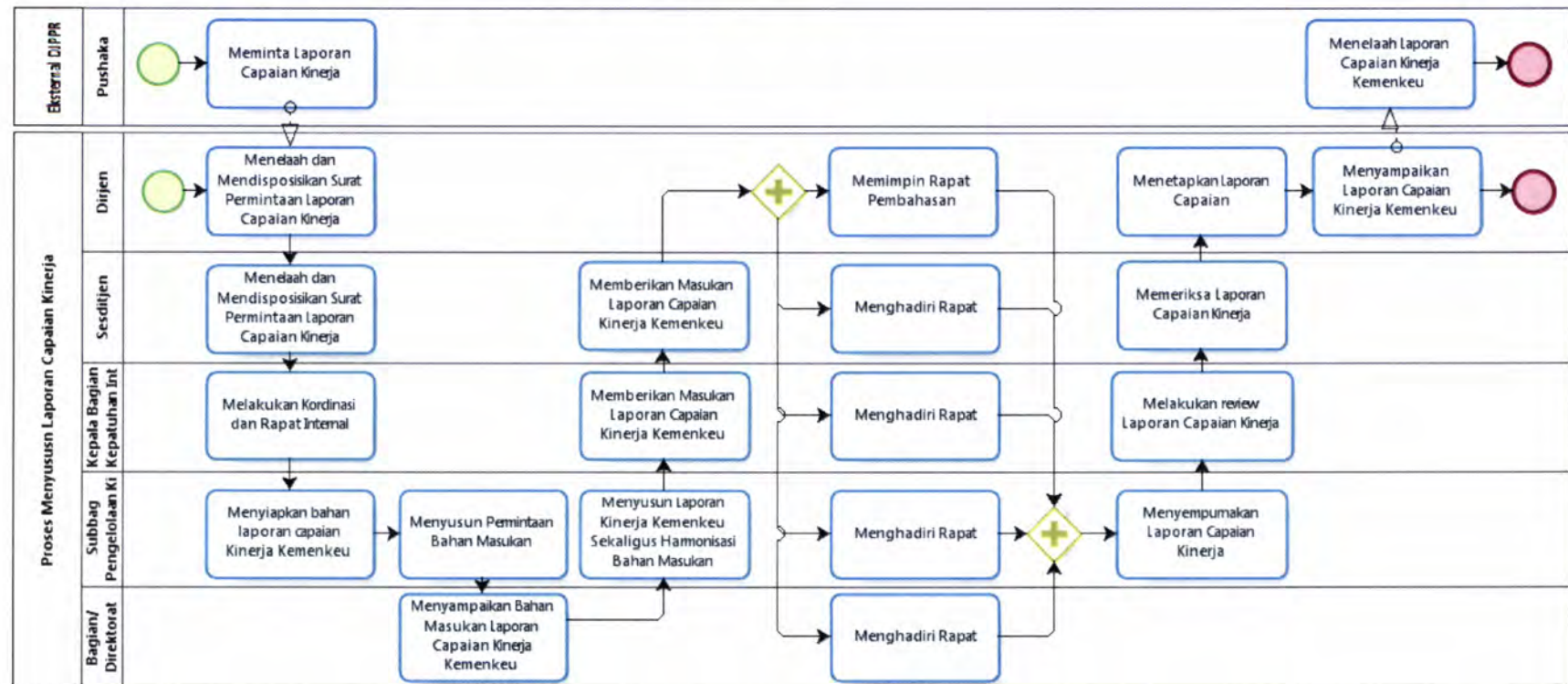
L.2.01 MENYUSUN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI (CKP)



L.2.02 MENYUSUN NILAI KERJA ORGANISASI (NKO)



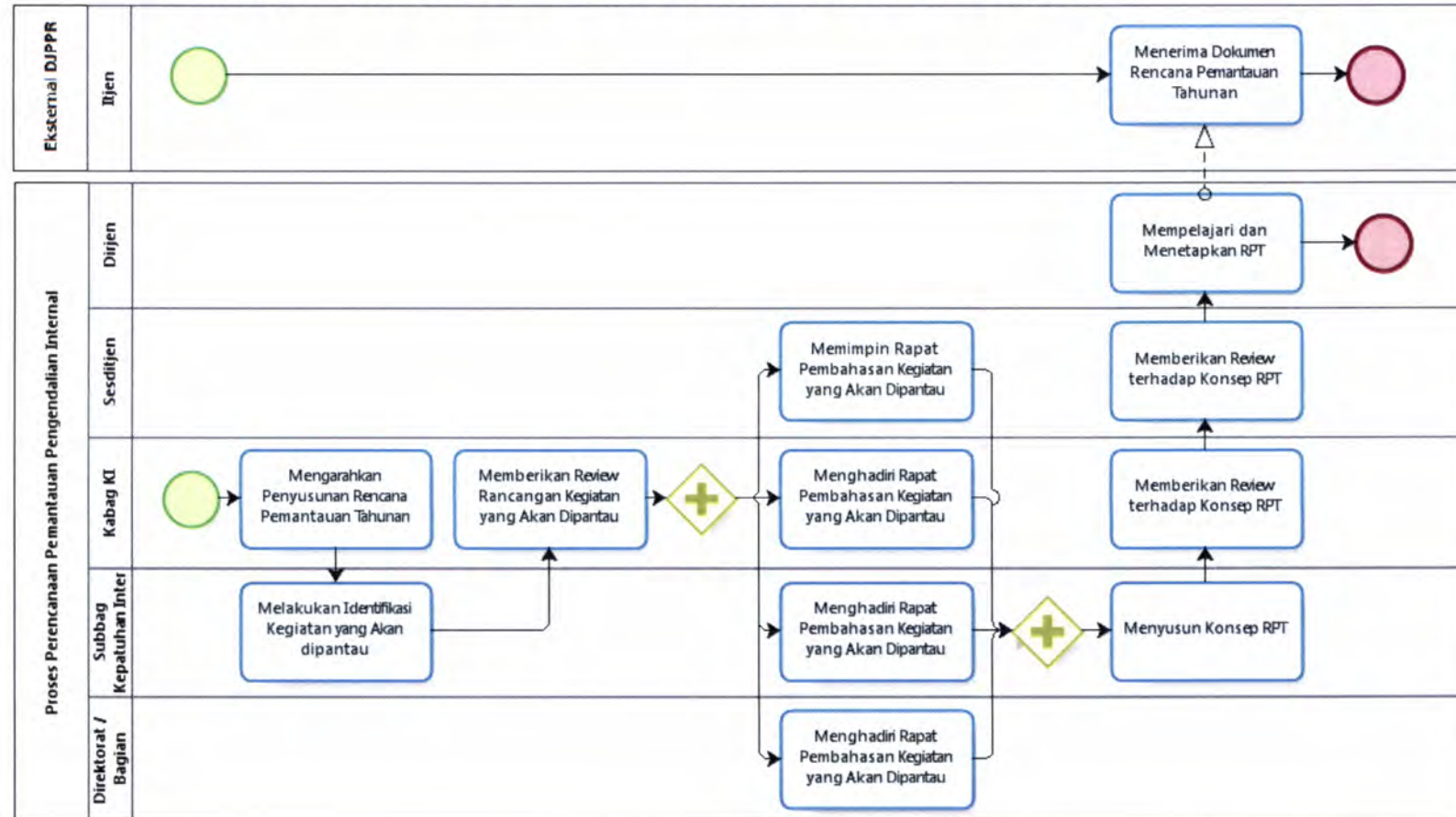
L.2.03 MENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA



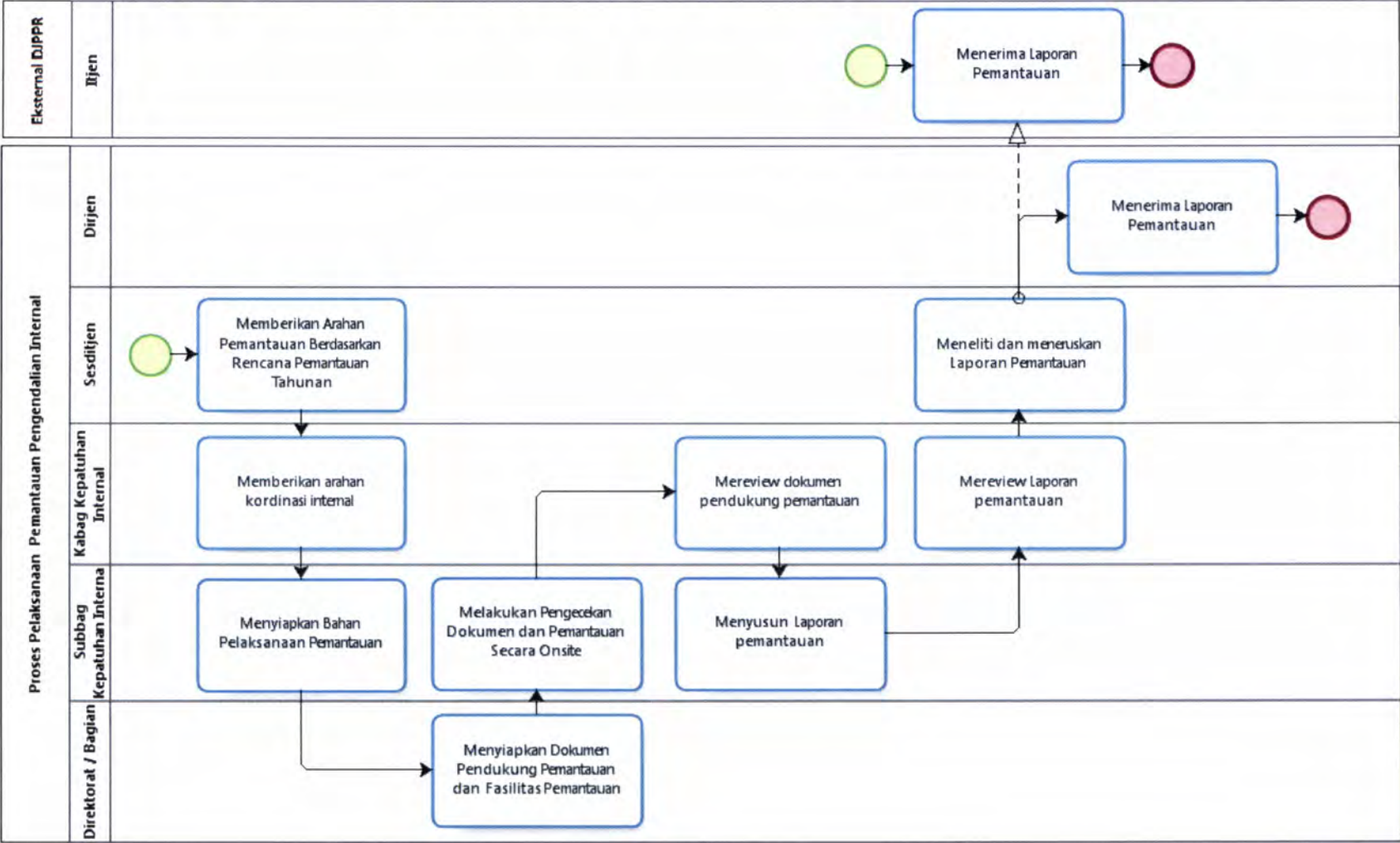
M. PENGELOLAAN KEPATUHAN INTERNAL

M.1 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL

M.1.01 PERENCANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL

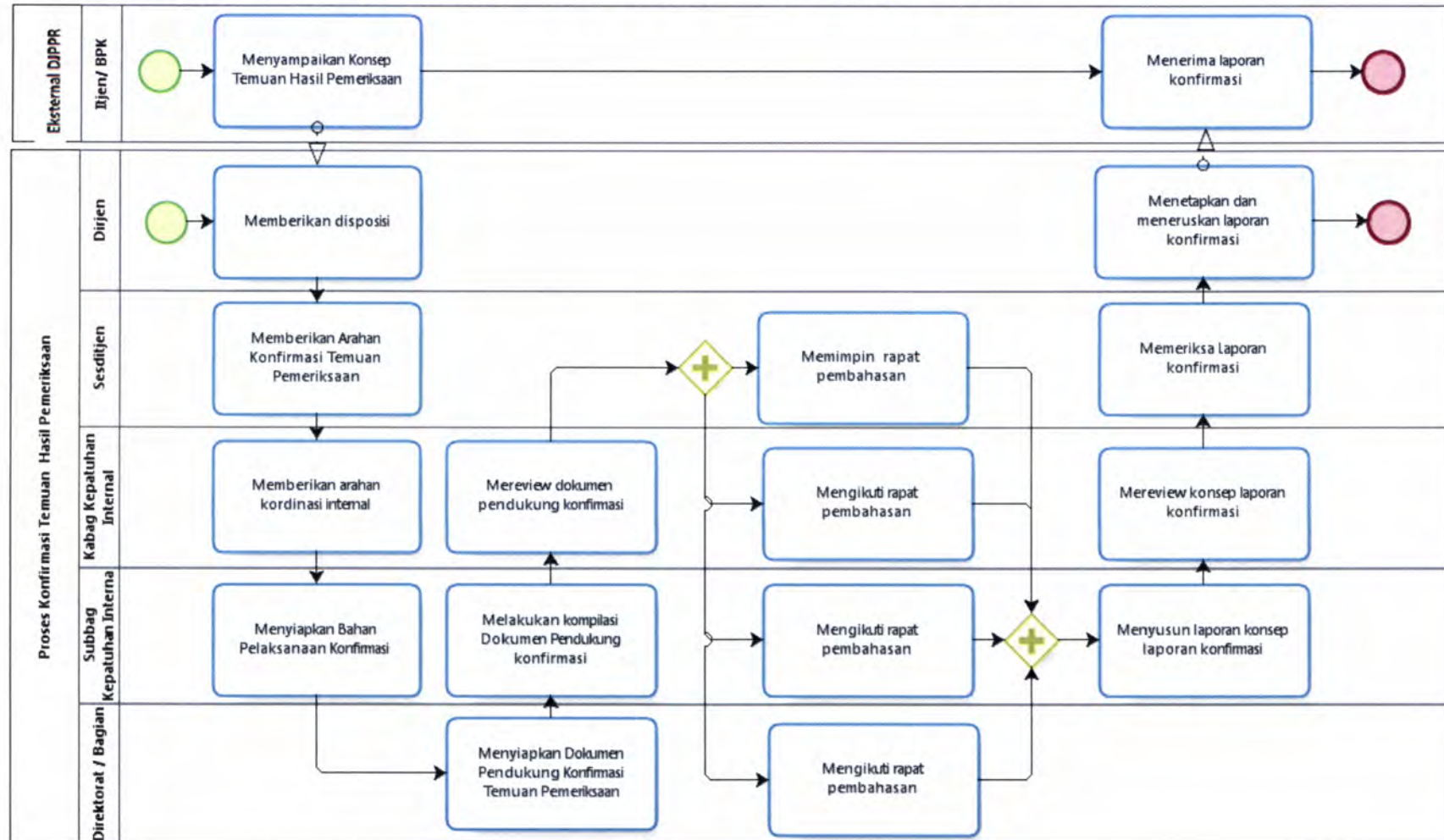


M.1.02 PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL

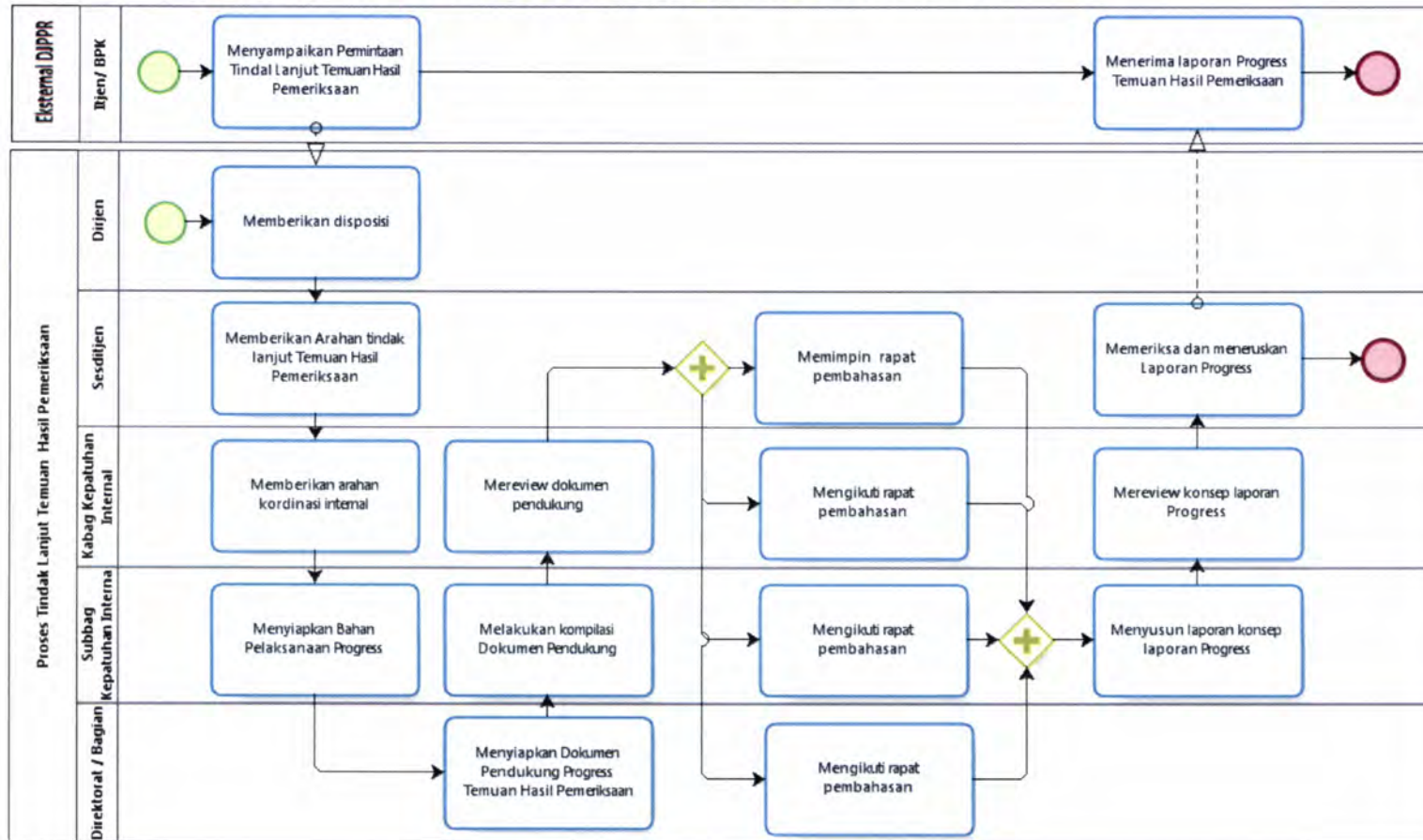


M.2 KONFIRMASI DAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN

M.2.01 MELAKUKAN KONFIRMASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

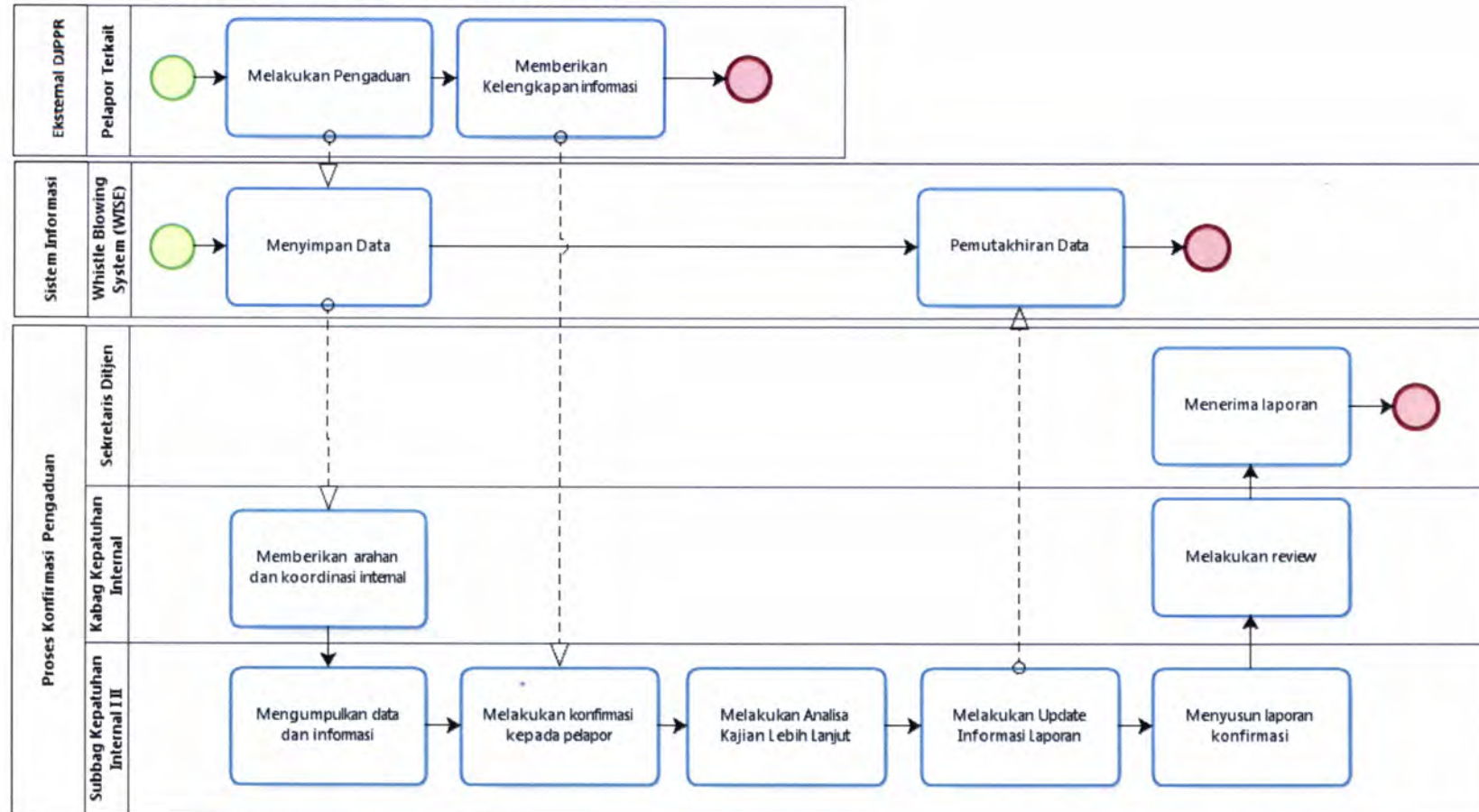


M.2.02 MENINDAKLANJUTI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN



M.3 TINDAK LANJUT PENGADUAN

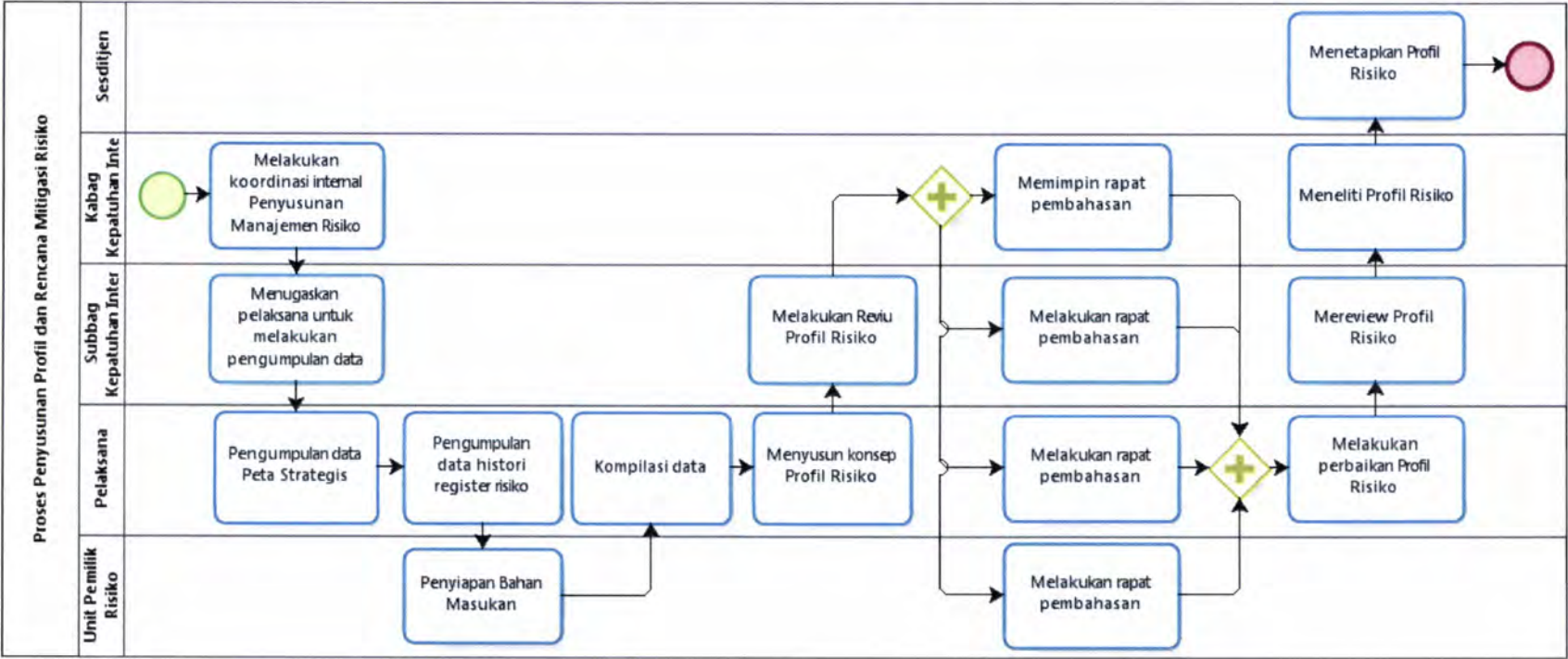
M.3.01 KONFIRMASI PENGADUAN



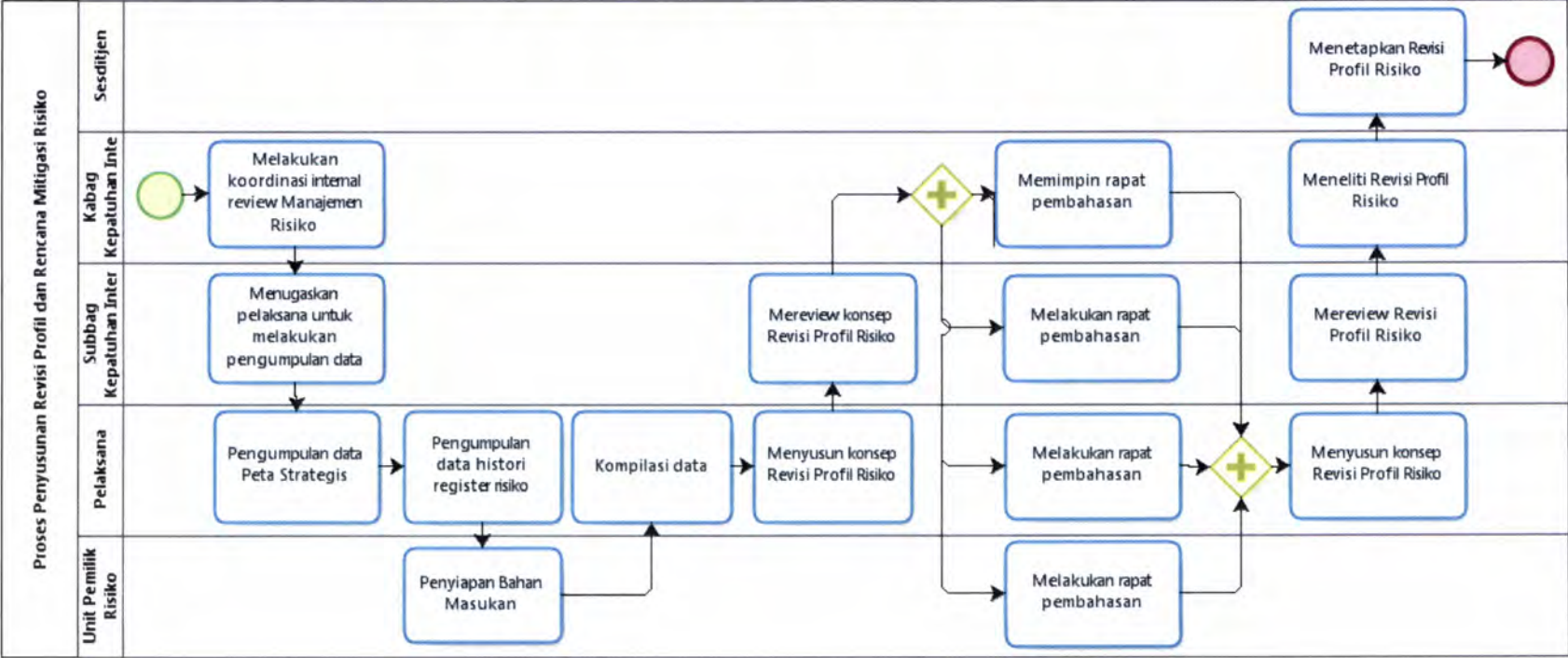
N. MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

N.1 PENYUSUNAN PROFIL RISIKO

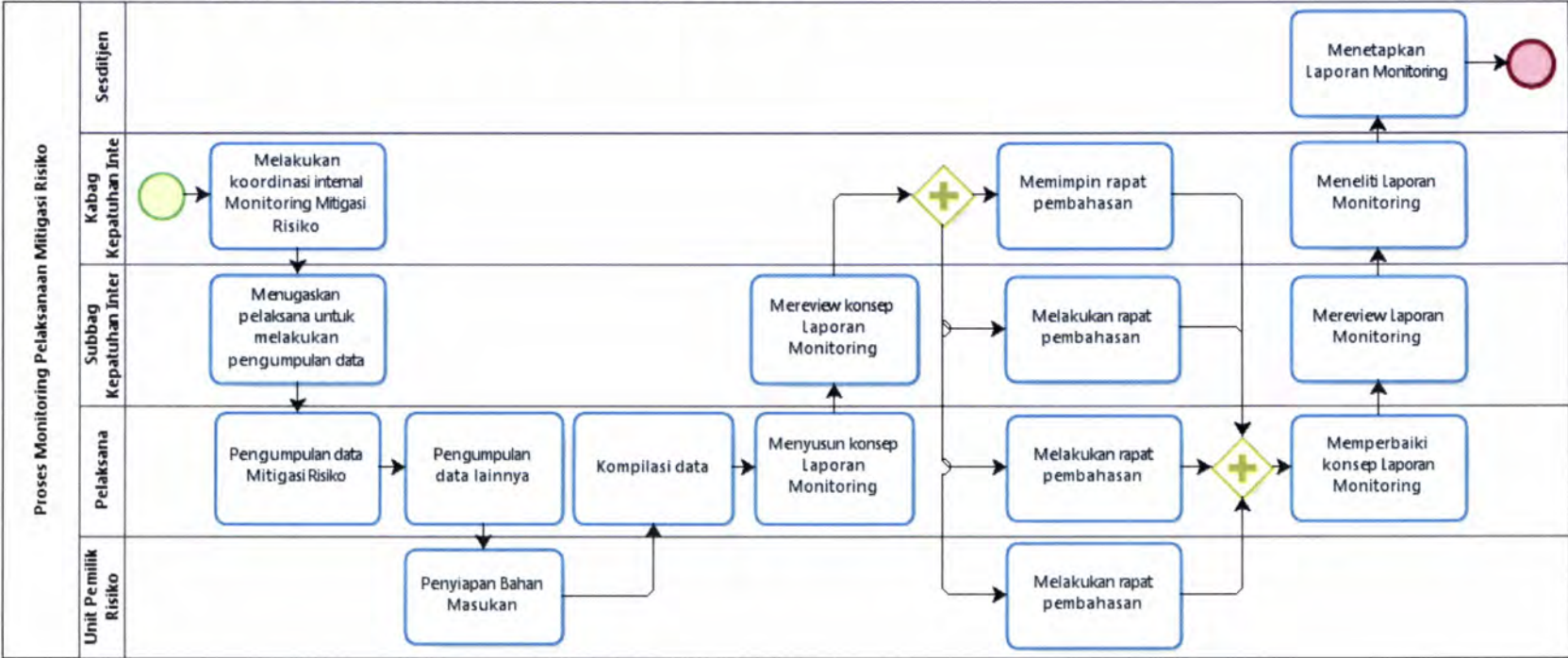
N.1.01 PENYUSUNAN PROFIL DAN RENCANA MITIGASI RISIKO



N.1.02 PENYUSUNAN REVISI PROFIL DAN RENCANA MITIGASI RISIKO

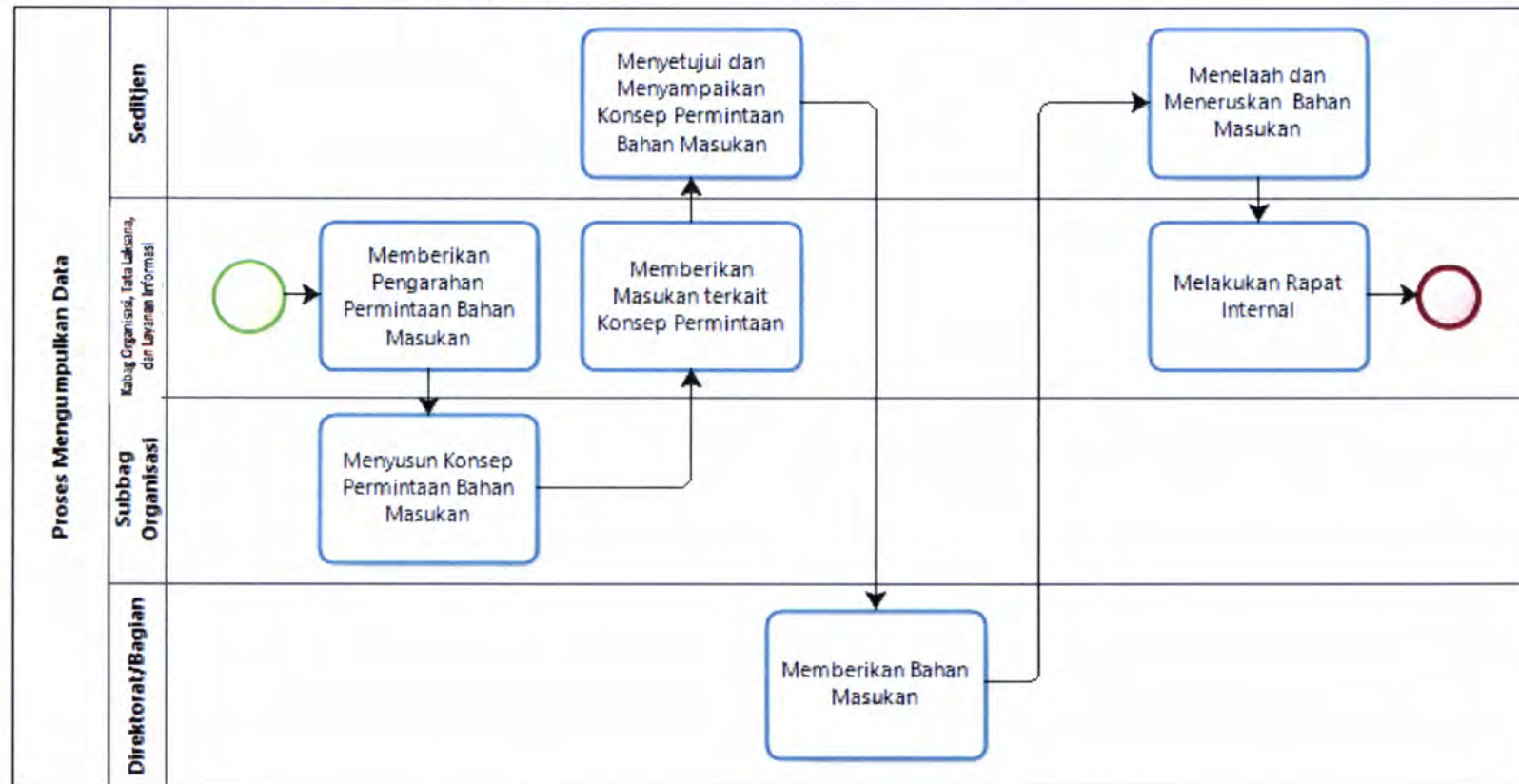


N.2 MONITORING PELAKSANAAN MITIGASI RISIKO

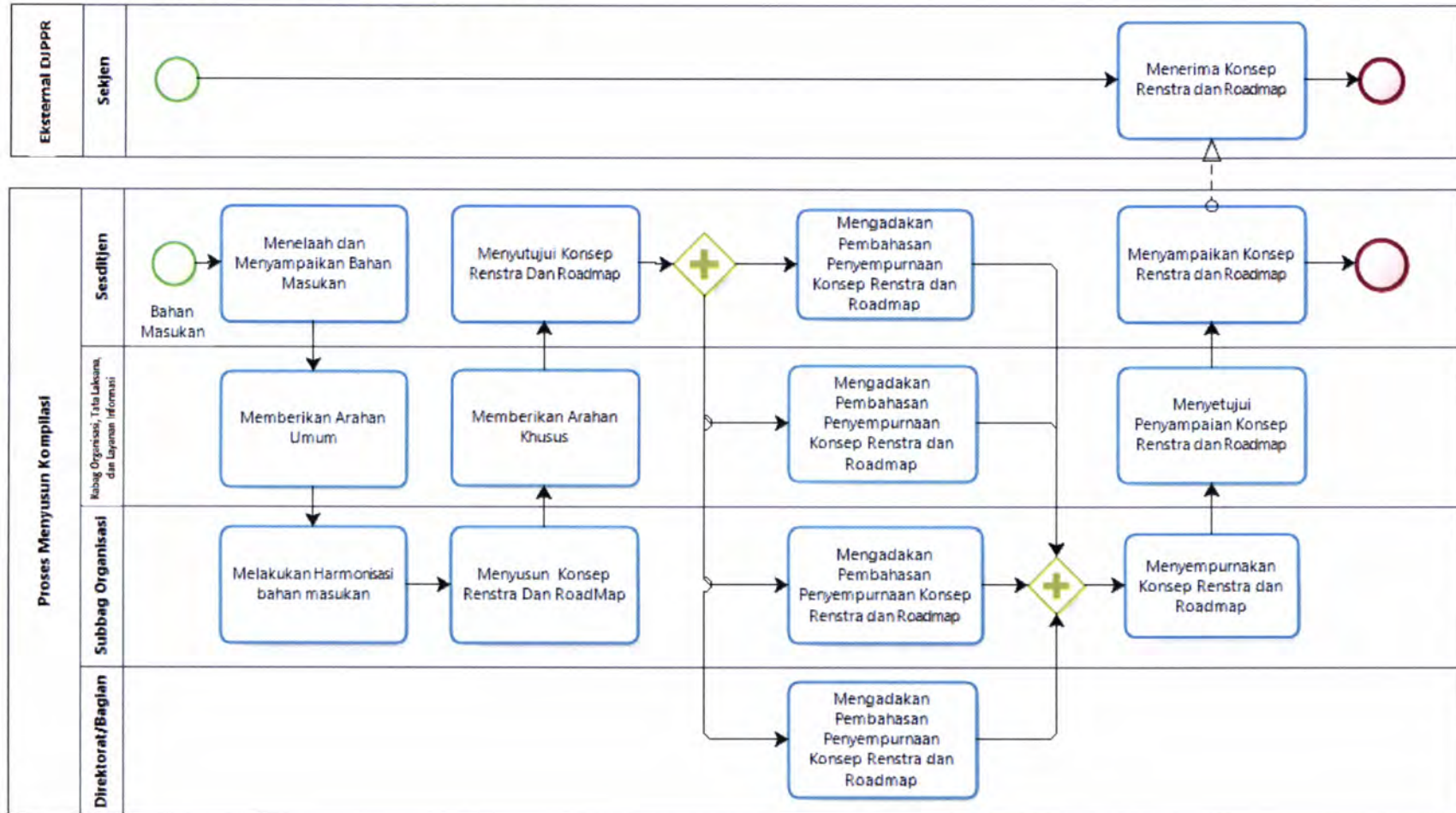


O.2 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ORGANISASI

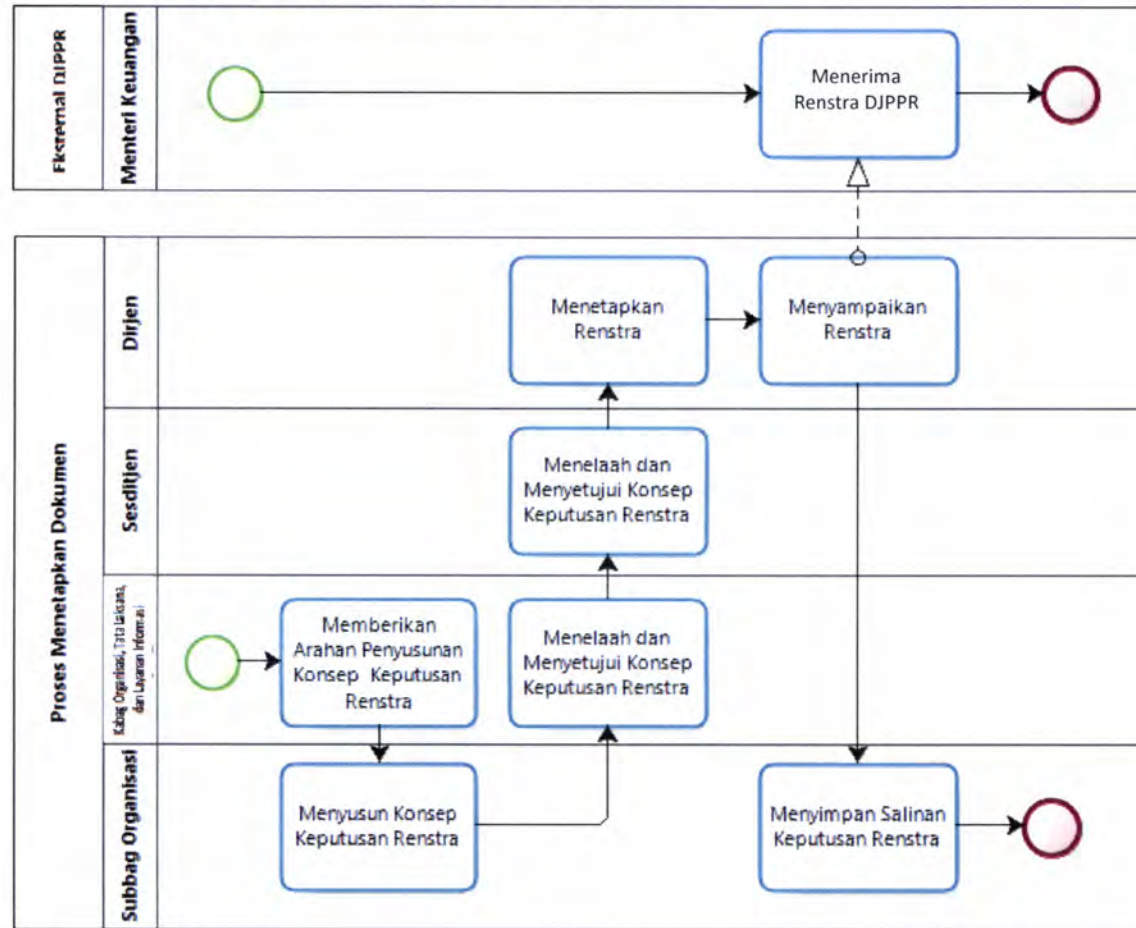
O.2.01 MENGUMPULKAN DATA



O.2.02 MENYUSUN KOMPILASI



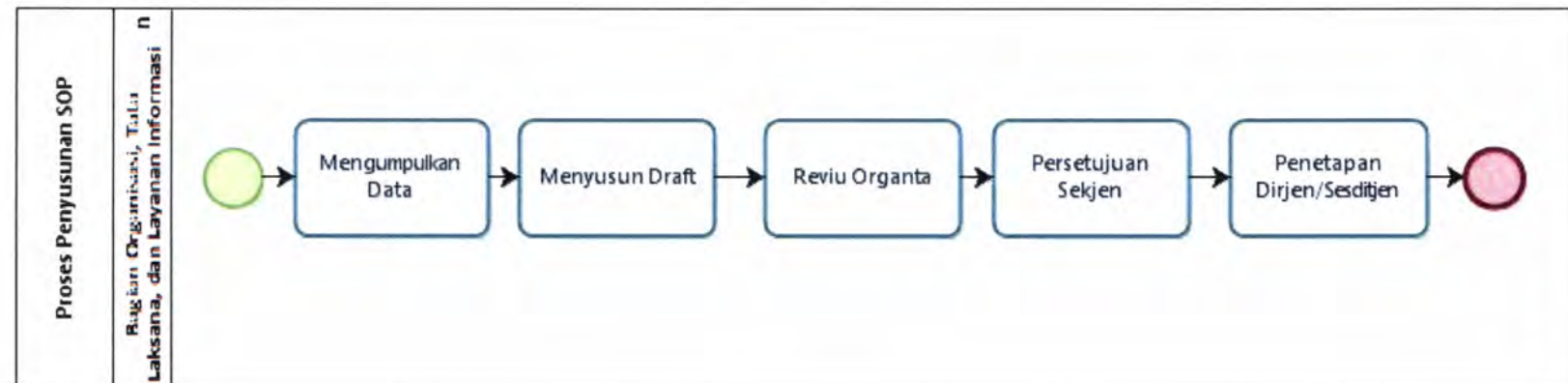
O.2.03 MENETAPKAN DOKUMEN



O.3 MENYUSUN DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI

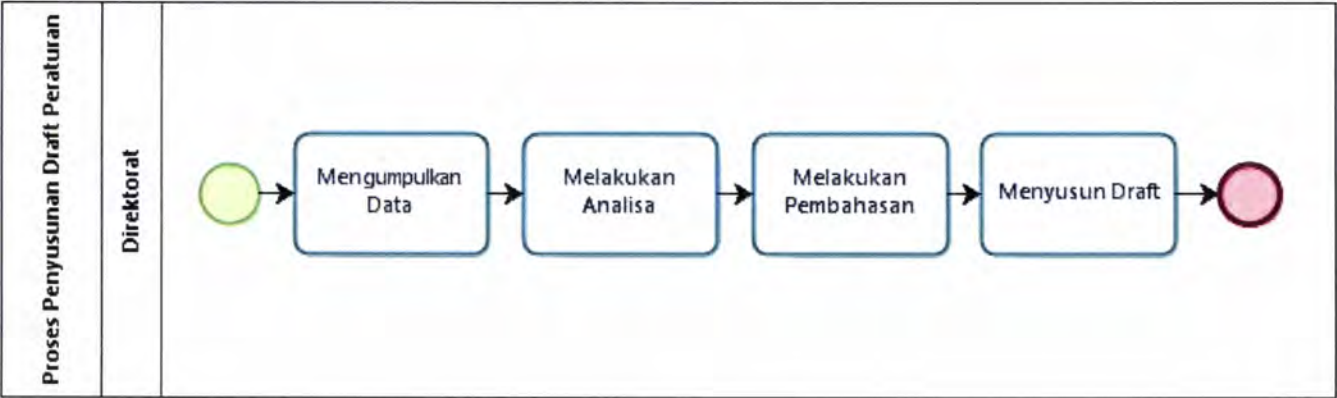


O.4 PENYUSUNAN SOP

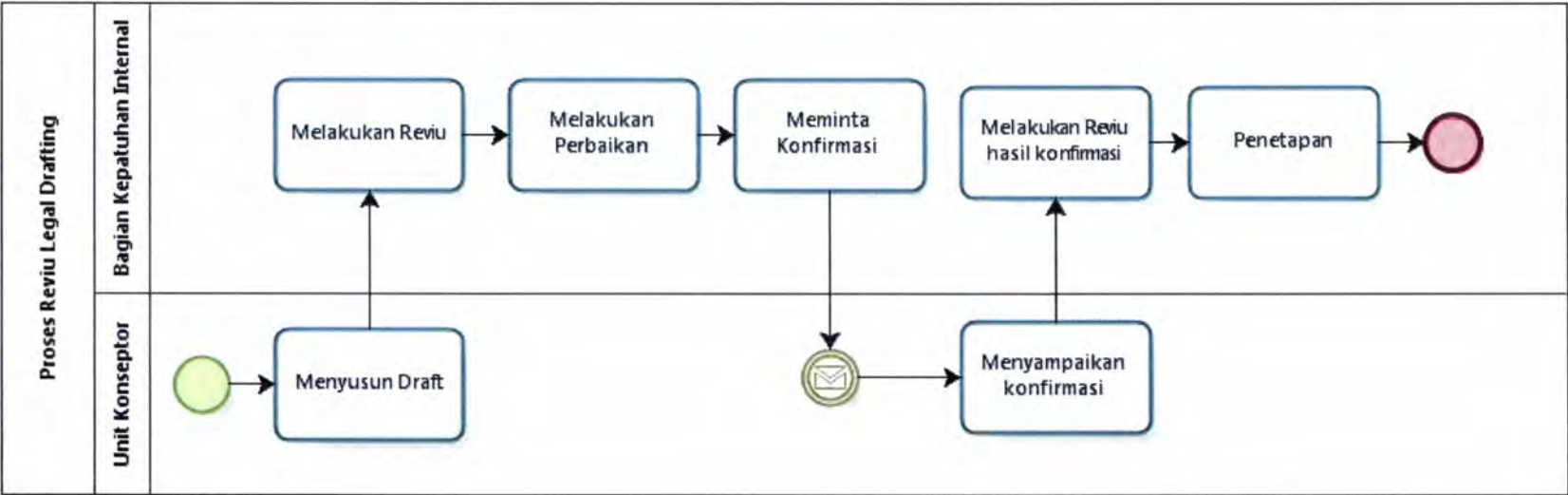


P. PERATURAN PENGELOLAAN UTANG

P.1 PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN



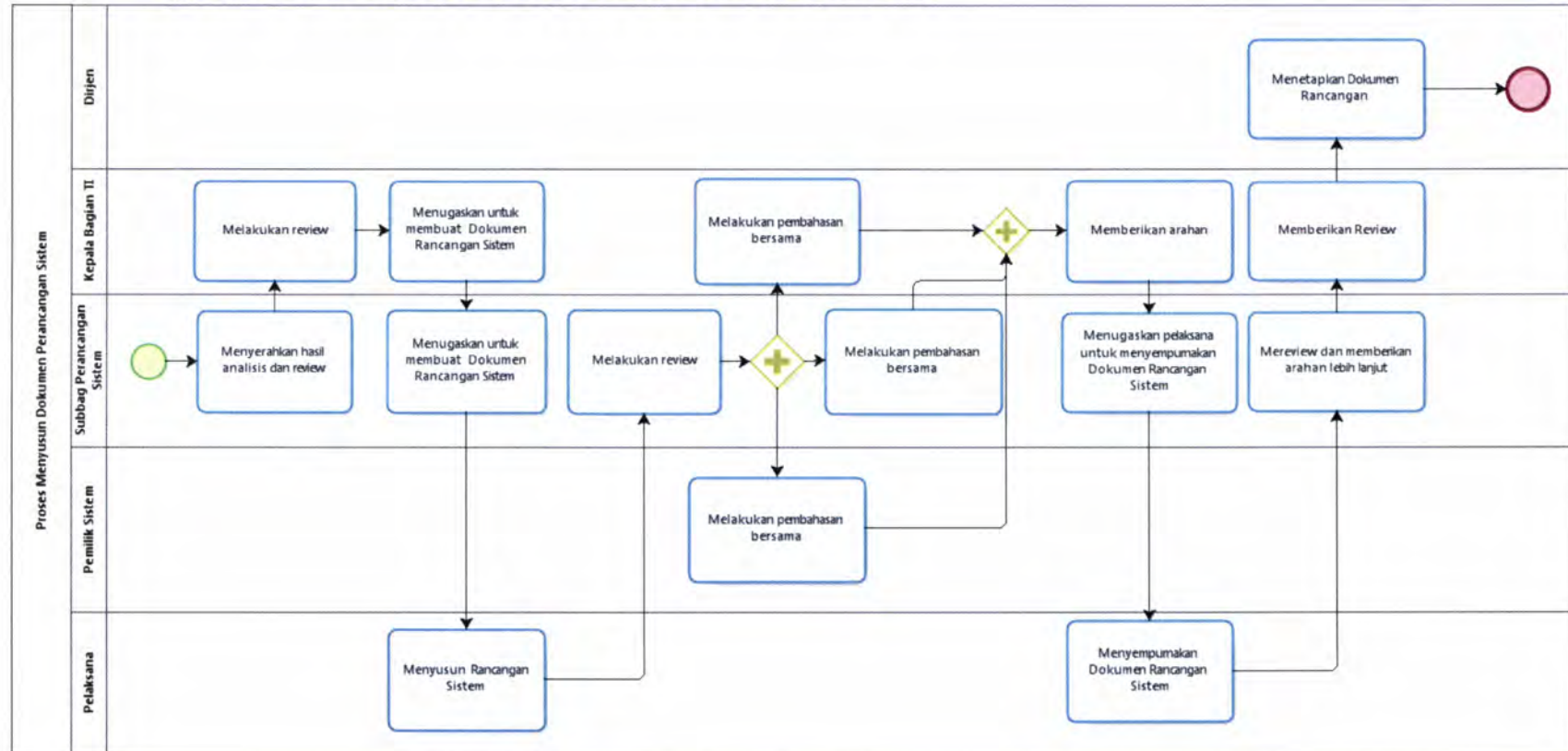
P.2 REVIU LEGAL DRAFTING



Q. TEKNOLOGI INFORMASI

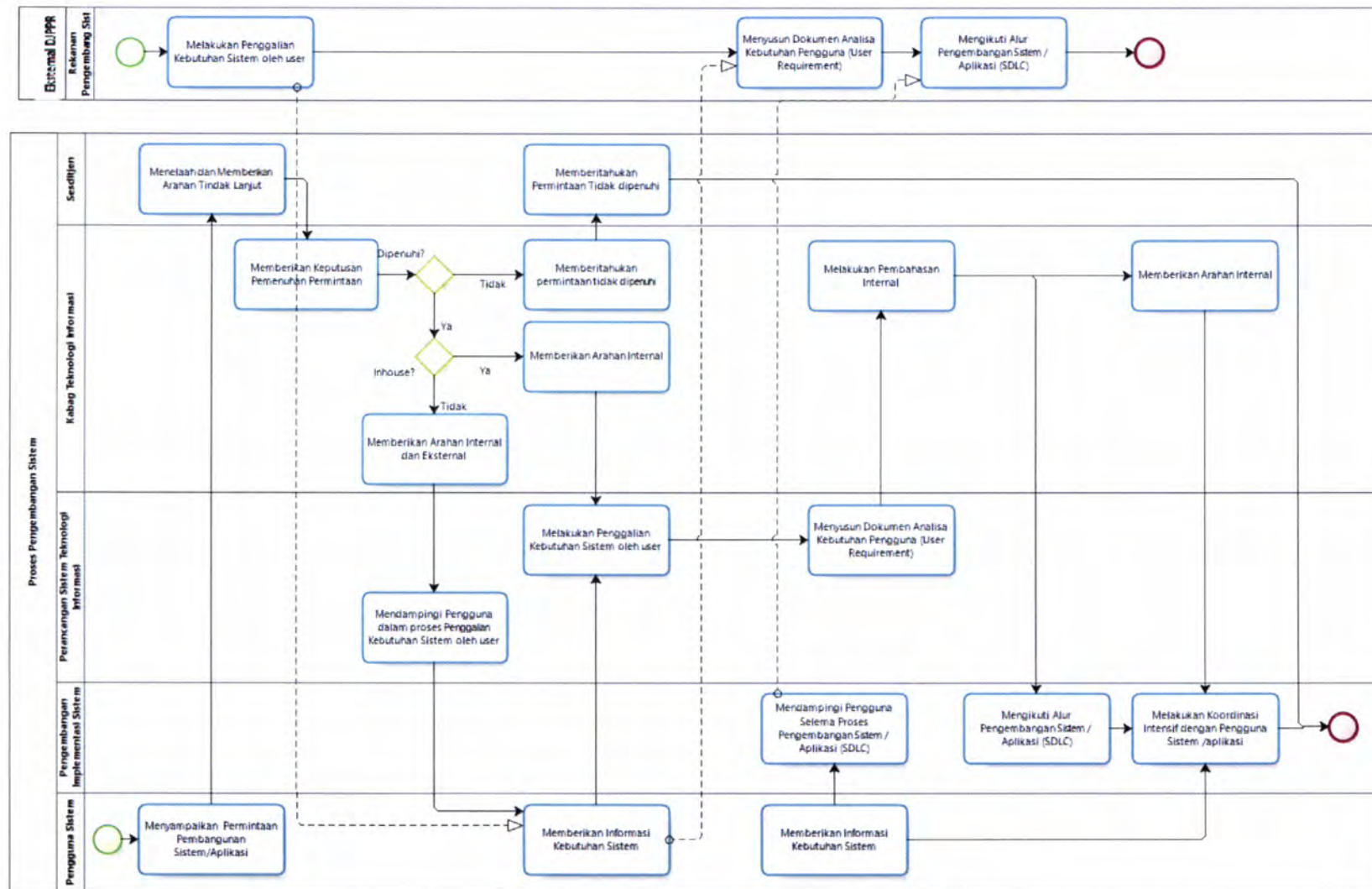
Q.1 PERANCANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Q.1.01 MENYUSUN DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM

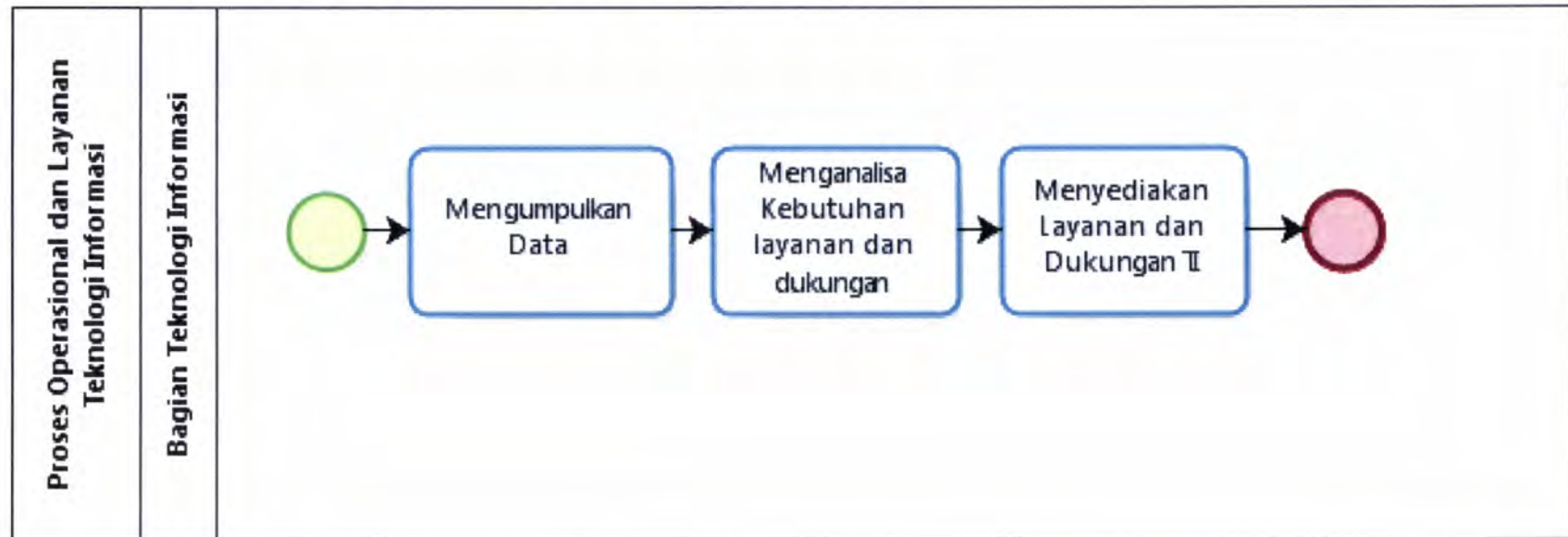


Q.2 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Q.2.01 MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN SISTEM



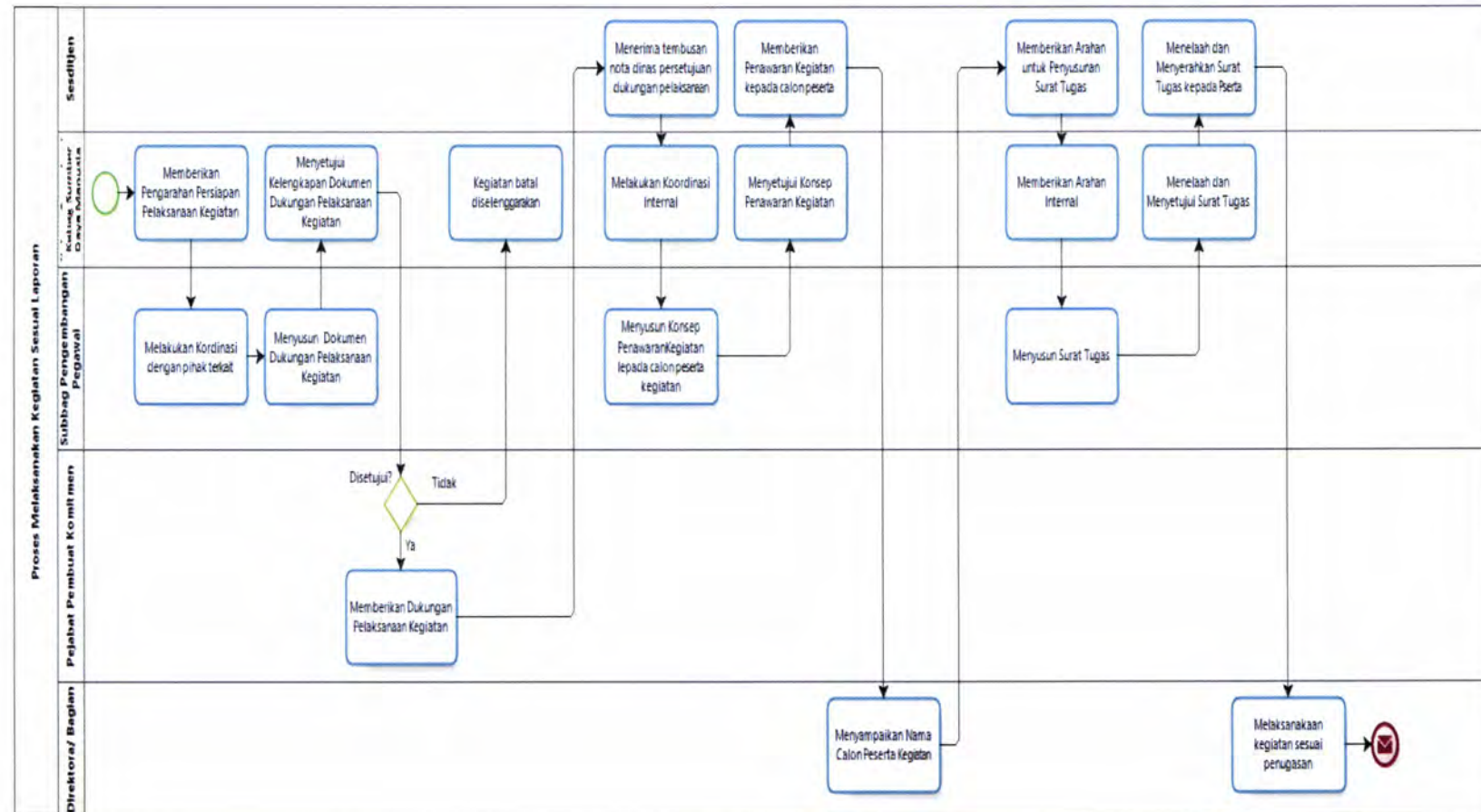
Q.3 OPERASIONAL DAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI



R. KEPEGAWAIAN

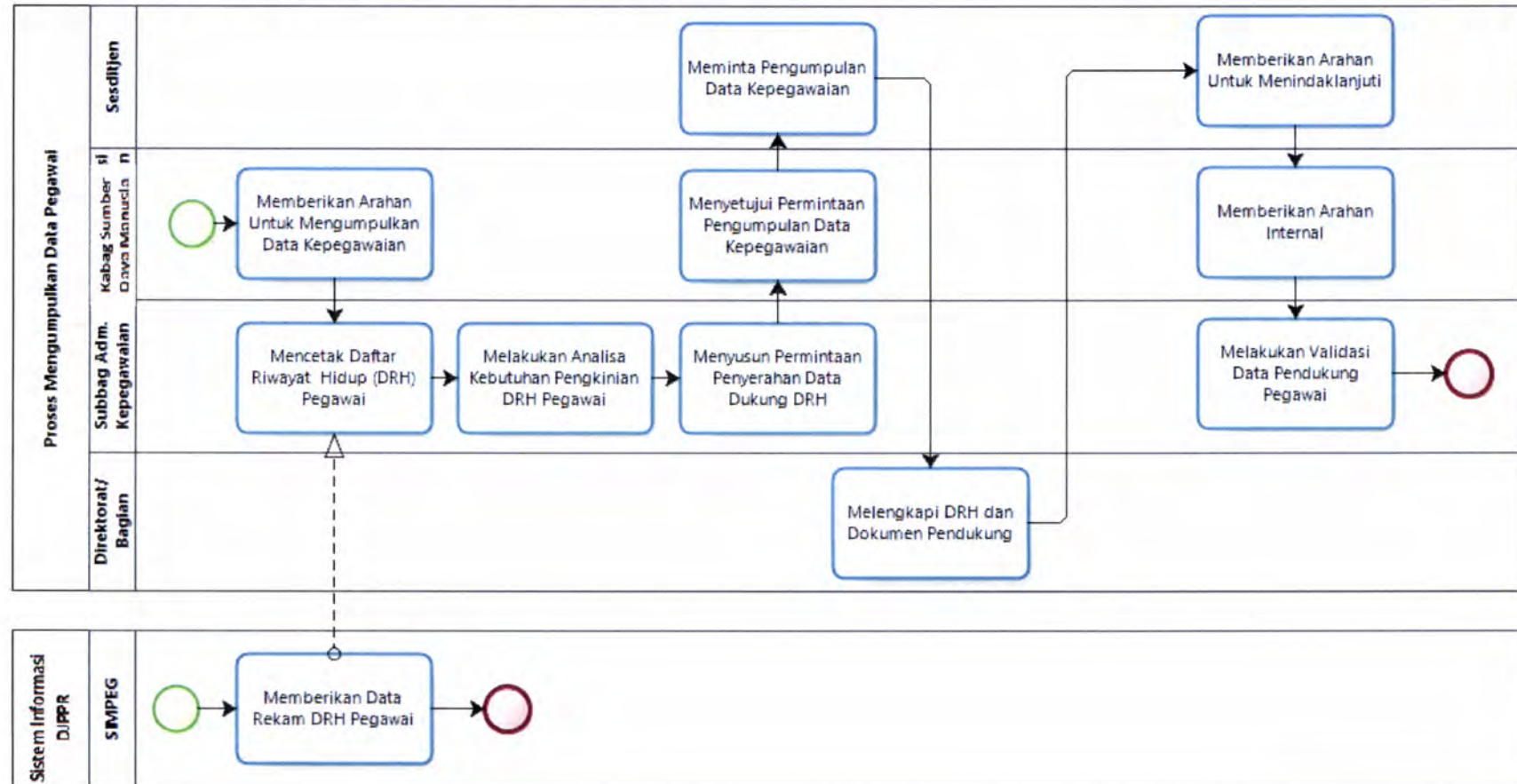
R.1 PENGEMBANGAN PEGAWAI

R.1.01 MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI LAPORAN

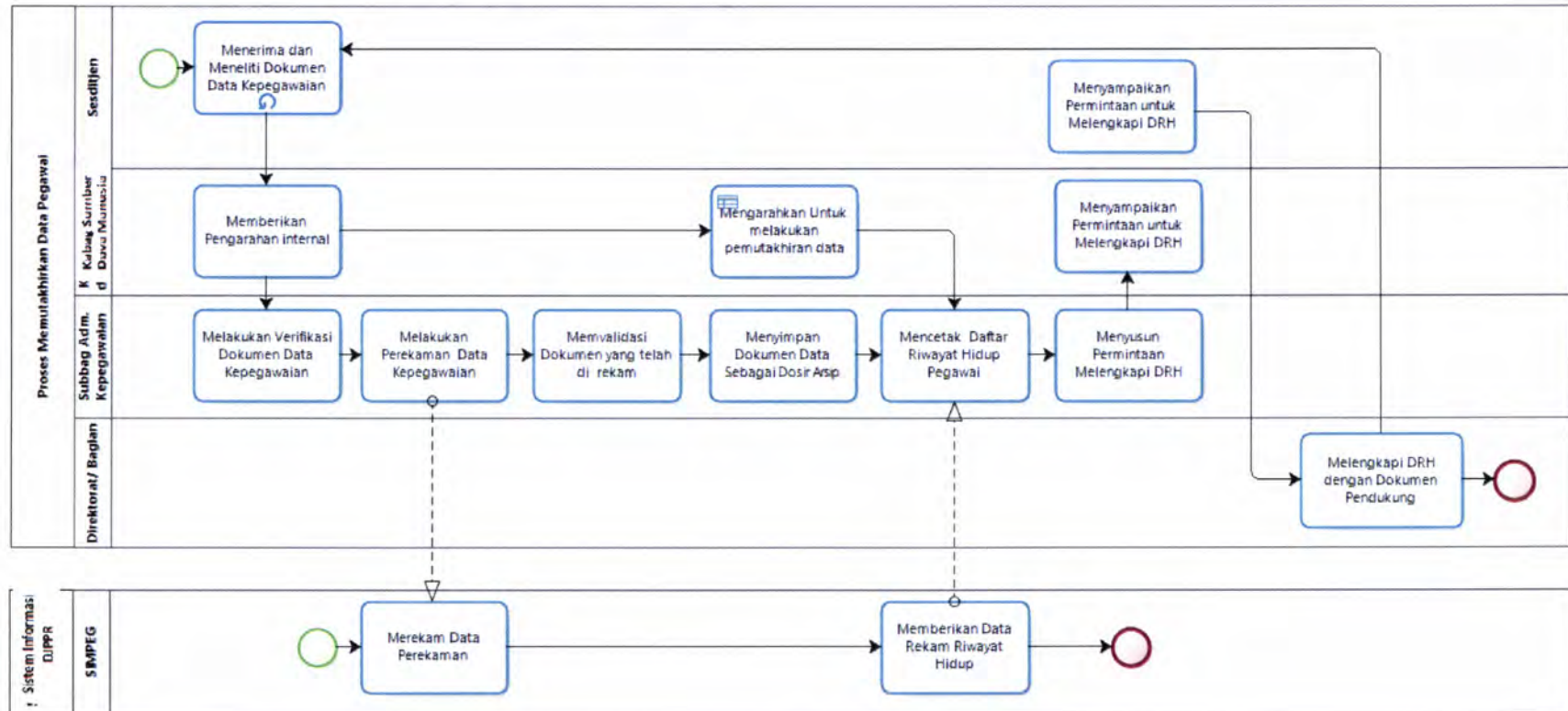


R.2 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

R.2.01 MENGUMPULKAN DATA PEGAWAI

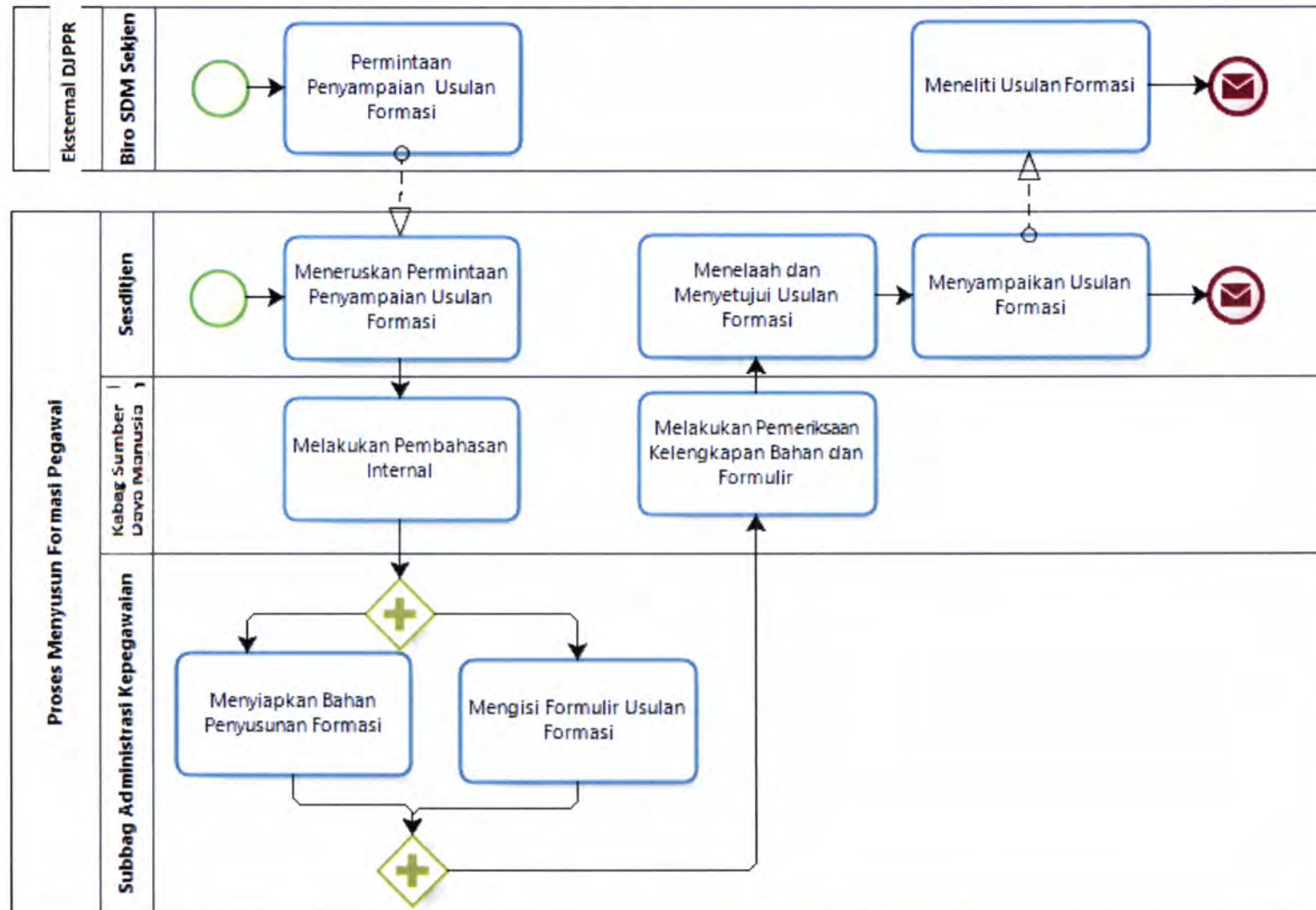


R.2.02 MEMUTAKHIRKAN DATA PEGAWAI



Apr

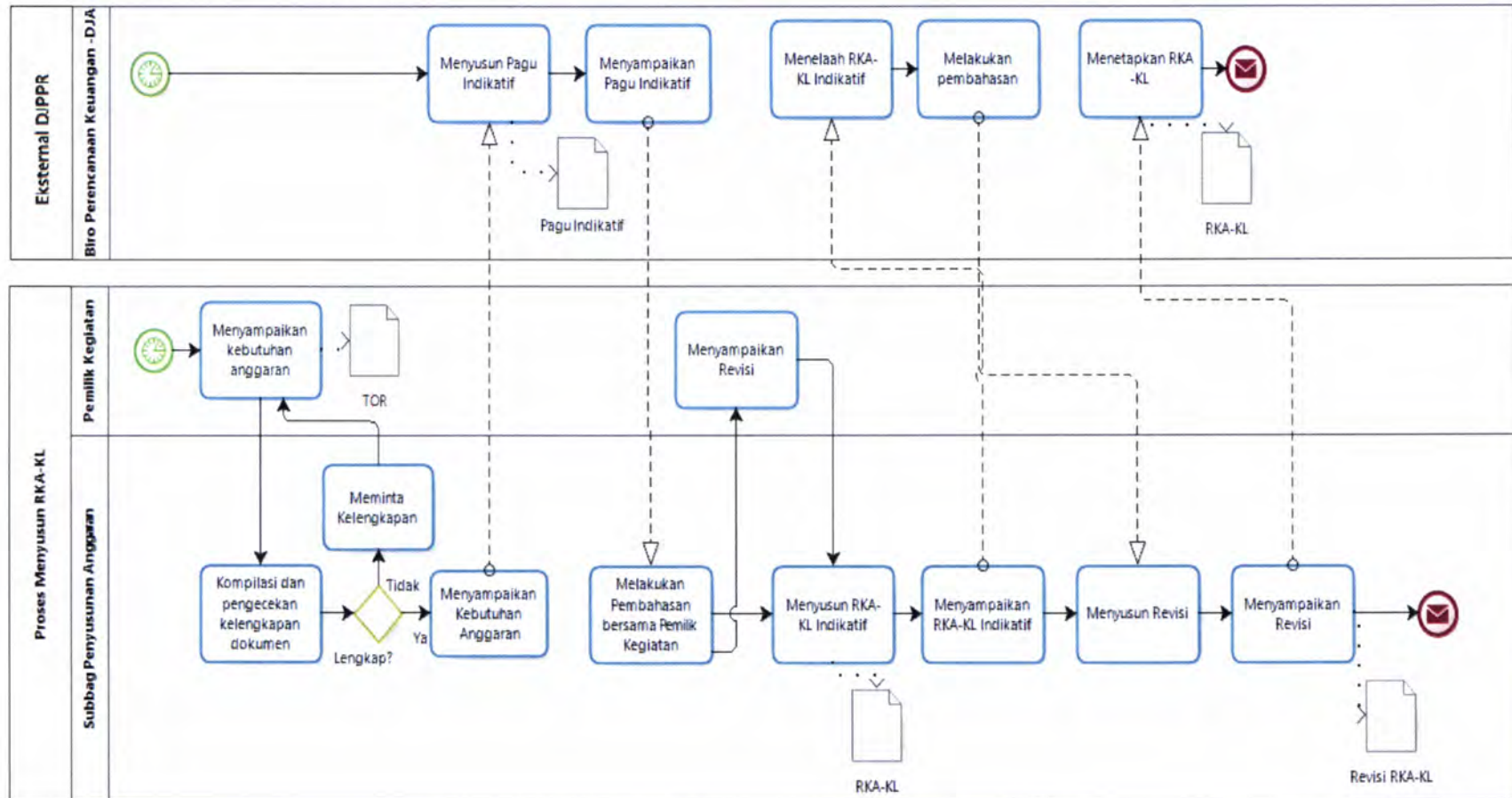
R.2.03 MENYUSUN FORMASI PEGAWAI



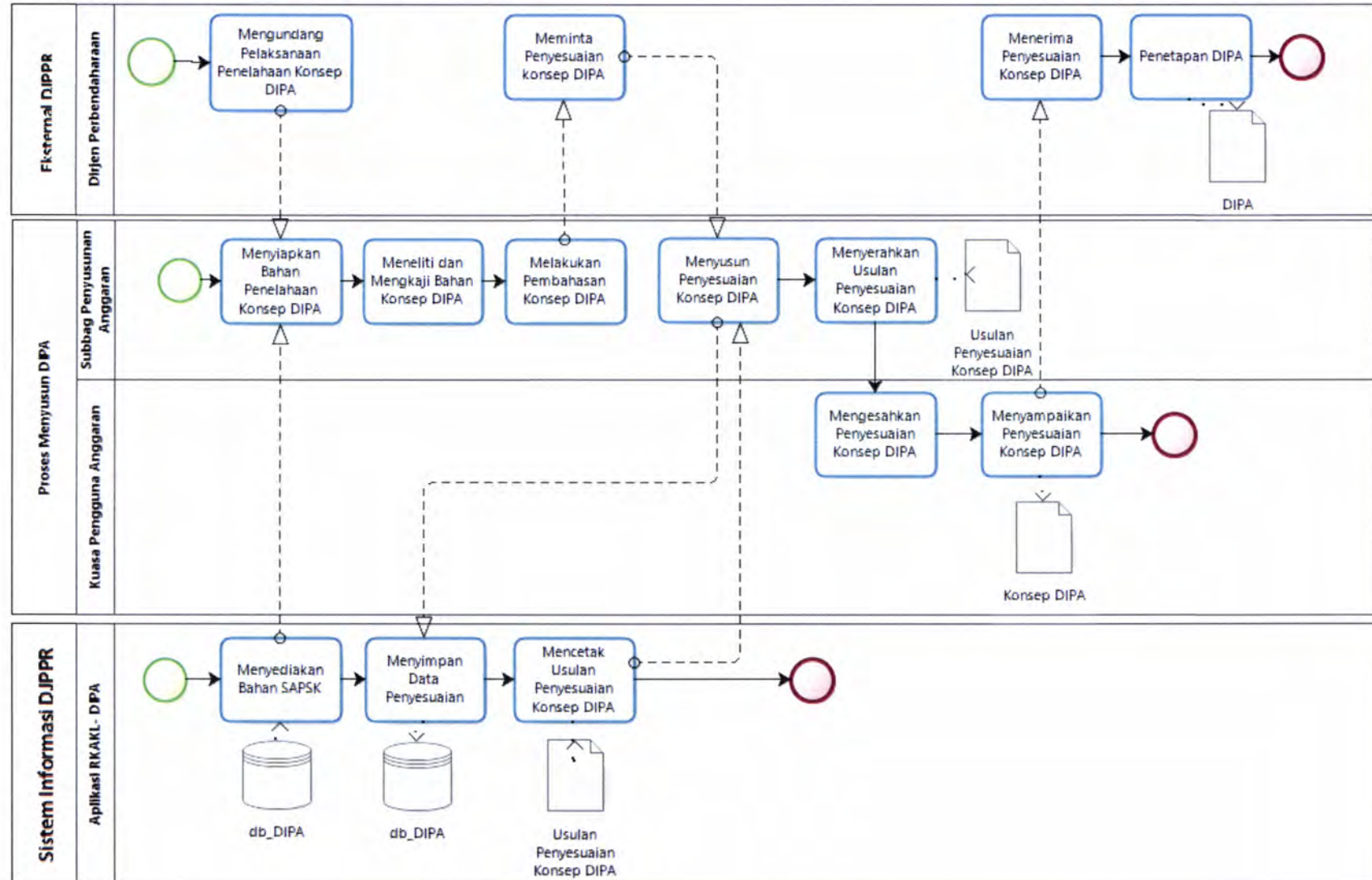
S. PENGELOLAAN KEUANGAN

S.1 PENYUSUNAN ANGGARAN

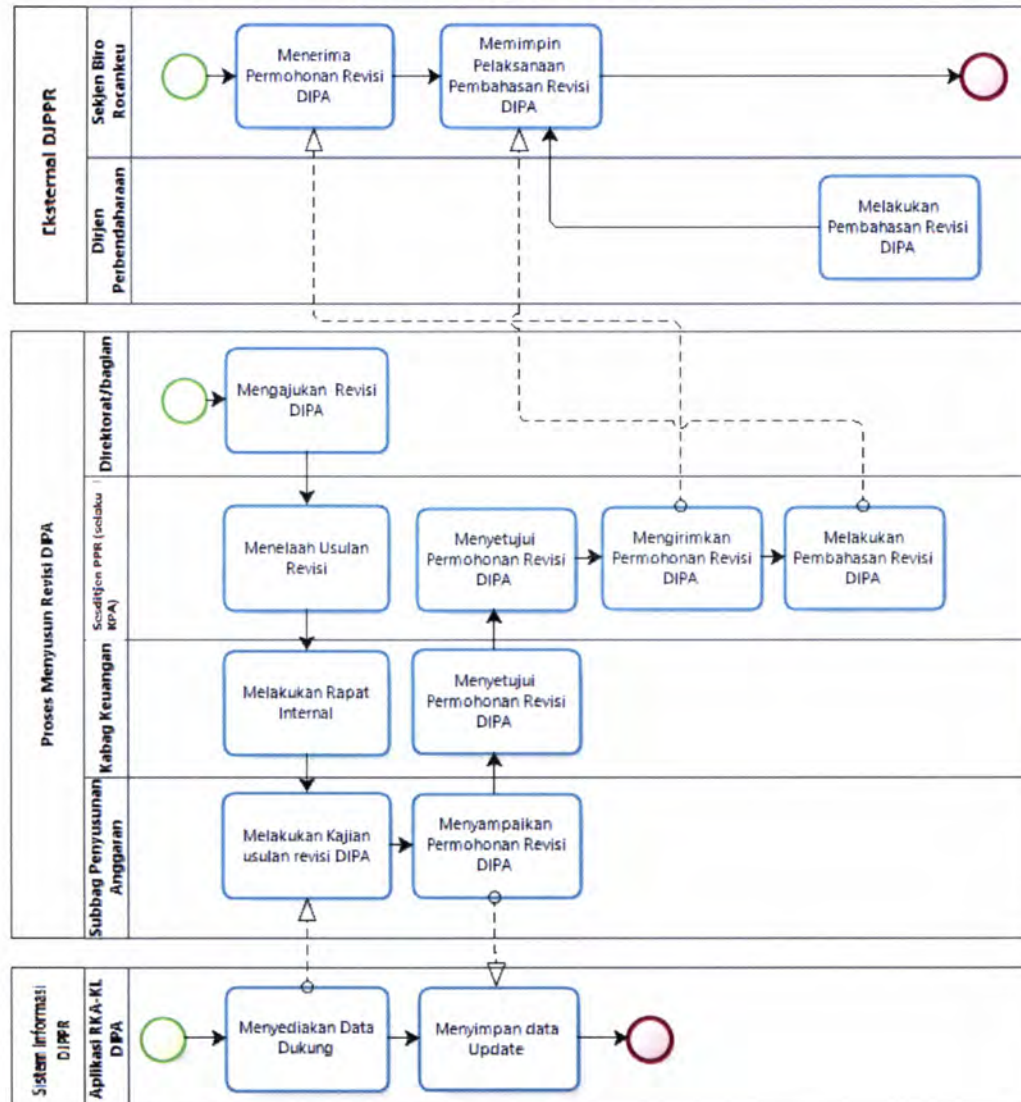
S.1.01 MENYUSUN RKA-KL



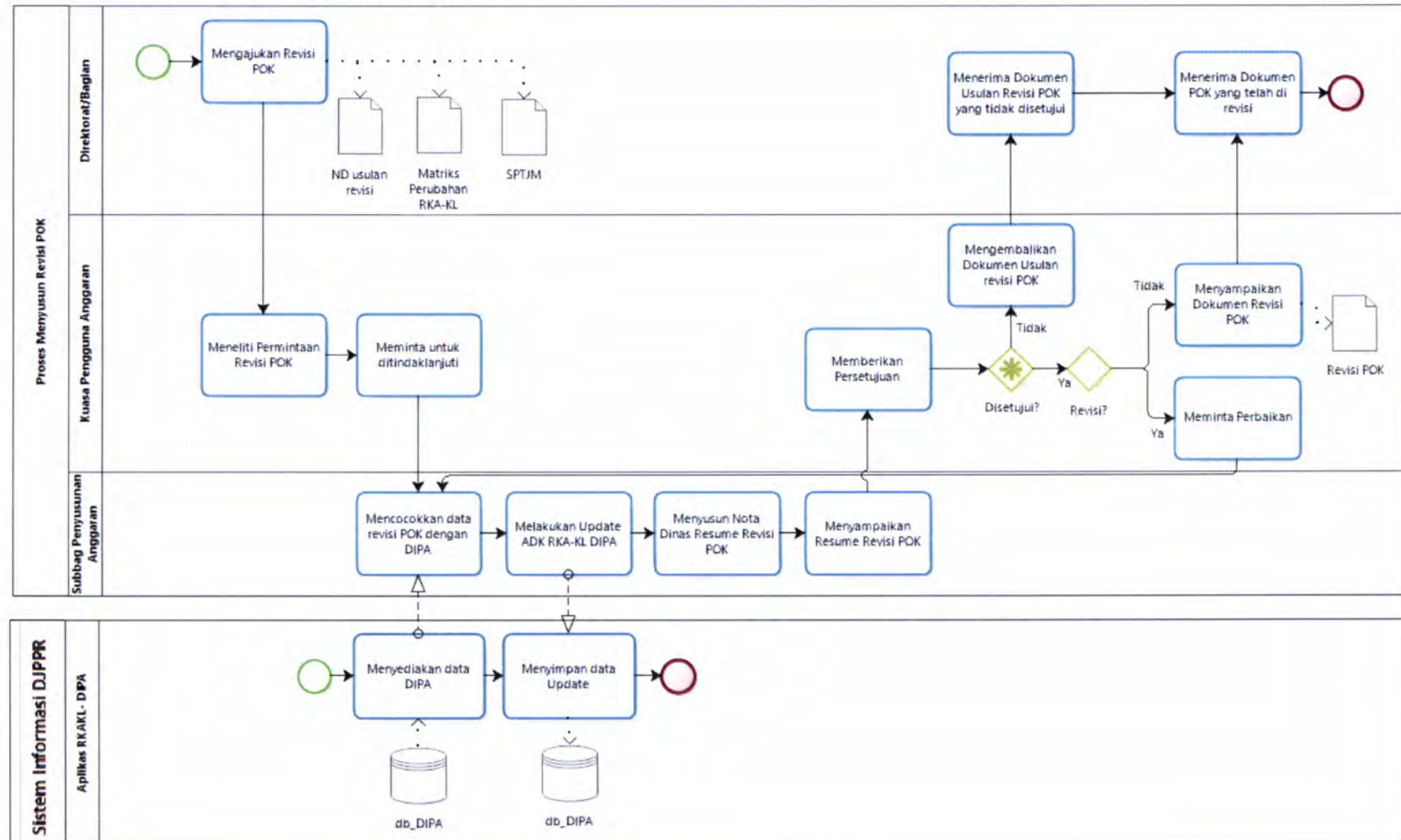
S.1.02 MENYUSUN DIPA



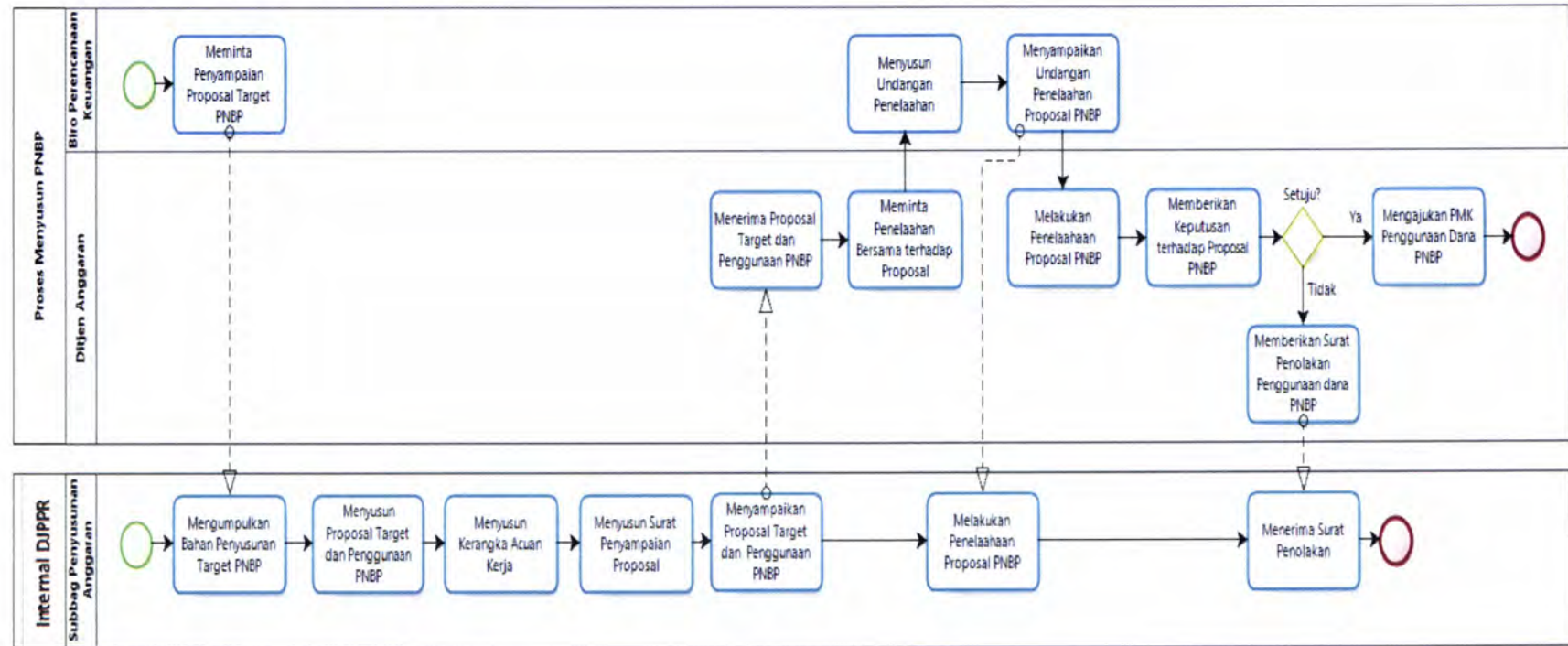
S.1.03 MENYUSUN REVISI DIPA



S.1.04 MENYUSUN REVISI POK

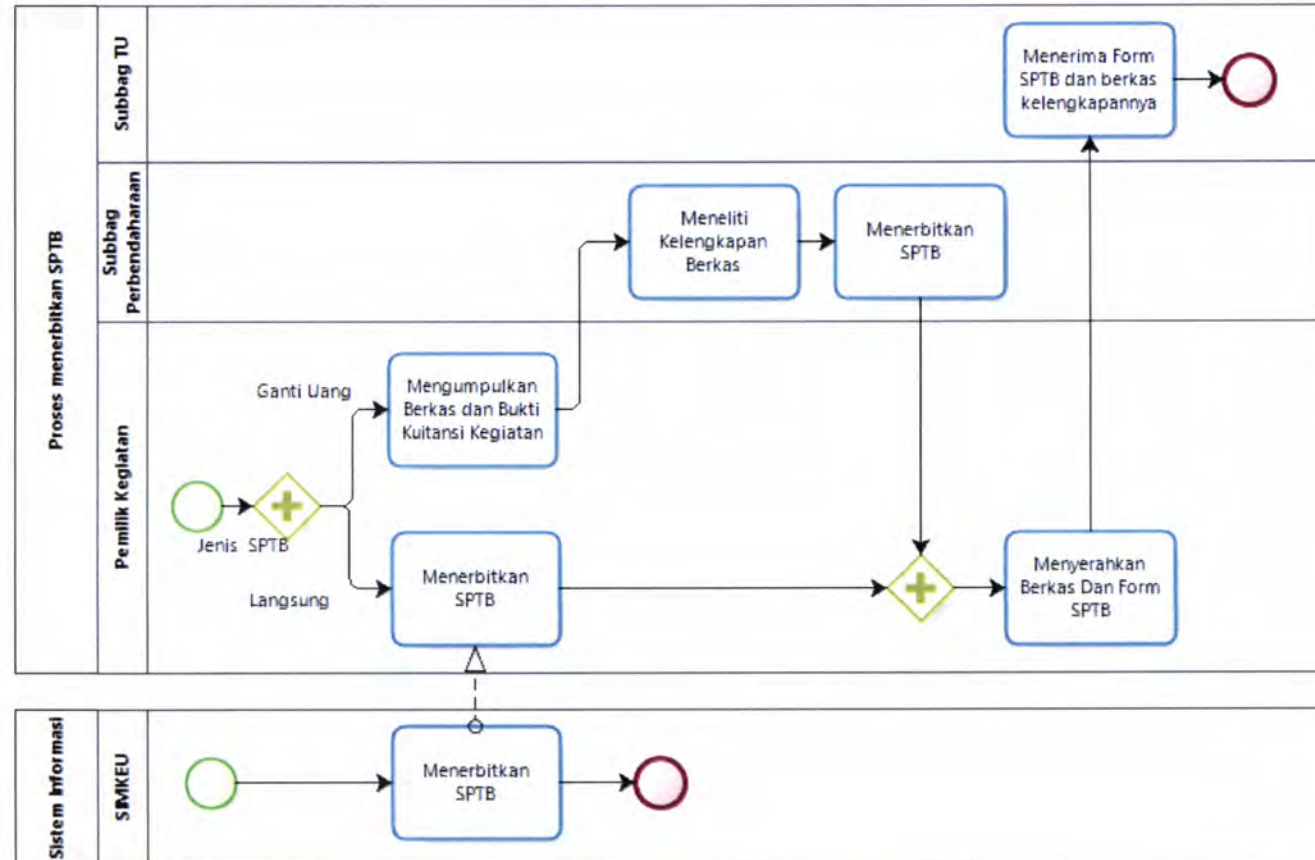


S.1.05 MENYUSUN PNBP

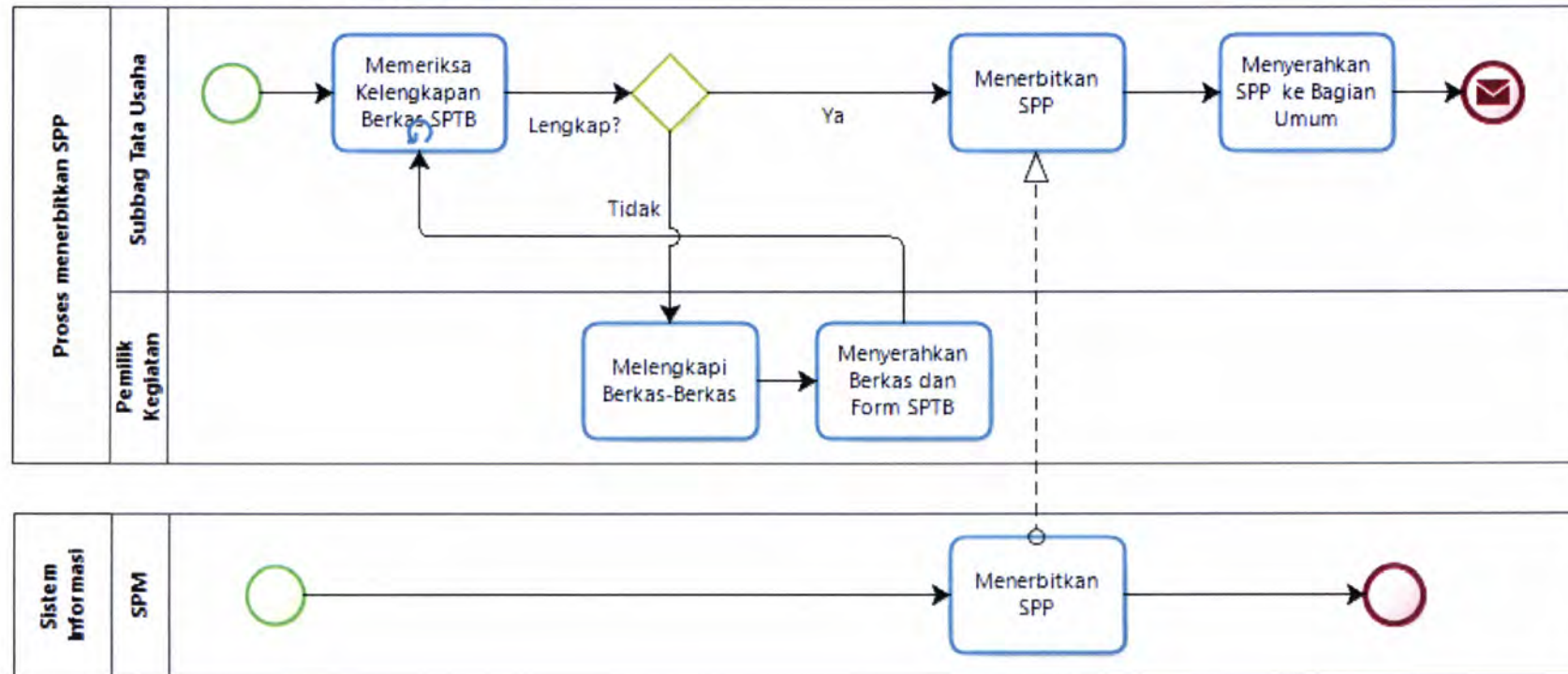


S.2 PERBENDAHARAAN

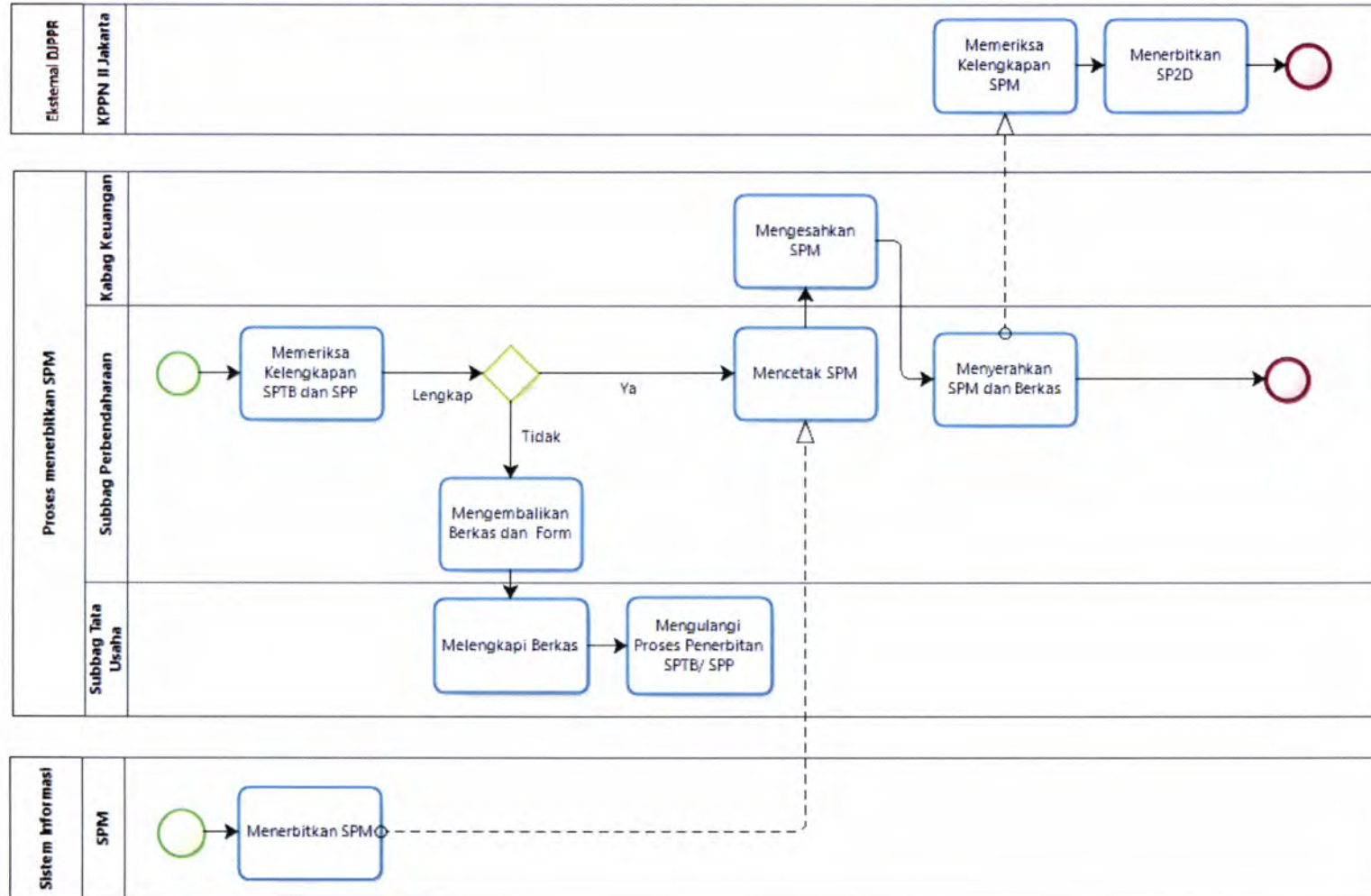
S.2.01 MENERBITKAN SPTB



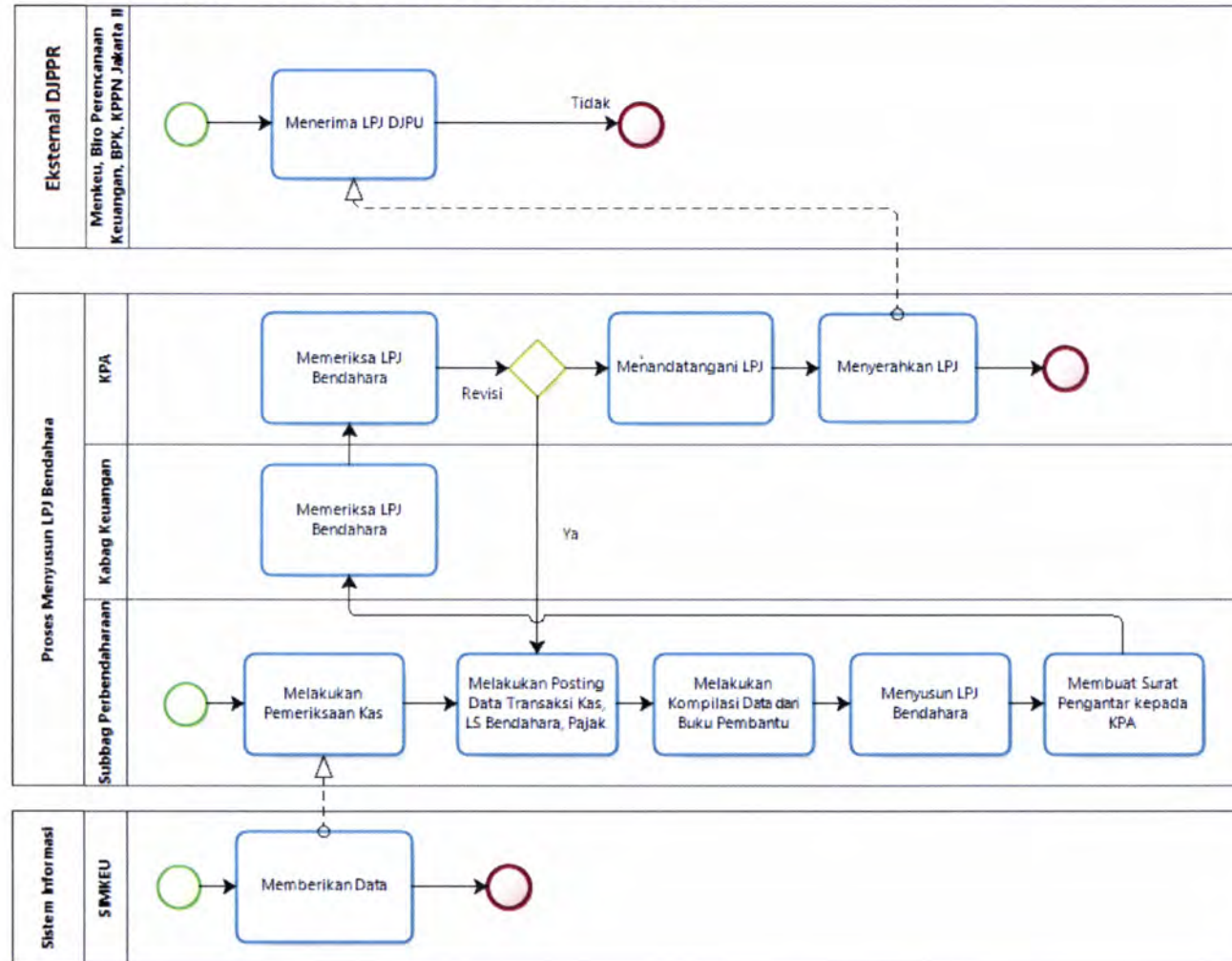
S.2.02 MENERBITKAN SPP



S.2.03 MENERBITKAN SPM

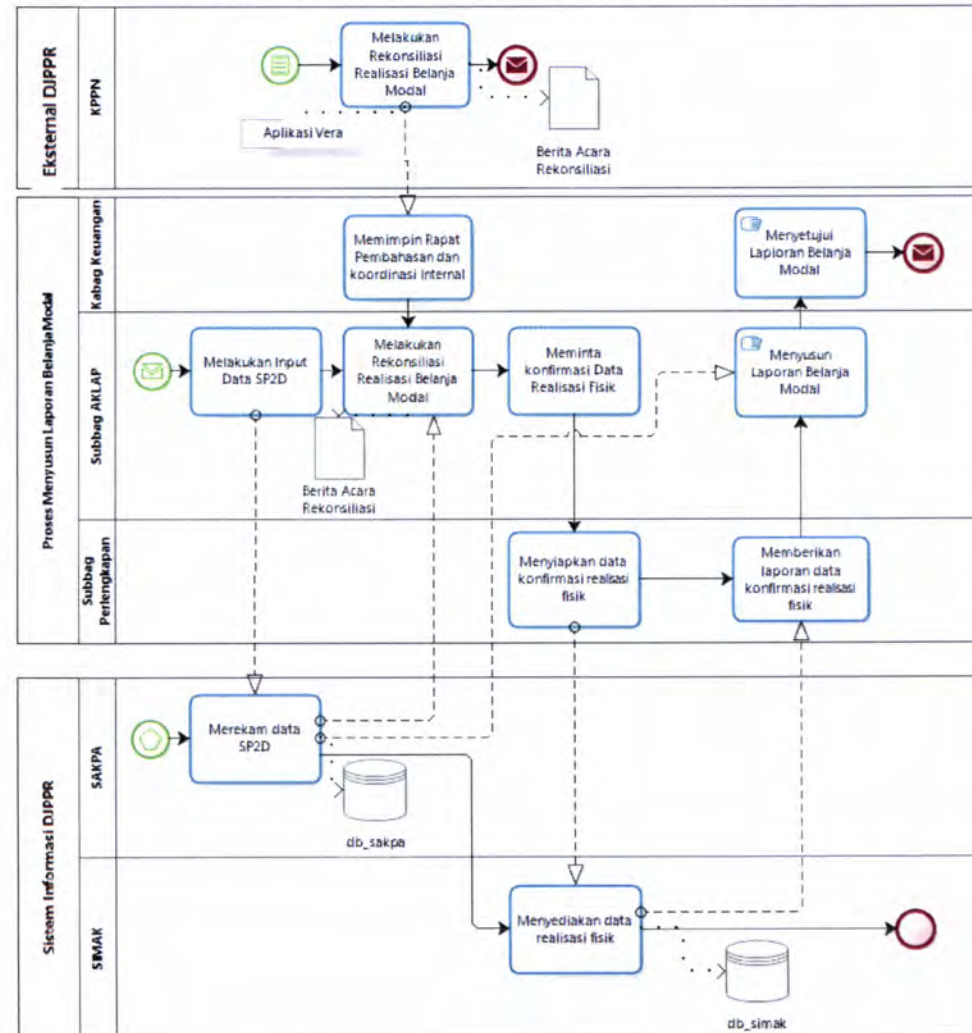


S.2.04 MENYUSUN LPJ BENDAHARA

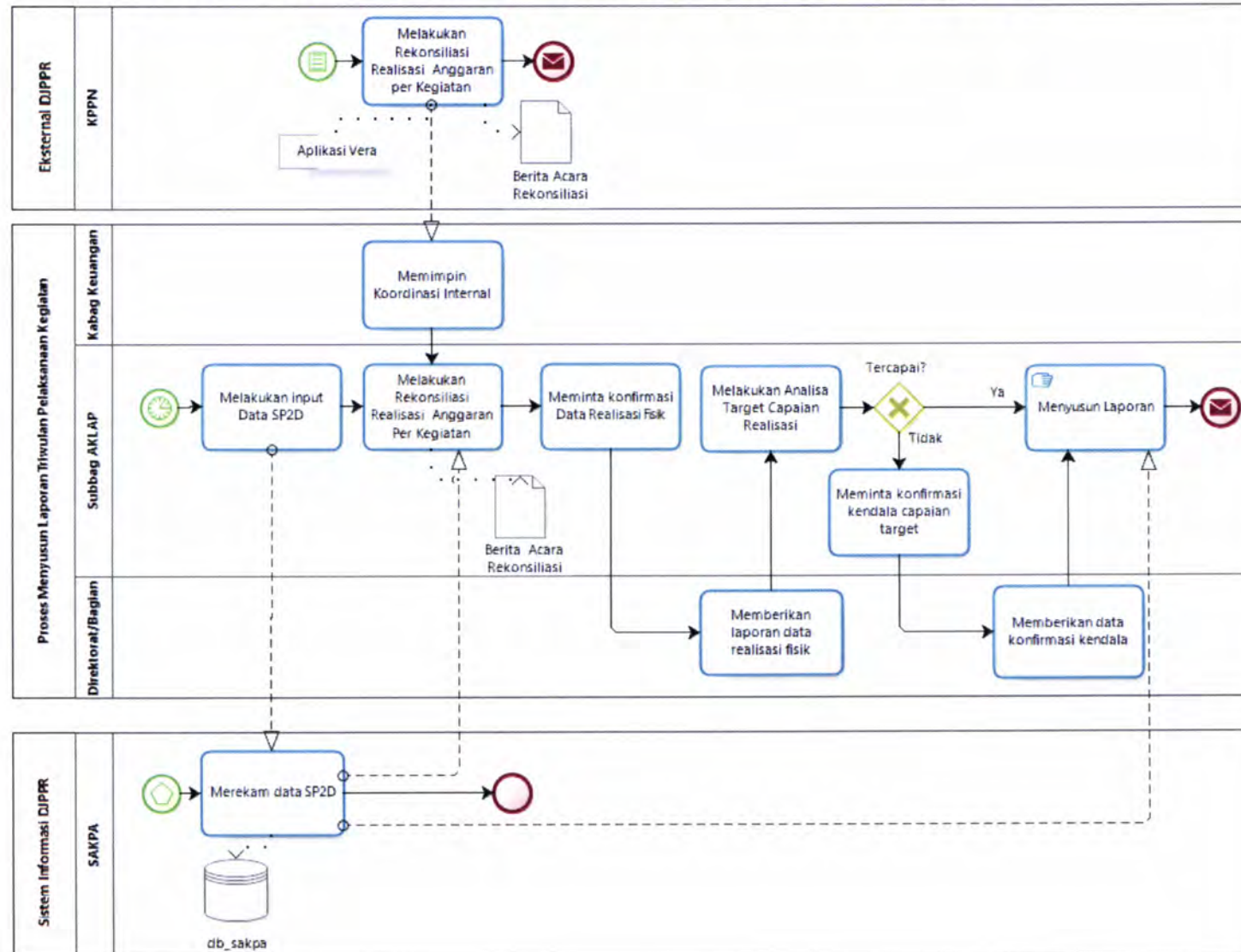


S.3 AKUNTANSI DAN PELAPORAN

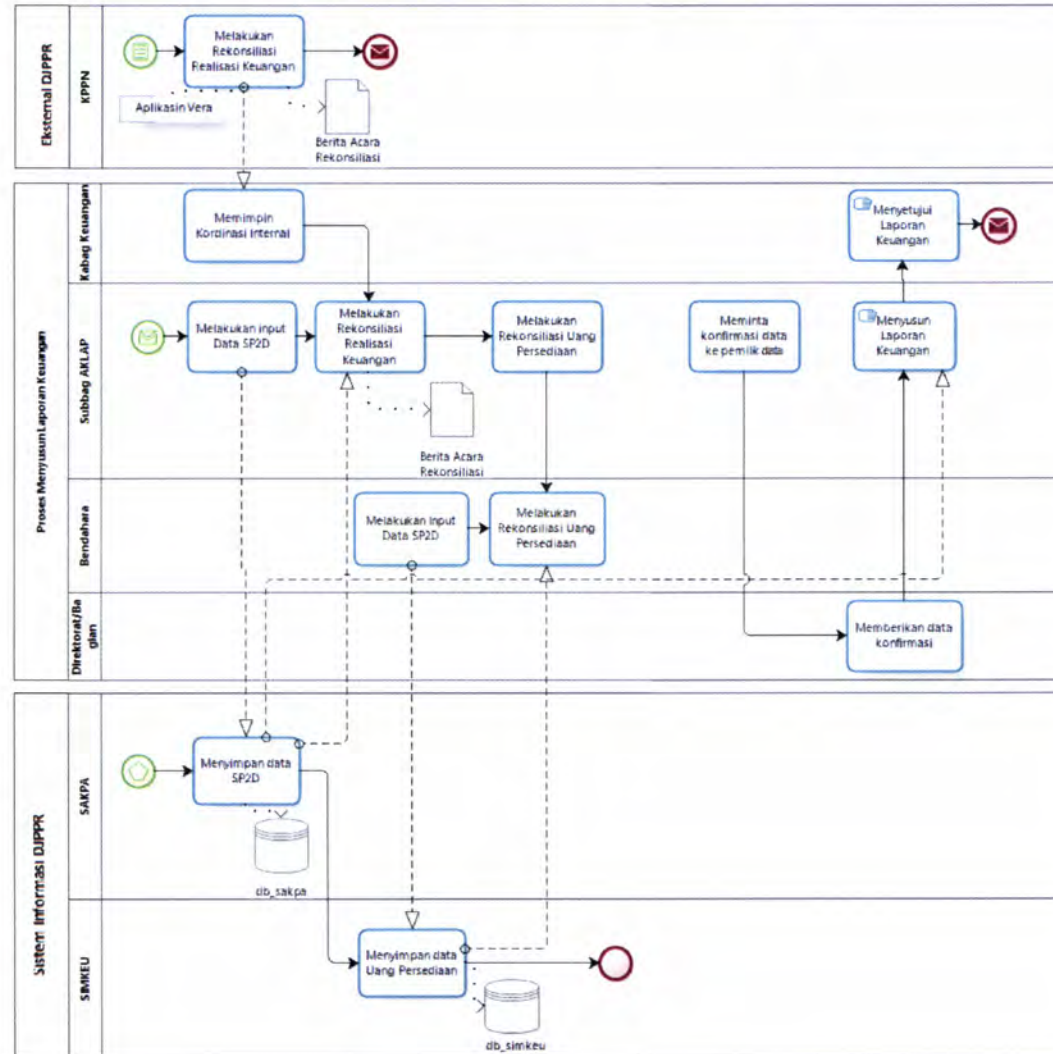
S.3.01 MENYUSUN LAPORAN BELANJA MODAL



S.3.02 MENYUSUN LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN



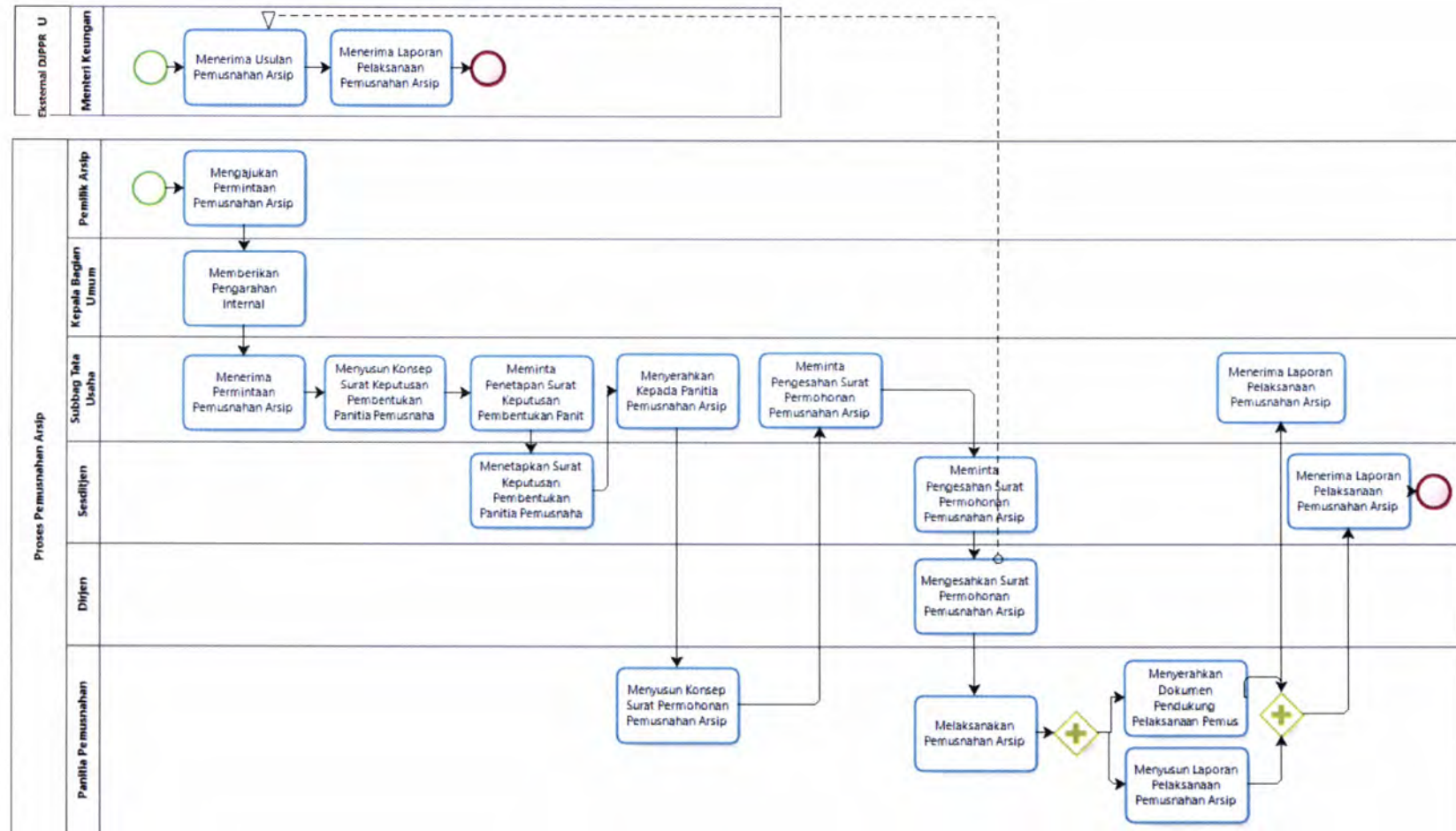
S.3.03 MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN



T. ADMINISTRASI UMUM

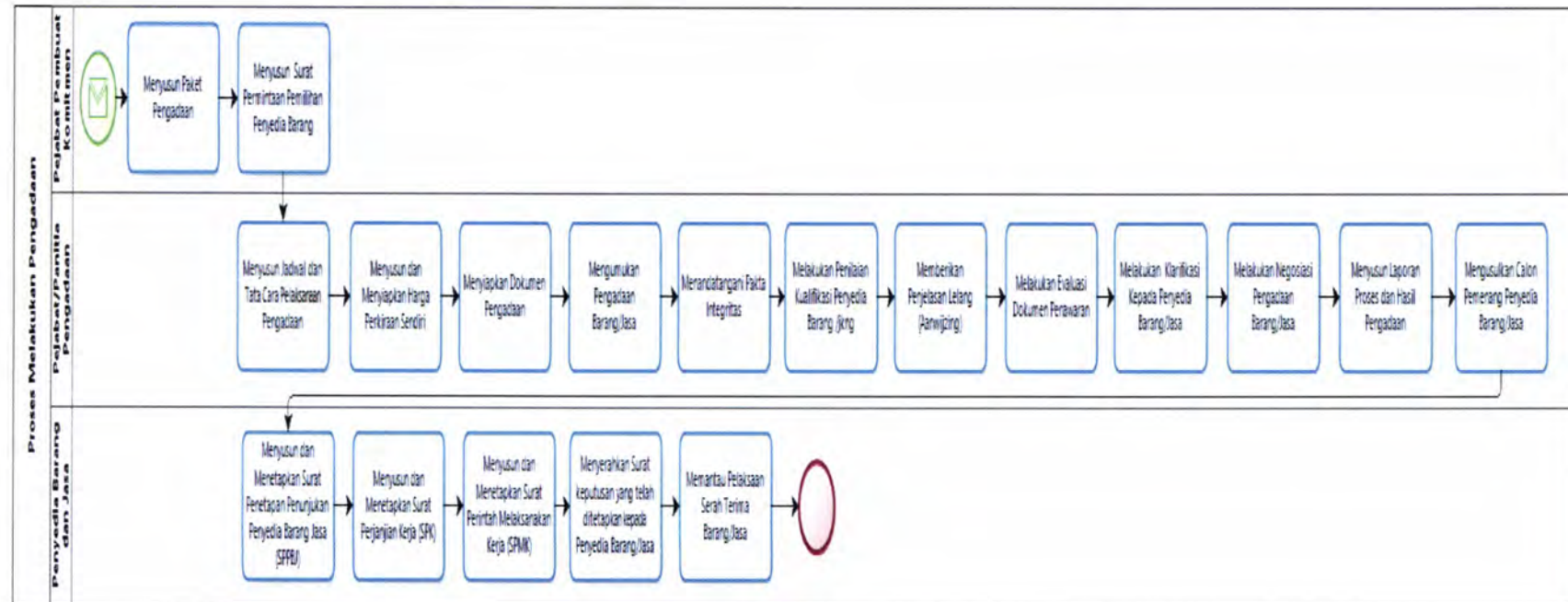
T.1 PENGELOLAAN ARSIP

T.1.01 MELAKUKAN PEMUSNAHAN ARSIP

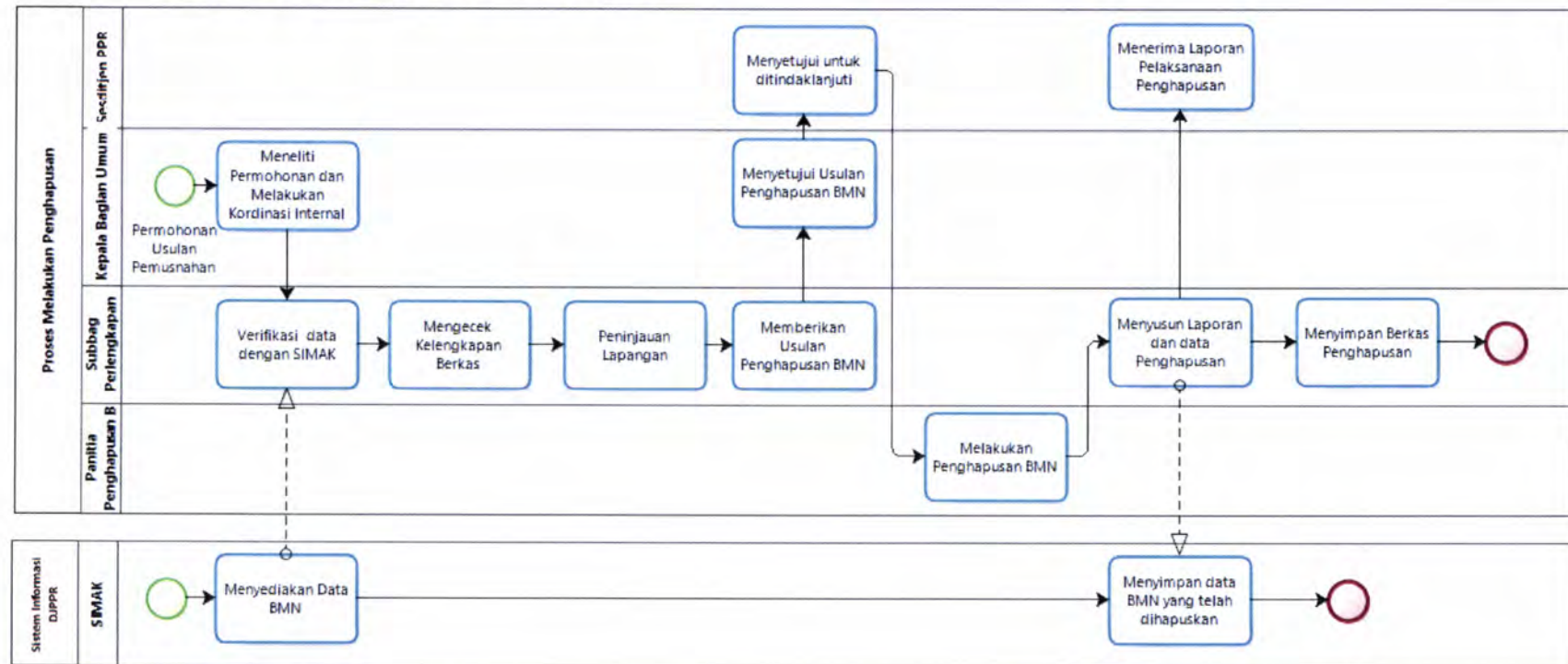


T.2 PENGELOLAAN BMN

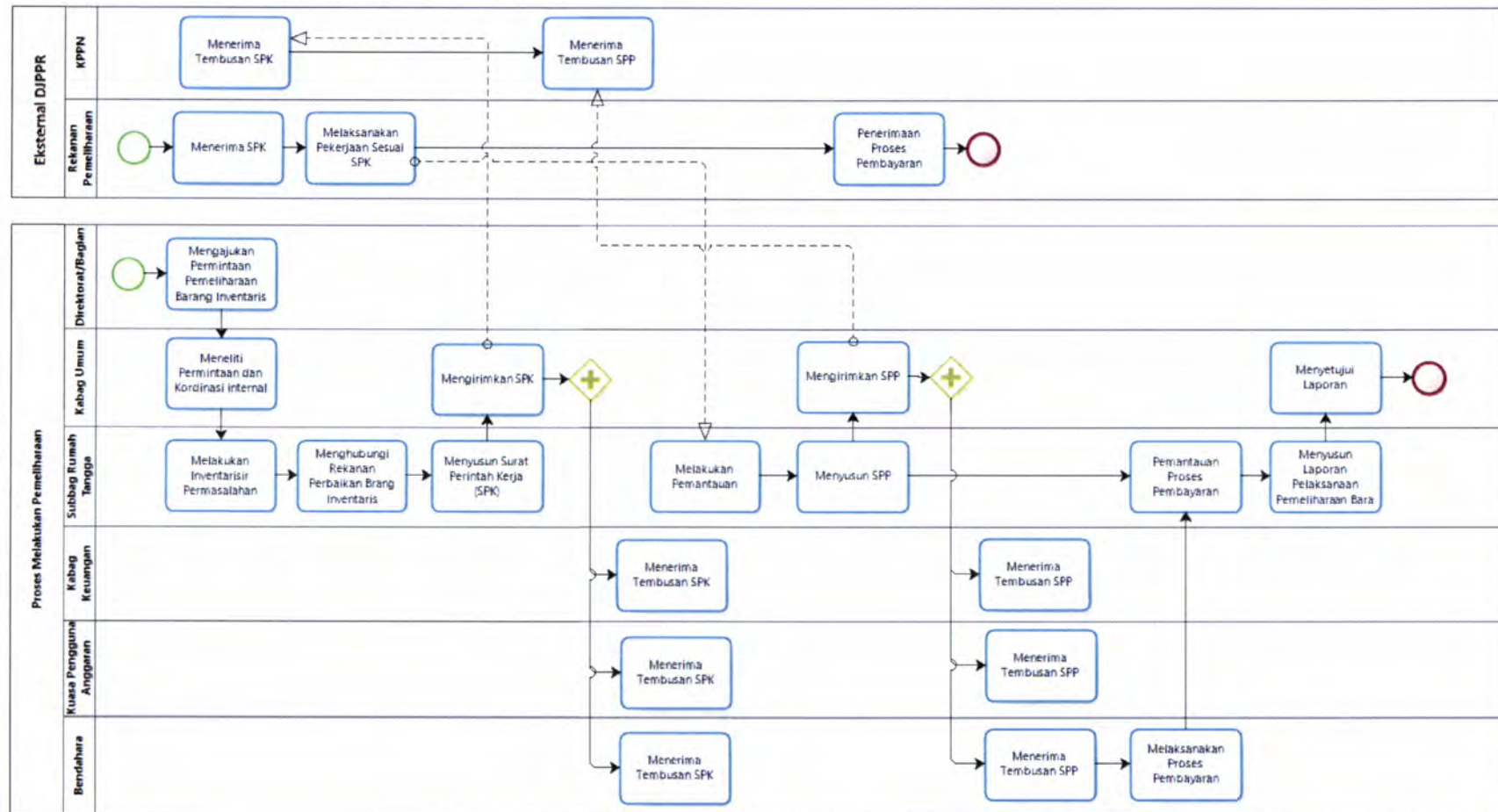
T.2.01 MELAKUKAN PENGADAAN



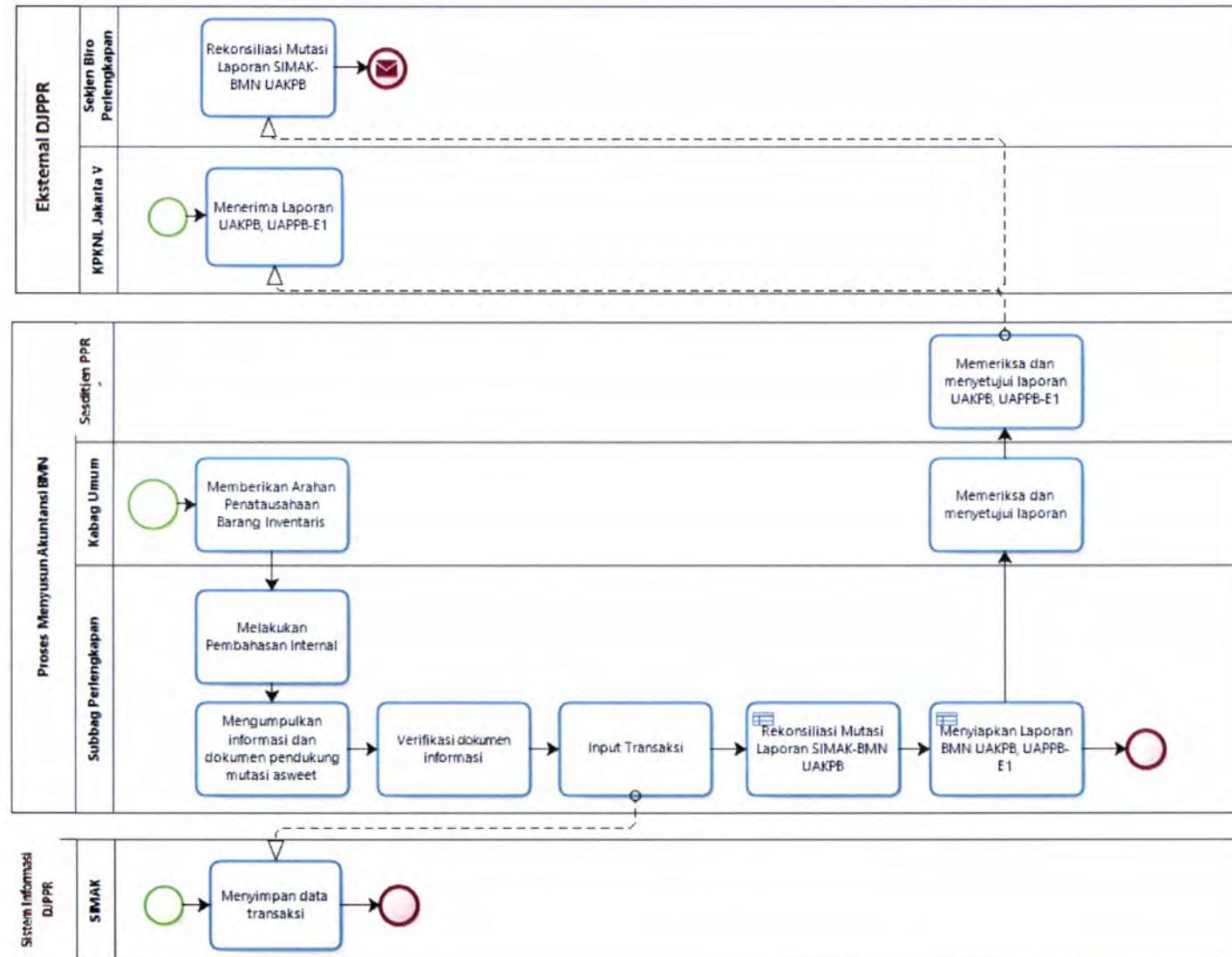
T.2.02 MELAKUKAN PENGHAPUSAN



T.2.03 MELAKUKAN PEMELIHARAAN

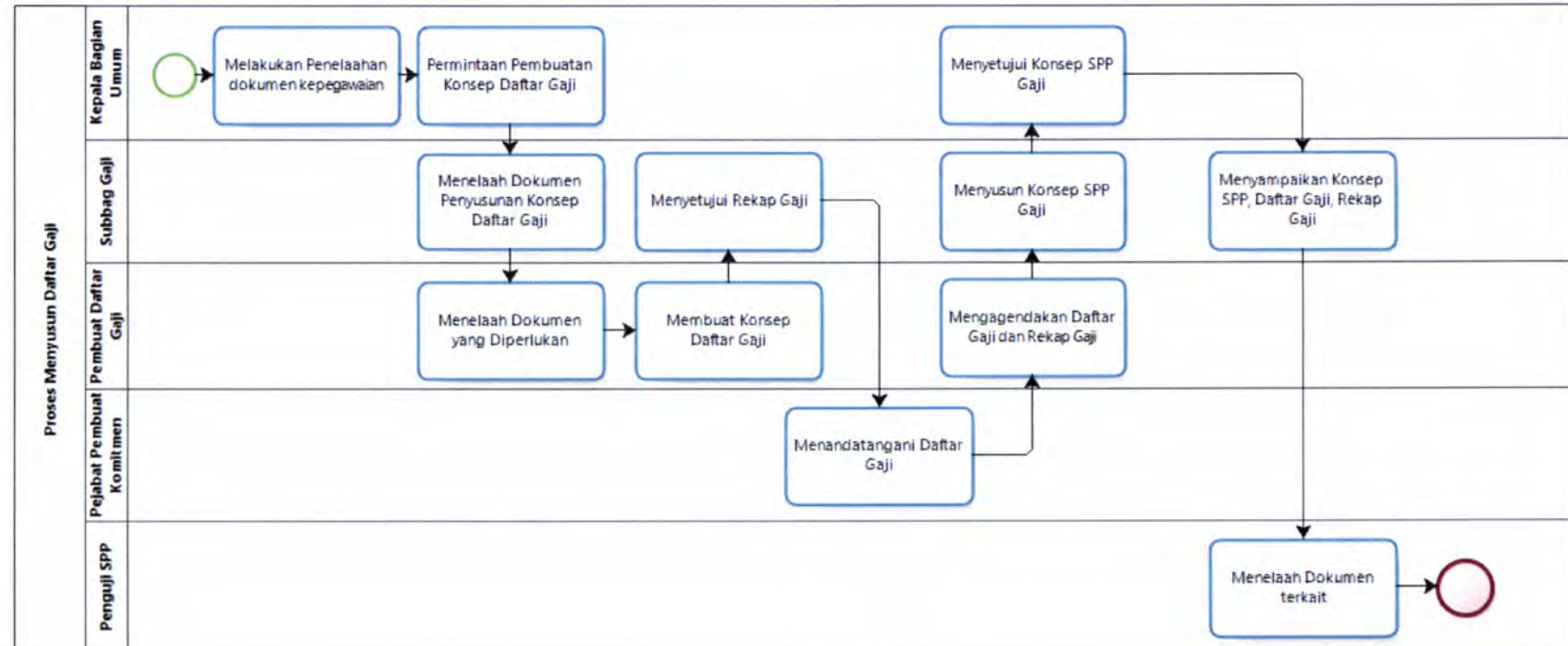


T.2.04 MENYUSUN AKUNTANSI BMN



T.3 PENGELOLAAN GAJI DAN KESEJAHTERAAN

T.3.01 MENYUSUN DAFTAR GAJI

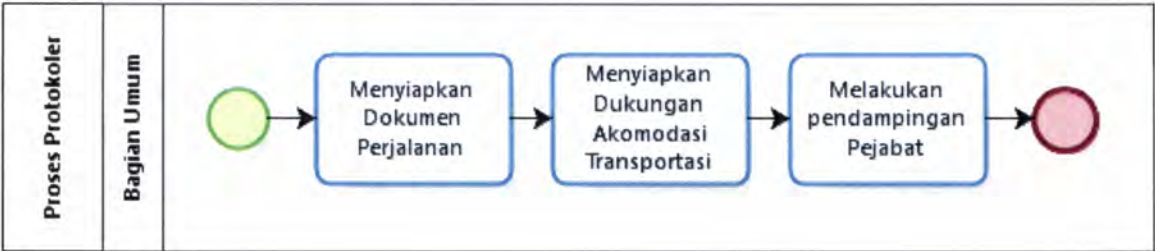


U. KESEKRETARIATAN

U.1 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN



U.2 PROTOKOLER



DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,


ROBERT PAKPAHAN